



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 2 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Wewenang dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 – 2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024 – 2026.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun (Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk).

Pasal 2

- (1) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan pada tahun 2024–2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-perangkat Daerah;
 - b. perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah;

- c. penyusunan RPD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan; dan
- d. penyusunan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a **BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antara Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika.
- b **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.
- c **BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat Latar Belakang, Neraca Daerah, Proyeksi APBD Papua Selatan Tahun 2024-2026, dan Arah Kebijakan APBD Papua Selatan Tahun 2024-2026.
- d **BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**
Memuat Permasalahan Pembangunan Provinsi Papua Selatan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
- e **BAB V : TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 dan RPJMN 2020-2024, dan Penyalarsan Dengan RIPP Tahun 2022-2041.
- f **BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Memuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan, dan Program Prioritas Pembangunan.
- g **BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Memuat Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah, dan Rencana Program Pembangunan Daerah.

h **BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Memuat Gambaran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Selatan Beserta Target Tahun 2024-2026.

i **BAB IX : PENUTUP**

Memuat Kaidah Pelaksanaan, dan Pedoman Transisi.

- (2) Isi beserta uraian sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD dilaksanakan oleh Kepala Bapperida.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diubah sebagai berikut:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RPD dapat diubah tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

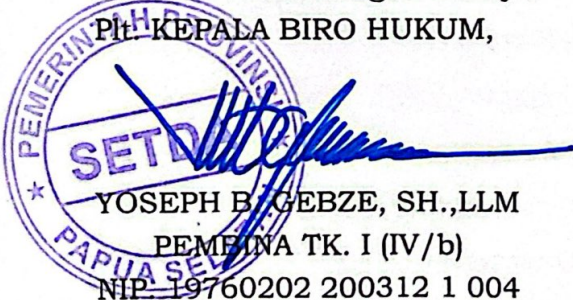
Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 11 July 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN
CAP / TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 11 July 2023
Pj. Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Selatan
CAP / TTD
MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,


YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBAWA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Selatan
2023



RPD



BAB I

Pendahuluan




Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPD Papua Selatan 2024-2026. Adapun pembahasan hubungan antar dokumen terbagi menjadi hubungan RPD dengan RPJMN, RPJPD Provinsi Papua sebagai provinsi induk, RKPD Provinsi Papua Selatan, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan.

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, merupakan acuan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB) khususnya di Provinsi Papua Selatan. Dimana dalam rangka Persiapan pelaksanaan Daerah Otonom Baru (DOB) maka terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diantaranya melakukan identifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh DOB untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahannya periode 2024-2026, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2023 Provinsi Papua (Provinsi Induk) merupakan langkah awal bagi Provinsi Papua Selatan, dimana sebagai Pemerintah Daerah Otonom Baru, Pemerintah Provinsi Papua Selatan merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Selanjutnya, merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, untuk daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir pada tahun 2022 perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Dokumen RPD ini selanjutnya juga dijadikan



pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Proses serta tahapan penyusunan RPD Papua Selatan 2024-2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur.


1. **Persiapan penyusunan RPD**, yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPD;
 - b. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPD;
 - c. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
2. **Penyusunan rancangan RPD**, dengan memperhatikan:
 - a. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua Induk sampai dengan Tahun 2025;
 - c. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Papua Induk Tahun 2019-2023.
3. **Konsultasi Publik**, dalam rangka: menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRD
4. **Penyusunan rumusan Rancangan Akhir RPD**, yang meliputi:
 - a. Penyempurnaan Rancangan Menjadi Rancangan Akhir
 - b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;
 - c. Fasilitasi Ranperkada tentang RPD;
 - d. Konsultasi rancangan akhir RPD ke Gubernur.
5. **Penetapan RPD**, meliputi:
 - a. Penyempurnaan rancangan akhir RPD sesuai hasil konsultasi;
 - b. Penetapan RPD;
 - c. Penyampaian RPD kepada DPRD;

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
27. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
39. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025.

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN

Hubungan antara dokumen dalam penyusunan RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1.3.1 RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Provinsi Papua Selatan.

1.3.2 RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, sebagai provinsi induk

Selain berpedoman kepada RPJMN diatas, Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. RPD Tahun 2023-2026 merupakan bagian tahap kelima dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

1.3.3 RKPD

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

1.3.4 RENSTRA

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Menjaga kesinambungan pembangunan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024;
- b. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Provinsi Papua Selatan pada periode tahun 2024-2026;
- c. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan selama periode tahun 2024-2026;

Tujuan, sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode tahun 2024-2026 lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Selatan, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPD Papua Selatan 2024-2026.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor pendukung dan pencapaian SDG's.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Bab V. Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat Tujuan dan sasaran serta indikator dan Target kinerja sasaran pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk intergrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Papua Selatan, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan tahun 2026.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPD dan pedoman transisi pada saat RPD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah



Bab ini memuat gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing wilayah Provinsi Papua Selatan. Pembahasan bab ini akan menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, serta penentuan target pembangunan Provinsi Papua Selatan 2024-2026

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi Papua Selatan terletak pada garis 6°00'LU-9° 00' LS dan 137° 30' BT-141° 00' BT. Provinsi Papua memiliki luas wilayah sebesar 131.493, 90 Km² yang terdiri dari 4 Kabupaten dan terbagi menjadi 78 distrik, 24 kelurahan dan 686 kampung. Provinsi Papua Selatan berbatasan administrasi dengan wilayah di sekitarnya sebagai berikut:

Utara	:	Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang
Timur	:	Negara Papua Nugini
Selatan	:	Laut Arafura
Barat	:	Kabupaten Mimika dan Laut Aru

Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke. Seperti tersaji pada tabel II.1 Kabupaten terluas adalah Kabupaten Merauke dengan luas wilayah 46.791,63 Km² Sementara Kabupaten dengan wilayah terkecil adalah Kabupaten Mappi dengan luas wilayah 25.609,94 Km².

Tabel II.1 Luas Wilayah Kabupaten di Provinsi Papua Selatan

No	Kabupaten	Luas (Km ²)	Persentase terhadap Luas Provinsi
1	Merauke	46.791,63	36%
2	Boven Digoel	27.108,29	21%
3	Mappi	25.609,94	19%
4	Asmat	31.983,43	24%
Provinsi Papua Selatan		131.493,29	100%

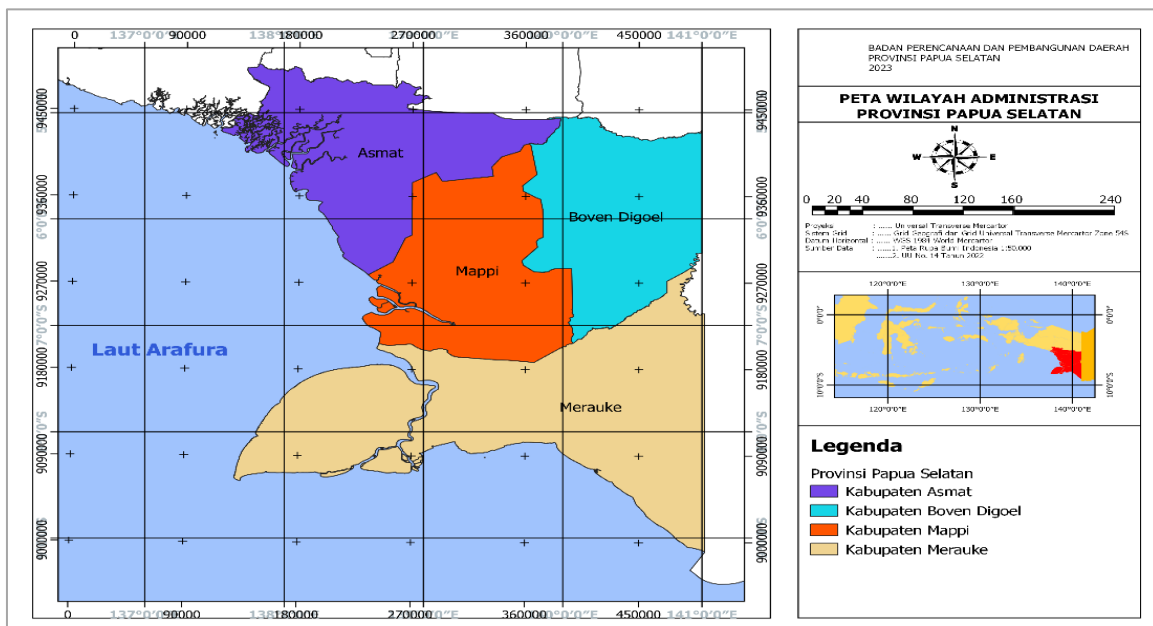
Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dan Hasil Analisis, 2023



Gambar II.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Papua Selatan



Sumber: Peta RTRW Provinsi Papua, Data RBI, dan Pengolahan Data Tahun 2022



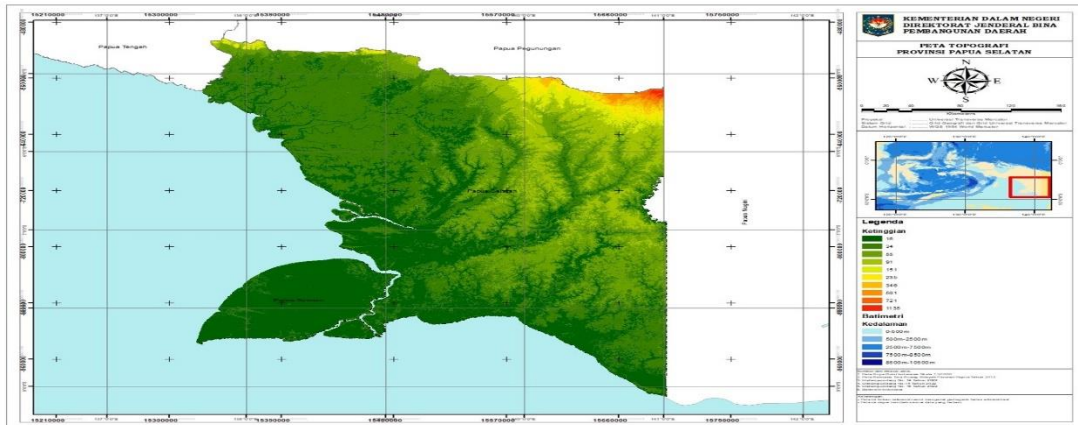
Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.1.1.2 Kondisi Topografi

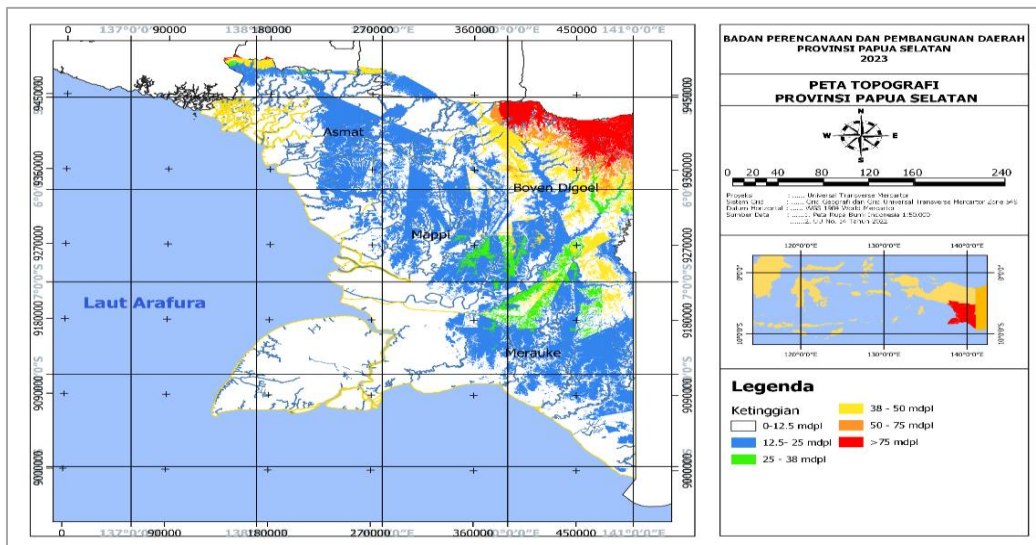
Papua Selatan sebagian besar berada di dataran rendah dengan kondisi alam di dominasi rawa-rawa, hutan, dan sungai-sungai besar seperti sungai Digul dan Maro. Ketinggian yang mendominasi di Provinsi Papua Selatan berada di bawah 34 meter diatas permukaan laut. Sebagian kecil wilayah Papua Selatan berada pada ketinggian diatas 500 meter (dataran tinggi) yaitu pada bagian utara-timur, di Kabupaten Boven Digoel.



Gambar II.2 Peta Topografi Provinsi Papua Selatan



Sumber: Peta RTRW Provinsi Papua, Data RBI, dan Pengolahan Data Tahun 2022

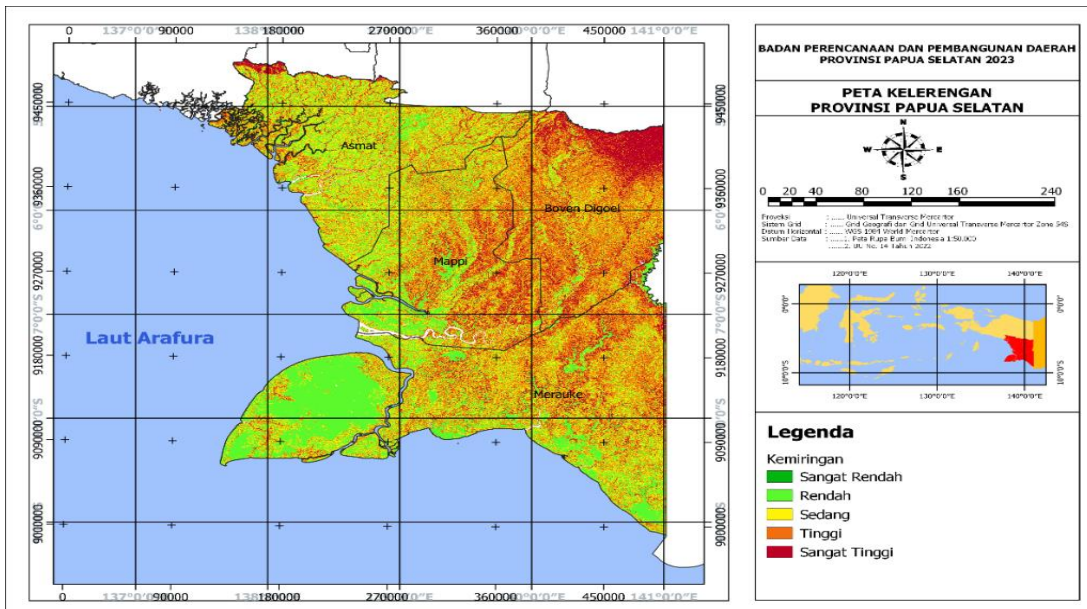


Sumber: Hasil Analisis, 2023

Walaupun memiliki ketinggian daratan yang relatif rendah, terdapat banyak wilayah Papua Selatan yang memiliki kelereng yang curam. Hal ini berasal dari percabangan-percabangan sungai yang membelah daratan dan bukit-bukit kecil. Kondisi topografi dan lingkungan alam di Papua Selatan memberikan tantangan pembangunan jaringan transportasi darat dan berimplikasi pada tingginya biaya pembangunan untuk di lakukan di Papua Selatan dibanding wilayah lainnya.



Gambar II.3 Peta Kelerengan Provinsi Papua Selatan

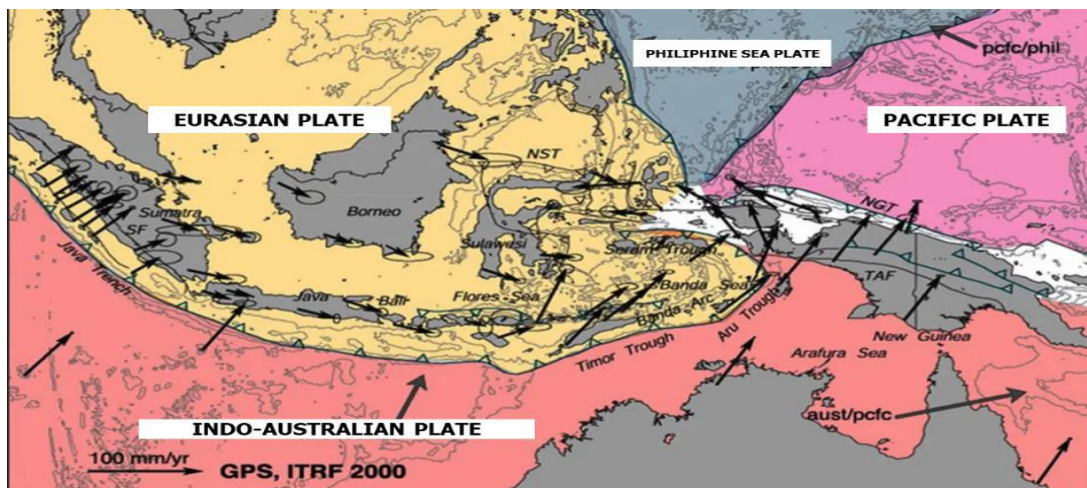


Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Papua Selatan seperti pada wilayah Papua lainnya terletak di antara dua lempeng besar yaitu Lempeng Indo-Australia di sisi selatan dan Lempeng Pasifik di sebelah Utara seperti tergambar pada gambar II.4

Gambar II.4 Peta Tektonik Indonesia

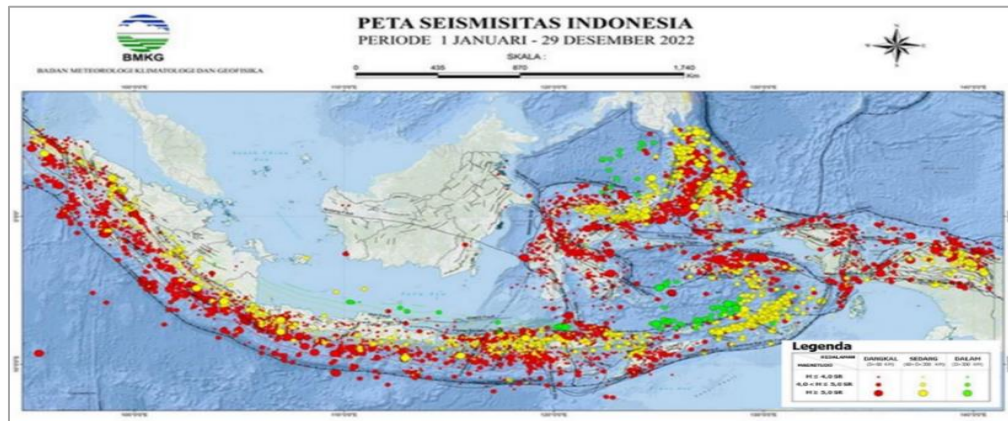


Sumber: BMKG, 2018 (website: www.bmkg.go.id, diakses pada 12 Maret 2023)

Pulau Papua dan pegunungan *central range* dikategorikan sebagai tipe busur kepulauan oseanik aktif tumbukan antar lempeng benua (Dewey and Bird, 1970). Berdasarkan Peta Seismitas Indonesia (lihat gambar II.5) menyajikan titik-titik dimana rawan gempa banyak terjadi selama tahun 2022. Untuk wilayah Papua Selatan relatif lebih sedikit gempa dibandingkan wilayah lainnya di Papua.



Gambar II.5 Peta Seismisitas Indonesia (1 Januari – 29 Desember 2022)

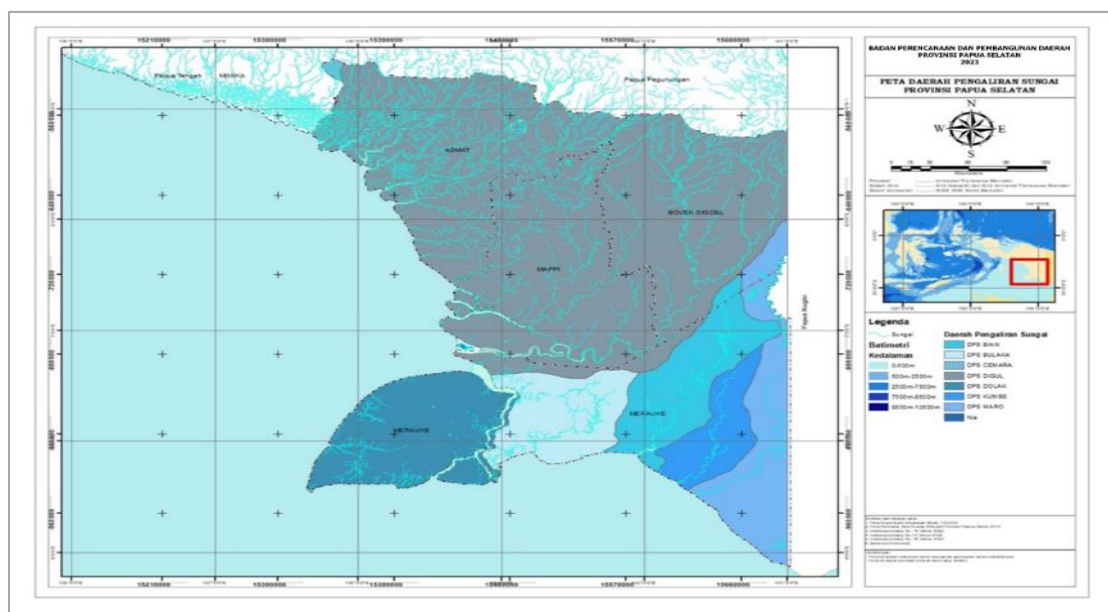


Sumber: BMKG, 2022

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Provinsi Papua Selatan memiliki 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total luas tangkapan 119.450,13 km². Banyaknya jumlah Sumber Daya Air yang berasal dari sungai dan Danau menjadi sumber penghidupan dan sumber daya energi listrik terbarukan. Namun demikian menjaga keselarasan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan tetap diprioritaskan. Daerah Aliran Sungai Digul merupakan DAS terluas dengan persentase luas wilayah sebesar 61% dari total DAS di Papua Selatan (lihat Gambar II.6).

Gambar II.6 Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Papua Selatan

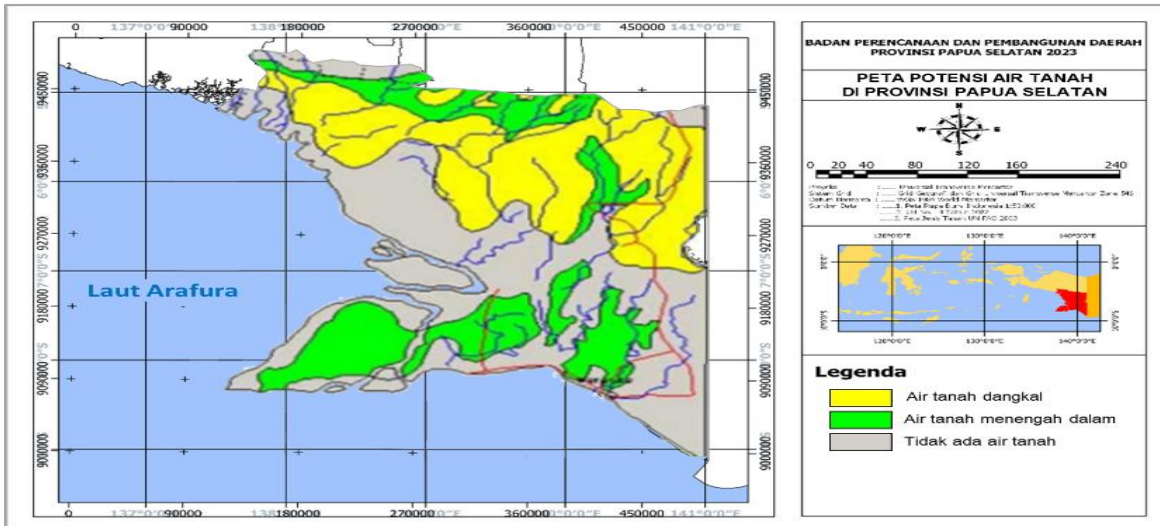


Sumber: Peta RTRW Provinsi Papua 2013, Data RBI, Pengolahan Data Tahun 2022

Selain sumber air permukaan terdapat sumber air yang berasal dari dalam tanah. Gambar II.7 menunjukkan potensi air tanah di bagian selatan Papua Selatan berupa potensi air tanah menengah dalam, sedangkan di bagian utara Papua Selatan sebagian besar berupa tanah potensi air tanah dangkal dan sebagian kecil potensi air tanah dalam.



Gambar II.7 Peta Potensi Air Tanah di Pulau Papua

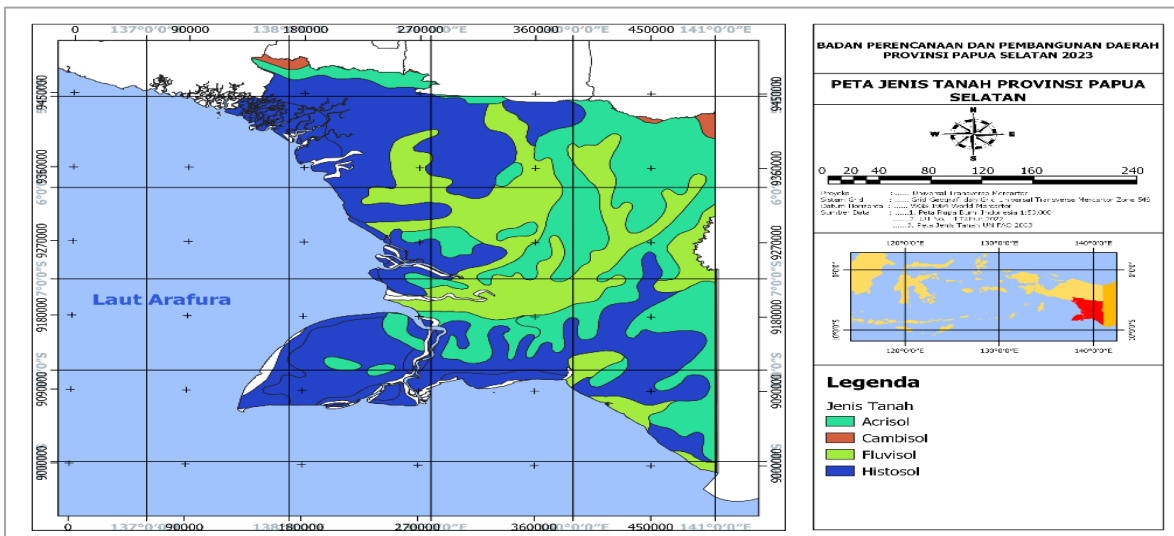


Sumber: website resmi Pemerintah Provinsi Papua, 2023

2.1.1.5 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Papua Selatan berdsarkan taksonomi tanah USDA terdiri atas Acrisol, Cambisol, Fluvisol, dan Histosol, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.8. Sebagian besar tanah terutama yang berada di daerah pesisir merupakan tanah histosol dengan kandungan organik yang tinggi dan mengandung banyak air. Tanah jenis ini tidak dapat terlalu subur untuk digunakan sebagai lahan pertanian apabila digunakan dalam bentuk mentah, perlu proses pengeringan serta pengolahan tanah untuk dapat digunakan sebagai lahan produktif.

Gambar II.8 Peta Jenis Air Tanah Provinsi Papua Selatan



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Di wilayah pesisir Papua Selatan, terdapat tanah dengan kandungan kambisol dan akrisol. Tanah kambisol merupakan lapisan permukaan tanah dimana garis horizontal terlihat secara samar dengan warna kecokelatan. Tanah jenis ini sering digunakan untuk lahan pertanian. Tanah jenis akrisol memiliki karakteristik kaya akan tanah liat dan mengandung aluminium yang menyebabkan

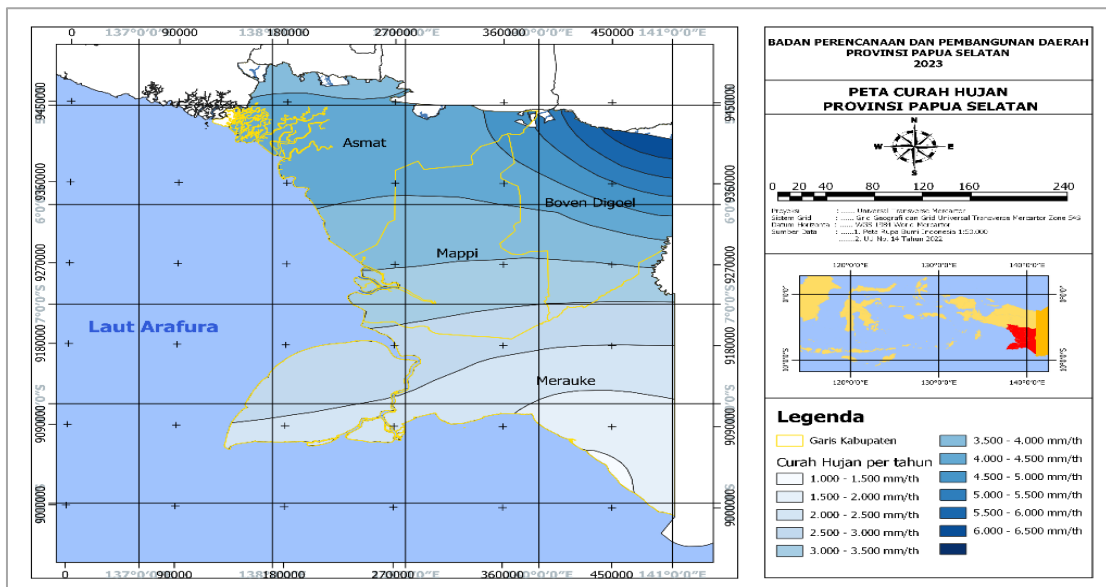


tanah ini jarang digunakan untuk pertanian secara umum. Beberapa jenis tanaman yang dapat tumbuh pada lingkungan ini antara lain karet, tebu, kopi apabila didukung oleh iklim yang sesuai.

2.1.1.6 Kondisi Klimatologi

Papua Selatan Memiliki iklim hutan hujan tropis yaitu iklim dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim ini dipengaruhi oleh angin Muson yang menyebabkan Kekhasan flora dan fauna di Pulau Papua. Curah hujan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021 tersaji pada Tabel II.2, rata-rata hujan terjadi selama 20 hari dalam sebulan. Gambar II.9 menunjukkan lokasi Papua Selatan sebelah utara terutama di Kabupaten Boven Digoel sebagai wilayah yang paling sering terjadi hujan. Curah hujan yang tinggi memberikan potensi dan tantangan bagi pembangunan di Papua Selatan. Potensi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air lainnya. Di sisi lain, tantangan yang dapat terjadi berupa komoditas pertanian yang membutuhkan iklim kering, pembangunan infrastruktur jalan dan rawan bencana tanah longsor.

Gambar II.9 Peta Klimatologi Provinsi Papua Selatan



Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel II.2 Jumlah Curah Hujan Berdasarkan Bulan Di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

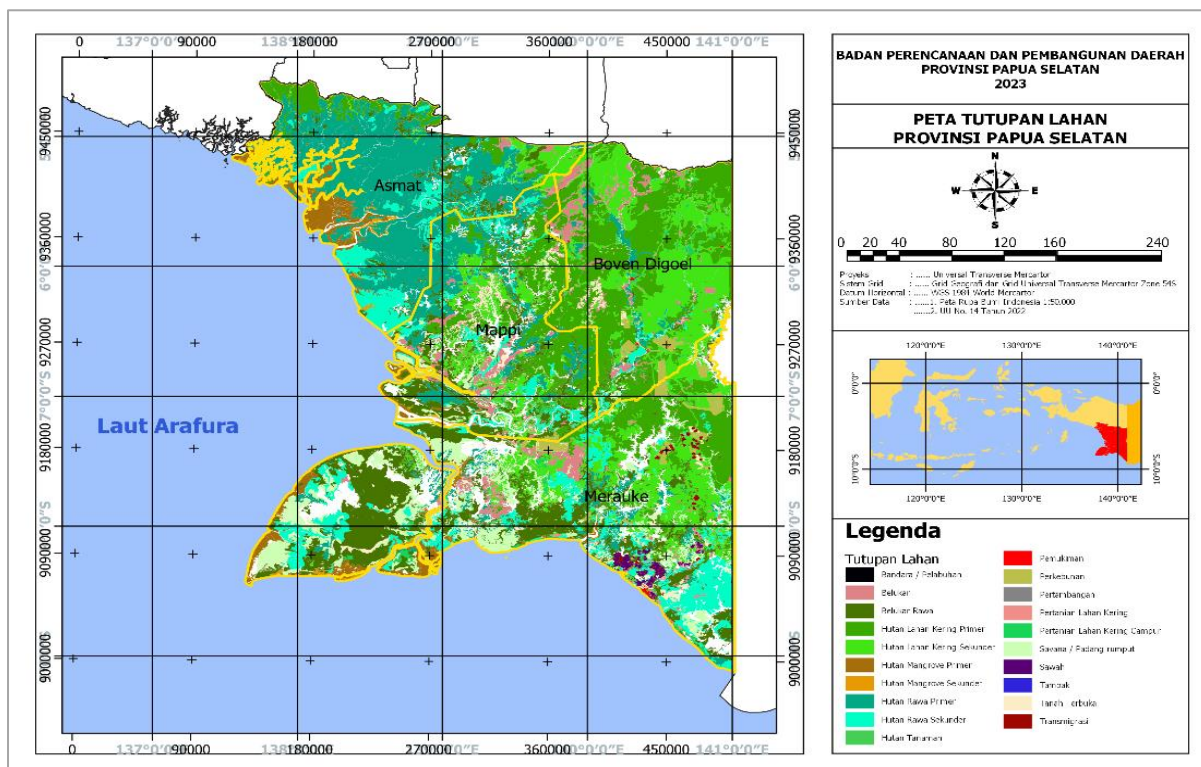
Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	337,5	25,5	35,26
februari	220,4	23,5	38,87
Maret	402,55	24,5	41,2
April	346,95	22	22,28
Mei	297,75	23	43,58
Juni	272,9	21	38,74
Juli	257	23	31,04
Agustus	231,55	23,5	36,24
September	277	22,5	31,95
Oktober	194,25	14,5	53,82
November	384	18	48,08
Desember	376,9	23	39,06

Sumber: BPS Provinsi Papua Dalam Angka, 2022 (diolah)

2.1.1.7 Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan pengkategorian lahan berdasarkan kenampakan dari atas permukaan bumi. Tutupan lahan berbeda dari penggunaan lahan di mana penggunaan lahan mengacu pada jenis aktivitas yang berada pada wilayah tertentu. Data aktivitas berada pada digit kedetailan yang lebih dalam dibandingkan tutupan lahan. Dengan tutupan lahan yang sama bisa terdapat penggunaan lahan yang berbeda. Pada Gambar II.10 terlihat tutupan lahan didominasi oleh hutan baik hutan lahan kering maupun rawa. Tutupan hutan lahan kering mendominasi bagian pedalaman Papua Selatan sedangkan hutan rawa lebih mendominasi bagian pesisir.

Gambar II.10 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Selatan Tahun 2019



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia, Hasil Analisis, 2023

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, pemanfaatan potensi pengembangan wilayah menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan ke depan. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis, potensi sektoral yang dapat dikembangkan, pola investasi yang berkembang, serta potensi alam yang luar biasa di Provinsi Papua Selatan. Pembangunan Provinsi Papua Selatan harus memanfaatkan berbagai sumber daya potensial secara optimal yang lebih menekankan pada pengembangan sektor-sektor unggulan, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tabel II.2 menampilkan potensi pengembangan wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan mempertimbangkan arahan pengembangan kawasan budidaya dalam RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk.

Tabel II.2 Potensi Pengembangan Wilayah Provinsi Papua Selatan

No	Potensi Pengembangan Wilayah	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
1	Kawasan peruntukkan hutan produksi				
	a. Hutan produksi terbatas (HPT)	✓	✓	✓	✓
	b. Hutan produksi tetap (HP)	✓	✓	✓	✓
	c. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	✓	✓	✓	✓
2	Kawasan hutan rakyat	✓	✓	✓	✓
3	Kawasan peruntukkan pertanian				
	a. Pertanian lahan basah	✓	✓	✓	
	b. Pertanian lahan kering	✓			
	c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	✓	✓	✓	✓
	d. Hortikultura	✓	✓		
	e. Perkebunan	✓	✓	✓	
	f. Peternakan	✓	✓	✓	
4	Kawasan peruntukkan perikanan				
	a. Perikanan tangkap	✓		✓	✓
	b. Perikanan budidaya	✓	✓	✓	✓
	c. Pengembangan industri perikanan	✓			
5	Kawasan peruntukkan pertambangan				
	Pertambangan batubara		✓		
6	Kawasan peruntukkan industri	✓	✓	✓	
7	Kawasan peruntukkan pariwisata				
	a. Wisata budaya				✓
	b. Wisata alam	✓	✓	✓	✓
	c. Wisata minat khusus	✓	✓	✓	✓
8	Kawasan peruntukkan permukiman				
	a. Permukiman perkotaan	✓	✓	✓	✓
	b. Permukiman perkampungan	✓	✓	✓	✓

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk, dan data hasil olahan mengacu UU Nomor 14 Tahun 2022

2.1.2.1 Potensi Hutan Produksi

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tersebar di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat (lihat Tabel II.2). Pemanfaatan hutan produksi di Papua Selatan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan potensi hutan produksi di Papua Selatan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dilakukan secara berkeadilan dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kriteria ekonomi, lingkungan dan sosial, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.3.

Tabel II.3 Kriteria Pengelolaan Hutan Produksi

No	Kriteria	Uraian
1	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. terdapat batas yang secara jelas tergambar dalam peta dan teridentifikasi di lapangan; b. terdapat lembaga pengelola yang dilengkapi dengan organisasi, tenaga ahli, serta sistem keuangan yang jelas dan transparan; c. terdapat ketegasan proses produksi; serta d. terdapat sistem tata usaha kayu, administrasi dan keuangan yang jelas.
2	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. tidak menyebabkan erosi tanah atau sedimentasi pada badan air; b. tidak menyebabkan perubahan drastis terhadap struktur dan komposisi tegakan; serta c. terlindunginya satwa liar dan habitatnya dari gangguan kegiatan penebangan kayu.
3	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. mempertimbangkan sistem penguasaan lahan yang mengatur hak dan kewajiban penguasaan dan pemanfaatan hutan yang bersumber pada hukum adat; b. membangun integrasi sosial budaya masyarakat dan karyawan pengelola hutan, termasuk kepedulian terhadap peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar; serta c. keberadaan pengelola hutan tidak mengganggu sistem kehidupan masyarakat setempat, terutama yang perikehidupannya bertumpu pada kawasan hutan.

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk, yang diolah dengan mempertimbangkan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan

2.1.2.2 Potensi Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, pada umumnya berada di atas tanah milik atau tanah adat. Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan hutan rakyat yang tersebar di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat (lihat Tabel II.2). Hutan rakyat memainkan peranan penting baik dalam upaya penanganan lahan kritis, dan juga perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun data tentang produksi hasil hutan rakyat yang valid belum tersedia secara lengkap, tetapi hutan rakyat yang berkembang secara tradisional di Papua Selatan telah berperan signifikan dalam produksi hasil hutan, maupun penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat. Selain itu, ikatan emosional yang terbangun dalam pengembangan hutan rakyat secara bersama-sama oleh petani secara berkelompok telah meningkatkan keeratn hubungan sosial di masyarakat Papua Selatan. Dalam hal ini, kearifan lokal dalam mengelola kekayaan alam, termasuk hutan rakyat, merupakan aspek yang perlu dicermati sebagai bagian dari pengelolaan kawasan hutan rakyat di Papua Selatan.

2.1.2.3 Potensi Pertanian

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan (lihat Tabel II.2). Pertanian lahan basah dapat dikembangkan di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Pertanian lahan kering dapat dikembangkan di Kabupaten Merauke. Pertanian holtikultura dapat dikembangkan di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel. Perkebunan dan peternakan dapat dikembangkan di Merauke, Boven Digoel dan Mappi. Adapun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu dilindungi dan dikembangkan di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan secara konsisten dalam mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam hal ini, penggunaan lahan untuk pertanian di Provinsi Papua Selatan dikembangkan dengan memanfaatkan potensi tanah yang

sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, termasuk mencegah kerusakannya.

2.1.2.4 Potensi Perikanan

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan, dengan karakteristik yang berbeda-beda (lihat Tabel II.2). Potensi perikanan tangkap yang tinggi terdapat di Kabupaten Merauke, Mappi dan Asmat. Potensi perikanan budaya yang tinggi terdapat di seluruh kabupaten di Papua Selatan. Adapun potensi pengembangan industri perikanan hanya terdapat di Kabupaten Merauke. Dalam hal ini, Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan minapolitan berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

2.1.2.5 Potensi Pertambangan

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pengembangan pertambangan batubara di Kabupaten Boven Digoel (lihat Tabel II.2). Meskipun demikian, **diperlukan kajian lebih lanjut** untuk melakukan pemetaan serta meninjau potensi pertambangan di Provinsi Papua Selatan. Hal ini mempertimbangkan bahwa pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian harus diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap **memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup**. Selain itu, kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) yang dilengkapi dengan RPL dan RKL. Hal ini diperlukan sejak tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga tahap eksploitasi agar tidak menimbulkan perselisihan dan/atau persengketaan dengan masyarakat setempat.

2.1.2.6 Potensi Industri

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 terdapat potensi pemantapan industri di Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi (lihat Tabel II.2). Dengan adanya pertimbangan bahwa di 3 (tiga) kabupaten tersebut telah terdapat kompleks industri besar sebelumnya, maka sifat pemantapan yang dimaksud dalam subbab ini meliputi: (1) pemenuhan persyaratan pengelolaan dampak lingkungan; (2) penataan di dalam kawasan industri termasuk peletakan bangunan pabrik dan ruang terbuka hijau; (3) pengendalian dampak terhadap sistem transportasi daerah sekitarnya; (4) penataan dan pengendalian Kawasan dan kegiatan non-industri lainnya di sekitar kawasan agar tidak saling merugikan. Adapun jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan hasil hutan, pertambangan, perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan.

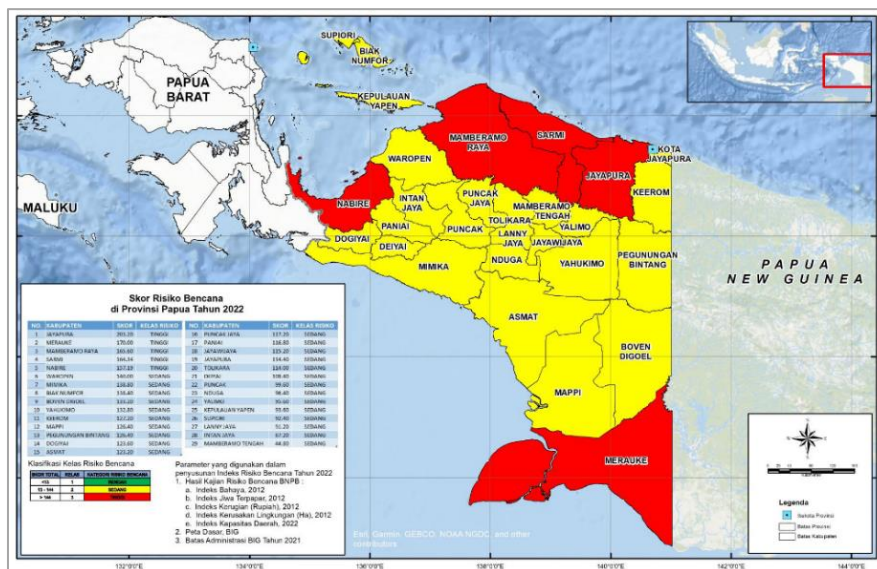
2.1.2.7 Potensi Pariwisata

Provinsi Papua Selatan memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan ialah: Taman Nasional Lorentz di Asmat, dan Taman Nasional Wasur di Merauke. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Selatan dikelompokkan menjadi 4 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, dan obyek wisata alam. Selain itu, ada beberapa obyek wisata lainnya di Provinsi Papua Selatan yaitu Tugu Kembar Sabang Merauke di Merauke, Pantai Lampu Satu di Merauke, dan Museum Kebudayaan dan Kerajinan di Asmat. Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Papua Selatan secara garis besar memiliki indeks kerawanan bencana pada rentang risiko sedang hingga tinggi. Berdasarkan wilayah di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke memiliki indeks risiko bencana tinggi sementara Kabupaten Asmat, Boven Digoel, dan Mappi memiliki indeks risiko bencana sedang,

Gambar II.11 Peta Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kota Tahun 2022



Sumber: BNPB, 2023

Kabupaten di Provinsi Papua Selatan secara umum memiliki risiko yang tinggi untuk jenis bencana banjir dan kebakaran hutan, sedangkan risiko sedang untuk bencana tanah longsor. Kabupaten dengan wilayah pesisir yaitu Merauke, Mappi, dan Asmat memiliki risiko tinggi terhadap

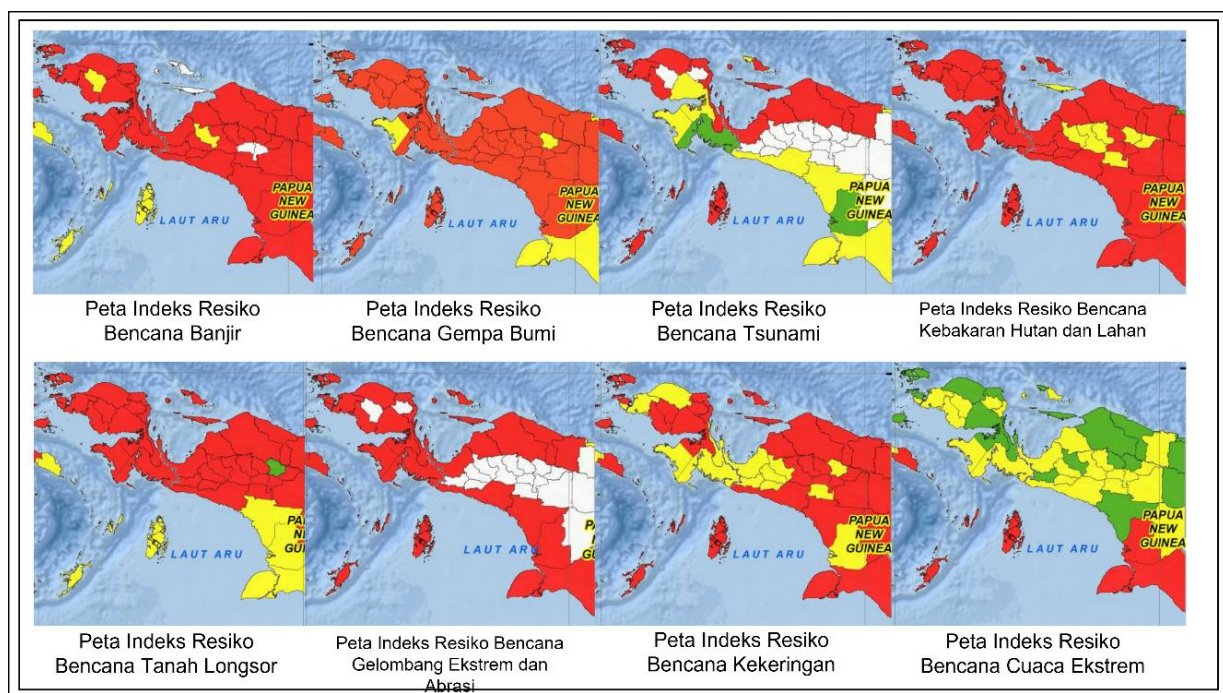
gelombang ekstrem dan abrasi, Sementara Kabupaten yang berdekatan dengan daerah pegunungan di sebelah utara memiliki risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi.

Tabel II.4 Kelas Risiko Bencana di Provinsi Papua Selatan 2022

Jenis Bencana	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Tsunami	Sedang	-	Rendah	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Bencana Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi
Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah

Sumber: BNPB, 2023

Gambar II.12 Peta Indeks Tiap Risiko Bencana Kabupaten dan Kota Tahun 2022



Sumber: BNPB, 2023

2.1.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 522.215 jiwa. Jumlah penduduk Papua Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya migrasi penduduk yang masuk ke wilayah Papua Selatan (imigrasi) yang biasanya didorong oleh perkembangan kegiatan perekonomian wilayah. Wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Papua Selatan sampai pada tahun 2022 adalah Kabupaten Merauke yaitu sebanyak 232.357 jiwa (44,49% dari total penduduk di Papua Selatan), diikuti Kabupaten Asmat sebanyak 113.524 jiwa (21,74%), dan Kabupaten Mappi sebanyak 111.141 jiwa (21,28%). Sementara itu, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Boven Digoel yaitu sebanyak 65.193 jiwa (12,48%), sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.5.

Tabel II.5 Kondisi Demografi Papua Selatan 2020-2022

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)			Distribusi Penduduk (%)			Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)			Laju Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022
1	Merauke	230.932	231.696	232.357	44,96	44,76	44,49	5,24	5,26	5,16	0,33	0,29
2	Boven Digoel	64.285	64.716	65.193	12,52	12,50	12,48	3,62	3,65	2,77	0,67	0,74
3	Mappi	108.295	109.579	111.141	21,08	21,17	21,28	12,91	13,06	4,58	1,19	1,43
4	Asmat	110.105	111.632	113.524	21,44	21,57	21,74	7,02	7,12	4,54	1,39	1,69
Papua Selatan		513.617	517.623	522.215	100,00	100,00	100,00	28,79	29,09	17,05	0,78	0,89

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022-2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Tingginya jumlah penduduk di Kabupaten Merauke disebabkan karena memiliki sarana transportasi dan aksesibilitas yang paling memadai, infrastruktur yang cukup bagus, memiliki variasi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, serta keadaan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding kabupaten yang lain. Kabupaten Merauke sebagai ibukota provinsi mendorong peningkatan migrasi penduduk yang didorong meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan.

Tabel II.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Papua Selatan

No	Kabupaten	Laki-laki			Perempuan			Total Penduduk			Rasio Jenis Kelamin		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Merauke	120.870	121.080	121.237	110.062	110.616	111.120	230.932	231.696	232.357	109,82	109,46	109,10
2	Boven Digoel	34.189	34.364	34.564	30.096	30.352	30.629	64.285	64.716	65.193	113,60	113,22	112,85
3	Mappi	55.918	56.494	57.210	52.377	53.085	53.931	108.295	109.579	111.141	106,76	106,42	106,08
4	Asmat	57.116	57.818	58.708	52.989	53.814	54.816	110.105	111.632	113.524	107,79	107,44	107,10
Papua Selatan		268.093	269.756	271.719	245.524	247.867	250.496	513.617	517.623	522.215	109,19	108,83	108,47

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022-2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

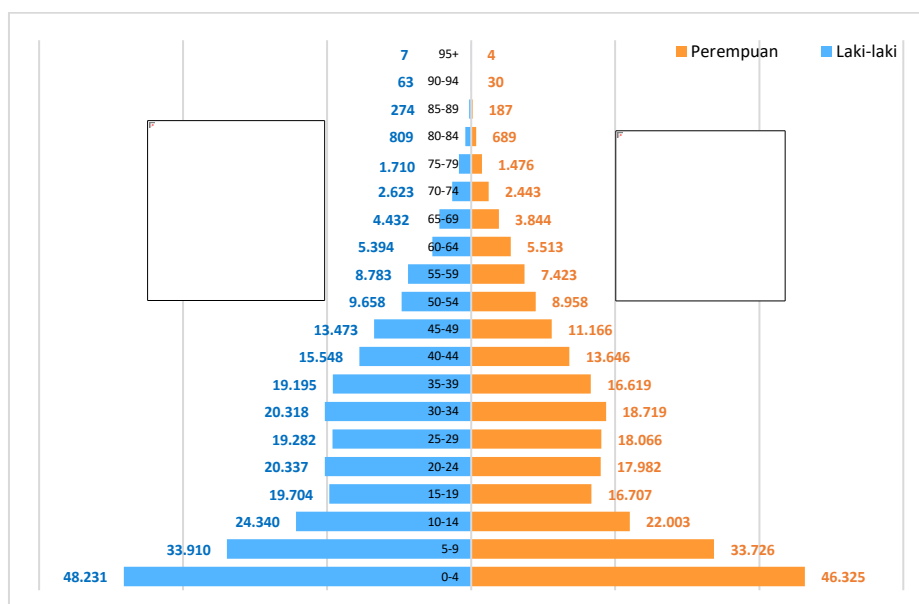
Jumlah penduduk laki-laki di Papua Selatan sebanyak 271.719 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 250.496 jiwa. Rasio jenis kelamin di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar 108,47 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Provinsi Papua Selatan terdapat 109 penduduk laki-laki (lihat Tabel II.6).

Tabel II.7 Hasil Sensus Penduduk Provinsi Papua Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umum, 2020

Kelompok Umur	Merauke			Boven Digoel			Mappi			Asmat			Papua Selatan		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
0-4	18.079	17.181	35.260	6.241	6.070	12.311	9.781	9.459	19.240	14.130	13.615	27.745	48.231	46.325	94.556
5-9	13.321	13.319	26.640	4.894	4.778	9.672	8.519	8.554	17.073	7.176	7.075	14.251	33.910	33.726	67.636
10-14	9.863	9.213	19.076	2.749	2.459	5.208	6.072	5.288	11.360	5.656	5.043	10.699	24.340	22.003	46.343
15-19	8.325	7.009	15.334	2.199	1.856	4.055	4.421	3.805	8.226	4.759	4.037	8.796	19.704	16.707	36.411
20-24	9.639	8.499	18.138	2.603	2.301	4.904	4.054	3.778	7.832	4.041	3.404	7.445	20.337	17.982	38.319
25-29	9.311	8.295	17.606	2.463	2.271	4.734	3.903	3.732	7.635	3.605	3.768	7.373	19.282	18.066	37.348
30-34	9.425	8.571	17.996	2.986	2.524	5.510	3.985	3.870	7.855	3.922	3.754	7.676	20.318	18.719	39.037
35-39	9.772	8.015	17.787	2.610	2.086	4.696	3.532	3.377	6.909	3.281	3.141	6.422	19.195	16.619	35.814
40-44	7.234	6.365	13.599	2.089	1.629	3.718	3.083	2.799	5.882	3.142	2.853	5.995	15.548	13.646	29.194
45-49	6.592	5.890	12.482	1.993	1.345	3.338	2.555	2.036	4.591	2.333	1.895	4.228	13.473	11.166	24.639
50-54	4.705	4.577	9.282	1.186	969	2.155	1.868	1.681	3.549	1.899	1.731	3.630	9.658	8.958	18.616
55-59	4.865	4.293	9.158	1.000	733	1.733	1.600	1.372	2.972	1.318	1.025	2.343	8.783	7.423	16.206
60-64	3.128	3.217	6.345	479	469	948	960	1.052	2.012	827	775	1.602	5.394	5.513	10.907
65-69	2.768	2.395	5.163	377	316	693	745	729	1.474	542	404	946	4.432	3.844	8.276
70-74	1.732	1.594	3.326	174	159	333	452	432	884	265	258	523	2.623	2.443	5.066
75-79	1.196	966	2.162	106	86	192	255	289	544	153	135	288	1.710	1.476	3.186
80-84	626	493	1.119	27	34	61	99	101	200	57	61	118	809	689	1.498
85-89	229	146	375	9	10	19	26	18	44	10	13	23	274	187	461
90-94	51	22	73	4	1	5	8	5	13	0	2	2	63	30	93
95+	7	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2020

Gambar II.13 Piramida Penduduk Provinsi Papua Selatan, 2020



Sumber: BPS Kabupaten, 2020 (diolah)

Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 94.556 jiwa, diikuti kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 67.636 jiwa, dan kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 46.343 jiwa. Terkait dengan struktur penduduk, piramida penduduk Provinsi Papua Selatan termasuk dalam kategori expansive dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda, dengan tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang memiliki dua implikasi, jika penduduk dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif maka akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah, dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah. Dalam aspek kesehatan, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengimplementasikan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan tingginya tingkat kelahiran sekaligus memastikan anak di Provinsi Papua Selatan dapat tumbuh berkembang dengan seimbang dan berkualitas. Selain itu, dengan jumlah penduduk muda dan angkatan kerja juga besar, maka pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

Kondisi Demografi OAP dan non-OAP

Berbagai upaya untuk mengetahui kondisi demografi OAP dan non-OAP telah dilakukan pendataan berbasis kampung melalui Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di wilayah Papua. Berdasarkan Tabel II.8 dapat diketahui cakupan pendataan yang dilakukan sampai dengan 21 Maret 2023 di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan sebesar 23.873 jiwa atau 4,69% dari total jumlah penduduk dalam sensus penduduk 2020 (jumlah penduduk dalam SP 2020: 513.617 jiwa). Dari total penduduk yang terdata SIO Papua, sebanyak 19.651 jiwa adalah OAP sedangkan 4.222

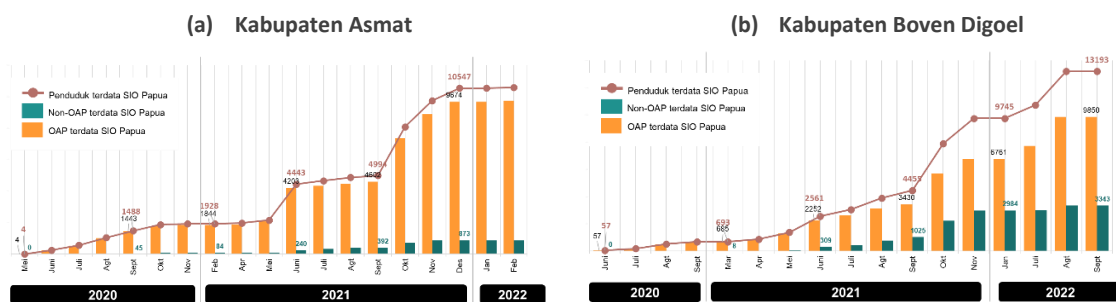
jiwa lainnya adalah non-OAP. Cakupan pendataan ini masih dinamis dan akan terus bertambah seiring dengan pendataan yang dilakukan di tingkat kampung dengan target cakupan 100%.

Tabel II.8 Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SIO Papua (update: 21 Maret 2023)

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk SP2020 (jiwa)	Kemajuan Pendataan SIO Papua (jiwa)			Cakupan SIO Papua Terhadap SP2020 (%)
			OAP	Non-OAP	Total	
Provinsi Papua Selatan		513.617	19.651	4.222	23.873	4,69
1	Merauke	230.932	76	6	82	0,04
2	Boven Digoel	64.285	9.850	3.343	13.193	20,52
3	Mappi	108.295	0	0	0	0,00
4	Asmat	110.105	9.725	873	10.598	9,63

Sumber: SIO Papua (Sistem Informasi Orang Papua) <https://www.siopapua.com/>

Gambar II.14 Perkembangan Cakupan Pendataan OAP dan non-OAP di Boven Digoel dan Asmat Dalam SIO Papua (update: 18 April 2023)



Sumber: SIO Papua (Sistem Informasi Orang Papua) <https://www.siopapua.com/>

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pembahasan aspek kesejahteraan masyarakat dalam subbab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: (1) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (2) fokus kesejahteraan sosial; serta (3) fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB Provinsi Papua Selatan dalam periode 4 (empat) tahun terakhir berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan (Miliar rupiah) 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Merauke	14,536.82	16,023.14	16,037.19	16,731.24
Boven Digoel	4,566.55	4,818.16	4,821.05	4,958.68
Mappi	2,674.53	2,957.68	2,995.01	3,100.29
Asmat	2,258.84	2,470.83	2,569.01	2,694.63
Papua Selatan	24,036.74	26,269.81	26,422.26	27,484.84

Sumber: BPS Provinsi Papua dan Kabupaten, 2022 (diolah)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa secara makro kinerja ekonomi Provinsi Papua Selatan berdasarkan kabupaten/kota melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkan kecenderungan kenaikan yang cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Angka PDRB provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar 24.036,74 miliar rupiah, pada tahun 2019 sebesar 26.269,81 miliar rupiah, tahun 2020 sebesar 26.422,26 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 sebesar 27.484,84 miliar rupiah

Adapun kondisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten di Provinsi Papua Selatan selama tahun 2018-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, total PDRB ADHK kabupaten di Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 15,95 triliun dan mengalami peningkatan menjadi Rp.17,66 triliun pada tahun 2022. Kabupaten yang memiliki PDRB ADHK tertinggi adalah Kabupaten Merauke (tahun 2022: Rp 10,84 triliun) dan Kabupaten Boven Digoel (tahun 2022: Rp 3,26 triliun), sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.10. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan aktivitas perekonomian di Kabupaten Merauke sebagai ibukota Provinsi Papua Selatan jauh lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Apabila membandingkan PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas (lihat Tabel II.10 dan Tabel II.11), dapat diketahui bahwa peran sektor migas terhadap pendapatan regional kabupaten di Provinsi Papua Selatan tidak signifikan.

Tabel II.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan (Milyar Rupiah)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	9.583,70	10.307,40	10.209,60	10.363,50	10.838,50
Boven Digoel	3.221,87	3.275,51	3.190,50	3.214,09	3.264,01
Mappi	1.775,92	1.884,40	1.860,73	1.902,24	1.997,29
Asmat	1.373,50	1.452,80	1.522,33	1.531,36	1.563,59
Total 4 Kabupaten	15.954,99	16.920,11	16.783,15	17.011,19	17.663,40

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019-2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")(diolah)

Tabel II.12 menunjukkan laju pertumbuhan total PDRB ADHK menurut kabupaten di Papua Selatan tahun 2018-2022. Berdasarkan Tabel II.12 diketahui bahwa secara umum terdapat trend perlambatan laju pertumbuhan PDRB ADHK di seluruh wilayah Papua Selatan. Penurunan laju pertumbuhan terbesar terjadi di Kabupaten Merauke dari 8,11% pada 2018 menjadi 4,58% pada 2022. Penurunan laju pertumbuhan PDRB secara signifikan terjadi pada tahun 2020 sebagai

dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Adapun Kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi di Papua Selatan tahun 2022 adalah Mappi yaitu sebesar 5,00%.

Tabel II.11 Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan (Milyar Rupiah)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	9.424,70	10.137,50	10.035,50	10.176,80	10.645,00
Boven Digoel	3.179,05	3.230,49	3.144,89	3.168,37	3.218,17
Mappi	1.770,13	1.878,49	1.854,73	1.896,23	1.991,11
Asmat	1.452,60	1.522,13	1.531,16	1.563,39	1.641,41
Total 4 Kabupaten	15.826,48	16.768,60	16.566,28	16.804,79	17.495,70

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019-2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Tabel II.12 Laju Pertumbuhan Total PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten di Papua Selatan (%)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	8,11	7,55	-0,95	1,51	4,58
Boven Digoel	3,26	1,66	-2,60	0,74	1,55
Mappi	6,31	6,11	-1,26	2,23	5,00
Asmat	5,77	4,79	0,59	2,11	4,99
Rata-rata 4 Kabupaten	5,86	5,03	-1,05	1,65	4,03

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019-2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

2.2.1.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan komposisi sektor ekonomi dalam perekonomian suatu wilayah. Dalam subbab ini, pembahasan struktur ekonomi dirumuskan berdasarkan sektor ekonomi atau lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Pada tahun 2017-2022, secara umum struktur ekonomi kabupaten di Papua Selatan menunjukkan struktur ekonomi agraris dengan kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel II.13 Rata-rata Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan (%), 2017-2022

Lapangan Usaha	Rata-rata Distribusi PDRB ADHK 2017-2022 (%)			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,55	26,03	23,36	20,90
Pertambangan dan Penggalan	1,72	1,38	0,32	0,01
Industri Pengolahan	3,78	23,95	0,67	2,27
Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,00	0,00	0,05
Konstruksi	16,08	24,19	32,93	30,15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	5,76	6,90	5,99
Transportasi dan Pergudangan	7,27	1,76	1,96	2,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	0,23	0,22	0,26
Informasi dan Komunikasi	8,68	0,33	0,55	0,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	0,91	0,71	0,20
Real Estate	2,86	1,35	1,65	1,82
Jasa Perusahaan	1,52	0,17	0,10	0,54
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,27	9,56	23,31	21,79
Jasa Pendidikan	2,36	2,00	3,69	7,94

Lapangan Usaha	Rata-rata Distribusi PDRB ADHK 2017-2022 (%)			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	1,71	2,67	4,07
Jasa Lainnya	1,20	0,67	0,95	1,09
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata kontribusi seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel II.13 diketahui bahwa seluruh kabupaten di Papua Selatan memiliki struktur ekonomi yang didominasi kontribusi lapangan usaha: (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (2) konstruksi, serta (3) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Meskipun demikian, terdapat kabupaten yang memiliki kontribusi lapangan usaha perdagangan yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Merauke (14,25%), Mappi (6,90%) dan Asmat (5,99%). Khusus untuk Kabupaten Merauke sebagai ibukota provinsi, terdapat kontribusi yang tinggi pada sektor transportasi dan pergudangan (7,27%), informasi dan komunikasi (8,68%). Selain itu, terdapat kontribusi sektor industri pengolahan yang sangat tinggi di Boven Digoel selama tahun 2017-2022 dengan rata-rata sebesar 23,95%.

Dalam menganalisis struktur ekonomi daerah, selain mengkaji kontribusi lapangan usaha juga perlu meninjau laju pertumbuhan lapangan usaha pada rentang tahun tertentu. Berdasarkan Tabel II.14 dapat diketahui terdapat laju pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor tersier/jasa seperti perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini mengindikasikan mulai adanya transformasi struktural atau pergeseran pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja/struktur mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor jasa di Papua Selatan. Meskipun demikian, perubahan struktur ekonomi ini perlu didukung dengan upaya peningkatan pertumbuhan sektor industri di Papua Selatan yang belum berkembang atau bahkan mengalami perlambatan pertumbuhan pada 2017-2022 (Boven Digoel: -3,02% dan Asmat: -0,08%).

Tabel II.14 Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan (%), 2017-2022

Lapangan Usaha	Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2017-2022 (%)			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	1,11	0,63	1,88
Pertambangan dan Pengeksploasian	6,01	2,47	1,94	-0,19
Industri Pengolahan	2,30	-3,02	2,04	-0,06
Pengadaan Listrik dan Gas	7,64	5,33	7,83	1,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,98	0,00	4,61	1,13
Konstruksi	9,29	2,83	4,81	6,38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,08	5,04	5,33	1,47
Transportasi dan Pergudangan	1,70	2,48	2,46	4,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,29	2,68	3,17	2,61
Informasi dan Komunikasi	7,87	5,00	6,01	8,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	4,91	5,94	2,04
Real Estate	4,83	2,57	3,57	2,32
Jasa Perusahaan	3,09	2,37	2,16	2,77

Lapangan Usaha	Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2017-2022 (%)			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	2,04	5,81	3,49
Jasa Pendidikan	2,94	1,87	3,98	3,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,68	6,80	6,43	7,17
Jasa Lainnya	3,28	2,13	4,61	5,04
PDRB	4,45	0,92	3,91	3,90

Keterangan: Laju pertumbuhan lapangan usaha relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan seluruh lapangan usaha di wilayah tersebut

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (diolah)

Untuk menganalisis struktur ekonomi kabupaten di Provinsi Papua Selatan dilakukan analisis Tipologi Klassen terhadap kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB per lapangan usaha di seluruh kabupaten tahun 2017-2022. Tipologi Klassen membagi lapangan usaha menjadi 4 kategori yaitu: kuadran I adalah sektor maju dan cepat tumbuh, kuadran II adalah sektor berkembang cepat, kuadran III adalah sektor maju tapi tertekan, serta kuadran IV adalah sektor yang relatif tertinggal (lihat Tabel II.15).

Berdasarkan Tabel II.15 dapat diketahui bahwa sektor maju dan tumbuh pesat di seluruh Kabupaten adalah sektor konstruksi. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian justru memiliki laju pertumbuhan yang kecil sehingga termasuk dalam kategori “**sektor maju tapi tertekan**” (kuadran III). Selain sektor konstruksi, sektor lainnya yang termasuk sektor maju dan cepat tumbuh adalah sektor perdagangan (di Kabupaten Merauke dan Mappi), sektor informasi dan komunikasi (di Kabupaten Merauke), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (di Kabupaten Mappi dan Asmat), serta sektor jasa pendidikan (di Kabupaten Asmat).

Tabel II.15 Tipologi Klassen Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2017-2022

Lapangan Usaha	Tipologi Klassen			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3	3	3	3
Pertambangan dan Penggalian	2	4	4	4
Industri Pengolahan	4	3	4	4
Pengadaan Listrik dan Gas	2	2	2	4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4	4	2	4
Konstruksi	1	1	1	1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1	2	1	3
Transportasi dan Pergudangan	3	4	4	2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4	4	4	4
Informasi dan Komunikasi	1	2	2	2
Jasa Keuangan dan Asuransi	4	2	2	4
Real Estate	2	4	4	4
Jasa Perusahaan	4	4	4	4

Lapangan Usaha	Tipologi Klassen			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3	3	1	1
Jasa Pendidikan	4	4	4	1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2	2	2	2
Jasa Lainnya	4	4	2	2

Keterangan:
1 Kuadran I: sektor maju dan tumbuh pesat
2 Kuadran II: sektor potensial dan dapat berkembang pesat
3 Kuadran III: sektor maju tapi tertekan
4 Kuadran IV: sektor relatif tertinggal

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (diolah)

Sebagai tindaklanjut dari analisis Tipologi Klassen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.15, dapat diketahui intervensi sektoral yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pembangunan ekonomi jangka pendek/menengah maupun jangka panjang. Untuk perbaikan ekonomi jangka pendek/menengah pemerintah provinsi/kabupaten dapat fokus pada perbaikan sektor-sektor potensial yang berkembang pesat (kuadran II), seperti jasa keuangan dan asuransi (di Kabupaten Boven Digoel dan Mappi), pertambangan dan penggalian (di Kabupaten Merauke), transportasi dan perdagangan (di Kabupaten Asmat), serta sektor informasi dan komunikasi (di Kabupaten Boven Digoel, Mappi, dan Asmat).

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di suatu wilayah. Berdasarkan **Error! Reference source not found.**, rata-rata tingkat ketimpangan kabupaten di Provinsi Papua Selatan termasuk kategori **ketimpangan sedang** pada posisi antara 0,3 hingga 0,4. Meskipun demikian, pada tahun 2017-2021 tren rasio gini Provinsi Papua Selatan menunjukkan trend peningkatan yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua Selatan. Secara regional, wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan paling rendah pada tahun 2021 di Papua Selatan adalah Kabupaten Mappi (skor: 0,384) dan Kabupaten Merauke (skor: 0,385). Adapun wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi adalah Kabupaten Boven Digoel (skor: 0,407) dan Asmat (skor: 0,405).

Tabel II.16 Indeks Gini Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2017-2021

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
1	Merauke	0,368	0,388	0,386	0,380	0,385
2	Boven Digoel	0,345	0,424	0,392	0,448	0,407
3	Mappi	0,394	0,416	0,416	0,427	0,384
4	Asmat	0,233	0,385	0,398	0,403	0,405
Rata-rata 4 Kabupaten		0,335	0,403	0,398	0,415	0,395

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

2.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia




Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup, melalui pendekatan 3 dimensi

dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan Tabel II.17 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, proxy IPM Provinsi Papua Selatan termasuk **kategori sedang** (kriteria: 60-69) dengan nilai mencapai 61,40. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat wilayah dengan **kategori IPM tinggi** sejak tahun 2018 yaitu Kabupaten Merauke, yang terus mengalami peningkatan IPM hingga mencapai 71,24 pada tahun 2022. Wilayah di Provinsi Papua Selatan yang masih memiliki **IPM kategori rendah** (kriteria: <60) adalah Kabupaten Mappi (tahun 2022: 59,61) dan Kabupaten Asmat (tahun 2022: 52,22).

Dalam melakukan analisis kondisi IPM, penting untuk dilakukan analisis IPM terpilah gender (laki-laki dan perempuan) karena adanya perbedaan pemenuhan kebutuhan dasar laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Tabel II.17 diketahui bahwa capaian IPM laki-laki di Papua Selatan termasuk dalam **kategori sedang** (kriteria: 60-69) dan terus mengalami peningkatan dari 64,24 pada tahun 2017 menjadi 66,90 pada tahun 2022. Meskipun demikian, capaian IPM perempuan di Papua Selatan masih termasuk dalam **kategori rendah** (kriteria: <60) dan mengalami peningkatan dari 49,13 pada tahun 2017 menjadi 52,45 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar untuk perempuan di Papua Selatan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam hal ini, wilayah dengan capaian IPM perempuan sangat rendah adalah Kabupaten Asmat yaitu 27,85 pada tahun 2017 dan 32,45 pada tahun 2022.

Tabel II.17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Selatan 2017-2022

Indikator	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Merauke	68,64	69,38	69,98	70,09	70,49	71,24
	Boven Digoel	60,14	60,83	61,51	61,53	61,62	62,52
	Mappi	57,10	57,72	58,30	58,15	58,70	59,61
	Asmat	48,49	49,37	50,37	50,55	51,29	52,22
	Rata-rata 4 Kabupaten	58,59	59,33	60,04	60,08	60,53	61,40
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki	Merauke	73,80	74,50	75,12	75,14	75,53	76,10
	Boven Digoel	65,47	66,15	66,84	66,91	67,10	67,80
	Mappi	62,67	63,30	63,88	63,74	64,17	65,06
	Asmat	55,03	55,72	56,62	56,84	57,71	58,64
	Rata-rata 4 Kabupaten	64,24	64,92	65,62	65,66	66,13	66,90
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan	Merauke	64,54	65,33	65,88	66,00	66,50	67,96
	Boven Digoel	51,61	52,37	52,97	52,98	53,05	54,17
	Mappi	52,50	52,95	53,42	53,21	53,76	55,22
	Asmat	27,85	29,10	30,41	30,46	31,00	32,45
	Rata-rata 4 Kabupaten	49,13	49,94	50,67	50,66	51,08	52,45

(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IPM seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2017-2023 (diolah).

2.2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Secara umum terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di Papua Selatan dari 88,65

ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 90,52 ribu jiwa pada tahun 2022. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat di Kabupaten Mappi (2022: 26,76 ribu jiwa) dan Kabupaten Asmat (2022: 25,60 ribu jiwa). Meskipun mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, namun apabila meninjau persentase penduduk miskin di Papua Selatan terhadap total penduduk terdapat trend penurunan. Persentase penduduk miskin Papua Selatan tahun 2018 sebesar 18,25% dan mengalami penurunan menjadi 17,62% pada 2022. Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Merauke yaitu 10,10% pada tahun 2022.

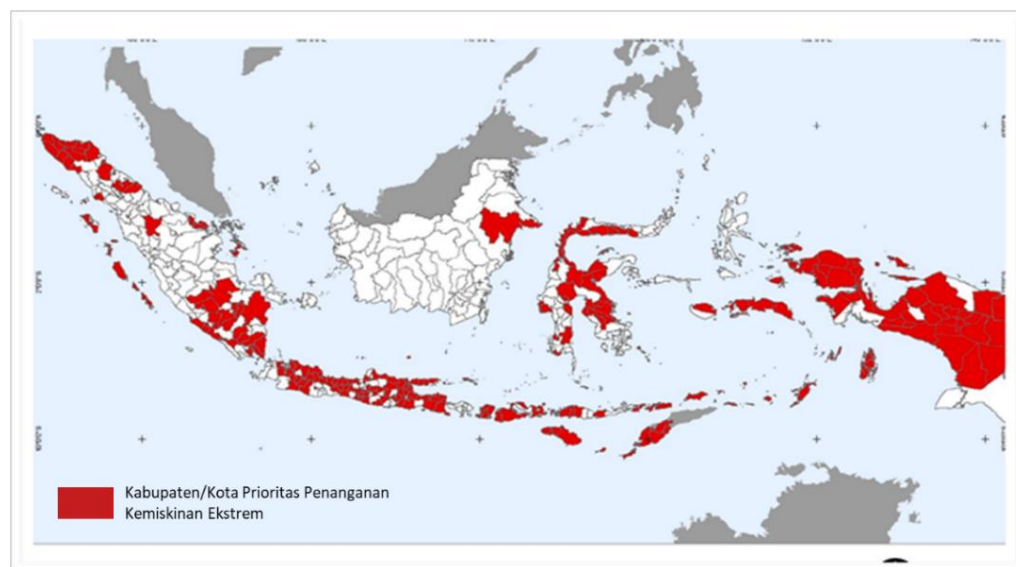
Tabel II.18 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua Selatan 2018-2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	23,72	23,49	22,89	23,83	23,96	10,54	10,35	10,03	10,16	10,10
Boven Digoel	13,70	13,54	13,86	13,88	14,20	20,35	19,66	19,41	19,90	20,04
Mappi	25,21	26,10	26,91	26,36	26,76	25,64	25,50	25,04	26,05	26,04
Asmat	26,02	25,80	25,12	25,04	25,60	27,41	26,60	25,49	24,83	24,87
Papua Selatan*	88,65	88,93	88,78	89,11	90,52	18,25	17,96	17,56	17,60	17,62

* Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Papua Selatan merupakan hasil proxy terhadap data 4 kabupaten di Papua Selatan

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019-2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Gambar II.15 Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia



Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2022

Arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Selatan akan dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dengan dasar pelaksanaan program kemiskinan Ekstrem sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terpadu. Berdasarkan Gambar II.15 diketahui bahwa 3 kabupaten di Provinsi Papua Selatan

termasuk dalam wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

Tabel II.19 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Selatan Tahun 2018 dan 2022

Kabupaten	Presentase Penduduk Miskin (%)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	2018	2022	2018	2022	2018	2022	2018	2022
Merauke	10,54	10,10	2,06	1,67	0,70	0,56	345.965	408.710
Boven Digoel	20,35	20,04	4,38	4,57	1,51	1,40	452.723	550.445
Mappi	25,64	26,04	5,07	3,90	1,41	0,81	301.237	402.212
Asmat	27,41	24,87	4,01	3,57	0,87	0,81	354.478	424.978
Rata-rata	18,25	17,62	3,88	3,43	1,12	0,90	363.601	446.586

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019-2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Berdasarkan Tabel II.19 dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin (P0), Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan selama 2018-2022. Rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan dari 3,88 pada 2018 menjadi 3,43 pada 2022. Begitupula dengan rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan yang mengalami penurunan dari 1,12 pada tahun 2018 menjadi 0,90 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk di Papua Selatan pada 2018-2022 serta penurunan ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Papua Selatan.

2.2..1.6 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks kemahalan konstruksi (IKK) merupakan ukuran untuk menggambarkan perbandingan harga barang/ jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga kota acuan. Komoditas konstruksi meliputi gedung tempat tinggal; gedung non tempat tinggal; dan jaringan jalan, irigasi, dan sistem. Semakin tinggi nilai indeks IKK dapat diartikan semakin sulit/mahal pembangunan konstruksi untuk dilakukan di daerah tersebut. IKK memberikan nilai 100 pada Kota Makassar sebagai kota acuan. Secara umum Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 telah mengalami penurunan kemahalan konstruksi sebesar 17% dibandingkan tahun 2018. Di Tahun 2022, Kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang paling mudah dilakukan konstruksi (indeks terendah) adalah Kabupaten Boven Digoel (140,02) dan tersulit (indeks tertinggi) di Kabupaten Mappi (150,06) dengan rata-rata indeks di Papua Selatan (145,62). Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel II.20.

Tabel II.20 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan 2018-2022

No	Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
1	Merauke	156,56	153,05	150,93	148,88	143,10
2	Boven Digoel	161,96	162,63	159,84	157,75	140,02
3	Mappi	167,70	152,24	152,02	155,91	150,06
4	Asmat	213,94	202,28	179,68	169,93	149,32
	Rata-rata	175,04	172,38	160,61	158,11	145,62

Sumber: BPS Papua, 2022 (dalam dokumen Indeks Kemahalan Konstruksi Papua 2022) (diolah)

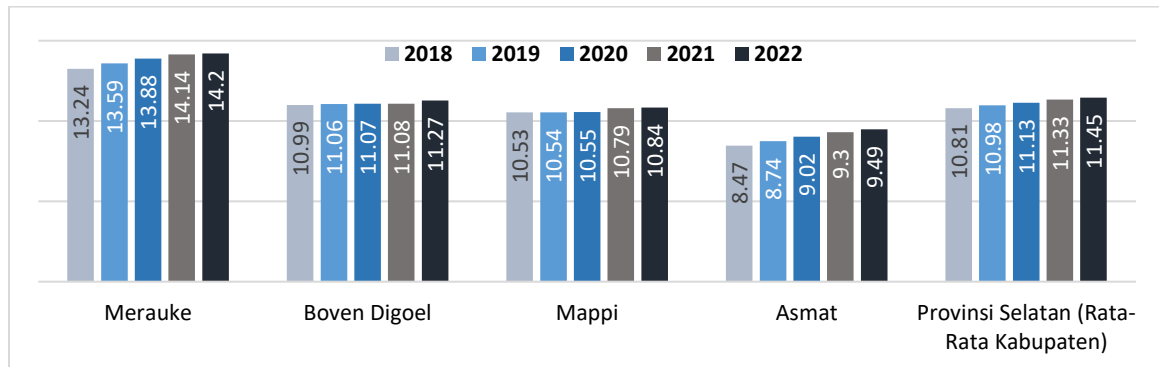
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Fokus Pendidikan

2.2.2.1.1 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah yang menunjukkan peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang.

Gambar II.16 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2018-2022

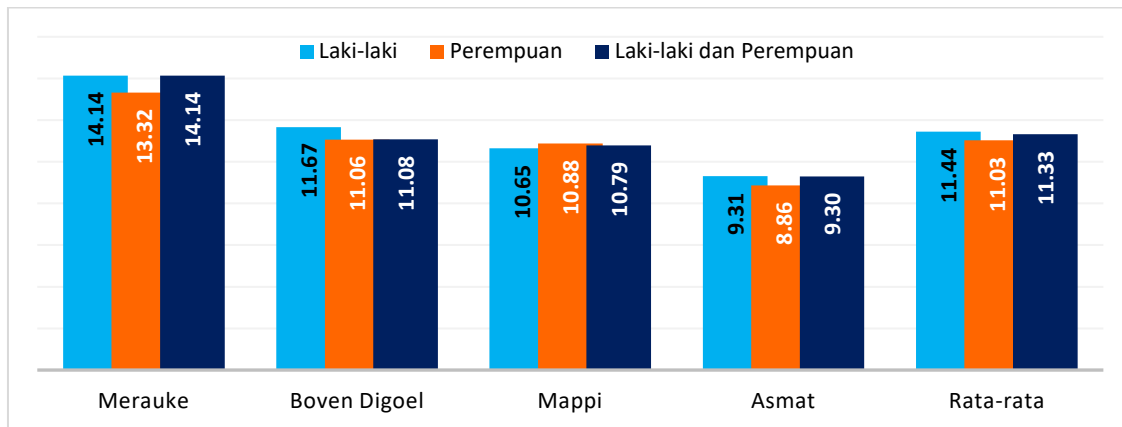


*Catatan: Angka Provinsi menggunakan angka rata-rata Kabupaten
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

HLS di Provinsi Papua Selatan hanya mengalami sedikit peningkatan dalam 5 tahun terakhir (2018-2022), yang secara rata-rata dari 4 kabupaten masih berada pada kisaran angka 11, yakni 10,81 di tahun 2018 dan meningkat secara bertahap menjadi 11,45 di tahun 2022. Angka ini dapat diartikan bahwa anak 7 tahun (laki-laki dan perempuan) yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,5 tahun lamanya, atau sampai dengan kelas terakhir pada Pendidikan Menengah (SMA atau sederajat). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.16. Tinjauan per kabupaten menunjukkan HLS Kabupaten Merauke merupakan yang tertinggi, bahkan sejak tahun 2021 mencapai di atas 14 tahun, sementara HLS terendah terdapat di Kabupaten Asmat, yang masih berada di bawah 10 tahun hingga tahun 2022.

Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, terdapat sedikit perbedaan antara HLS laki-laki dan perempuan. Secara rata-rata kabupaten, HLS pada perempuan sedikit lebih rendah daripada laki-laki, namun keduanya sama-sama mencapai angka di atas 11 tahun. Terdapat pengecualian di Kabupaten Mappi, yang menunjukkan HLS pada perempuan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Berikut gambar yang menunjukkan capaian HLS menurut kabupaten pada tahun 2021.

Gambar II.17 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



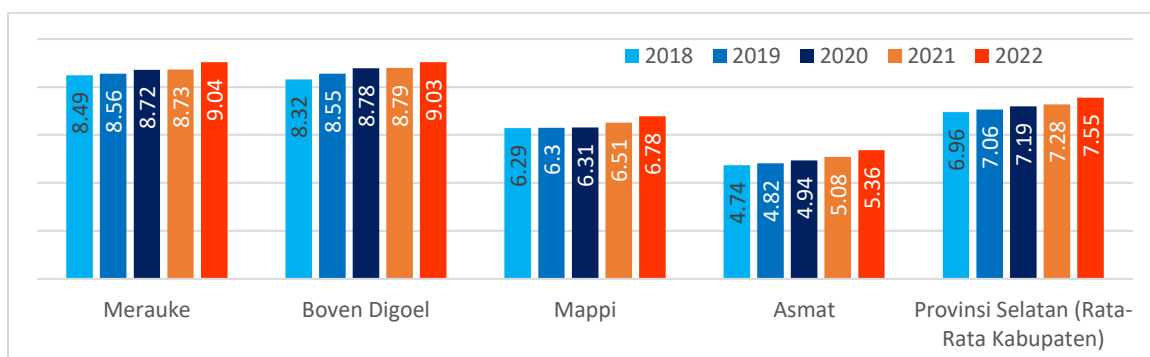
*Catatan: Angka Provinsi menggunakan angka rata-rata Kabupaten
 Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.2.2.1.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, yang diukur pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sama halnya dengan HLS, angka rata-rata lama sekolah di Papua Selatan hanya mengalami sedikit peningkatan dalam 5 tahun terakhir, yang hingga tahun 2022 secara rata-rata baru mencapai angka 7 tahun plus. Artinya, rata-rata penduduk Provinsi Papua Selatan rata-rata mengenyam pendidikan formal selama 7 tahun lebih atau setara dengan kelas 1 SMP. Angka ini masih di bawah angka rata-rata Nasional, yaitu dengan capaian 8,69 pada tahun 2022.

Berdasarkan kabupaten, terdapat 2 kabupaten dengan angka RLS di atas 8 (Merauke dan Boven Digoel), sedangkan 2 kabupaten lainnya masih berada di bawah angka 7. Gambar II.18 menunjukkan perkembangan RLS di 4 Provinsi Papua Selatan dalam 5 tahun terakhir.

Gambar II.18 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Papua Selatan, 2018-2022

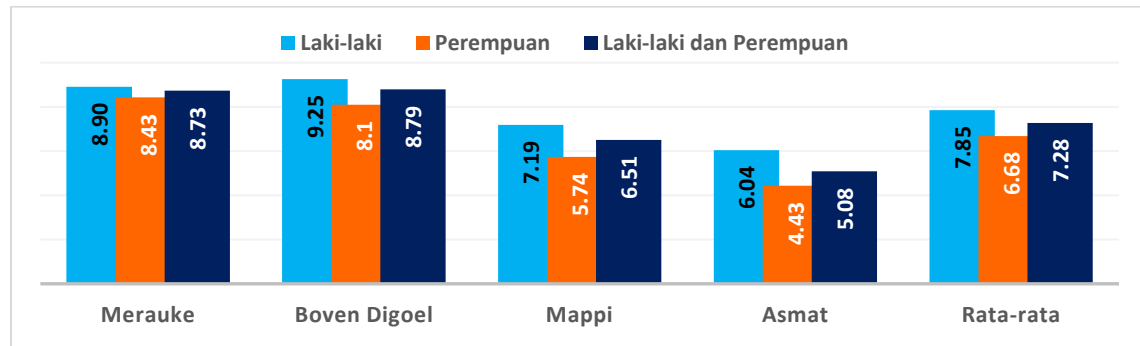


*Catatan: Angka Provinsi menggunakan angka rata-rata Kabupaten
 Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Gambar II.18 menampilkan angka RLS di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan 2 kabupaten lainnya, yakni mencapai di atas 9 tahun pada 2022. Sementara pada tahun yang sama Kabupaten Asmat hanya mencapai angka 5,36. Angka RLS

pada perempuan di Provinsi Papua Selatan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2021, RLS pada perempuan sebesar 6,68 tahun, atau tertinggal 1 tahun lebih dibandingkan RLS laki-laki yang mencapai 7,85 tahun. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Gambar II.19.

Gambar II.19 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan, 2021



* Catatan: Angka Provinsi menggunakan angka rata-rata Kabupaten
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

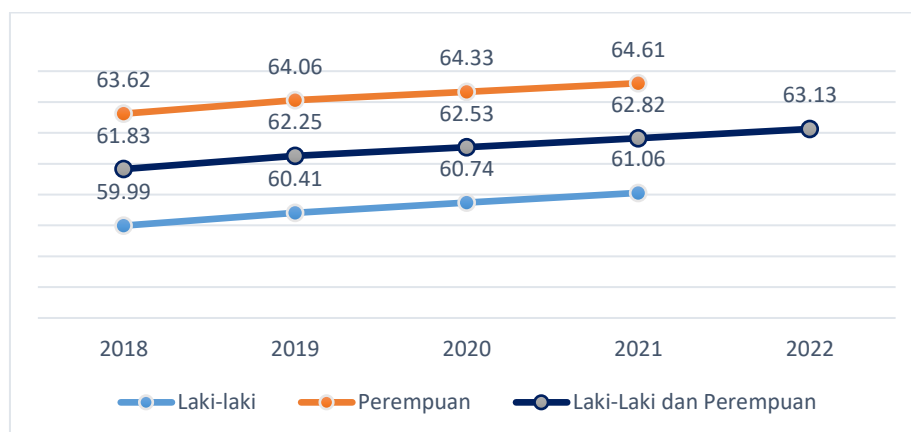
2.2.2.2 Fokus Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH menggambarkan usia kematian pada suatu populasi yang merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Angka ini merupakan gambaran kondisi kesehatan suatu wilayah secara garis besar. Tinggi rendahnya AHH ditentukan oleh status kesehatan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor-faktor: angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu, pelayanan kesehatan yang tersedia dan kondisi sosio-ekonomi (tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan serta gaya hidup dan kondisi psikososial).

Secara umum, AHH pada 4 Kabupaten di Papua Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 rata-rata kabupaten mencapai angka 63,13 tahun. Pemilahan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa AHH perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, yang selaras dengan perbedaan pada angka nasional dan global. Di tahun 2021, AHH Perempuan rata-rata kabupaten di Provinsi Papua Selatan mencapai angka 64,61 tahun, yang lebih tinggi sebanyak 3,5 tahun dibandingkan AHH laki-laki pada tahun yang sama (61,06 tahun). Berikut gambar yang menunjukkan perkembangan AHH berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Papua Selatan.

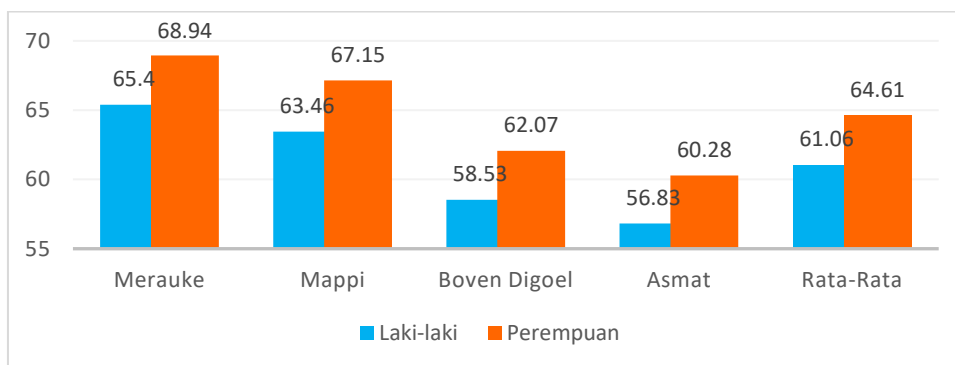
Gambar II.20 Perkembangan AHH Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan (Rata-Rata Kabupaten), 2018-2022



Catatan: data BPS terpilah jenis kelamin baru tersedia hingga tahun 2021
 Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

AHH perempuan yang lebih tinggi daripada laki-laki itu terdapat di semua kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan. Pada tahun 2021, perbedaan angka berkisar pada angka 3,5 poin di semua kabupaten. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar II.21.

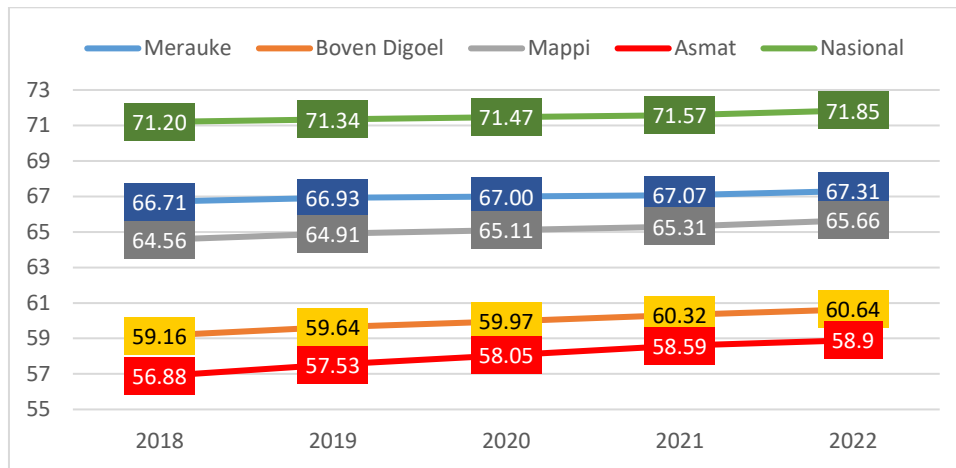
Gambar II.21 Perkembangan AHH Menurut Jenis Kelamin pada Masing-Masing kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Jika ditinjau perkembangannya per kabupaten, dari tahun ke tahun terdapat urutan yang tetap, yakni Kabupaten Merauke memiliki AHH tertinggi, diikuti oleh berturut-turut Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Selisih antara Kabupaten Merauke dan Asmat pada tahun 2018 mencapai hampir 10 tahun, yang secara bertahap mengalami sedikit perkembangan hingga pada tahun 2022 rentang perbedaannya menjadi 8,4 poin. AHH Kabupaten Merauke sendiri, sebagai yang tertinggi di Provinsi Papua Selatan, berada 4,5 poin di bawah angka nasional yakni 71,85 tahun di tahun 2022. Grafik berikut menunjukkan peningkatan AHH masing-masing Kabupaten sejak tahun 2018 hingga 2022 dibandingkan dengan AHH Nasional.

Gambar II.22 Perbandingan Perkembangan AHH 4 Kabupaten di Papua Selatan dengan Nasional, 2018- 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua dan BPS RI, 2023

2.2.2.2.2 Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Tingginya angka stunting merupakan hambatan dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Program Percepatan penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan semua pemangku kepentingan;

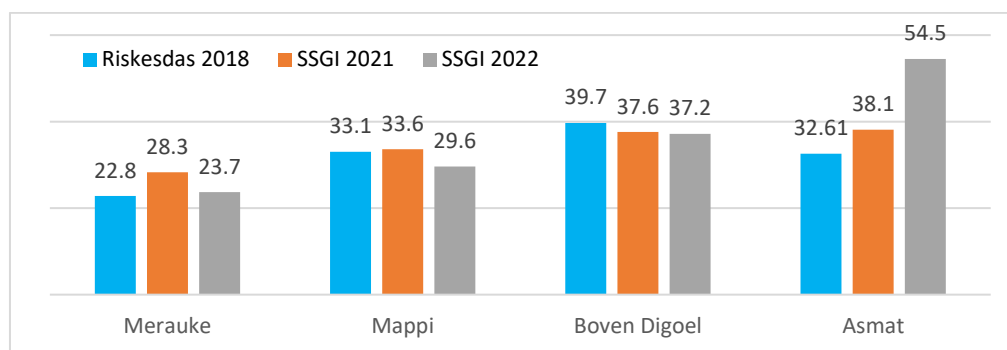
Upaya penurunan angka stunting dijalankan melalui Intervensi Spesifik yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting dan. Intervensi Sensitif yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. Kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting bukan saja anak balita, namun juga meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui. Pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 tahun, yakni berupa target antara yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran TB/U yang dapat menilai anak *stunted* (pendek), pada tahun 2022 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) didapatkan angka rata-rata kabupaten untuk balita stunting sebesar 36,3%. Angka rata-rata kabupaten ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, yakni 32,0% (Hasil Riskesdas 2018) dan 34,4% (SSGI 2021)

Tinjauan berdasarkan kabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Asmat memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi (54,5%) pada tahun 2022, yang meningkat dibandingkan angka tahun 2018 dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 32,6% dan 38,1%. Tiga kabupaten lainnya pun masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi, kecuali Kabupaten Merauke yang mendekati angka nasional pada tahun 2022 sebesar 23,7% (angka nasional 21,6%). Gambar berikut menunjukkan

prevalensi stunting pada balita di 4 kabupaten wilayah Provinsi Papua Selatan berdasarkan hasil 3 survey yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI.

Gambar II.23 Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022



Sumber: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, SSGI 2022

2.2.2.3 Fokus Ketenagakerjaan

2.2.2.3.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. TPAK merupakan angka persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tabel II.21 menunjukkan perkembangan TPAK di Papua Selatan selama 5 tahun terakhir. Dapat diketahui bahwa rata-rata TPAK kabupaten di Papua Selatan mengalami trend penurunan pada tahun 2018-2022 dari 77,79 pada tahun 2018 menjadi 69,71 pada tahun 2022.

Tabel II.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten di Papua Selatan Tahun 2018-2022 (%)

Kabupaten	TPAK					TPT				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	69,58	68,05	70,12	70,69	62,43	1,72	2,61	3,43	2,19	2,64
Boven Digoel	81,08	74,90	75,48	79,72	75,62	3,49	3,08	8,09	6,73	5,56
Mappi	77,67	68,56	64,09	61,60	60,42	2,88	4,51	5,77	4,11	2,34
Asmat	82,84	83,35	81,78	81,16	80,35	0,49	1,06	2,38	n.a	n.a
Rata-rata	77,79	73,72	72,87	73,29	69,71	2,15	2,82	4,92	4,34	3,51

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2019-2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Dengan kata lain, TPT merupakan persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja. Rata-rata TPT Kabupaten di Papua Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 2,15% pada tahun 2018 menjadi 3,51% pada tahun 2022 (Tabel II.21). Meskipun tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja dapat dianggap sebagai indikator yang informatif dalam mencerminkan kinerja pasar tenaga kerja, namun perlu dipertimbangkan bahwa indikator ini belum cukup untuk menafsirkan ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan.

2.2.2.3.2 Pekerjaan Utama Penduduk

Tabel II.22 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin menurut kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.22 diketahui bahwa mayoritas (sebanyak 70.805 jiwa atau 27,92%) penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Selatan pada tahun 2021 bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yang terdiri atas 50.647 jiwa laki-laki dan 20.158 jiwa perempuan. Berdasarkan gender, penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas mayoritas (32,94%) bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, sedangkan penduduk usia perempuan usia 15 tahun ke atas mayoritas (40,79%) bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tabel II.22 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2021

Status Pekerjaan Utama		Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Buruh/karyawan/pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga /tidak dibayar	Total
Merauke	Laki-laki	10.345	26.604	2.802	25.931	2.461	8.125	76.268
	Perempuan	8.585	8.722	356	10.221	298	19.940	48.122
Boven Digoel	Laki-laki	3.825	4.228	335	11.015	707	1.709	21.819
	Perempuan	2.645	2.894	121	3.977	37	4.376	14.050
Mappi	Laki-laki	12.465	3.677	914	7.191	358	1.322	25.927
	Perempuan	5.333	1.483	0	2.804	0	4.282	13.902
Asmat	Laki-laki	7.169	12.214	113	6.510	736	2.992	29.734
	Perempuan	4.491	3.926	35	3.156	42	12.130	23.780
Papua Selatan	Laki-laki	33.804	46.723	4.164	50.647	4.262	14.148	153.748
		21,99	30,39	2,71	32,94	2,77	9,20	100,00
	Perempuan	21.054	17.025	512	20.158	377	40.728	99.854
		21,08	17,05	0,51	20,19	0,38	40,79	100,00
Laki-laki + Perempuan	54.858	63.748	4.676	70.805	4.639	54.876	253.602	
	21,63	25,14	1,84	27,92	1,83	21,64	100,00	

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan aspek krusial dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan apabila merujuk pada Undang-Undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal maka diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu

dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan di Provinsi Papua Selatan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar meliputi enam urusan yang wajib diselenggarakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Layanan ini difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

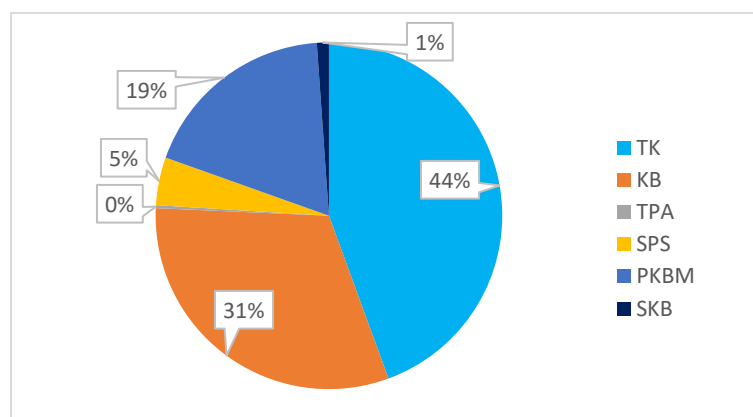
2.3.1.1 Pendidikan

Aspek Pelayanan Pendidikan yang dibahas dalam dokumen ini adalah pendidikan dalam jalur formal, yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta mencakup jenis pendidikan umum, vokasi, dan khusus.

2.3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini memiliki berbagai bentuk, antara lain pada Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dari berbagai jenis pendidikan itu, yang tergolong jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal. Proporsi masing-masing jenis PAUD di Papua Selatan ditunjukkan dalam gambar II.xx di bawah ini, yang menunjukkan jenis TK dan Kelompok Bermain sebagai bentuk pendidikan terbanyak (masing-masing 44% dan 31%).

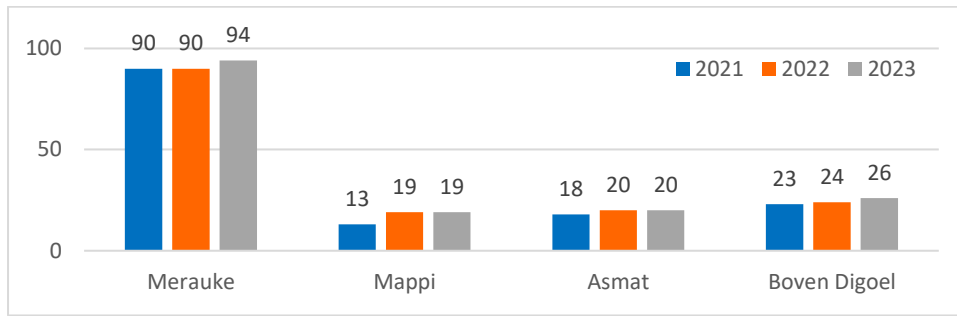
Gambar II.24 Jenis dan Proporsi PAUD di Papua Selatan Tahun 2023 (%)



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Jumlah TK di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan menunjukkan penambahan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat 159 TK di wilayah Provinsi Papua Selatan, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Metrauke (94 TK). Data dari Kemendikbud tersebut dirangkum pada Gambar berikut.

Gambar II.25 Perkembangan Jumlah TK Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan, 2021-2023

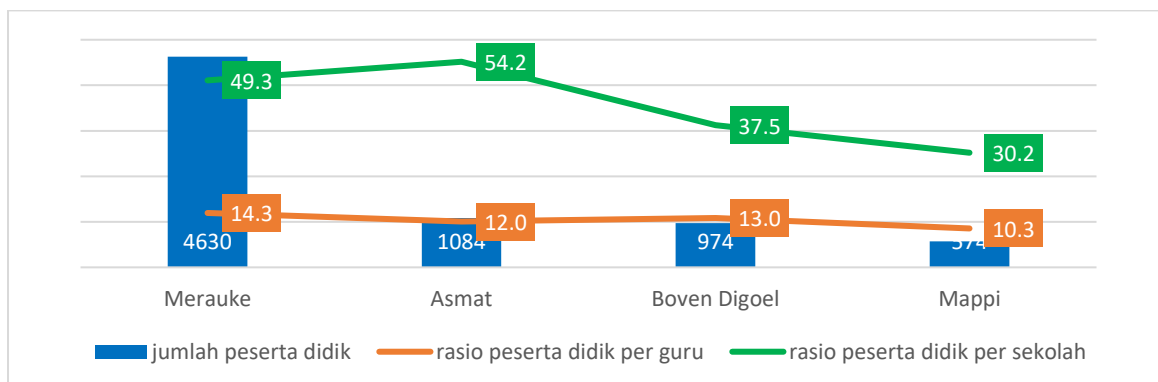


Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Jumlah peserta didik TK di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2023 tercatat 7.262 anak, sehingga rasio jumlah siswa per sekolah di tingkat provinsi adalah 46 anak. Angka ini paling padat di Kabupaten Asmat (54 siswa per sekolah), dan paling rendah di Mappi (30 siswa). Jumlah guru TK di Papua Selatan tahun 2023 tercatat berjumlah 544 orang, masing-masing 323 guru di Kabupaten Merauke, 90 guru di Asmat, 75 guru di Boven Digoel dan 56 guru di Mappi. Jika dihitung rasio guru per sekolah, secara keseluruhan tingkat provinsi diperoleh angka 3,4 guru per sekolah TK.

Adapun rasio guru terhadap peserta didik TK untuk tingkat provinsi terhitung 1 guru untuk 13,3 anak didik. Berdasarkan kabupaten, rasio itu berkisar antara 10 hingga 14, dengan rasio terbesar di Kabupaten Mappi (1:10). Rasio ini sudah memenuhi standar nasional, yaitu minimal 1 guru untuk 15 anak didik pada PAUD usia 4-6 tahun. Gambar berikut menampilkan jumlah peserta didik serta rasio guru terhadap peserta didik dan rasio peserta didik per sekolah di masing-masing Kabupaten tahun 2023.

Gambar II.26 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat TK di Provinsi Papua Selatan, 2023

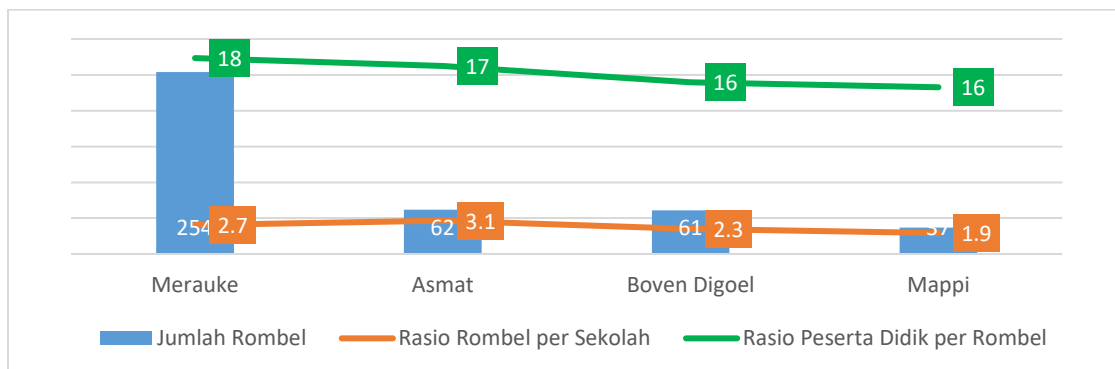


Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Sedangkan jika dihitung berdasarkan Rombongan Belajar (Rombel), pada tingkat TK di Provinsi Papua Selatan terdapat 377 Rombel (Dapodikdasmen, 2023), atau 2-3 rombongan per sekolah. Pemilahan berdasarkan kabupaten menunjukkan pula angka terbanyak adalah 3 rombongan per

sekolah. Berikut gambar yang menampilkan jumlah rombel, jumlah siswa per Rombel serta jumlah Rombel per sekolah berdasarkan Kabupaten.

Gambar II.27 Jumlah Rombel, Rasio Siswa per Rombel dan Rasio Rombel per Sekolah pada Tingkat TK di Provinsi Papua Selatan 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

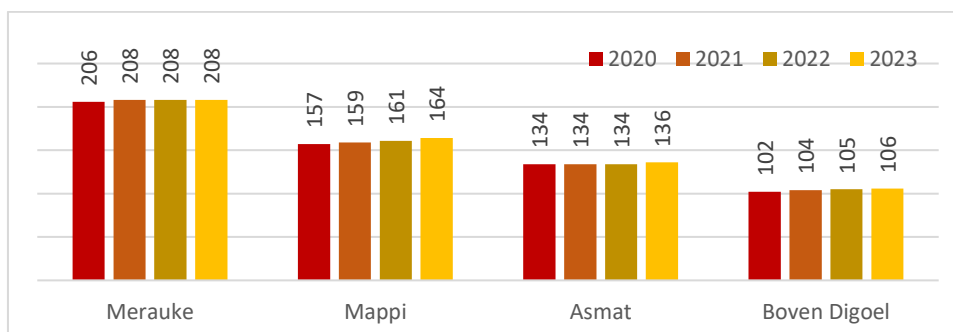
2.3.1.1.2 Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

A. Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar (SD) – termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Provinsi Papua Selatan tidak banyak mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, dari sejumlah 599 SD pada tahun 2020 menjadi 614 SD di tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah SD berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir.

Gambar II.28 Perkembangan Jumlah SD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2020-2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

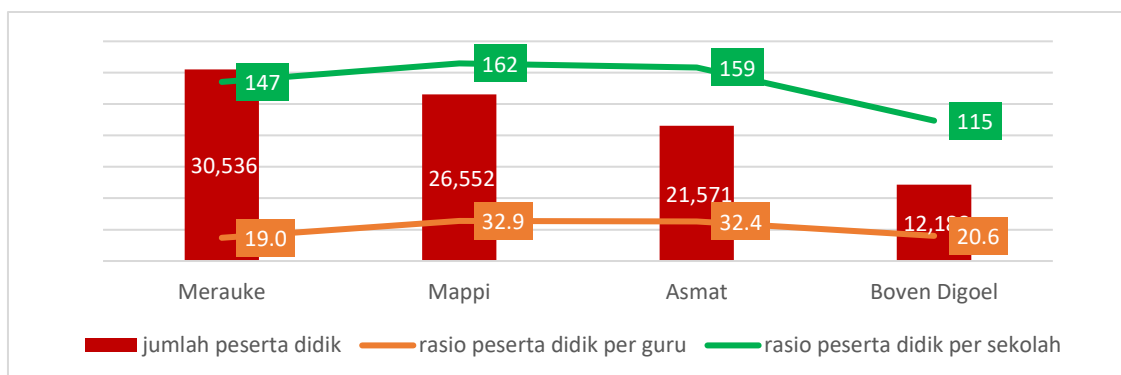
Pada tahun 2023, SD terbanyak terdapat di Kabupaten Merauke (208 sekolah) dan paling sedikit di Boven Digoel (106 sekolah). Rasio peserta didik per sekolah untuk tingkat provinsi terhitung 148

peserta didik per sekolah, dengan kisaran dari 115 peserta didik (Boven Digoel) hingga 162 peserta didik (Mappi).

Sedangkan guru yang mengajar pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat sebanyak 3669 guru. Dengan jumlah ini, diketahui bahwa rasio guru terhadap sekolah dasar di Provinsi Papua Selatan adalah 6 guru per sekolah. Jika dipilah per kabupaten, maka kabupaten yang rasio guru per sekolah di tingkat SD tertinggi terdapat di Kabupaten Merauke, yakni 7,7 guru untuk 1 sekolah. Kabupaten Mappi dan Asmat memiliki rasio yang sama dengan 5 orang guru per sekolah.

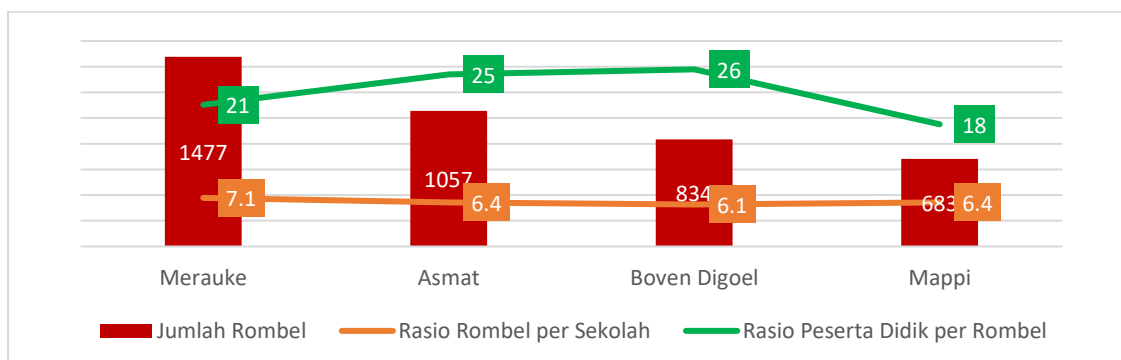
Sedangkan kecukupan guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru yang untuk tingkat provinsi diperoleh angka 24,8 siswa untuk 1 guru. Angka ini belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SD terhadap gurunya adalah 20:1. Namun jika dipilah per kabupaten, nampak bahwa Kabupaten Merauke telah memenuhi standar ini. Berikut gambar yang merangkum informasi tentang peserta didik serta rasionya terhadap guru dan sekolah di Provinsi Papua Selatan.

Gambar II.29 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat SD di Provinsi Papua Selatan, 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Gambar II.30 Jumlah Rombel, Rasio Peserta Didik per Rombel dan Rasio Rombel per Sekolah pada Tingkat SD di Provinsi Papua Selatan, 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

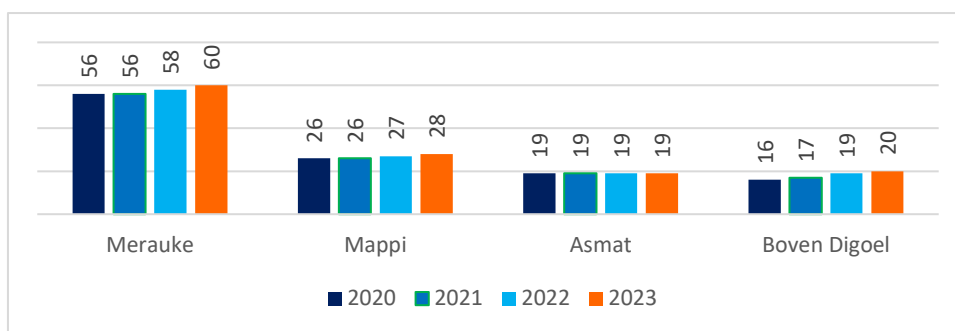


Untuk tingkat SD, jumlah Rombongan Belajar (Rombel) ideal berdasarkan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan melalui Permendikbud adalah 6-24 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 28 anak. Untuk provinsi Papua Selatan, rata-rata rombongan di tiap sekolah untuk tingkat SD adalah 6,6 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan sebanyak 22 orang. Angka provinsi ini telah memenuhi standar nasional. Jika dipilah per kabupaten, Kabupaten Asmat dan Boven Digoel belum memenuhi standar jumlah peserta didik dalam 1 rombongan rombongan per sekolah (melebihi 24 siswa). Sedangkan mengenai jumlah rombongan telah terpenuhi oleh semua kabupaten, dengan jumlah rombongan di atas 6 (lihat Gambar II.30).

B. Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) - termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs -) di Provinsi Papua Selatan juga mengalami penambahan dalam 4 tahun terakhir, dari sejumlah 117 SMP pada tahun 2020 menjadi 127 di tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah SMP di Provinsi Papua Selatan berdasarkan kabupaten dalam 5 tahun terakhir.

Gambar II.31 Perkembangan Jumlah SMP Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan, 2020-2023



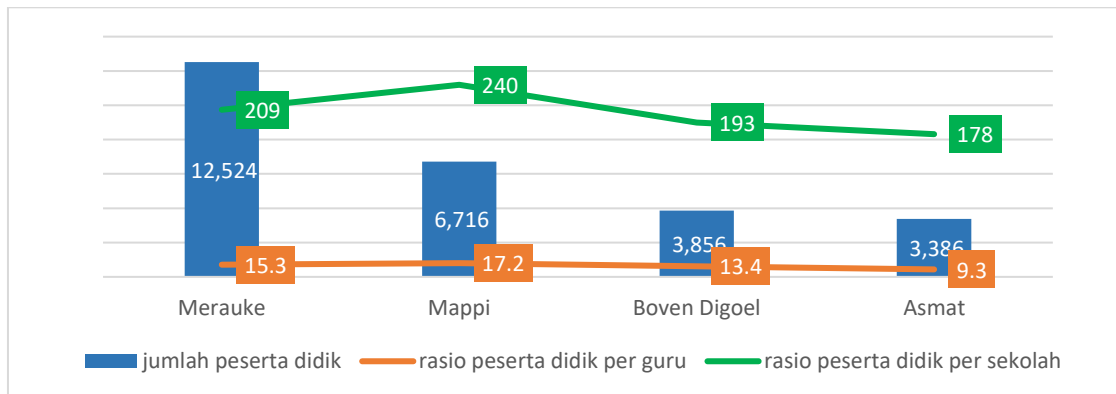
Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Rasio peserta didik per sekolah pada tingkat SMP di Papua Selatan pada tahun 2023 sebesar 209 peserta didik per sekolah, dengan kisaran antara 175 peserta didik (Kabupaten Asmat) hingga 240 peserta didik (Kabupaten Mappi).

Jumlah guru yang SMP mengajar pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat sebanyak 1861 guru. Dengan jumlah ini, terhitung rasio guru : sekolah pada jenjang ini di Provinsi Papua Selatan adalah 14,7 guru untuk 1 sekolah. Rasio terendah terdapat di Kabupaten Asmat (19,1 guru/sekolah) sedangkan tertinggi Kabupaten Merauke (13,7 guru/sekolah). Sedangkan ketersediaan guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru diperoleh angka 14,2 siswa untuk 1 guru. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMP terhadap gurunya adalah 20:1. Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, seluruh kabupaten telah memenuhi standar tersebut. Gambar II.xx berikut ini menyajikan jumlah peserta didik serta rasionya per 1 guru dan per sekolah berdasarkan kabupaten di Papua Selatan.



Gambar II.32 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat SMP di Provinsi Papua Selatan, 2023

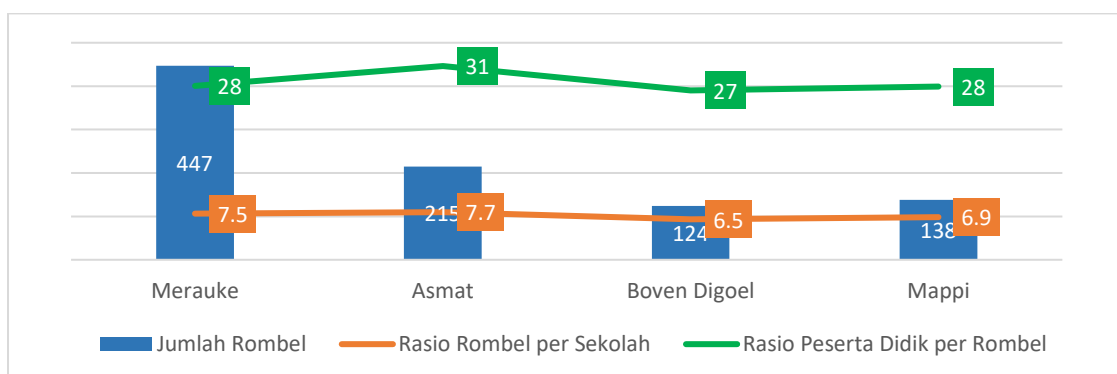


Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Jumlah rombongan ideal untuk tingkat SMP/MTs berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-33 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 32 anak. Untuk provinsi Papua Selatan, rata-rata rombongan di tiap sekolah pada tingkat SMP Tahun 2022 adalah 7,3 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan sebanyak 29 orang. Angka provinsi ini telah memenuhi standar nasional.

Tinjauan berdasarkan kabupaten menunjukkan bahwa semua kabupaten di Provinsi Papua Seltan memenuhi standar jumlah rombongan per sekolah dan jumlah siswa dalam 1 rombongan pada tingkat SMP. Kabupaten dengan jumlah rombongan terbanyak terbanyak adalah Asmat dengan 7,7 rombongan per sekolah, demikian pula peserta didik terbanyak dalam 1 rombongan (31 siswa)

Gambar II.33 Jumlah Rombongan, Jumlah Peserta Didik per Rombongan dan Jumlah Rombongan per Sekolah pada Tingkat SMP di Provinsi Papua Selatan, 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

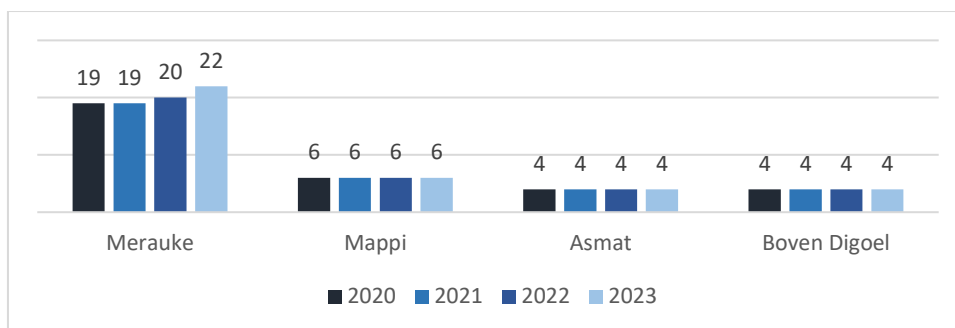
2.3.1.1.3 Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat

A. Sekolah Menengah Atas

Seperti pada jenjang pendidikan di bawahnya, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) - termasuk Madrasah Aliyah (MA) - di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir juga bertambah, dari 33 SMA pada tahun 2020 menjadi 36 SMA tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah SMA di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir.

Gambar II.34 Perkembangan Jumlah SMA Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2020 - 2023



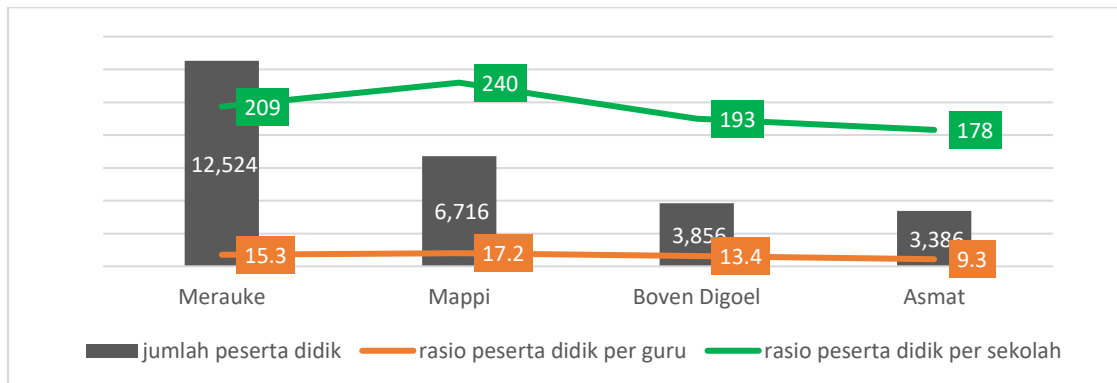
Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Jumlah SMA terbanyak di tahun 2023 terdapat di Kabupaten Merauke (22 sekolah), yang merupakan dua pertiga dari jumlah seluruh SMA di Papua Selatan. Pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat jumlah guru SMA/MA sebanyak 855 guru. Jumlah ini menghasilkan rasio guru terhadap sekolah pada jenjang ini di Provinsi Papua Selatan adalah 23,8 orang guru per sekolah. Kabupaten dengan rasio guru per sekolah di tingkat SMA/MA tertinggi terdapat di Kabupaten Asmat, sebesar 27,8 guru per sekolah. Sedangkan Kabupaten Merauke dan Boven Digoel memiliki rasio masing-masing 23,8 dan 23,0 guru per sekolah. Kabupaten Mappi memiliki rasio terendah dengan 21,3 orang guru per sekolah.

Rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 14,4 siswa untuk 1 guru. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMA terhadap gurunya adalah 20:1.

Kabupaten yang memiliki rasio guru : peserta didik yang tertinggi tercatat Kabupaten Asmat yakni 9,3 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Mappi, yakni 17,2 peserta didik untuk 1 guru. Sebaran jumlah serta rasio peserta didik berdasarkan kabupaten di Papua Selatan ditunjukkan pada Gambar II.35.

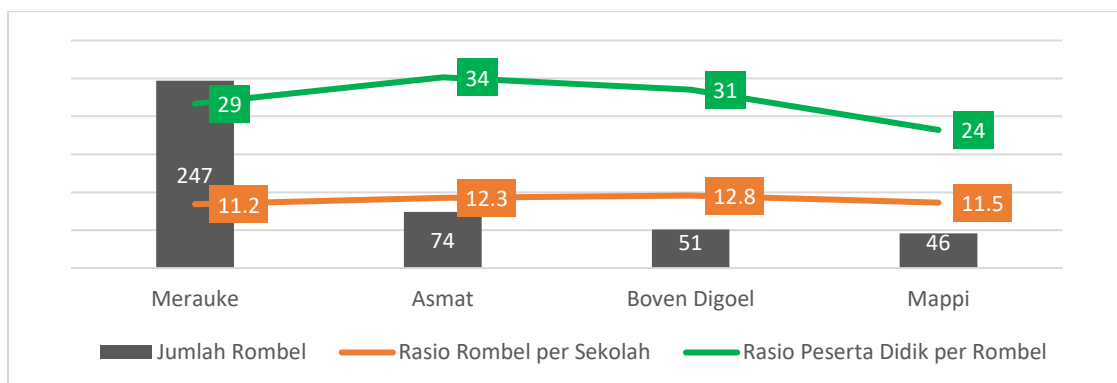
Gambar II.35 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat SMA di Provinsi Papua Selatan, 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Standar jumlah rombongan untuk tingkat SMA berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-36 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 36 peserta didik. Provinsi Papua Selatan pada tahun 2023 telah memenuhi standar nasional, dengan rata-rata rombongan di tiap sekolah pada tingkat SMA/MA adalah 11,6 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan sebanyak 29 orang. Berdasarkan kabupaten, semua kabupaten di Provinsi Papua Selatan memenuhi standar jumlah rombongan per sekolah maupun jumlah siswa dalam 1 rombongan. Gambar berikut menunjukkan informasi selengkapnya.

Gambar II.36 Jumlah Rombongan, Jumlah Siswa per Rombongan dan Jumlah Rombongan per Sekolah pada Tingkat SMA di Provinsi Papua Selatan 2023

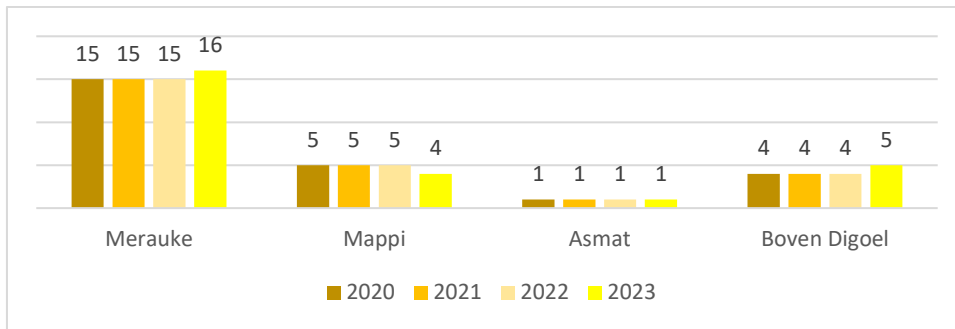


Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

B. Sekolah Menengah Kejuruan

Berbeda dengan jenjang dan jenis sekolah lainnya, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir relatif tetap, hanya terdapat penambahan 1 sekolah. Dalam wilayah Provinsi Papua Selatan pada tahun 2020 terdapat 25 SMK, dan pada tahun 2023 menjadi 26 SMK. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah SMK di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir.

Gambar II.37 Perkembangan Jumlah SMK di Provinsi Papua Selatan, 2020-2023



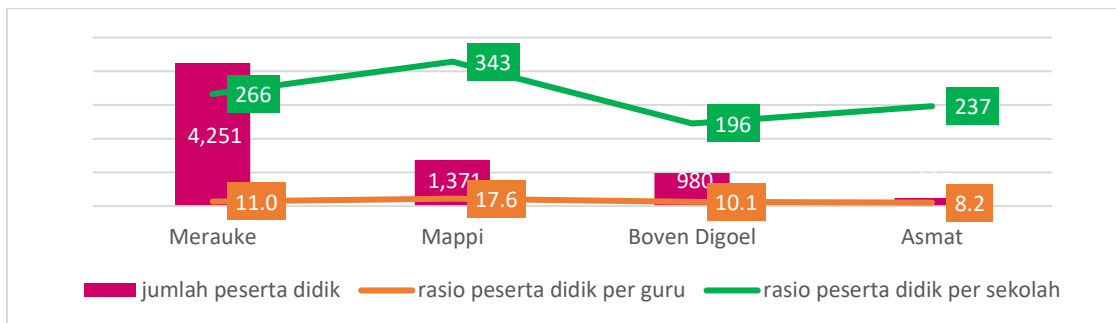
Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Lebih dari setengah SMK terdapat di Kabupaten Merauke (16 sekolah), sementara di Kabupaten lain hanya terdapat 1- 5 SMK; paling sedikit di Asmat (1 sekolah). Pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat jumlah guru SMK sebanyak 589 orang. Dengan jumlah ini, rasio guru SMK di Provinsi Papua Selatan adalah 22,7 guru per sekolah. Kabupaten dengan rasio guru per SMK tertinggi terdapat di Kabupaten Asmat, yakni 29 guru per sekolah.

Kecukupan jumlah guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru yang untuk tingkat provinsi diperoleh angka 11,6 siswa untuk 1 guru. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMK terhadap gurunya adalah 15:1

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, tercatat Kabupaten Mappi memiliki rasio guru : peserta didik yang terendah yakni 1377 guru untuk 10.000 siswa atau dengan rasio 17,6 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Asmat, yakni 8,2 peserta didik untuk 1 guru. Gambar II.38 menyajikan jumlah peserta didik beserta rasionya terhadap jumlah sekolah dan jumlah guru di Papua Selatan.

Gambar II.38 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada SMK di Provinsi Papua Selatan, 2023

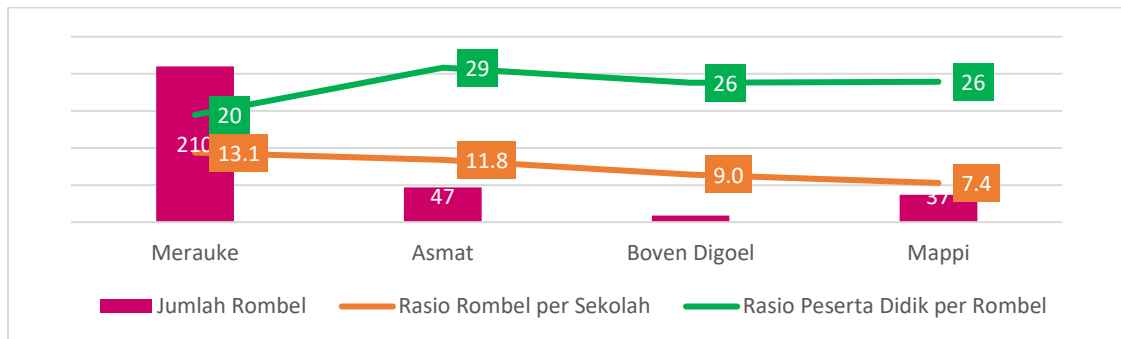


Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Standar jumlah rombongan untuk tingkat SMK berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-72 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 36 peserta didik. Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 telah memenuhi

standar nasional, dengan jumlah rombel di tiap sekolah pada tingkat SMK adalah 11,7 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombel sebanyak 23 orang. Berdasarkan kabupaten, semua kabupaten di Provinsi Papua Selatan memenuhi standar jumlah rombel per sekolah dan jumlah siswa dalam 1 rombel. Gambar berikut menunjukkan jumlah rombel serta rasionya terhadap siswa dan sekolah per kabupaten.

Gambar II.39 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Selatan 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

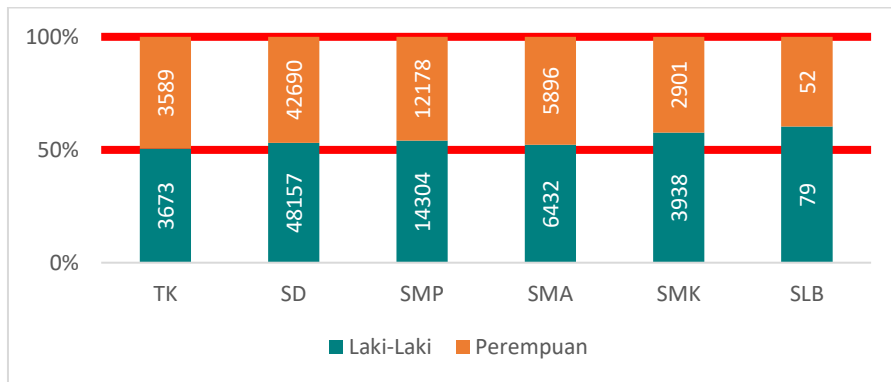
2.3.1.1.4 Pendidikan Khusus

Pendidikan Khusus yang terdapat di Provinsi Papua Selatan berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya ada 1 sekolah, bertempat di Kabupaten Merauke. Jumlah peserta didik di sekolah ini 131 orang, terdiri dari 79 laki-laki dan 52 perempuan (Dapodikdasmen 2023), dengan jumlah guru sebanyak 27 orang. Dengan demikian di sekolah ini rasio 1 guru untuk 5 peserta didik. Jumlah rombongan belajar adalah 33 rombel (Dapodik Kemendikbudristek 2023), sehingga jumlah peserta didik per rombel adalah 4 orang. SLB ini tercatat terakreditasi tahun 2022 dengan peringkat B dalam data akreditasi BANSM Kemendikbud.

2.3.1.1.5 Partisipasi Sekolah

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), diketahui bahwa jumlah peserta didik mengalami penurunan dengan makin tingginya jenjang pendidikan. Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, proporsi peserta didik laki-laki sedikit lebih tinggi daripada perempuan pada semua jenjang pendidikan di tahun ajaran 2022-2023. Berikut gambar yang menunjukkan jumlah peserta didik di Provinsi Papua Selatan berdasarkan jenjang/ jenis pendidikan serta proporsinya berdasarkan jenis kelamin.

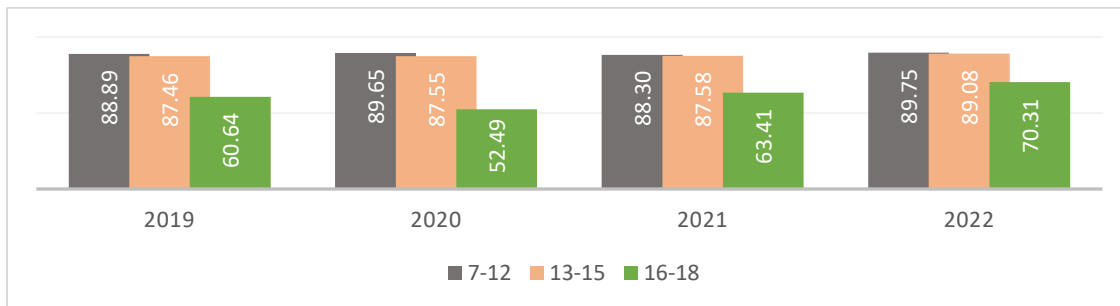
Gambar II.40 Jumlah Peserta Didik dan Proporsi Gender pada Tiap Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Selatan, 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perkembangan APS dalam 4 tahun terakhir di Provinsi Papua Selatan ditunjukkan pada gambar berikut

Gambar II.41 Angka Partisipasi Sekolah dari Rata-Rata Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2019-2022

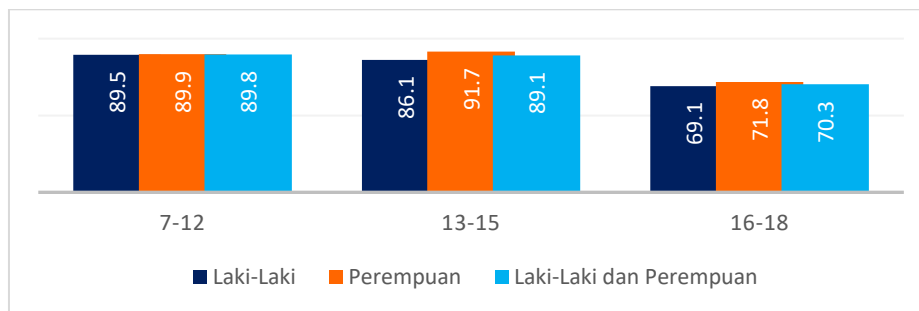


Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Dari tabel di atas nampak bahwa APS makin menurun dengan bertambah tingginya usia jenjang pendidikan. Pada tahun 2022, dari APS anak usia 7-12 tahun yang setara dengan pendidikan sekolah dasar sebesar 89,75% sedikit menurun di kelompok usia 13-15 tahun (setara usia SMP), kemudian menurun cukup banyak di usia 16-18 tahun (usia SMA) yang hanya 70,31%.

Sedangkan data APS berdasarkan kabupaten terpilah jender tahun 2022 menunjukkan bahwa perbedaan APS antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh, namun APS perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada semua kelompok umur. APS berdasarkan jenis kelamin dan rata-rata di 4 kabupaten ditunjukkan pada **Error! Reference source not found.xx** berikut.

Gambar II.42 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Pemilahan APS terpilah jender berdasarkan kabupaten ditampilkan pada **Error! Reference source not found.** Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa APS pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di beberapa kabupaten, terutama pada kelompok umur 13-15 tahun.

Tabel II.23 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan, 2022

Kabupaten	APS per Kelompok Umur Berdasarkan Gender								
	7-12			13-15			16-18		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
Merauke	95.6	94.6	95.1	96.0	98.4	97.0	87.3	90.8	89.0
Mappi	94.2	92.6	93.5	80.7	93.2	88.0	60.8	60.2	60.5
Asmat	77.7	78.5	78.1	76.5	77.8	77.2	58.3	54.1	56.0
Boven Digoel	90.7	94.1	92.4	91.1	97.2	94.0	70.1	82.1	75.8
Rata-Rata Kabupaten	89.5	89.9	89.8	86.1	91.7	89.1	69.1	71.8	70.3

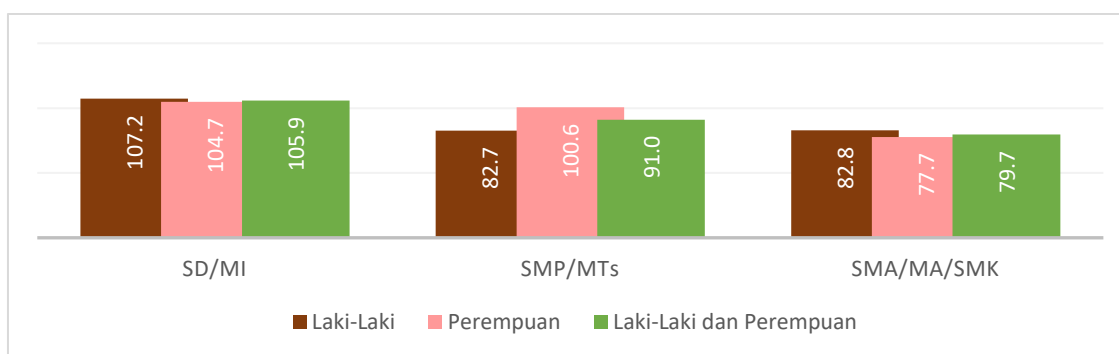
Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

2.3.1.1.6 Angka Partisipasi Kasar

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Papua Selatan pada jenjang Pendidikan SD/ sederajat hingga SMA pada tahun 2022 ditunjukkan pada gambar II.xx di bawah ini. Sedangkan rincian per kabupaten dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.xx**. Dari gambar dan tabel tersebut, nampak bahwa APK pada jenjang SD makin menurun hingga ke jenjang SMA, namun jika dipilah per kabupaten, tidak selalu terjadi penurunan itu pada beberapa jenjang.

Angka di atas 100% pada APK menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peserta didik pada jenjang tersebut yang usianya di luar usia sekolah pada jenjang ini.

Gambar II.43 APK Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Tabel II.24 APK Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022

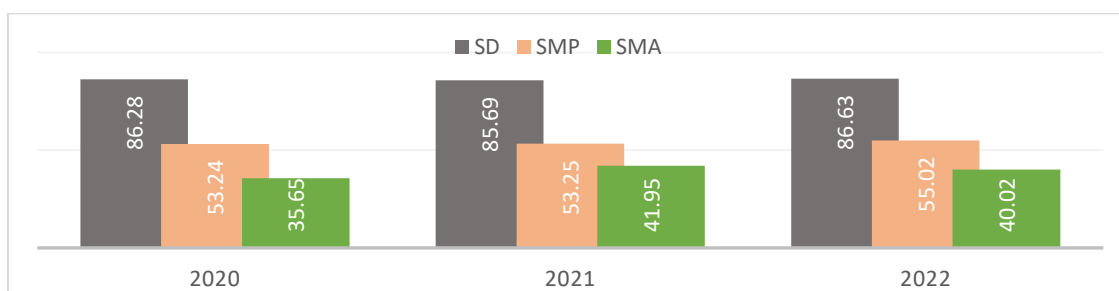
Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
Merauke	120.48	106.17	113.14	92.82	122.1	105.37	124.29	108.27	116.58
Mappi	110.74	114.28	112.29	97.6	86.07	90.86	60.24	75.57	66.81
Asmat	97.63	98.66	98.1	49.04	72.68	62.33	79.51	55.43	66.18
Boven Digoel	99.98	99.88	99.93	91.15	121.35	105.6	67.14	71.37	69.17
Rata-Rata	107.21	104.75	105.87	82.65	100.55	91.04	82.795	77.66	79.685

Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

2.3.1.1.7 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa yang bersekolah pada satu jenjang pendidikan dengan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan itu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia yang sama. Indikator ini bermanfaat untuk menilai proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Perbandingan APM rata-rata dari 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan perkembangan yang baik dengan meningkatnya APM pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Gambar berikut menunjukkan perkembangan APM pada masing-masing jenjang pendidikan dalam kurun waktu 2020-2022.

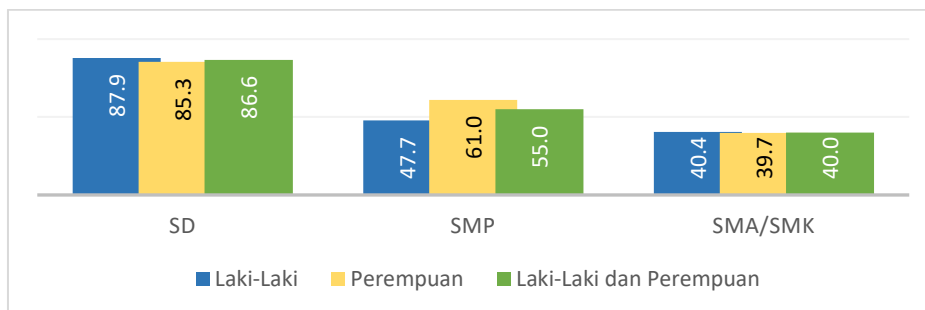
Gambar II.44 Rata-Rata APM dari 4 Kabupaten pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Selatan, 2020-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Sedangkan jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, APM pada perempuan, tahun 2022 lebih tinggi pada jenjang SMP dibandingkan APM laki-laki. Gambar berikut menunjukkan perbedaan tersebut.

Gambar II.45 Rata-Rata APM dari 4 Kabupaten berdasarkan jenis Kelamin pada Tiap Jenjang Pendidikan, di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Perbandingan APM antar kabupaten tahun 2021 menunjukkan pola yang sama yakni APM yang makin rendah dengan makin tingginya jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI semua kabupaten menunjukkan angka yang tinggi, dengan capaian paling rendah sebesar 92,61% di Kabupaten Teluk Wondama. Terjadi penurunan yang cukup tajam yang sama di semua kabupaten yakni dari jenjang SD ke SMP dan dari SMA ke Perguruan Tinggi. Gambar berikut menunjukkan perbandingan APM antar kabupaten pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2021.

Tabel II.25 APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022

Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
Merauke	94.14	87.54	90.75	66.42	68.92	67.49	74.18	55.6	65.24
Mappi	92.31	90.92	91.7	42.76	56.44	50.75	27.73	33.63	30.64
Asmat	77.57	76.20	76.95	19.04	48.02	35.33	30.27	26.93	28.42
Boven Digoel	87.58	86.63	87.11	62.75	70.62	66.51	29.31	42.82	35.77
Rata-Rata Kabupaten	87.90	85.32	86.63	47.74	61.00	55.02	40.37	39.75	40.02

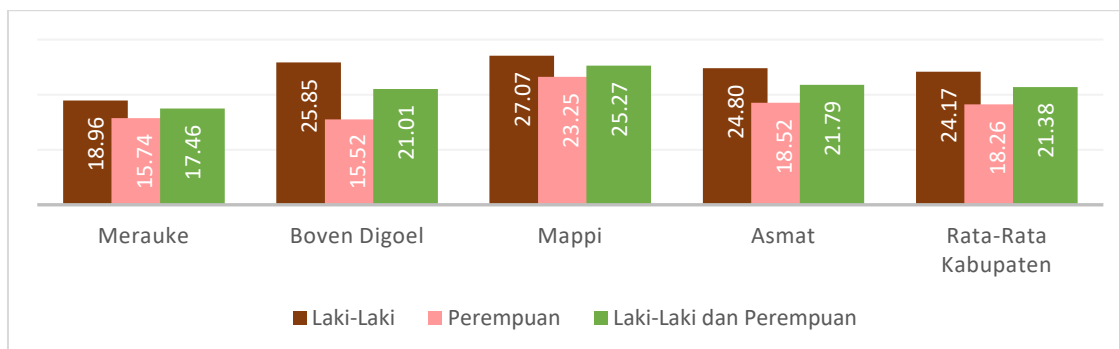
Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

2.3.1.1.8 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

Dengan tidak adanya data terpilah kabupaten mengenai Angka Putus Sekolah, digunakan persentase penduduk usia sekolah (7-24 tahun) yang tidak bersekolah lagi. Kelemahannya persentase ini tidak bisa memilah keputussekolahan pada masing-masing jenjang pendidikan. Gambar di bawah menunjukkan Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi. Dari Gambar II.46 diketahui bahwa persentase penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Pola itu serupa di semua kabupaten dan paling tinggi angkanya di Kabupaten Mappi.

Gambar II.46 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.3.1.1.9 Akreditasi Sekolah

Mengenai sekolah terakreditasi, Data Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah menunjukkan jumlah sekolah yang telah terakreditasi pada penilaian hingga tahun 2022 di wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

Gambar II.45 Proporsi Sekolah Terakreditasi menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Selatan, 2023

Kabupaten	SD			SMP			SMA			SMK		
	Jumlah sekolah	Jumlah	%ase	Jumlah sekolah	Jumlah	%ase	sekolah	Jumlah	%ase	sekolah	jumlah	%ase
Merauke	208	203	98%	60	59	98%	22	22	100%	16	16	100%
Mappi	164	121	74%	28	26	93%	6	6	100%	4	3	75%
Asmat	136	88	65%	4	2	50%	4	4	100%	1	1	100%
Boven Digoel	106	83	78%	20	18	90%	4	3	75%	5	2	40%
Papua Selatan	614	495	81%	112	105	94%	36	35	97%	26	22	85%

Sumber: Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah 2022 – BANSM kemdikbud.go.id

Data BANSM Kemendikbud di atas menunjukkan bahwa persentase sekolah terakreditasi cukup baik untuk tingkat SMP dan SMA (di atas 90%). Jika dipilah per kabupaten, nampak bahwa proporsi sekolah terakreditasi relatif rendah di Kabupaten Asmat dan Boven Digoel.

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

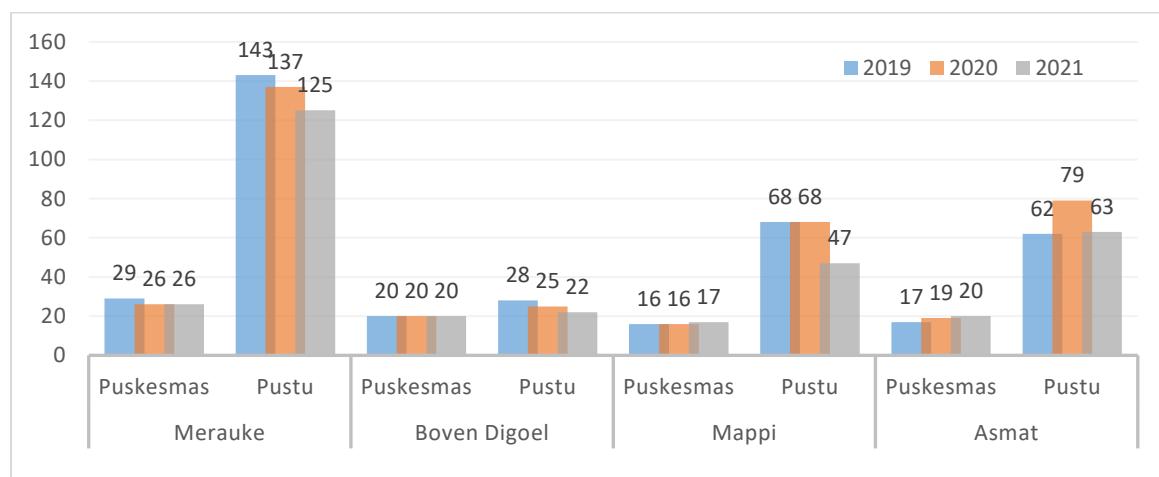
Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pelayanan ini mencakup pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Praktik Perseorangan, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium, Rumah Sakit, Upaya Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Dalam uraian berikut, fasilitas yang dibahas adalah puskesmas, rumah sakit, dan Ketersediaan Obat dan Vaksin (sebagai bagian dari Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan), serta UKBM.

A. Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah Puskesmas di Papua Selatan sampai dengan tahun 2021 tercatat 83 Puskesmas dan 257 puskesmas pembantu (pustu). Jika dipilah per kabupaten, di 4 kabupaten wilayah Provinsi Papua Selatan, terdapat fluktuasi jumlah puskesmas. Perubahan ini disebabkan karena perbaikan data dengan mengeluarkan sejumlah puskesmas yang belum teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI. Gambar II.xx menunjukkan perkembangan jumlah puskesmas dan pustu di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan sejak 2019 hingga 2021.

Dari data jumlah puskesmas dan pustu pada tahun 2021, dapat diketahui bahwa rasio puskesmas : pustu adalah 1:3. Jika dipilah per kabupaten, maka rasio terendah terdapat di kabupaten Boven Dogoel (1 : 1,1), diikuti oleh Mappi (1:2,8). Asmat (1:3,2) dan Merauke (1:4,8).

Gambar II.47 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019 - 2021

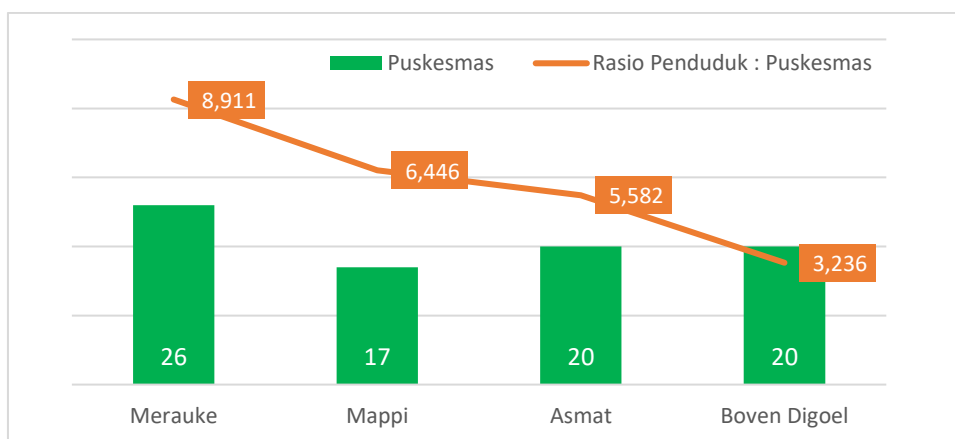


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021

Dengan mengacu pada data BPS, rasio puskesmas per penduduk yang dilayani di Provinsi Papua Selatan adalah 1 : 5.457 penduduk. Rasio ini tergolong sangat baik dibandingkan standar nasional yakni minimal 1 puskesmas untuk 16.000 penduduk. Jika dilihat per kabupaten, semua kabupaten telah memenuhi standar nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada **Error! Reference source not f**

ound.xx . Namun rasio yang baik ini tidak serta merta mewakili tingkat aksesibilitas penduduk, namun diketahui kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi di Papua Selatan masih merupakan hambatan terhadap aksesibilitas penduduk untuk memperoleh layanan kesehatan puskesmas.

Gambar II.48 Rasio puskesmas per Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022



Sumber: Provinsi Papua dalam Angka, BPS 2023 (diolah)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022 menyebutkan bahwa baru 42,6% puskesmas di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu dokter, perawat, bidan, dan 2 tenaga kesehatan lainnya di antara dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat.

Sedangkan mengenai puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial. secara provinsi mencapai 84,6%. Angka ini disebabkan persentase puskesmas di kabupaten Asmat yang masih rendah (38,5%), sementara 3 kabupaten lainnya telah mencapai 100%. Berikut tabel yang menunjukkan kabupaten dengan ketersediaan nakes serta obat dan vaksin yang dimaksud.

Tabel II.26 Persentase Puskesmas di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan serta Obat dan Vaksin Esensial

Kabupaten	% puskesmas dengan 5 jenis nakes	% puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
Merauke	60,0	100,0
Boven Digoel	15,0	100,0
Mappi	64,7	100,0
Asmat	30,8	38,5
Rata-Rata	42,6	84,6

Sumber: Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022

Puskesmas yang Menjalankan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah raga

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pemerintah mengamanatkan penyelenggaraan Kesehatan Kerja ditujukan kepada setiap orang yang berada di

tempat kerja, dan dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja di semua tempat kerja.

Kesehatan Kerja termasuk dalam indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020, yakni dengan mengukur persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Satu kabupaten/ kota dinyatakan melaksanakan kedua upaya kesehatan ini jika puskesmas melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga, masing-masing minimal 30%. Capaian nasional pada tahun 2020 (Profil Kesehatan Indonesia 2021), 64% kabupaten/kota di Indonesia sudah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja, dan 37,5% melaksanakan kesehatan olahraga. Hingga tahun 2021, belum ada kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang memenuhi kriteria melaksanakan kesehatan kerja maupun kesehatan olahraga.

B. Rumah Sakit

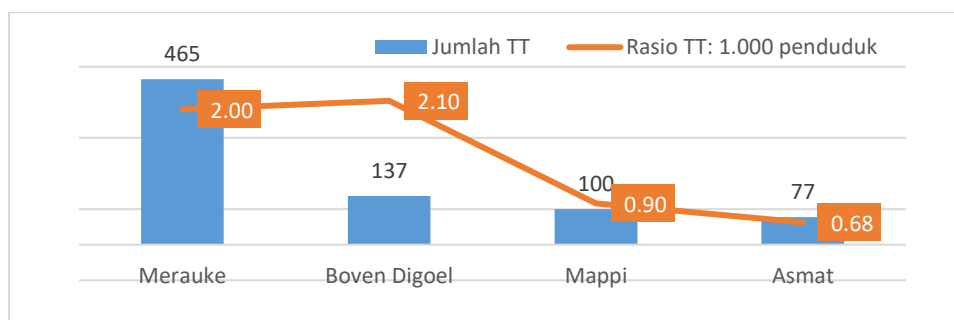
Terdapat 7 rumah sakit di Provinsi Papua Selatan, yang 6 di antaranya merupakan RS Kelas D, sedangkan 1 lainnya belum ditentukan kelasnya. Berikut tabel yang menampilkan daftar rumah sakit yang dimaksud.

Tabel II.27 Nama, Kelas dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	No.	Nama Rumah Sakit	Kelas	Jumlah Tempat Tidur	Akreditasi
Merauke	1	RS Umum Daerah Merauke	D	312	Paripurna
	2	RS Umum Bunda Pengharapan	D	96	Paripurna
	3	RS TNI Angkatan Laut	D	57	Paripurna
Boven Digoel	4	RS Bergerak Boven Digoel	Belum Ditetapkan	22	
	5	RS Umum Daerah Boven Digoel	D	115	
Mappi	6	RS Umum Daerah Mappi	D	Tidak ada data	
Asmat	7	RS Umum Daerah Asmat	D	77	

Sumber: Profil Kesehatan Dinkes Provinsi Papua, 2021
[https://sirs.kemkes.go.id/\(Ditjen Yankes Kemenkes RI\)](https://sirs.kemkes.go.id/(Ditjen Yankes Kemenkes RI))
<https://kars.or.id> (komisi akreditasi rumah sakit)

Gambar II.49 Rasio Tempat Tidur RS per 1000 Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021 (diolah)

Indikator terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk.



Menurut Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021, seluruh tempat tidur RS di Papua Selatan berjumlah 779 Tempat Tidur, atau 1,5 Tempat Tidur per 1000 penduduk. Rasio ini melebihi standar WHO, yakni 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Namun jika dipilah per kabupaten, terdapat 2 kabupaten yang belum memenuhi standar, yakni rasio TT per 1000 penduduknya di bawah 1 yakni Kabupaten Mappi dan Asmat. Berikut gambar yang menunjukkan perbandingan antar kabupaten tersebut.

C. Telemedicine

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 di antara strategi pembangunan kesehatan disebutkan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan salah satu fokusnya pada inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Inovasi ini meliputi perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine. Provinsi Papua Selatan belum mencatat capaian terkait jenis layanan ini.

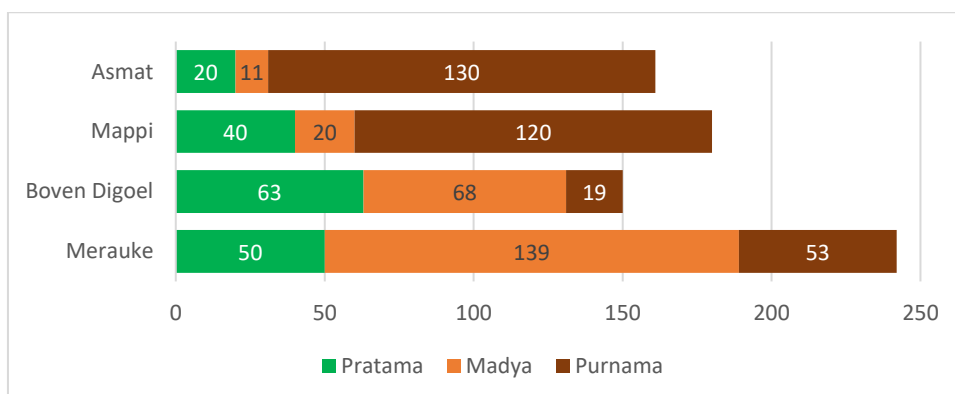
D. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang diuraikan dalam dokumen ini yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

Pos Pelayanan Terpadu

Posyandu di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021 berjumlah 733 posyandu, yang meliputi 242 posyandu di Kabupaten Merauke, 150 posyandu di Kabupaten Boven Digoel, 180 posyandu di Kabupaten Mappi dan 161 lainnya di Kabupaten Asmat. Berdasarkan stratanya, posyandu di Provinsi Papua Selatan terbanyak merupakan Posyandu Purnama (322 unit atau 43,9%), dan selebihnya merupakan Posyandu Madya (238 unit atau 32,5%), dan Posyandu Pratama (173 unit atau 23,6%) Berikut grafik yang menjabarkan jumlah serta strata posyandu di masing-masing kabupaten:

Gambar II.50 Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

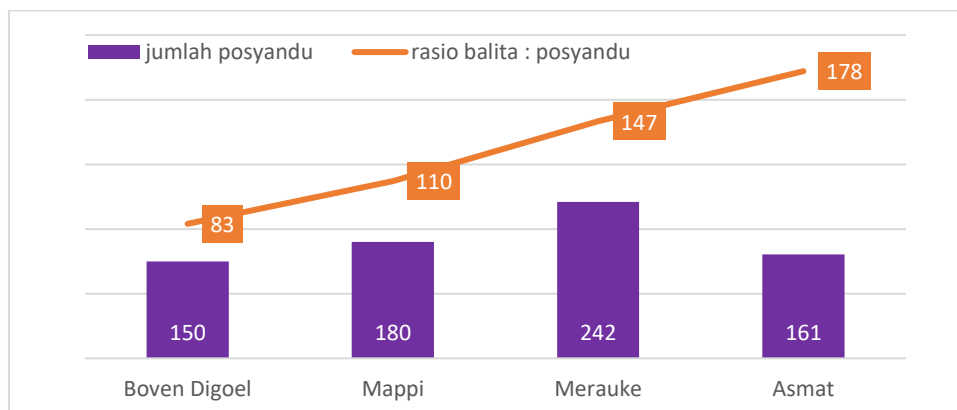


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022



Untuk mengetahui jangkauan pelayanan posyandu terhadap balita, digunakan rasio jumlah balita yang dilayani oleh 1 posyandu. Pada tingkat provinsi, rasio tersebut sebesar 131 balita per posyandu. Berdasarkan kabupaten, rasio tertinggi terdapat di Boven Digoel dengan rasio posyandu per balita per sebesar 1: 83. Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten Asmat dengan rasio 1:178. Selengkapnya mengenai jumlah posyandu dan rasionya per balita di masing-masing kabupaten di tunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar II.51 Jumlah Posyandu dan Rasio Posyandu terhadap Jumlah Balita di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021

Posbindu PTM

Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) adalah bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Informasi mengenai jumlah Posbindu PTM hingga tahun 2021 di wilayah Provinsi Papua Selatan tidak tersedia secara lengkap. Data Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2022 hanya menampilkan jumlah Posbindu PTM di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, masing-masing sebanyak 123 dan 22 unit.

2.3.1.2.2 SDM Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan berperan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebut bahwa sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Pembahasan mengenai SDM kesehatan pada dokumen ini mencakup jumlah dan cakupan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, tanpa pemilahan antara puskesmas dan rumah sakit. Tabel berikut menunjukkan jumlah keseluruhan dan rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Rincian mengenai masing-masing tenaga diuraikan pada bahasan setelah ini.

Tabel II.52 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah dan Rasio Nakes	
	tenaga medis	tenaga kesehatan
Merauke	703	90
Boven Digoel	559	48
Mappi	675	34
Asmat	325	36
Jumlah	2,262	208
rasio penduduk : nakes	229	2489
rasio nakes : 1000 penduduk	4.37	0.40

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2022

A. Tenaga Medis

Yang dimaksud tenaga medis di sini adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Distribusi tenaga medis per kabupaten dapat dilihat pada Tabel II.xx berikut.

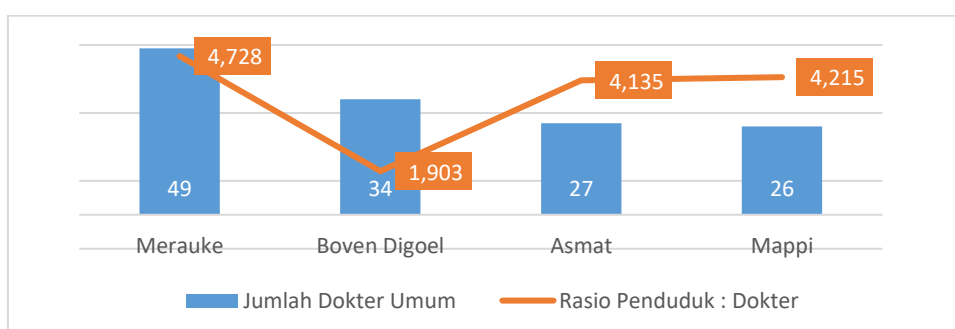
Tabel II.28 Distribusi Tenaga Medis di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Dokter Spesialis			Dokter Umum			Dokter Gigi			Dokter Gigi Spesialis		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Merauke	13	21	34	21	28	49	4	3	7	-	-	-
Boven Digoel	3	4	7	15	19	34	1	3	4	-	-	-
Mappi	1	-	1	14	12	26	2	2	4	-	-	-
Asmat	2	-	2	12	15	27	-	1	1	-	-	-
Jumlah	19	25	44	62	74	136	7	9	16	0	0	0

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2022

Kecukupan tenaga dokter umum diketahui melalui rasio dokter umum terhadap penduduk yang dilayani. Pada tingkat provinsi, rasionya sebesar 1: 3806, atau 1 dokter umum melayani 3.806 penduduk. Sedangkan jika dipilah menurut kabupaten, rasio tertinggi terdapat di Kabupaten Boven Digoel dengan rasio 1 dokter untuk 1.903 penduduk. Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara Provinsi rasio dokter terhadap penduduk masih di bawah standar nasional sebesar 1: 2500, demikian pula secara kabupaten, hanya kabupaten Boven Digoel yang telah melampaui standar nasional. Berikut grafik yang menggambarkan jumlah serta rasio dokter umum terhadap penduduk pada tahun 2021.

Gambar II.53 Jumlah serta Rasio Dokter Umum Terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



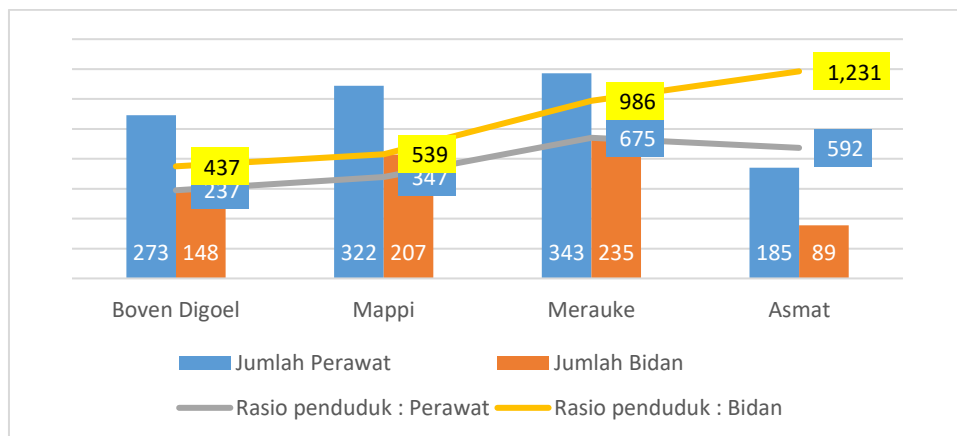
Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2023

B. Tenaga Keperawatan dan Kebidanan

Di tahun 2021, berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Papua, jumlah perawat di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan berjumlah 1.123 orang, atau memiliki rasio 1 perawat untuk 461 penduduk. Angka ini telah melampaui standar nasional jumlah perawat terhadap jumlah penduduk, yakni 1:855. Sedangkan jumlah bidan di wilayah Provinsi Papua Selatan sebanyak 679 orang. Angka ini sama dengan 1 bidan untuk 762 penduduk. Rasio ini juga telah melebihi standar jumlah minimal tenaga bidan terhadap jumlah penduduk yang ditetapkan secara nasional, yakni 1: 1000.

Dari grafik di bawah dapat dilihat bahwa jumlah tenaga keperawatan bukan saja telah memenuhi standar pada tingkat provinsi, namun juga pada ke-4 kabupaten di Papua Selatan. Sedangkan rasio bidan telah memenuhi standar minimal di tingkat provinsi, namun jika dipilah per kabupaten, maka nampak bahwa Kabupaten Asmat memiliki rasio bidan: penduduk di bawah standar, yakni 1: 1231. Distribusi tenaga perawat dan bidan di masing-masing kabupaten dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.xx**.

Gambar II.54 Jumlah serta Rasio Tenaga Perawat dan Bidan terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2023

C. Tenaga Kesehatan Lainnya

Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas promotif dan preventif untuk mendukung tugas pelayanan kesehatan masyarakat antara lain tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik dan tenaga gizi. Selain tenaga medis dan paramedis, ketenagaan puskesmas dinyatakan sesuai standar jika tersedia setidaknya 1 orang dari masing-masing jenis tenaga kesehatan ini di tiap puskesmas. Distribusi tenaga kesehatan preventif dan promotif ini cukup terdistribusi ke hampir semua kabupaten, namun kecukupan jumlahnya belum memenuhi kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan yang ada.

Data dari Profil Kesehatan Provinsi Papua yang dipublikasikan tahun 2023 menampilkan distribusi tenaga kesehatan di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Distribusi tenaga kesehatan yang dimaksud dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.xx**.

Tabel II.29 Distribusi Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif berdasarkan Jenisnya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker
Merauke	36	12	18	16	16	1	-	18	8
Boven Digoel	18	12	17	26	28	-	4	21	12
Mappi	36	6	12	26	27	2	7	22	8
Asmat	6	6	8	6	7	1	2	8	7
Jumlah	96	36	55	74	78	4	13	69	35

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2023

2.3.1.2.3 Kesehatan Keluarga A. Angka Kematian Ibu (AKI)

Definisi kematian ibu dalam indikator AKI ini adalah semua kematian selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam lingkup tersebut dengan denominator 1.000 atau 100.000 kelahiran hidup. Selain mewakili kondisi pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga menunjukkan derajat kesehatan masyarakat. Penghitungan AKI seringkali mengalami hambatan, karena selain jumlah kematian, diperlukan data yang valid mengenai jumlah kelahiran hidup dalam satu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ketersediaan data ini masih terbatas, karena sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak memadai.

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021, tercatat 24 kematian ibu dari 8.507 kelahiran hidup, sehingga diperoleh AKI Provinsi Papua Selatan tahun 2021 sebesar 282 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari angka nasional saat ini sebesar 189 (Sensus Penduduk 2020 – BPS RI), dan sangat mungkin angka sesungguhnya lebih tinggi karena terdapat kasus-kasus kematian yang tidak dilaporkan. Sedangkan jika dilihat distribusinya per kabupaten, terdapat rentang AKI yang cukup lebar, yakni dari 164 per 100.000 KH di Kabupaten Asmat hingga 491 per 100000 KH di Boven Digoel. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.xx.

Tabel II.30 Jumlah dan Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup (KH)	AKI Per 100.000 KH
Merauke	10	3698	270
Boven Digoel	7	1427	491
Mappi	4	1548	258
Asmat	3	1834	164
Jumlah	24	8507	282

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Mengenai penyebab Kematian Ibu, dari 24 kasus tersebut 6 di antaranya adalah perdarahan (25%). Sebab lainnya antara lain Infeksi (4 kasus atau 17%), sementara separuhnya (58%) tidak diketahui atau digolongkan sebagai sebab lainnya.

B. Pemeriksaan Kehamilan

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan menilai cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan kehamilan pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan K4 adalah pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali, dengan kriteria masing-masing 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama dan ke 2 serta 2 kali pemeriksaan pada trimester ke 3. Data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021 menunjukkan cakupan 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan untuk K1 sebesar 93,6% dan K4 sebesar 29,8%. Cakupan K4 Provinsi Papua Selatan ini jauh di bawah cakupan nasional pada tahun 2019 sebesar 88,5%.

Jika dilihat per kabupaten, Kabupaten Merauke memiliki jumlah ibu hamil paling banyak, dan juga cakupan K1 dan K4 tertinggi di antara 4 Kabupaten di Papua Selatan. Cakupan K1 dan K4 yang cukup rendah terdapat di Kabupaten Asmat. Terdapatnya angka cakupan di atas 100% menunjukkan adanya ketidaktepatan perkiraan jumlah ibu hamil sebagai target pelayanan ini. Tabel berikut menunjukkan informasi selengkapnya mengenai cakupan K1 dan K4.

Tabel II.55 Cakupan K1 dan K4 di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Ibu Hamil	K1		K4	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4,924	5,041	102.4%	2,058	41.8%
Boven Digoel	2,180	2,091	95.9%	768	35.2%
Mappi	3,033	3,393	111.9%	583	19.2%
Asmat	3,367	2,121	63.0%	620	18.4%
Jumlah	13,504	12,646	93.6%	4,029	29.8%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

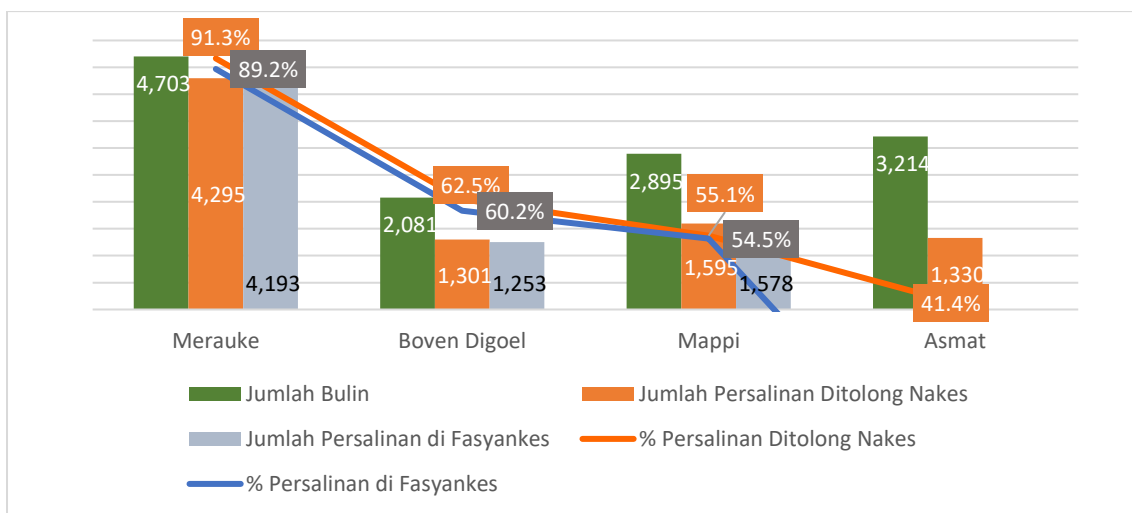
C. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Upaya lainnya dalam penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi adalah mendorong setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum, dan bidan, serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Secara umum cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Papua Selatan tahun 2021 cukup baik, yakni sebesar 66,1%, meskipun masih jauh di bawah target nasional sebesar 87%. Angka pertolongan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih rendah, yakni 54,5%.

Berdasarkan kabupaten, terdapat ketidaklengkapan data, namun informasi yang tersedia cukup menggambarkan kondisi pertolongan persalinan di 4 kabupaten di Papua Selatan. Terdapat perbedaan yang cukup tajam antara kabupaten Merauke dengan 3 kabupaten lainnya. Merauke memiliki cakupan pertolongan persalinan oleh nakes sebesar 91,3% dan dilakukan di fasilitas kesehatan sebesar 89,2%, sementara 3 kabupaten lainnya hanya mencapai paling tinggi 62,5% di antara kedua indikator tersebut. Gambar berikut menunjukkan perbedaan tersebut.

Gambar II.56 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022



Catatan: Data pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan untuk Kabupaten Asmat tidak valid sehingga tidak diperhitungkan

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

D. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Standar Pelayanan kesehatan ibu nifas dilakukan minimal tiga kali dengan jadwal yang dianjurkan, yakni pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF3). Pada tingkat provinsi, cakupan KF1, KF2 dan KF3 di 4 kabupaten se-Papua Selatan tahun 2021 berturut-turut 67,2%, 61,2% dan 54,5%. Data Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan pada tahun 2020 cakupan kunjungan nifas lengkap secara nasional 88,3%.

Capaian kunjungan nifas menurut kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021 ditampilkan pada Tabel II.xx. Berdasarkan data dari Dinkes tersebut nampak bahwa Kabupaten Merauke memiliki cakupan Kunjungan Nifas Lengkap di atas 76,1%, sedangkan 3 kabupaten lainnya memiliki cakupan antara 31% hingga 54%.

Gambar II.xx Cakupan Kunjungan Nifas Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

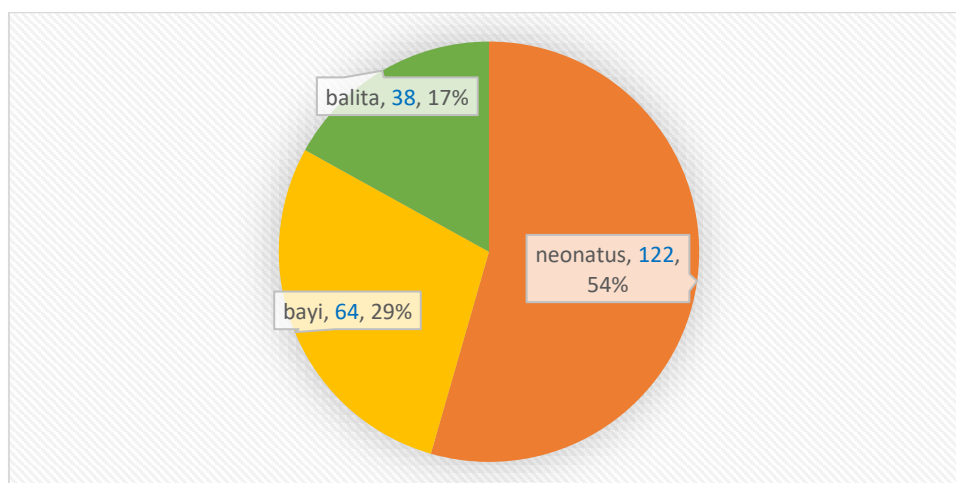
Kabupaten	Jumlah Bulin	KF1		KF2		KF3		Ibu Nivas dapat Vitamin A	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4,703	4,300	91.4%	3,939	83.8%	3,580	76.1%	4,303	91.5%
Boven Digoel	2,081	1,358	65.3%	1,021	49.1%	657	31.6%	1,329	63.9%
Mappi	2,895	1,669	57.7%	1,149	39.7%	1,047	36.2%	872	30.1%
Asmat	3,214	1,337	41.6%	1,786	55.6%	1,748	54.4%	243	7.6%
Jumlah	12,893	8,664	67.2%	7,895	61.2%	7,032	54.5%	6,747	52.3%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

E. Angka Kematian Anak

Dari Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 diketahui bahwa jumlah seluruh kematian anak di 4 Kabupaten berjumlah 224 kasus, terdiri dari 122 neonatus (0-28 hari), 64 bayi (29 hari – 11 bulan) dan 38 balita (12 – 59 bulan). Dengan angka-angka ini maka angka kematian anak di Provinsi Papua Selatan adalah 26,3 per 1000 persalinan. Angka ini jauh lebih tinggi dari pada angka nasional yang sudah mencapai 2,98 per 1000 persalinan. Proporsi kematian pada 3 kelompok umur anak ini digambarkan dalam Gambar II..

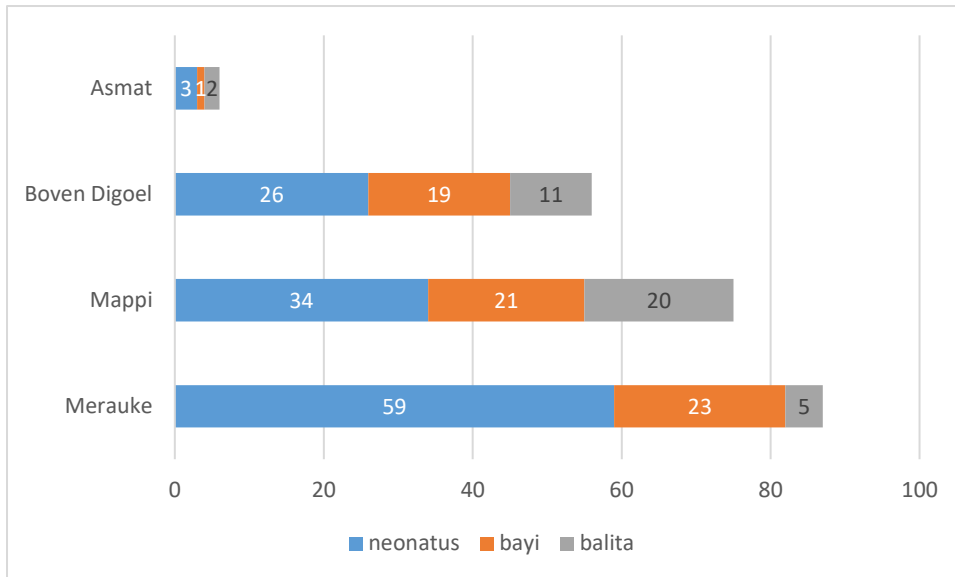
Gambar II.xx Jumlah dan Proporsi Kematian Anak Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Jika dipilah berdasarkan kabupaten, kematian anak terbanyak pada tahun 2021 dilaporkan di Kabupaten Merauke dengan 87 kasus. Sedangkan Kabupaten Asmat melaporkan sangat sedikit kasus kematian anak. Kemungkinan di daerah-daerah sulit ini pelaporan kasus kematian dari kampung ke tingkat administrasi pemerintahan yang lebih atas belum berjalan dengan baik. Berikut grafik yang menunjukkan hal tersebut.

Gambar II.57 Jumlah Kematian Anak Menurut Kabupaten Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Penyebab kematian neonatal pada tahun 2021 terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, sepsis, dan lainnya. Pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan, penyebab kematian terbanyak adalah diare, dan sebagian lainnya digolongkan sebagai “lain-lain”. Demikian juga pada kelompok anak balita (12 – 59 balita) penyebab kematian terbanyak adalah diare dan sebab lain-lain.

F. Kunjungan Neonatal

Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada masa neonatal (0-28 hari) antara lain dengan mengupayakan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Cakupan KN1 di 4 Kabupaten Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021 tergolong baik, yakni mencapai 84,6%, sedangkan cakupan KN3 sebesar 73,6%. Sebaran cakupan Kunjungan Neonatal berdasarkan kabupaten ditampilkan dalam Tabel II.xx.

Tabel II.xx Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4,349	3,983	91.6%	3,959	91.0%
Boven Digoel	1,605	1,452	90.5%	743	46.3%

Kabupaten	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Mappi	1,587	1,870	117.8%	999	62.9%
Asmat	1,877	662	35.3%	1,231	65.6%
Jumlah	9,418	7,967	84.6%	6,932	73.6%

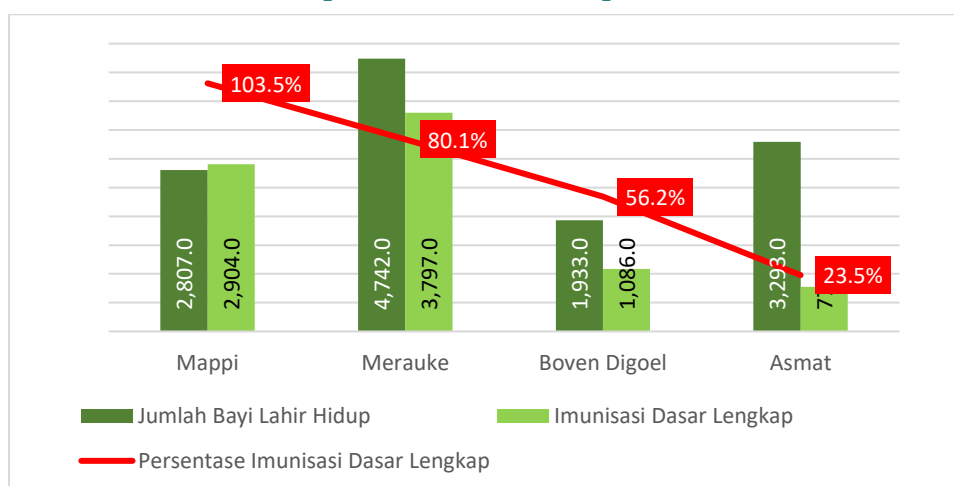
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Tabel II.xx menunjukkan bahwa cakupan KN1 dan KN3 yang tinggi mencapai di atas 90% terdapat di Kabupaten Merauke, serta K1 yang tinggi juga terdapat di Boven Digoel dan Mappi. Cakupan di Kabupaten Asmat tidak dapat dibandingkan karena ada ketidaksesuaian data yakni cakupan KN3 yang melebihi KN1. Adanya cakupan di atas 100% di Kabupaten Mappi menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah pembilang (jumlah lahir hidup)

G. Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization*)

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain Hepatitis B, TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio dan Campak. Program imunisasi mewajibkan setiap bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes (OPV), 1 dosis polio suntik (IPV) dan 1 dosis campak. Berdasarkan data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan sebesar 56,7%. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 92,2%. Gambar berikut menunjukkan cakupan IDL yang dimaksud. Grafik tersebut menunjukkan 2 kabupaten di Papua Selatan memiliki cakupan IDL di atas 80%, meskipun ada kemungkinan kesalahan jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Mappi, sehingga memiliki cakupan di atas 100%.

Gambar II.58 Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Mengenai *Universal Child Immunization* (UCI), menurut Profil Kesehatan Papua 2022, di Provinsi Papua Selatan telah terdapat 32,52% kampung/ kelurahan yang mencapai UCI. Yang dimaksud dengan kampung/ kelurahan UCI adalah kampung dengan cakupan minimal 85% bayinya memperoleh imunisasi dasar lengkap. Secara nasional, capaian desa/ kelurahan UCI adalah 59,2%. Pilihan per kabupaten menunjukkan rentang persentase Kampung/ kelurahan UCI antara 21,33% (Kabupaten Asmat) dan 44,51% (Kabupaten Mappi). Tabel berikut menunjukkan informasi selengkapnya.

Tabel II.31 Jumlah dan Persentase Kampung/ Kelurahan UCI Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

No.	Kabupaten	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Kampung/ Kelurahan UCI	% Kampung/ Kelurahan UCI
1	Merauke	192	78	40.63%
2	Boven Digoel	117	28	23.93%
3	Mappi	164	73	44.51%
4	Asmat	225	48	21.33%
Papua Selatan		698	227	32.52%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

H. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan balita meliputi antara lain pemantauan pertumbuhan (penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/ tinggi badan), Pemberian Makanan Tambahan dan pemberian kapsul vitamin A. Berdasarkan data LPPD Provinsi Papua 2021, pelayanan Kesehatan Balita di 4 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan baru mencapai 23,4% di tahun 2021. Angka yang sangat rendah bahkan belum melebihi 10%, yakni di Kabupaten Boven Digoel, sementara capaian tertinggi di Kabupaten Merauke baru mencapai 30,9%. Berikut tabel yang menunjukkan capaian tersebut per Kabupaten.

Tabel II.xx Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2021

No.	Kabupaten	Jumlah Balita			Pelayanan Kesehatan Balita					
					Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Merauke	10,640	10,711	21,351	3,330	31.3%	3,266	15.3%	6,596	30.9%
2	Boven Digoel	3,264	3,498	6,762	306	9.4%	267	3.9%	573	8.5%
3	Mappi	6,476	6,726	13,202	902	13.9%	1,102	8.3%	2,004	15.2%
4	Asmat	7,164	7,496	14,660	1,767	24.7%	2,159	14.7%	3,926	26.8%

Papua Selatan	27,544	28,431	55,975	6,305	22.9%	6,794	12.1%	13,099	23.4%
---------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

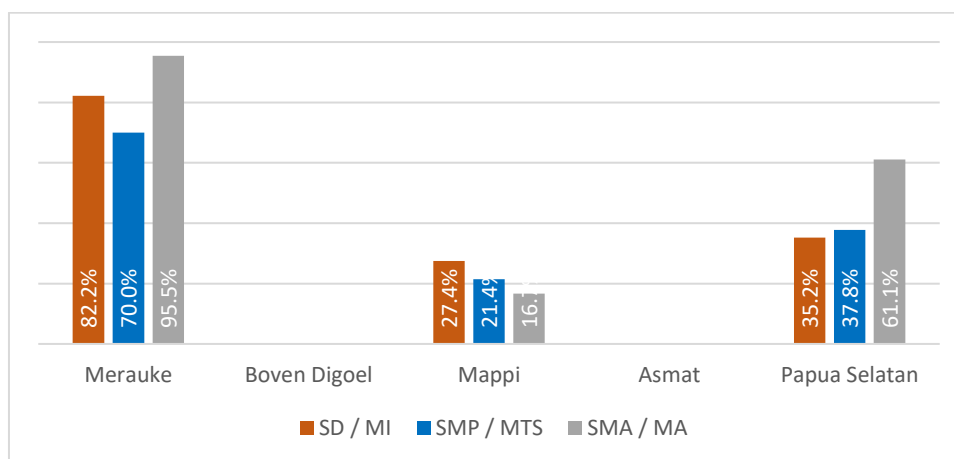
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022

I. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan UKS merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Tidak terdapat laporan yang lengkap mengenai cakupan sekolah di Provinsi Papua Selatan yang mendapat pelayanan kesehatan peserta didik dalam periode tahun 2018-2022. Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 menampilkan data dari 2 kabupaten saja, yakni Kabupaten Merauke dan Mappi. Data tersebut menunjukkan perbedaan yang lebar antara cakupan Kabupaten Merauke dan Mappi dalam ke-3 jenjang sekolah. Dari 2 kabupaten yang tersedia datanya, wilayah Provinsi Papua Selatan masih memiliki cakupan yang rendah, yakni mencakup 35,2% untuk tingkat SD/MI, 37,8% tingkat SMP/MTs dan 61,1% tingkat SMA/MA. Gambar berikut menampilkan cakupan pelayanan kesehatan sekolah di masing-masing kabupaten pada tahun 2021.

Gambar II.59 Persentase Sekolah dengan Pelayanan Kesehatan Sekolah Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

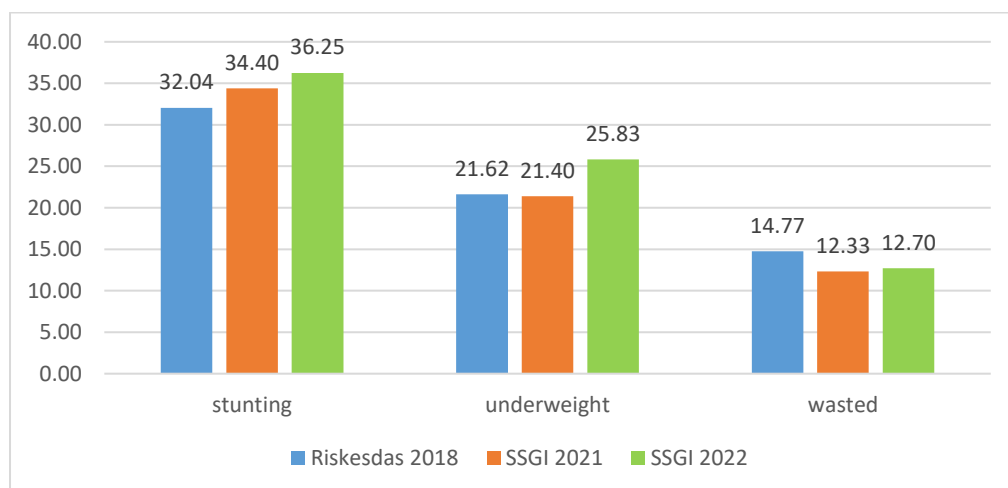
2.3.1.2.4 Gizi

Status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang atau Tinggi Badan (BB/PB atau TB). Pengukuran status gizi ini didasarkan atas standar World Health Organization tahun 2005. Indeks yang biasa digunakan di fasilitas kesehatan saat ini adalah BB/U untuk menilai gizi buruk atau gizi kurang dan indeks TB/U untuk menilai kondisi anak stunting.

Data mengenai kondisi gizi anak di 4 kabupaten Provinsi Papua Selatan yang dijadikan acuan dalam pembahasan ini adalah hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI tahun 2021 dan 2022. Perbandingan kondisi gizi dari tahun ke tahun berdasarkan ke-3 survey ini menunjukkan bahwa kondisi gizi balita di Provinsi Papua Selatan tidak membaik dalam 4 tahun terakhir. Terjadi peningkatan angka rata-rata kabupaten baik untuk balita dengan berat badan kurang (*underweight*) maupun tinggi badan kurang (*stunting*).

Gambar II.xx di bawah ini menunjukkan prevalensi balita pendek berdasarkan TB/U, balita kurang berat badan berdasarkan BB/U dan balita kurus berdasarkan BB/TB tahun 2018, 2021 dan 2022. Secara rata-rata kabupaten, nampak bahwa persentase balita dengan masalah gizi cenderung meningkat menggunakan ke-3 indeks pengukuran atatus gizi,

Gambar II.60 Persentase Balita Stunting, *Underweight* dan *Wasted* di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022

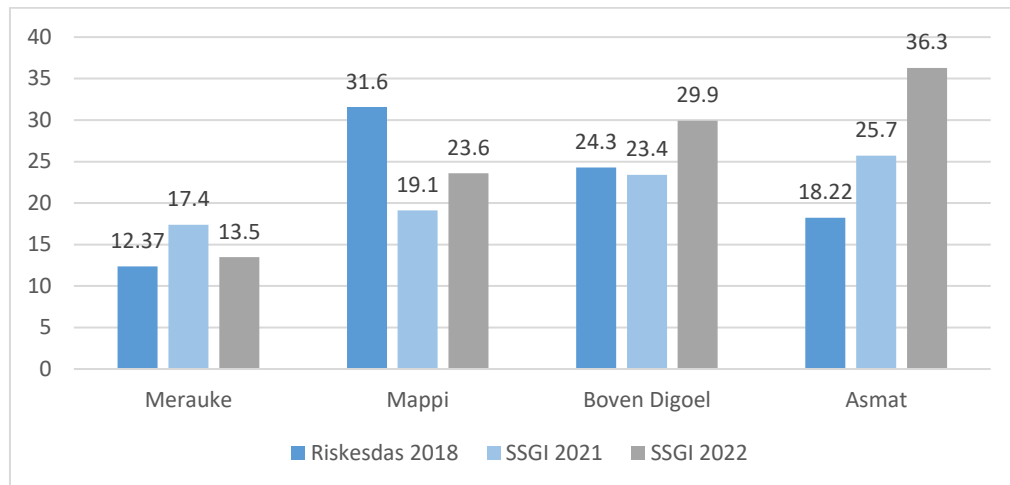


Sumber: Riskesdas 2018, SSGI 2021 dan 2022

Mengenai stunting, berdasarkan SSGI 2022 didapatkan angka rata-rata kabupaten untuk balita stunting sebesar 36,3%. Angka rata-rata kabupaten ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 32,0% (Hasil Riskesdas 2018) dan 34,4% (SSGI 2021). Kabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Asmat memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi (54,5%) di tahun 2022. Uraian mengenai stunting ini diuraikan di muka pada Sub Bab 2.2.2.2 Fokus Kesehatan.

Kondisi yang serupa juga terjadi pada hasil pengukuran status gizi berdasarkan BB/U, untuk menentukan gizi kurang dan gizi buruk pada balita (*underweight*). Secara rata-rata kabupaten, prevalensi balita *underweight* pada tahun 2018, 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, yakni berturut-turut 21.62%, 21.40% dan 25.83%. Gambar berikut menampilkan prevalensi balita *underweight* berdasarkan kabupaten.

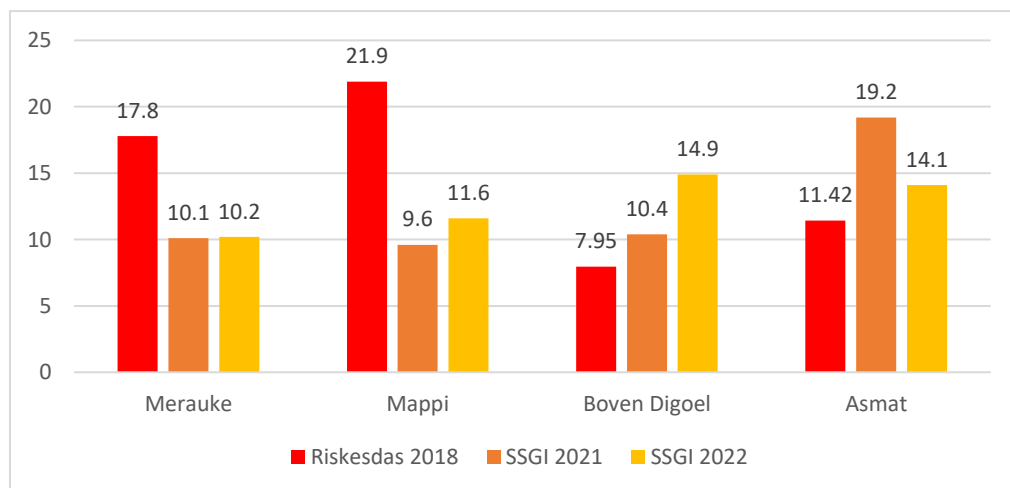
Gambar II. xx Persentase Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk (*underweight*) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022



Sumber: Riskedas 2018, SSGI 2021 dan 2022

Pengukuran status gizi berdasarkan indeks BB/TB atau balita kurus (*wasted*) menunjukkan persentase yang lebih rendah dibandingkan 2 indeks pengukuran lainnya. Berturut-turut pada tahun 2018, 2021 dan 2022 prevalensi balita kurus di rata-rata kabupaten di Provinsi Papua selatan adalah 14.77%, 12.33% dan 12.70%. Dengan indeks pengukuran ini, Kabupaten Mappi pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi tertinggi. Berikut gambar yang menunjukkan perbandingan antar kabupaten mengenai prevalensi balita kurus tersebut.

Gambar II.61xx Persentase Balita Kurus (*Wasted*) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022



Sumber: Riskedas 2018, SSGI 2021 dan 2022

2.3.1.2.5 Pengendalian Penyakit

A. Penyakit Menular

Tuberkulosis merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Secara global, diperkirakan 10 juta orang menderita TB pada tahun 2019 dan Indonesia berada pada peringkat ke-2 dengan penderita TB tertinggi di dunia setelah India. Keberhasilan penanganan

tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB (*Treatment Coverage, TC*). Pada tahun 2020 belum ada provinsi di Indonesia yang mencapai angka TC \geq 80%, dengan rata-rata nasional baru mencapai 41,7%. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate, TSR*) secara nasional baru mencapai 82,7%, masih di bawah target yang ditetapkan renstra Kementerian Kesehatan untuk indikator ini pada tahun 2020 yaitu sebesar 90%.

Upaya penanggulangan Tb di Papua Selatan masih menghadapi banyak tantangan. Pada tahun 2021, dalam lingkup provinsi TC baru mencapai 39%. Sedangkan TSR cukup baik, yang mencapai 81,5%. Berdasarkan kabupaten, TC yang masih rendah terdapat di Kabupaten Boven Digoel dan Asmat, sedangkan TSR umumnya menunjukkan capaian yang baik, kecuali di kabupaten Asma yang baru mencapai 55,0%. Tabel berikut menunjukkan capaian TC dan TSR berdasarkan kabupaten di Papua Selatan.

Tabel II.xx TC dan TSR Tuberkulosis Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

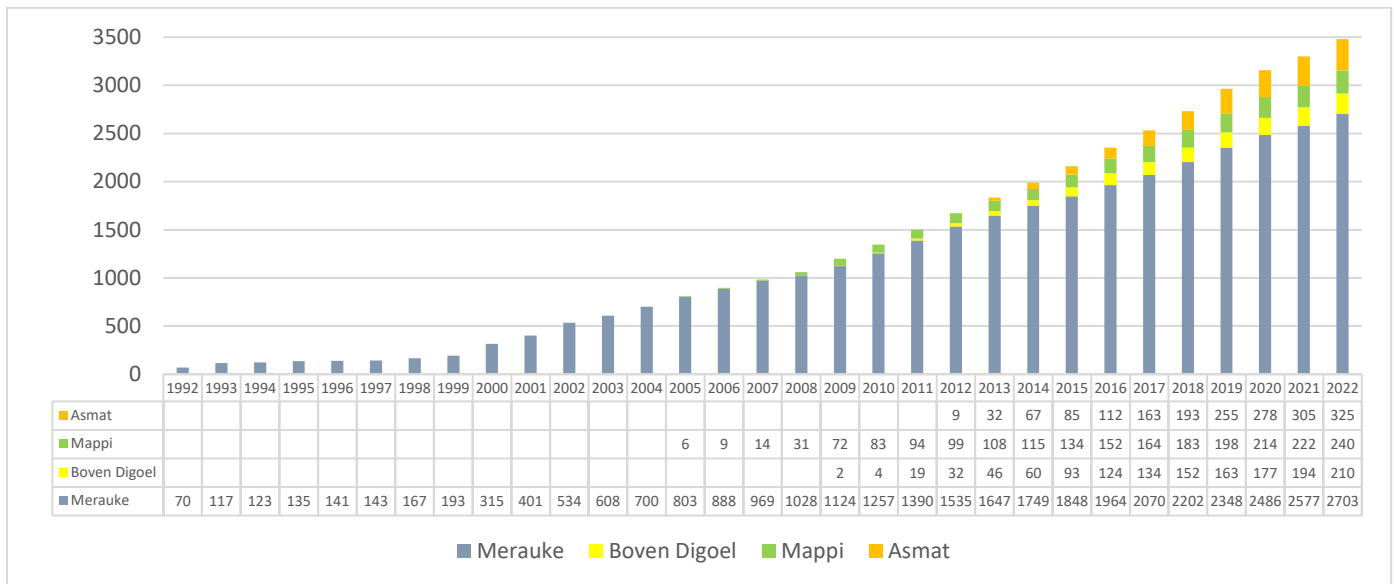
Kabupaten	Jumlah Kasus Terduga Tb	<i>Treatment Coverage</i>		<i>Treatment Success Rate</i>	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	2,175	995	46%	840	84.4%
Boven Digoel	1,422	363	26%	321	88.4%
Mappi	2,249	1,103	49%	953	86.4%
Asmat	1,510	404	27%	222	55.0%
Papua Selatan	7,356	2,865	39%	2,336	81.5%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua, 2022

HIV-AIDS

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua menunjukkan hingga akhir tahun 2022 di wilayah Provinsi Papua Selatan secara kumulatif telah tercatat 2703 kasus HIV-AIDS. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten pertama di Papua yang melaporkan kasus AIDS di tahun 1992. Sementara kabupaten lain baru melaporkan kasus-kasus pertama pada tahun 2005 (Mappi), 2009 (Boven Digoel) dan 2012 (Asmat). Perkembangan kasus HIV-AIDS di Provinsi Papua Selatan sejak tahun 1992 hingga 2022 ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar II.62 Perkembangan Jumlah Kumulatif Kasus HIV-AIDS di Papua Selatan, 1992 - 2022



Sumber: Unit Pelaksana Teknis AIDS Tuberkulosis Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan 2023

Pada tahun 2021, ODHA yang sedang dalam pengobatan ARV di Papua Selatan mencakup 58,0%, dengan angka tertinggi di Kabupaten Merauke; 81,4%. Kabupaten Asmat menduduki urutan terbawah dengan cakupan ODHA dengan pengobatan ARV hanya 11,6%. Sedangkan Kabupaten Boven Digoel dan Mappi masing-masing mencapai angka 28,4% dan 21,9%.

Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh virus, jamur dan bakteri. Program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita, yang ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Cakupan penemuan pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 34,8% dari angka perkiraan kasus (3,55% dari jumlah balita). Tidak tersedia data yang lengkap untuk Provinsi Papua Selatan. Data LPPD Provinsi Papua 2021 menampilkan data 2 kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel dengan cakupan penemuan kasus masing-masing sebesar 34% dan 5%.

Diare

Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Secara nasional, pada tahun 2020 cakupan pelayanan penderita diare pada balita sebesar 28,9% dari sasaran yang ditetapkan. Sedangkan capaian provinsi Papua Selatan untuk balita cukup baik yakni sebesar 39,8%. Sementara untuk pelayanan pada semua umur, Papua Selatan mencapai 15,1%. Berikut tabel yang

menunjukkan cakupan pelayanan diare berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021

Tabel II.xx Cakupan Pelayanan Kasus Diare Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Target Penemuan Kasus		Pelayanan Balita		Pelayanan Semua Umur	
	Balita	Semua Umur	Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	3,600	23,520	791	22.0%	1,823	7.8%
Boven Digoel	1,140	7,002	834	73.2%	1,699	24.3%
Mappi	2,226	10,161	981	44.1%	2,185	21.5%
Asmat	2,472	10,135	1,149	46.5%	1,958	19.3%
Papua Selatan	9,438	50,818	3,755	39.8%	7,665	15.1%

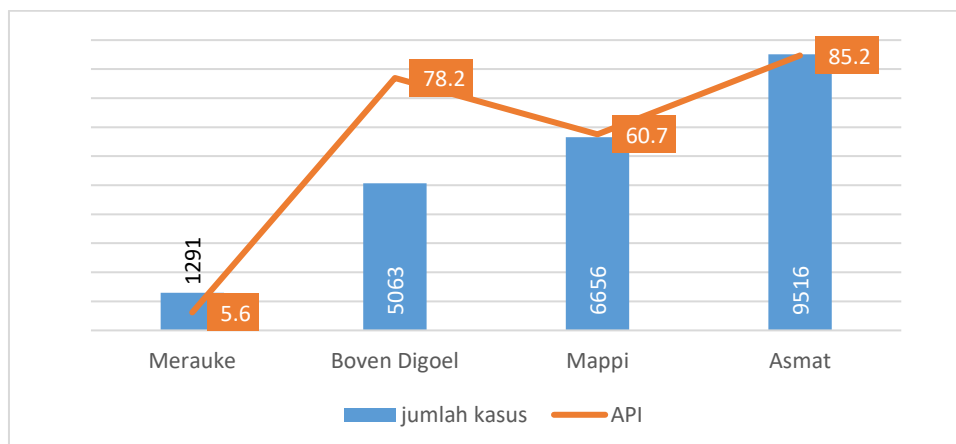
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022

Malaria

Angka Kesakitan Malaria digambarkan dengan indikator *Annual Parasite Incidence (API)* per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk di wilayah tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir API nasional di bawah 1 per 1.000 penduduk, termasuk pada tahun 2020 yang sebesar 0,94%.

Di Provinsi Papua Selatan, API masih tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata dari 4 kabupaten pada tahun 2021 sebesar 43,5 per 1.000 penduduk. Sedangkan jika dipilah per Kabupaten, hanya kabupaten Merauke yang memiliki API cukup rendah (5,6 per 1000 penduduk), sementara 3 kabupaten lainnya memiliki API di atas 50 per 1000 penduduk). Berikut gambar yang menunjukkan API per kabupaten di Papua Selatan tahun 2021.

Gambar II.xx Jumlah Kasus dan Annual Paracite Incidence (API) Malaria per 1.000 penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua, 2022

Mengenai penanganan kasus, pada tingkat Provinsi, angka *Slide Positivity Rate* (SPR) atau persentase kasus positif dari semua sediaan darah yang diperiksa laboratorium pada tahun 2021 sebesar 31,7%. Angka SPR yang sangat tinggi terdapat di Kabupaten Boven Digoel, Sementara kasus positif malaria yang ditangani sesuai standar pada tingkat provinsi mencapai 88,5%. Kabupaten Mappi mencapai 100% untuk capaian pengobatan kasus sesuai standar, sedangkan Kabupaten Asmat hanya 76,0%. Berikut tabel mengenai penanganan kasus malaria di Provinsi Papua Selatan


Tabel II.xx Cakupan Penanganan Kasus Malaria Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Kasus Diperiksa Laboratorium	Jumlah Kasus Positif	% Kasus Positif	Jumlah Kasus Diobati Sesuai Standar	% Pengobatan Standar
Merauke	14,856	1,291	8.7%	1,158	89.7%
Boven Digoel	6,070	5,063	83.4%	4,892	96.6%
Mappi	27,770	6,656	24.0%	6,656	100.0%
Asmat	22,371	9,516	42.5%	7,228	76.0%
Papua Selatan	71,067	22,526	31.7%	19,934	88.5%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua, 2022

B. Penyakit Tidak Menular (PTM)

Data mengenai PTM di Provinsi Papua Selatan tidak tersedia secara lengkap. LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 menampilkan data mengenai cakupan pelayanan penderita Hipertensi, Diabetes Mellitus dan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat hanya pada 2



kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel. Berikut data yang dapat menjadi gambaran tentang situasi pelayanan PTM di Provinsi Papua Selatan:

1. Penderita Hipertensi yang mendapat pengobatan dari estimasi jumlah kasus Hipertensi Berusia ≥ 15 Tahun:
 - Kabupaten Merauke: 84,66%
 - Kabupaten Boven Digoel: 81,39%
2. Penderita Diabetes Melitus yang mendapat pengobatan dari estimasi jumlah kasus:
 - Kabupaten Merauke: 44,58%
 - Kabupaten Boven Digoel: 41,88%
3. Penderita ODGJ Berat yang mendapat pengobatan dari estimasi jumlah kasus:
 - Kabupaten Merauke: 87,55%
 - Kabupaten Boven Digoel: 48,98%

2.3.1.2.6 Kesehatan Lingkungan

A. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Upaya yang dilakukan adalah mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 285 dari 324 kabupaten/kota yang ditargetkan dapat menerapkan KTR, atau baru 54,3% dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Papua Selatan sendiri penerapan KTR ini belum berjalan dengan baik.

B. Tempat Tempat Umum (TTU)

Yang dimaksud dengan TTU adalah tempat-tempat umum yang mencakup Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Tempat Ibadah, Pasar dan sebagainya. Upaya Kesehatan yang dijalankan adalah dengan pembinaan TTU agar memenuhi syarat-syarat kesehatan. Di wilayah provinsi Papua Selatan, Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022 hanya menampilkan data tentang persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan dari 3 kabupaten, antara lain: Merauke 79,9%, Boven Digoel 57,3% dan Mappi 5,2%. Angka-angka ini menunjukkan upaya kesehatan lingkungan ini belum menunjukkan capaian yang tinggi.

C. Kabupaten/Kota Sehat

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 111 kabupaten/kota (21,6%). Jumlah ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu 110 KKS. Sedangkan sebanyak 22 Provinsi hingga tahun 2020 belum menyelenggarakan KKS, termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

2.3.1.2.7 Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang membagi kepesertaan JKN menjadi 2 kelompok, yaitu (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari oleh pemerintah. (2) Bukan PBI jaminan kesehatan, yang terdiri dari Pekerja maupun Non Pekerja beserta keluarganya.

Data mengenai kepesertaan JKN ini tidak tersedia secara lengkap untuk wilayah Provinsi Papua Selatan. Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 hanya menampilkan data dari 2 kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel, dengan masing-masing cakupan JKN sebesar 109,6% dan 114,5%. Dari keseluruhan peserta itu, sebagian besar merupakan peserta PBI, yakni 85,5% di Kabupaten Merauke dan 86,4% di Kabupaten Boven Digoel.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Tabel II.32 menunjukkan proporsi Panjang jaringan jalan di Provinsi Papua tahun 2017-2021. Data menunjukkan terdapat peningkatan panjang jalan dari kualitas rusak berat menjadi kualitas sedang dan rusak ringan. Pada tahun 2021, panjang jalan dengan kualitas sedang dan rusak ringan meningkat sebesar 270% dan 170%. Jumlah jalan dengan kualitas rusak berat mengalami penurunan jumlah sebesar 60%. Sementara proporsi kualitas jalan dari dominasi kualitas jalan rusak berat sebesar lebih dari 50% mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 21% diiringi dengan peningkatan proporsi jalan kualitas rusak ringan dan sedang dari 12% dan 18% menjadi 32,4% dan 30,2%.

Tabel II.32 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jaringan Jalan di Provinsi Papua Selatan 2018-2022

Kondisi Jalan		2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan (km)	Baik	950,835	878,639	865,841	797,419	831,496
	Sedang	616,761	626,761	569,686	1711,784	1668,254
	Rusak	915,856	1050,685	884,337	1576,214	1555,086
	Rusak Berat	2482,53	2409,878	2653,439	1069,991	1100,572
Persentase	Baik	19,1%	17,7%	17,4%	15,5%	16,1%
	Sedang	12,4%	12,6%	11,5%	33,2%	32,4%
	Rusak	18,4%	21,2%	17,8%	30,6%	30,2%
	Rusak Berat	50,0%	48,5%	53,4%	20,8%	21,3%
Total		4965,982	4965,963	4973,303	5155,408	5155,408

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten, 2022 (dalam dokumen Kabupaten dalam Angka 2022)

Tabel II.33 menunjukkan kondisi jaringan jalan kabupaten/ kota Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.33 diketahui bahwa Kabupaten Asmat memiliki jalan dengan kualitas rusak berat terpanjang dan proporsi terbanyak (32%). Sementara Kabupaten Boven Digoel memiliki jalan dengan kualitas rusak (ringan) terpanjang dan proporsi terbanyak. Perbaikan jalan pada kedua kabupaten ini menjadi salah satu pilihan prioritas dalam percepatan peningkatan akses jalan dan serta memudahkan pelaksanaan pembangunan.

Tabel II.33 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan 2022

No	Kabupaten	Panjang jalan tiap Kondisi Jaringan Jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
1	Merauke	367,35	642,00	155,57	148,95
2	Boven Digoel	138,74	180,72	945,20	3,28
3	Mappi	69,1	845,6	109	61,86
4	Asmat	256,31	-	345,32	284,85

Sumber: BPS Kabupaten, 2022 (dalam dokumen Kabupaten dalam Angka 2022)

2.3.1.3.3 Sanitasi Layak

Sistem sanitasi mencakup sistem pengolahan air limbah dan irigasi merupakan sistem yang harus disediakan secara optimal baik dalam lingkup publik maupun rumah tangga. Utamanya dalam lingkup rumah tangga, penyediaan sanitasi yang layak merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan tempat tinggal yang sehat. Terkelolanya sistem pengolahan air limbah menghindarkan wabah dan penyakit terutama terkait kesehatan pencernaan dan kulit dari lingkungan masyarakat. Tabel II.34 menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat memerlukan peningkatan sistem sanitasi yang layak. Data 2017-2020 menunjukkan kurang dari 50% rumah tangga di Kabupaten Mappi dan Asmat yang memiliki sanitasi yang layak.

Tabel II.34 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	57,15	64,56	80,34	74,02	78,24
Boven Digoel	41,30	34,72	63,25	66,37	56,78
Mappi	26,79	16,89	25,06	26,19	38,11
Asmat	13,11	0,57	6,84	23,28	30,36
Rata-rata 4 kabupaten	34,59	29,19	43,87	47,47	50,87

Sumber: Statistik Provinsi Papua Dalam Angka 2023

Prioritas peningkatan pelayanan sanitasi layak didukung oleh data yang ditunjukkan pada Tabel II.35. Di Kabupaten Mappi dan Asmat terdapat 33,61% dan 36,58% rumah tangga yang tidak terdapat fasilitas sanitasi layak. Sementara penggunaan fasilitas tempat buang air besar mayoritas menggunakan fasilitas pribadi, data sebelumnya menunjukkan kurangnya kelayakan fasilitas sanitasi pada lingkungan rumah tangga.

Tabel II.35 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 2022

Kabupaten	Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada
Merauke	79,02	5,94	4,67	0,04	10,32
Boven Digoel	69,57	3,24	1,00	1,04	25,14
Mappi	53,79	4,98	6,65	1,06	33,61
Asmat	47,87	10,55	4,62	0,39	36,58

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

2.3.1.3.3 Sumber Air Minum Layak

Ketersediaan sumber air minum yang layak menjadi syarat pengembangan suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum, air minum merupakan air yang layak dapat diminum dengan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan. Tabel II.36 menunjukkan penurunan rata-rata ketersediaan sumber air minum layak dari 77% pada tahun 2018 menjadi 72% pada tahun

2022. Penurunan ketersediaan air minum layak terjadi di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Kecuali Kabupaten Asmat.

Tabel II.36 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	84,45	24,79	29,67	71,35	77,32
Boven Digoel	72,05	17,08	36,22	64,50	61,98
Mappi	56,28	29,79	23,58	48,66	49,69
Asmat	94,79	87,78	91,81	98,67	97,97
Rata-rata	76,89	39,86	45,32	70,80	71,74

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

Sumber Air minum rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan adalah air kemasan bermerek terutama di Kabupaten Merauke (68%) dan Boven Digoel (37,36%). Sementara sumber air minum utama di Kabupaten Mappi adalah sumur tak terlindung (29,2%) dan Kabupaten Asmat adalah Air hujan (86,9%).

Tabel II.37 Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Utama, 2022

Kategori	Kabupaten			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Air Kemasan Bermerk/ Isi Ulang	68	37,36	11,51	11,93
Leding	0,32	0,78	0	0
Sumur Bor/ Pompa	2,85	13,18	0,27	0
Sumur Terlindung	6,42	4,01	18,8	0
Sumur Tak Terlindung	8,6	20,55	29,2	0
Mata Air Terlindung/Tak Terlindung	1,32	12,97	12,91	0
Air Permukaan	1,38	0,76	5,7	1,98
Air Hujan	11,1	10,38	21,62	86,09
Lainnya	0	0	0	0

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan papan dasar. Capaian kesejahteraan dan kelayakan hunian di daerah menggunakan tolak ukur kuantitas dan kualitas tempat hunian. Tinjauan kelayakan hunian melihat tiga komponen dalam bangunan hunian yaitu persentase hunian berdasarkan jenis atap, tembok, dan lantai terluas.

Tabel II.38 menunjukkan persentase hunian untuk tiap jenis atap terluas hunian. Mayoritas atap hunian di Papua Selatan menggunakan atap seng untuk huniannya dengan persentase rata-rata sekitar 83% hunian di Papua Selatan. Jenis atap lainnya dengan jumlah penggunaan yang signifikan adalah atap berjenis jerami. Jenis ini secara signifikan digunakan pada hunian di Kabupaten Mappi (20,66%) dan Asmat (13,93%).

Tabel II.38 Persentase Rumah Tangga Kabupaten/ Kota dan Jenis Atap Terluas 2022

Kabupaten	Beton	Genteng	Asbes	Seng	Bambu	Kayu	Jerami	Lainnya
Merauke	0,09	3,11	2,07	92,18	0,08	0,00	2,24	0,23
Boven Digoel	0,00	1,10	0,19	81,46	0,00	0,06	11,00	0,28
Mappi	0,00	1,38	0,00	77,52	1,00	0,19	20,66	0,25
Asmat	0,00	0,50	0,00	81,46	1,48	2,56	13,93	0,06
Rata-rata	0,00	1,50	0,60	83,20	0,60	0,70	12,00	0,20

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

Tabel II.39 menunjukkan persentase hunian untuk tiap jenis tembok hunian. Mayoritas tembok hunian di Papua Selatan menggunakan jenis tembok kayu atau papan dengan rata-rata proporsi sebesar 60,45%. Penggunaan tembok papan terbanyak dengan proporsi 90% terdapat di Kabupaten Asmat. Sementara penggunaan tembok berjenis Tembok dengan rata-rata proporsi sebesar 36% menempati urutan kedua jenis tembok di Papua Selatan.

Tabel II.39 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, 2022

Kabupaten	Tembok	Plasteran Anyaman Bambu	Kayu/ Papan	Anyaman Bambu	Batang Kayu	Bambu	Lainnya
Merauke	63,34	0,01	33,81	0,82	0	0,41	1,61
Boven Digoel	41,32	0,27	57,02	0,49	0,16	0	0,73
Mappi	42,75	0	50,08	1,36	0	0,75	5,06
Asmat	0	0	90,90	0,25	0,78	0,14	7,93
Rata-rata	36,85	0,07	57,95	0,73	0,24	0,33	3,83

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

Tabel II.40 menunjukkan persentase hunian untuk tiap jenis lantai hunian. Hunian di Papua Selatan menggunakan beragam jenis bahan dengan proporsi yang cukup signifikan untuk tiap jenis bahannya. Mayoritas jenis lantai yang digunakan pada hunian di Papua Selatan adalah jenis kayu/papan (45,53%). Di Kabupaten Asmat hampir seluruh huniannya menggunakan lantai berjenis kayu (99%). Sementara jenis lantai dengan penggunaan yang signifikan lainnya di Papua Selatan adalah lantai dengan bahan semen/ bata merah (29%) dan berjenis keramik (15,66%).

Tabel II.40 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Terluas, 2022

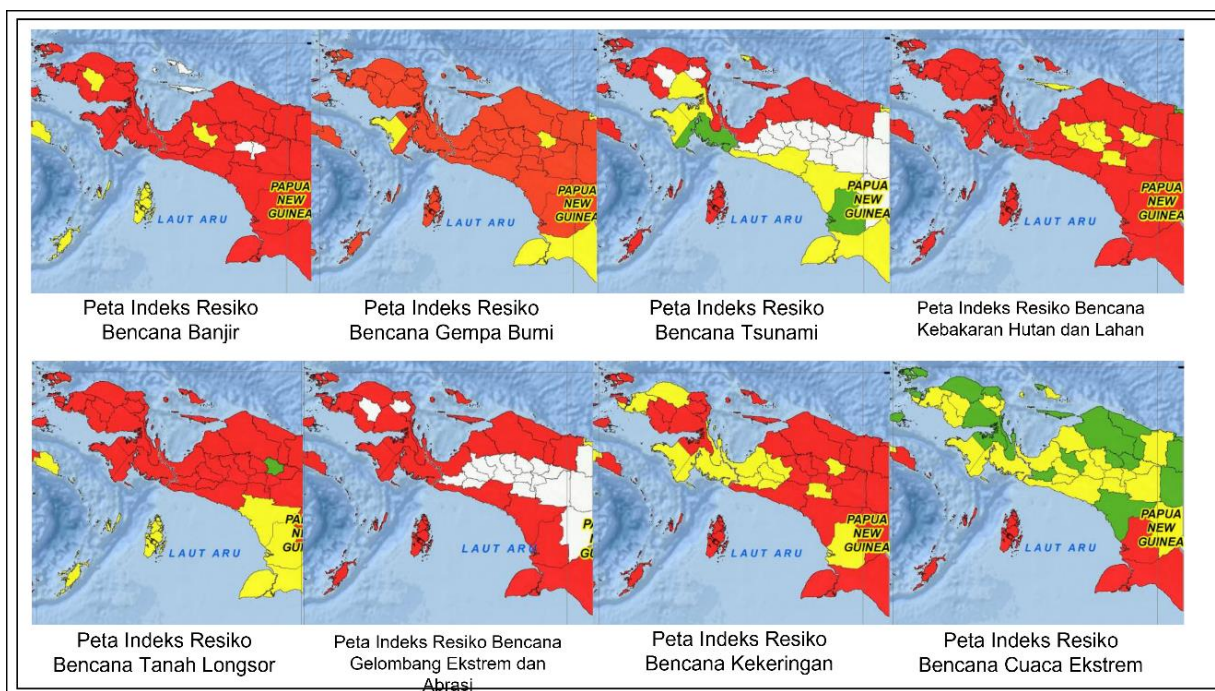
Kabupaten	Marmor/ Granit	Keramik	Parket/Vinil/Karpet, Ubin/Tegel/Teraso	Kayu/papan	Semen/Bata	Bambu	Tanah	Lainnya
Merauke	1,07	28,15	11,06	22,14	32,76	0,25	4,37	0,2
Boven Digoel	0,26	25,43	2,56	26,73	40,1	0,33	0,23	4,36
Mappi	2,55	9,07	3,49	34,22	45,67	1,09	2,19	1,71
Asmat	0,08	0	0,33	99,04	0	0,27	0,27	0
Rata-rata	0,99	15,66	4,36	45,53	29,63	0,49	1,77	1,57

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang terjadi pada suatu daerah yang mengakibatkan adanya kondisi yang kurang kondusif baik ini disebabkan bencana alam maupun konflik social, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan aktifitas dalam mengantisipasi, menekan dan menyelesaikan kondisi tersebut. Adapun Kondisi keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Selatan dapat dilihat pada gambar Peta Indeks Resiko Bencana dibawah ini :

Gambar II.63 Peta Indeks Tiap Risiko Bencana Kabupaten dan Kota Tahun 2022



Sumber: BNPB, 2023

Adapun Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penanganan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Konflik adalah proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal. Berdasarkan Tabel II.41 diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 42 kampung/kelurahan atau 6,12% dari total kampung/kelurahan di Papua Selatan telah menjadi lokasi perkelahian massal. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, terdapat variasi jumlah kejadian perkelahian massal pada tahun 2021. Kabupaten Merauke merupakan daerah dengan lokasi perkelahian paling banyak yaitu 20 kampung/kelurahan atau 10,53% dari jumlah kampung/kelurahan di Kabupaten Merauke. Wilayah dengan lokasi perkelahian massal terendah adalah Kabupaten Mappi yaitu 4 kampung/kelurahan.

Tabel II.41 Jumlah dan Persentase Kampung/Kelurahan Berdasarkan Jenis Perkelahian Massal di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kategori		Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Kampung/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal	Jumlah	20	4	4	14	42
	%	10,53	3,60	2,44	6,33	6,12
Jumlah kampung/kelurahan menurut Jenis	Perkelahian antar kelompok masyarakat	16	4	3	14	37

Kategori		Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
kejadian perkelahian massal	Perkelahian Kelompok Masyarakat Antar Kampung/ Kelurahan	3	0	0	0	3
	Perkelahian Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan	2	0	0	0	2
	Perkelahian Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah	1	0	0	1	2
	Perkelahian Pelajar/ Mahasiswa	0	0	0	0	0
	Perkelahian Antar Suku	1	0	0	0	1
	Perkelahian lainnya	1	0	1	0	2

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021

Dalam upaya menanggulangi isu konflik Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (sepaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial). Selain itu, terdapat strategi yang dinilai lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Tabel II.42 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021

Inisiator	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan	
					Jumlah	%
Aparat keamanan	10	1	3	3	17	28,33
Aparat pemerintah	5	4	1	6	16	26,67
Tokoh masyarakat	7	4	2	11	24	40,00
Tokoh agama	0	0	0	0	0	0,00
Lainnya	2	0	0	0	2	3,33
Tidak ada inisiator	0	0	0	1	1	1,67

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021

Tabel II.42 menunjukkan inisiator yang aktif dalam menyelesaikan perkelahian massal di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.42 dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat merupakan inisiator yang penting dalam penyelesaian konflik di Provinsi Papua Selatan dengan cakupan penyelesaian konflik di 24 kampung/kelurahan atau 40% dari lokasi kejadian perkelahian massal. Aparat keamanan menempati urutan ke-2 sebagai inisiator penyelesaian konflik, sedangkan aparat pemerintah menempati urutan ke-3.

2.3.1.6 Sosial

2.3.1.6.1 Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Undang-Undang No 40 Tahun 2004). Jaminan sosial (*social security*) merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial (*social welfare system*) dan diberikan kepada masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko ketunaan, kematian, ketidakmampuan dan pengangguran.

Berdasarkan Tabel II.43 diketahui bahwa cakupan seluruh program jaminan sosial di Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan peninjauan terhadap kabupaten pada tahun 2022, diketahui bahwa kabupaten yang memiliki cakupan jaminan sosial paling tinggi adalah Kabupaten Boven Digoel, baik untuk jaminan pensiun/veteran (11,93%), jaminan hari tua (12,24%), jaminan asuransi kecelakaan kerja (12,47%), jaminan/asuransi kematian (11,80%), maupun pesangon pemutusan hubungan kerja (6,97%).

Tabel II.43 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kategori	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Jaminan Pensiun/ Veteran	Merauke	12,42	7,06	10,41	11,65	9,80
	Boven Digoel	13,59	12,66	11,91	10,23	11,93
	Mappi	1,12	0,44	1,07	0,02	5,14
	Asmat	1,84	2,17	3,40	5,24	0,41
	Rata-rata 4 Kabupaten	7,24	5,58	6,70	6,79	6,82
Jaminan Hari Tua	Merauke	7,63	4,01	4,67	4,95	5,41
	Boven Digoel	19,91	11,73	10,63	27,54	12,24
	Mappi	0,27	0,02	0,64	0,02	5,23
	Asmat	1,81	1,82	2,36	5,16	0,24
	Rata-rata 4 Kabupaten	7,41	4,40	4,58	9,42	5,78
Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja	Merauke	6,17	5,22	3,46	6,15	5,48
	Boven Digoel	19,38	17,17	15,80	28,17	12,47
	Mappi	0,27	0,00	0,60	0,00	5,48
	Asmat	1,33	2,25	2,11	4,73	0,00
	Rata-rata 4 Kabupaten	6,79	6,16	5,49	9,76	5,86
Jaminan / Asuransi /Kematian	Merauke	5,89	3,09	3,03	5,26	6,02
	Boven Digoel	16,60	16,89	9,89	27,94	11,80
	Mappi	0,27	0,00	0,39	0,00	5,14
	Asmat	0,83	1,65	2,07	4,83	0,24
	Rata-rata 4 Kabupaten	5,90	5,41	3,85	9,51	5,80
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Merauke	2,93	2,28	2,61	2,84	2,44
	Boven Digoel	16,77	13,78	7,02	7,54	6,97
	Mappi	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	Asmat	0,18	1,50	0,75	1,07	0,00
	Rata-rata 4 Kabupaten	4,97	4,39	2,63	2,86	2,35

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2022 (dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua")

2.3.1.6.2 Bantuan Sosial

Penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran, yaitu mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatan. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui bantuan sosial yang merupakan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Undang-Undang No 40 Tahun

2004). Bentuk bantuan sosial yang dibahas dalam subbab ini antara lain berupa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tabel II.44 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menjadi Penerima Program KKS, BPNT dan PKH di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kategori	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	Merauke	9,82	9,69	3,74	5,10	2,12
	Boven Digoel	13,31	2,13	1,92	1,54	0,97
	Mappi	7,06	11,74	1,44	3,96	4,60
	Asmat	28,14	10,09	3,37	3,14	13,36
	Rata-rata 4 Kabupaten	14,58	8,41	2,62	3,44	5,26
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako	Merauke	n.a	n.a	0,00	10,53	4,38
	Boven Digoel	n.a	n.a	0,00	5,02	0,16
	Mappi	n.a	n.a	1,97	2,36	4,14
	Asmat	n.a	n.a	5,54	0,36	0,10
	Rata-rata 4 Kabupaten	n.a	n.a	1,88	4,57	2,20
Program Keluarga Harapan (PKH)	Merauke	0,57	2,54	1,05	3,58	3,86
	Boven Digoel	0,00	0,51	0,28	0,57	3,73
	Mappi	0,20	0,00	0,53	8,35	4,21
	Asmat	0,00	0,09	5,75	3,73	9,16
	Rata-rata 4 Kabupaten	0,19	0,79	1,90	4,06	5,24

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2022 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua”)

Tabel II.44 menunjukkan persentase rumah tangga yang pernah menjadi penerima program KKS, BPNT, dan PKH di Provinsi Papua Selatan tahun 2018-2022. Berdasarkan Tabel II.44 diketahui bahwa rata-rata cakupan penerima seluruh program bantuan sosial tersebut masih sangat kecil (<10%), dan pada pelaksanaan bantuan KKS terdapat penurunan cakupan penerima dari 14,58% pada tahun 2018 menjadi 5,26% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, dapat diketahui bahwa Kabupaten Asmat memiliki cakupan PKH dan KKS yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya pada tahun 2022 yaitu mencapai 9,16% dan 13,36%. Cakupan penerima bantuan sosial terendah di Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Boven Digoel yaitu 0,97% untuk KKS, 0,16% untuk BPNT dan 3,73% untuk PKH. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat Papua Selatan dalam jaminan dan bantuan sosial belum sepenuhnya terpenuhi melalui program bantuan sosial yang sebelumnya diimplementasikan (PKH, BPNT, KKS, dll), sehingga diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dalam mengisi gap akses jaminan dan bantuan sosial tersebut, khususnya afirmasi jaminan dan bantuan sosial untuk OAP.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintah wajib non-pelayanan dasar yang dibahas dalam subbab ini terdiri atas 18 urusan, yaitu: (1) tenaga kerja; (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) pangan; (4) pertanahan; (5) lingkungan hidup; (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) pemberdayaan masyarakat dan kampung; (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (9) perhubungan; (10) komunikasi dan informatika; (11) koperasi, usaha kecil dan menengah; (12) kepemudaan dan olahraga; (13) statistik; dan (14) kebudayaan.

2.3.2.1 Tenaga Kerja

2.3.2.1.1 Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja berhubungan erat dengan profil kependudukan, utamanya yang berusia produktif. Ukuran besar-kecilnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Definisi Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Tabel II.45 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Selatan menurut jenis kegiatan pada tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.45 diketahui bahwa 97,19% angkatan kerja di Papua Selatan telah bekerja. Persentase angkatan kerja yang telah bekerja tertinggi terdapat di Kabupaten Asmat (99,55%) dan Merauke (97,81%). Meskipun demikian, jumlah angkatan pengangguran yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Merauke yaitu sebesar 2.786 jiwa dan Kabupaten Boven Digoel sebesar 2.590 jiwa.

Tabel II.45 Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten		Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			Total	Persentase Angkatan Kerja terhadap total penduduk	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya			
Merauke	L	76.269	1.593	3.863	2.691	9.487	93.903	82,92	97,95
	P	48.122	1.193	4.873	28.293	3.514	85.995	57,35	97,58
	L+P	124.391	2.786	8.736	30.984	13.001	179.898	70,69	97,81
Boven Digoel	L	21.819	2.086	838	1.055	800	26.598	89,88	91,27
	P	14.050	504	956	5.784	348	21.642	67,25	96,54
	L+P	35.869	2.590	1.794	6.839	1.148	48.240	79,72	93,27
Mappi	L	25.927	1.298	1.738	3.183	2.449	34.595	78,70	95,23
	P	13.902	409	1.968	15.554	1.005	32.838	43,58	97,14
	L+P	39.829	1.707	3.706	18.737	3.454	67.433	61,60	95,89
Asmat	L	29.734	240	1.673	348	1.533	33.528	89,40	99,20
	P	23.780	0	1.992	6.025	906	32.703	72,72	100,00
	L+P	53.514	240	3.665	6.373	2.439	66.231	81,16	99,55
Papua Selatan	L	153.749	5.217	8.112	7.277	14.269	188.624	84,28	96,72
	P	99.854	2.106	9.789	55.656	5.773	173.178	58,88	97,93
	L+P	253.603	7.323	17.901	62.933	20.042	361.802	72,12	97,19

Catatan: L = laki-laki; P = perempuan

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

Apabila ditinjau berdasarkan gender, meskipun jumlah angkatan kerja laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, namun persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki yang bekerja. Persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja di Provinsi Papua Selatan mencapai 97,93%, sedangkan persentase angkatan kerja laki-laki yang bekerja di Provinsi Papua Selatan sebesar 96,72%. Hal ini mengindikasikan tingkat pengangguran angkatan kerja laki-laki di Provinsi Papua Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran angkatan kerja perempuan.

2.3.2.1.2 Lapangan Pekerjaan Utama

Tabel II.46 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Papua Selatan tahun 2020. Berdasarkan Tabel II.46 diketahui bahwa mayoritas

penduduk Papua Selatan bekerja di sektor pertanian (55,48%) serta sektor jasa (38,64%). Penduduk yang bekerja di sektor industri relatif kecil yaitu hanya sebesar 5,88% atau 14.374 jiwa. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, wilayah dengan mayoritas pekerjaan penduduk di sektor pertanian adalah Kabupaten Asmat (70,12% atau 35.875 jiwa), sedangkan penyerapan tenaga kerja tertinggi di sektor pertanian terdapat di Kabupaten Merauke (54.777 jiwa).

Tabel II.46 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020

Kabupaten		Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
		Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	
Merauke	jiwa	54.777	10.722	54.409	119.908
	persen	45,68	8,94	45,38	100,00
Boven Digoel	jiwa	18.509	1.614	12.860	32.983
	persen	56,12	4,89	38,99	100,00
Mappi	jiwa	26.534	1.133	12.853	40.520
	persen	65,48	2,80	31,72	100,00
Asmat	jiwa	35.875	905	14.385	51.165
	persen	70,12	1,77	28,11	100,00
Papua Selatan	jiwa	135.695	14.374	94.507	244.576
	persen	55,48	5,88	38,64	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

Selain lapangan pekerjaan utama, aspek yang perlu ditinjau dalam menganalisis kondisi tenaga kerja di Provinsi Papua Selatan adalah upah/gaji pekerja baik pekerja formal maupun informal. Berdasarkan Tabel II.47 dapat diketahui bahwa pekerja formal (buruh/karyawan/pegawai) memiliki upah atau gaji bersih bulanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pekerja informal (pekerja yang berusaha sendiri/pekerja bebas). Rata-rata upah/gaji bersih pekerja formal di Papua Selatan tahun 2020 sebesar Rp.3.618.203, sedangkan rata-rata upah/gaji bersih pekerja informal tahun 2020 sebesar Rp.2.187.413. Selain itu, dalam Tabel II.48 ditunjukkan bahwa pekerja informal dengan tingkat pendidikan SMA ke atas memiliki rata-rata upah/gaji yang lebih besar dibandingkan pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan pekerja yang lebih tinggi dapat mendorong pendapatan pekerja yang lebih tinggi karena tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat keterampilan, inovasi dan produktifitas kerja.

Tabel II.47 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Informal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah) di Papua Selatan Tahun 2020

Kabupaten	Kategori	Lapangan Pekerjaan Utama			Total
		Pertanian	Industri/ Manufaktur	Jasa	
Merauke	formal	3.021.789	2.866.934	3.318.016	3.264.222
	informal	2.224.880	1.942.036	3.621.054	2.695.139
Boven Digoel	formal	4.171.717	4.059.653	2.471.841	3.053.268
	informal	875.990	3.036.864	3.599.723	1.888.849
Mappi	formal	1.800.000	1.096.875	3.091.553	3.017.944
	informal	1.409.609	n.a	n.a	1.465.551
Asmat	formal	1.408.382	1.855.394	5.348.544	5.137.378
	informal	1.872.995	4.205.386	3.868.034	2.700.111
Rata-rata 4 Kabupaten	formal	2.600.472	2.469.714	3.557.489	3.618.203
	informal	1.595.869	3.061.429	3.696.270	2.187.413

* Pekerja Formal: Buruh/Karyawan/Pegawai

** Pekerja Informal: Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

Tabel II.48 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Pendidikan Tertinggi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Kabupaten	Pendidikan Tertinggi				Total
	Tidak pernah sekolah / belum tamat SD	SD/MI	SMP/MTs	SMA ke atas	
Merauke	2.058.514	2.172.280	2.334.260	3.651.327	2.695.139
Boven Digoel	568.045	2.026.536	1.909.760	2.501.627	1.888.849
Mappi	1.308.758	1.341.597	1.353.026	2.574.802	1.465.551
Asmat	2.350.233	2.216.208	2.261.471	4.546.383	2.700.111
Rata-rata 4 kabupaten	1.571.388	1.939.155	1.964.629	3.318.535	2.187.413

* Pekerja Informal: Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1 Pembangunan Gender

Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang menekankan status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah.

Tabel II.49 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Selatan. Angka Provinsi Papua Selatan yang digunakan adalah rata-rata dari 4 kabupaten, karena belum tersedia data terpilah provinsi baru pasca pembentukan DOB. Berdasarkan Tabel II.49 diketahui terdapat peningkatan rata-rata IPG Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dari 75,17 pada tahun 2017 menjadi 77,36 pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan, namun rata-rata IPG ini masih di bawah capaian IPG Nasional yang telah mencapai 91,63 pada tahun 2022, sehingga diperlukan akselerasi peningkatan IPG di Provinsi Papua Selatan.

Tabel II.49 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	87,45	87,69	87,70	87,84	88,04	89,30
Boven Digoel	78,83	79,17	79,25	79,18	79,06	79,90
Mappi	83,77	83,65	83,63	83,48	83,78	84,88
Asmat	50,61	52,23	53,71	53,59	53,72	55,34
Papua Selatan*	75,17	75,69	76,07	76,02	76,15	77,36
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IPG seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

Sumber: BPS Nasional, 2023

Berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki IPG paling tinggi di Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke (tahun 2022: 89,30) dan Kabupaten Mappi (tahun 2022: 84,88). Adapun IPG

yang paling rendah terdapat di Kabupaten Asmat yaitu 55,34 pada tahun 2022, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.49.

2.3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan

Pembangunan gender, sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pembangunan gender di Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari berbagai upaya pemberdayaan gender. Dalam meninjau sejauh mana pemberdayaan gender di daerah digunakan komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan di dunia politik (keterwakilan di parlemen), pengambilan keputusan, dan ekonomi.

IDG Papua Selatan dihitung dari rata-rata IDG 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan Tabel II.50 diketahui terdapat peningkatan IDG Papua Selatan dari 50,61 pada tahun 2017 menjadi 61,63 pada tahun 2022. Capaian IDG Papua Selatan masih lebih rendah dibandingkan capaian IDG nasional yang mencapai 76,59 pada tahun 2022.

Tabel II.50 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	71,65	72,18	57,35	55,59	58,12	59,71
Boven Digoel	44,55	60,19	54,07	53,87	52,17	55,83
Mappi	57,51	61,61	55,56	55,98	58,91	52,82
Asmat	28,71	29,22	74,86	77,13	78,37	78,16
Rata-rata 4 Kabupaten	50,61	55,80	60,46	60,64	61,89	61,63
Nasional	71,74	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59

(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IDG seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

Sumber: BPS Nasional, 2023

Selain menggunakan indikator IDG, pemberdayaan perempuan juga dapat ditinjau berdasarkan peran perempuan sebagai tenaga profesional. Berdasarkan Tabel II.51 dapat diketahui terdapat peningkatan rata-rata persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Papua Selatan dari 27,40% pada tahun 2017 menjadi 35,22% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah dengan persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang tinggi adalah Kabupaten Merauke (tahun 2022: 47,69%) dan Boven Digoel (tahun 2022: 44,50%).

Tabel II.51 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	40,70	42,09	37,14	34,62	40,42	47,69
Boven Digoel	30,90	36,93	35,28	33,06	33,14	44,50
Mappi	33,43	32,56	28,54	27,98	35,07	23,05
Asmat	4,57	4,44	33,33	43,16	44,22	25,64
Rata-rata 4 Kabupaten	27,40	29,01	33,57	34,71	38,21	35,22

Sumber: BPS Nasional, 2023

Keterlibatan perempuan di parlemen menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keterwakilan dan pemberdayaan perempuan di sektor publik. Indikator ini memperlihatkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambilan

keputusan dalam proses politik formal, khususnya di lembaga legislatif. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta keterkaitannya dengan pemberdayaannya. Meskipun proporsi perempuan di parlemen tingkat Kabupaten masih tergolong sangat rendah yaitu <10% (Tabel II.52), namun kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Asmat dengan keterwakilan perempuan sebesar 47,06% pada tahun 2022.

Tabel II.52 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	20,69	20,69	6,67	6,67	6,67	6,67
Boven Digoel	0,00	10,00	5,00	5,56	5,00	5,00
Mappi	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Asmat	4,00	4,00	28,00	28,00	28,00	47,06

Sumber: BPS Nasional, 2023

Tabel II.53 menunjukkan sumbangan pendapatan perempuan terhadap pendapatan keluarga di Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan Tabel II.53 diketahui terdapat peningkatan rata-rata sumbangan pendapatan perempuan dari 37,45% pada tahun 2017 menjadi 39,04% pada tahun 2021, namun mengalami penurunan menjadi 38,74% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah dengan sumbangan pendapatan perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Asmat (tahun 2022: 40,89%) dan Kabupaten Mappi (tahun 2022: 40,85%). Hal ini mengindikasikan bahwa peran perempuan terhadap ekonomi keluarga di Kabupaten Asmat dan Mappi relative lebih tinggi dibandingkan dengan di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.

Tabel II.53 Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	36,73	36,63	37,10	36,88	37,32	37,31
Boven Digoel	33,29	34,59	35,44	35,10	35,54	35,89
Mappi	41,56	41,65	41,84	41,93	42,36	40,85
Asmat	38,21	39,68	40,87	40,35	40,92	40,89
Rata-rata 4 Kabupaten	37,45	38,14	38,81	38,57	39,04	38,74

Sumber: BPS Nasional, 2023

2.3.2.3 Pangan

Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan melibatkan serangkaian indikator yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur ketahanan pangan suatu daerah adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Berdasarkan IKP tahun 2018-2021 diketahui bahwa terdapat penurunan rata-rata IKP kabupaten di Provinsi Papua Selatan dari 46,37 pada tahun 2018 menjadi 42,90 pada tahun 2021 (lihat Tabel II.55). Berdasarkan kategori IKP yang ditampilkan dalam Tabel II.54 rata-rata IKP kabupaten tersebut termasuk dalam kategori **wilayah rentan pangan prioritas 2** yang sangat bergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain atau sentra produksi pangan.

Tabel II.54 Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
Prioritas 1	≤ 41,52	≤ 28,84	≤ 37,61
Prioritas 2	41,52 – 51,42	28,84 – 41,44	37,61 – 48,27
Prioritas 3	51,42 – 59,58	41,44 – 51,29	48,27 – 57,11
Prioritas 4	59,58 – 67,75	51,29 – 61,13	57,11 – 65,96
Prioritas 5	67,75 – 75,68	61,13 – 70,64	65,96 – 74,40
Prioritas 6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2021

Tabel II.55 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Papua Selatan

Wilayah	Indikator	2018	2019	2020	2021	
1	Merauke	IKP (indeks)	78,53	78,25	77,60	77,75
		Kategori	Prioritas 6	Prioritas 6	Prioritas 6	Prioritas 6
		Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	94,40	97,39	96,43
		Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	84,00	82,54	83,82
		Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	61,82	59,06	59,18
2	Boven Digoel	IKP (indeks)	50,69	44,13	38,58	41,18
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 1	Prioritas 1
		Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	17,44	0,00	0,00
		Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	66,71	67,98	69,66
		Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	47,22	45,46	50,71
3	Mappi	IKP (indeks)	28,34	28,03	28,59	31,51
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
		Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	0,00	0,00	0,00
		Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	42,47	43,61	52,05
		Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	38,23	38,77	39,74
4	Asmat	IKP (indeks)	27,91	22,85	19,90	21,16
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
		Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	0,00	0,00	0,00
		Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	54,38	46,80	48,18
		Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	16,33	14,66	16,77
Rata-rata 4 Kabupaten	IKP (indeks)	46,37	43,32	41,17	42,90	
	Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	
	Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	27,96	24,35	24,11	
	Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	61,89	60,23	63,43	
	Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	40,90	39,49	41,60	

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Dalam Dokumen "Indeks Ketahanan Pangan 2018-2021"

Berdasarkan kabupaten, 3 dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan termasuk **wilayah rentan pangan prioritas 1** yaitu Kabupaten Boven Digoel (skor 2021 = 41,18), Kabupaten Mappi (skor 2021: 31,51), dan Kabupaten Asmat (skor 2021 = 21,16). Adapun Kabupaten Merauke memiliki ketahanan pangan yang sangat tinggi dengan indeks ketersediaan dan keterjangkauan yang sangat baik. Apabila meninjau komponen pembentuk IKP, dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya ketahanan pangan di Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat adalah lemahnya ketersediaan pangan dan pemanfaatan pangan. Hal ini mengindikasikan besarnya kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan bergizi di Provinsi Papua Selatan melalui, peningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan bergizi, penguatan lumbung pangan di kampung-kampung, diversifikasi jenis makanan pokok lokal, serta peningkatan kapasitas petani dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat..

2.3.2.4 Pertanian

Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaan tanah karena sangat menentukan mudah atau dapat/tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu. Dalam hal ini, di wilayah Provinsi Papua Selatan perlu diperhatikan adanya berbagai jenis status penguasaan tanah sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| a. Tanah negara bebas | (7) Kuasa Pertambangan |
| b. Tanah negara yang dibebani, di dalamnya termasuk: | c. Tanah negara yang telah diperuntukkan |
| (1) Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan HPHH | d. Tanah negara yang dikuasai penduduk |
| (2) Hutan Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) | e. Tanah negara yang dikuasai instansi |
| (3) Hutan Suaka Alam (HSA) | f. Hak Milik Adat |
| (4) Hutan Lindung | g. Hak Guna Usaha |
| (5) Hutan Produksi | h. Hak Pakai |
| (6) Kontrak Karya | i. Hak Pengelolaan |
| | j. Hak Guna Bangunan |
| | k. Hak Milik |

Permasalahan yang mencolok adalah ketidaksesuaian antara arahan rencana tata ruang pada suatu lokasi dengan status atau penguasaan tanahnya sekarang terutama untuk tanah negara yang dibebani, yang pada umumnya mencakup areal yang sangat luas seperti HPH, konsesi, kuasa pertambangan kontrak karya. Misalnya pada kasus TGHK yang tumpang tindih dengan kuasa pertambangan atau Hak Penguasaan Hutan (HPH). Hal ini dapat menjadi masalah jika dikaitkan dengan fungsi kawasan yang ingin dipertahankan (misalnya fungsi hidro-orologis).

Pola kepemilikan lahan di Tanah Papua terdiri atas tanah negara dan tanah ulayat. Tanah hak ulayat merupakan status tanah secara adat dan dikuasai oleh kepala adat atau Ondoafi. Pada dasarnya status tanah dalam hukum adat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Tanah Milik, yaitu tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga secara hukum adat sah karena mendapat warisan dari orang tua, tanah yang diberikan sebagai ganti rugi, dan atau merupakan hasil rampasan perang yang diperoleh pada zaman dahulu.
- Tanah Milik dengan Hak Pakai, yaitu tanah milik masyarakat yang diberikan kepada orang luar dengan seizin kepala adat untuk digarap sesuai dengan perjanjian dan dalam batas waktu tertentu.

Pada umumnya Tanah Milik dan Tanah Milik dengan Hak Pakai tidak dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan dengan bebas pada masyarakat luar. Setiap keluarga akan selalu mempertahankan tanah dan kampung mereka masing-masing karena tanah dan kampung merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat mereka. Hal tersebut dikarenakan cara hidup masyarakat yang masih berharap dan menggantungkan diri pada persediaan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Disamping itu juga mengingat besarnya pengorbanan nenek moyang atau leluhur mereka saat memperoleh tanah tersebut pada jaman dahulu. Oleh sebab itu, tanah ulayat ini tidak mudah dengan begitu saja untuk dilepas tanpa seizin kepala adat.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Peningkatan aktivitas manusia sering kali berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan. Aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan seperti pembukaan lahan, penebangan vegetasi alami, pembuangan limbah, pengubahan bentang alam dan sebagainya memberikan tekanan dan perubahan terhadap ekologi bukan hanya pada lingkungan sekitar namun ekosistem yang lebih luas. Aktivitas manusia ini secara langsung dan tidak langsung sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Penyelesaian aktivitas manusia dan lingkungan hidup untuk menciptakan peningkatan kualitas hidup yang optimal perlu didukung berbagai sektor mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, hingga proses monitoring lingkungan dan evaluasi kegiatan.

Sementara data lingkungan hidup Provinsi Papua Selatan belum tersedia, pendekatan menggunakan data Provinsi Papua tetap digunakan karena Papua Selatan masih berada pada lingkup wilayah tersebut dan karakteristik ekosistem lingkungan yang bergantung pada komponen-komponen lingkungan lintas/ di luar batas administrasi. Tabel II.56 menyajikan nilai kualitas lingkungan air, udara dan lingkungan hidup untuk Provinsi Papua pada Tahun 2015 hingga tahun 2022. Terjadi pengurangan kualitas air, udara, dan lingkungan hidup pada tahun 2018, terutama pada lingkungan air yang berkurang sekitar 20 poin yakni dari 62,5 menjadi 45 dari skala 100. Indeks kualitas lingkungan ini berangsur pulih pada tahun 2019-2022.

Tabel II.56 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air	61,11	50	62,5	45	47,29	55	n.a	55,07
Indeks Kualitas Udara	n.a.	89,6	90,01	89,89	92,56	94,57	n.a	95,32
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	73.30	79.17	78.18	95.94	99.58	n.a	n.a	100
Indeks Kualitas Air Laut	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	87,29
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,01	81,35	81,47	78,84	81,79	79,75	n.a	81,46

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyatakan seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Dalam hal ini, tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Indikator kinerja pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dijelaskan dalam subbab ini mencakup persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran, serta persentase penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tabel II.57 menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua Selatan tahun 2019-2022. Berdasarkan Tabel II.57 diketahui bahwa terdapat **peningkatan persentase penduduk yang mempunyai NIK**, baik penduduk usia 0-4 tahun, usia 5 tahun ke atas, maupun 17 tahun ke atas. Pada tahun 2019, rata-rata penduduk usia 0-4

tahun yang memiliki NIK sebanyak 51,43% dan meningkat menjadi 65,46% pada tahun 2022. Penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki NIK pada tahun 2019 sebesar 73,49% dan meningkat menjadi 91,80% pada tahun 2022. Adapun penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki NIK pada tahun 2019 sebesar 75,72% dan meningkat menjadi 94,46% pada tahun 2022.

Tabel II.57 Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Kategori	Wilayah	2019	2020	2021	2022
Umur 0-4 Tahun	Merauke	58,72	43,13	55,79	62,93
	Boven Digoel	47,00	59,37	55,20	69,81
	Mappi	66,23	60,21	54,40	63,86
	Asmat	33,77	60,40	67,65	65,23
	Rata-rata 4 Kabupaten	51,43	55,78	58,26	65,46
Umur 5 Tahun ke Atas	Merauke	88,60	88,94	91,97	93,71
	Boven Digoel	81,08	94,64	96,00	96,40
	Mappi	80,62	88,56	92,94	94,21
	Asmat	43,66	76,54	84,51	82,87
	Rata-rata 4 Kabupaten	73,49	87,17	91,36	91,80
Umur 17 Tahun ke Atas	Merauke	90,49	91,20	93,75	96,18
	Boven Digoel	81,92	96,10	97,23	97,21
	Mappi	82,31	91,15	94,99	97,20
	Asmat	48,16	78,69	85,78	87,26
	Rata-rata 4 Kabupaten	75,72	89,29	92,94	94,46

Sumber: BPS Provinsi Papua 2019-2022 (dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat")

Tabel II.58 menunjukkan persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Papua Selatan tahun 2019-2022. Berdasarkan Tabel II.58 diketahui bahwa sangat tinggi proporsi penduduk usia 0-4 tahun dan 0-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran dan terdapat trend penurunan kepemilikan akta kelahiran selama tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 rata-rata kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-4 tahun sebesar 44,39% dan mengalami penurunan menjadi 42,96% pada tahun 2022. Adapun penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran rata-rata sebesar 52,93% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 52,55% pada tahun 2022. Tingginya persentase penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran mengindikasikan rendahnya pemahaman penduduk Papua Selatan tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran.

Tabel II.58 Penduduk yang Mempunyai Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Tahun 2022

Kategori	Wilayah	2019	2020	2021	2022
Umur 0-4 Tahun	Merauke	60,96	52,20	59,27	68,20
	Boven Digoel	47,04	44,74	47,31	57,78
	Mappi	32,64	44,75	21,27	29,25
	Asmat	36,91	35,01	45,73	16,61
	Rata-rata 4 Kabupaten	44,39	44,18	43,40	42,96
Umur 0-17 Tahun	Merauke	71,93	70,07	75,38	76,69
	Boven Digoel	68,00	70,05	65,30	71,07
	Mappi	33,67	59,50	39,62	41,65
	Asmat	38,12	46,34	44,25	20,78
	Rata-rata 4 Kabupaten	52,93	61,49	56,14	52,55

Sumber: BPS Provinsi Papua 2019-2022 (dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat")

Kondisi Penduduk OAP dan non-OAP

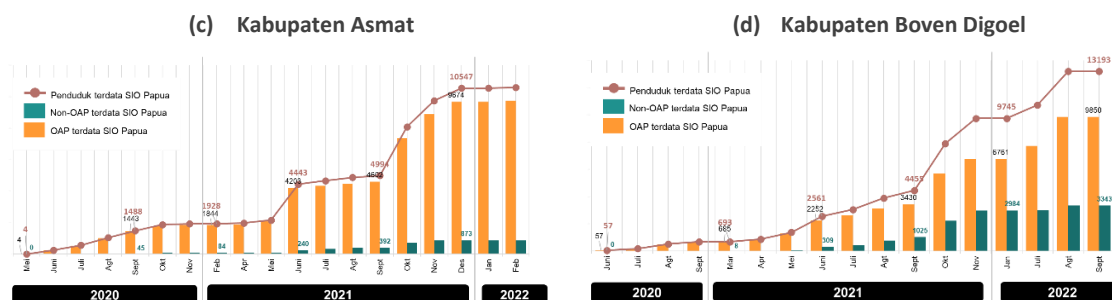
Berbagai upaya untuk mengetahui kondisi penduduk OAP dan non-OAP telah dilakukan pendataan berbasis kampung melalui Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di wilayah Papua. Berdasarkan Tabel II.8 dapat diketahui cakupan pendataan yang dilakukan sampai dengan 21 Maret 2023 di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan sebesar 23.873 jiwa atau 4,69% dari total jumlah penduduk dalam sensus penduduk 2020 (jumlah penduduk dalam SP 2020: 513.617 jiwa). Dari total penduduk yang terdata SIO Papua, sebanyak 19.651 jiwa adalah OAP sedangkan 4.222 jiwa lainnya adalah non-OAP. Cakupan pendataan ini masih dinamis dan akan terus bertambah seiring dengan pendataan yang dilakukan di tingkat kampung dengan target cakupan 100%.

Tabel II.59 Cakupan Penduduk OAP dan Non-OAP yang Terdata SIO Papua (update: 21 Maret 2023)

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk SP2020 (jiwa)	Kemajuan Pendataan SIO Papua (jiwa)			Cakupan SIO Papua Terhadap SP2020 (%)
			OAP	Non-OAP	Total	
Provinsi Papua Selatan		513.617	19.651	4.222	23.873	4,69
1	Merauke	230.932	76	6	82	0,04
2	Boven Digoel	64.285	9.850	3.343	13.193	20,52
3	Mappi	108.295	0	0	0	0,00
4	Asmat	110.105	9.725	873	10.598	9,63

Sumber: SIO Papua (Sistem Informasi Orang Papua) <https://www.siopapua.com/>

Gambar II.64 Perkembangan Cakupan Pendataan OAP dan non-OAP di Boven Digoel dan Asmat Dalam SIO Papua (update: 18 April 2023)



Sumber: SIO Papua (Sistem Informasi Orang Papua) <https://www.siopapua.com/>

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pemberdayaan masyarakat kampung merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata sosialnya. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa/kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Selatan dapat tercermin salah satunya melalui peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/

lingkungan, yang memotret perkembangan kemandirian kampung (penguatan otonomi kampung) di Papua Selatan berdasarkan implementasi UU Desa, dengan dukungan Dana Desa dan pendamping desa. IDM mengklasifikasi desa/kampung dalam lima status sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.60. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya fasilitas pemajuan kampung di Papua Selatan menuju kampung berkembang, maju dan mandiri yang berketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Tabel II.60 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Klasifikasi	Rentang Nilai IDM
1	sangat tertinggal	$0,270 \leq \text{IDM} \leq 0,491$
2	tertinggal	$0,491 < \text{IDM} \leq 0,599$
3	berkembang	$0,599 < \text{IDM} \leq 0,707$
4	maju	$0,707 < \text{IDM} \leq 0,815$
5	mandiri	$0,815 < \text{IDM} \leq 0,920$

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan Tabel II.61 diketahui bahwa meskipun mengalami peningkatan selama periode 2019-2021, status rata-rata IDM Kabupaten di Provinsi Papua Selatan masih berada dalam kategori “**tertinggal**” dengan skor 0,4806 pada tahun 2021. Berdasarkan kabupaten di Papua Selatan, Kabupaten Merauke mengalami perkembangan IDM yang relatif signifikan dari skor 0,4826 pada tahun 2019 menjadi 0,5383 pada tahun 2021. Telah terjadi peningkatan status IDM Kabupaten Merauke dari “sangat tertinggal” pada tahun 2019 menjadi “tertinggal” pada tahun 2020-2021. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi kampung di Kabupaten Merauke.

Berbeda dengan kondisi Kabupaten Merauke, nilai IDM 3 (tiga) wilayah lainnya di Provinsi Papua Selatan termasuk dalam kategori “**sangat tertinggal**” dan mengalami penurunan IDM pada tahun 2019-2021. Penurunan signifikan terjadi di Kabupaten Asmat dari 0,5211 pada tahun 2019 menjadi 0,4512 pada tahun 2021. Penurunan signifikan IDM Kabupaten Asmat ini bahkan berimplikasi pada penurunan status IDM kabupaten Asmat dari kategori “tertinggal” menjadi “sangat tertinggal”.

Tabel II.61 Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten di Provinsi Papua Selatan

Indikator		2019	2020	2021
Rata-rata IDM Kabupaten		0,4848	0,4971	0,4806
Status Rata-rata IDM Kabupaten		tertinggal	tertinggal	tertinggal
1	Merauke	0,4826	0,5315	0,5383
		sangat tertinggal	tertinggal	tertinggal
2	Boven Digoel	0,4764	0,4764	0,4745
		sangat tertinggal	sangat tertinggal	sangat tertinggal
3	Mappi	0,4592	0,4592	0,4585
		sangat tertinggal	sangat tertinggal	sangat tertinggal
4	Asmat	0,5211	0,5211	0,4512
		tertinggal	tertinggal	sangat tertinggal

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Dokumen “Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa 2016-2021”

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan dari 0,78% pada tahun 2020-2021 menjadi 0,89% pada tahun 2021-2022, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.62. Kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi di Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Asmat yaitu 1,69% pada tahun 2021-2022 yang meningkat dari 1,39% pada 2020-2021. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini salah satunya disebabkan karena faktor penggunaan alat KB oleh Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menunda atau mencegah kehamilan yang masih relatif sedikit. Adapun PUS adalah pasangan suami istri yang usia perempuannya adalah 15-49 tahun.

Tabel II.62 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2020-2021	2021-2022
Merauke	0,33	0,29
Boven Digoel	0,67	0,74
Mappi	1,19	1,43
Asmat	1,39	1,69
Papua Selatan	0,78	0,89

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Tabel II.63 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin berdasarkan status penggunaan alat KB atau cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan di Provinsi Papua Selatan tahun 2018-2022. Berdasarkan Tabel II.63 diketahui bahwa terdapat penurunan rata-rata persentase penggunaan alat KB dari 43,58% pada tahun 2018 menjadi 38,21% pada tahun 2020, dan lalu kembali menurun menjadi 36,07% pada tahun 2022. Kabupaten yang memiliki persentase perempuan (umur 15-49 tahun) yang paling kecil dalam penggunaan KB pada tahun 2022 adalah Kabupaten Asmat yaitu hanya mencapai 13,99%.

Tabel II.63 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Berdasarkan Status Penggunaan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan

Wilayah	2018			2020			2022		
	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan
Merauke	19,32	54,48	26,2	11,86	43,01	45,13	12,84	37,97	49,2
Boven Digoel	16,53	39,75	43,72	16,92	33,16	49,92	14,94	29,43	55,64
Mappi	12,79	13,25	73,97	5,72	32,59	61,69	12,86	22,25	64,89
Asmat	8,02	10,18	81,8	1,95	7,63	90,42	5,87	8,12	86,01
Rata-rata 4 Kabupaten	14,17	29,42	56,42	9,11	29,10	61,79	11,63	24,44	63,94

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat")

Tabel II.64 menunjukkan perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang tidak menggunakan alat KB berdasarkan alasan utama tidak menggunakan alat KB tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.64 diketahui bahwa alasan utama tidak menggunakan KB di Provinsi Papua Selatan adalah alasan fertilitas (26,25%), takut efek samping (17,74%) dan alasan lainnya (32,41%).

Hal ini mengindikasikan masih lemahnya pemahaman keluarga/pasangan usia subur (PUS) tentang fungsi dan penggunaan alat KB sehingga penyuluhan secara efektif menjadi penting dilakukan di Provinsi Papua Selatan.

Tabel II.64 Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Tidak Menggunakan Alat KB Berdasarkan Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat KB Tahun 2022

Alasan Tidak Menggunakan KB	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Rata-rata 4 Kabupaten
Alasan Fertilitas	23,00	36,85	24,52	20,64	26,25
Tidak Setuju KB	5,43	16,44	5,12	10,58	9,39
Tidak Tahu Alat atau Cara KB	1,68	1,68	2,24	5,26	2,72
Takut Efek Samping	18,70	14,16	28,15	9,95	17,74
Lainnya	46,72	22,86	18,43	41,61	32,41
Tidak Tahu	4,46	8,01	21,54	11,96	11,49
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat")

Tabel II.65 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut alat KB atau cara tradisional yang sedang digunakan di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.65 diketahui bahwa alat KB yang paling sering digunakan PUS di Papua Selatan adalah suntikan (rata-rata: 44,23%) dan kondom pria (rata-rata: 25%).

Tabel II.65 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2022

Alat KB/Cara Tradisional yang Digunakan	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Rata-rata 4 Kabupaten
Sterilisasi Wanita / Tubektomi	1,22	4,81	9,61	3,02	4,67
Sterilisasi Pria / Vasektomi	0,60	0,00	0,00	0,00	0,15
IUD/AKDR	1,10	0,96	3,94	0,00	1,50
Suntikan	70,85	62,43	43,63	0,00	44,23
Susuk KB	9,65	14,31	4,24	0,00	7,05
Pil	14,68	14,06	21,00	0,00	12,44
Kondom Pria	0,92	0,00	0,00	100,00	25,23
Intravag/Komdom wanita/diafragma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metode menyusui alami	0,56	1,37	0,00	0,00	0,48
Pantang berkala/kalender	0,27	2,06	0,00	0,00	0,58
Lainnya	0,14	0,00	17,58	0,00	4,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat")

Tabel II.66 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin yang menggunakan alat KB modern menurut tempat memperoleh alat KB di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.66 diketahui bahwa mayoritas masyarakat memperoleh alat KB pada tahun 2022 di puskesmas/pustu/klinik (rata-rata: 64,69%), dan praktik bidan/bidan di desa/perawat (rata-rata: 10,82%).

Tabel II.66 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Menggunakan Alat KB Modern menurut Tempat Memperoleh Alat KB Modern yang Terakhir Kali, 2022

Tempat Memperoleh Alat KB	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Rata-rata 4 Kabupaten
Rumah Sakit	1,78	8,41	15,10	3,02	7,08
Puskesmas/Pustu/Klinik	59,82	63,06	46,50	89,36	64,69
TKBK/ TMK/ MUYAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polindes/Poskesdes	0,93	0,00	12,04	0,68	3,41
Posyandu / Pos KB / PPKBD	9,45	2,56	8,93	0,00	5,24
Rumah Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktik Dokter Umum/kandungan	3,65	4,75	3,69	1,53	3,41
Praktik Bidan/Bidan di Desa / Perawat	18,03	15,89	4,86	4,49	10,82
Apotek/Toko Obat	6,34	5,33	8,88	0,93	5,37
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

2.3.2.9 Perhubungan

Sarana Transportasi merupakan bagian krusial untuk mencapai tujuan pembangunan. Transportasi berfungsi menghubungkan aktivitas antar wilayah baik melalui perpindahan barang, jasa, maupun informasi pendukung pembangunan.

2.3.2.9.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan sarana transportasi jalan merupakan hal yang harus diperhatikan seiring dengan meningkatkan jumlah kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Papua Selatan jumlah jalan yang tersedia untuk mendukung pergerakan kendaraan tersebut juga sebaiknya dapat ditingkatkan. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, begitu pula dengan jalan yang tersedia. Namun peningkatan jumlah kendaraan terjadi lebih pesat dibandingkan pertumbuhan jumlah jalan dimana terjadi penurunan rasio antara panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan. Semakin kecil nilai rasio maka semakin sedikit alokasi jalan yang tersedia untuk tiap kendaraan.

Tabel II.67 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Papua Selatan

Indikator	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan	4965,98	4965,96	4973,30	5155,41
Jumlah Kendaraan	105528	126618	n.a.	134958
Rasio	4,71%	3,92%	n.a.	3,82%

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2018-2022

2.3.2.9.2 Transportasi Darat

Berkembangnya aktivitas dan sarana transportasi jalan mengindikasikan penggunaan transportasi darat juga akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan berbagai jenis transportasi darat di Provinsi Papua Selatan. Tabel II.68 menampilkan jumlah tiap jenis transportasi darat di tiap kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Terjadi peningkatan moda transportasi mobil penumpang, barang, serta sepeda motor yang mengindikasikan peningkatan aktivitas dan pergerakan orang dan barang di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020.

Tabel II.68 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Provinsi Papua Selatan per Jenis Kendaraan 2017-2021

Kabupaten	Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	Mobil penumpang	435	5430	629	673	3963
	Mobil bis	2040	103	4219	4712	5205
	Mobil barang	2647	6083	5061	5420	5779
	Sepeda Motor	44215	99200	60461	64436	68411
	Kendaraan bermotor	49337	110816	70370	75241	83358
Boven Digoel	Mobil penumpang	n.a.	1077	n.a.	734	n.a.
	Mobil bis	n.a.	33	n.a.	33	n.a.
	Mobil barang	n.a.	1406	n.a.	1240	n.a.
	Sepeda Motor	n.a.	8504	n.a.	7130	n.a.
	Kendaraan bermotor	n.a.	11020	n.a.	9137	n.a.
Mappi	Mobil penumpang	n.a.	178	n.a.	734	n.a.
	Mobil bis	n.a.	12	n.a.	33	n.a.
	Mobil barang	n.a.	364	n.a.	1240	n.a.
	Sepeda Motor	n.a.	4318	n.a.	7130	n.a.
	Kendaraan bermotor	n.a.	4872	n.a.	9137	n.a.
Asmat	Mobil penumpang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Mobil bis	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Mobil barang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Sepeda Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Kendaraan bermotor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2022 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2018-2022)

2.3.2.9.3 Transportasi Laut dan Kunjungan Kapal

Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua 2013-2033 menyebutkan bahwa pelabuhan utama di Provinsi Papua Selatan terletak di Kabupaten Merauke yang ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan antar provinsi. Terdapat tiga rute utama pelayaran dari pelabuhan Merauke yaitu dengan tujuan akhir 1) Manokwari melalui Ambon, 2) Bitung-Sulawesi, dan 3) Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya. Data Statistik Transportasi Papua 2021 memuat data jumlah penumpang dan barang melalui pelabuhan Merauke. Data menunjukkan kunjungan kapal pada tahun 2021 sebanyak 277 unit dari dalam negeri dan 2 unit dari luar negeri. Muatan barang seluruhnya berasal dari dalam negeri dengan total muatan 337.213 ton muatan masuk (bongkar) dan 65.324 ton muatan keluar. Pada tahun 2021 Pelabuhan di Merauke telah dilalui oleh 12.868 penumpang datang dan 14.292 penumpang berangkat.

Tabel II.69 Rute Pelayaran di Provinsi Papua Selatan

No.	Nama Kapal	Rute Pelayaran
1	KM Sirimau	Manokwari-Sorong-Ambon-Wanci-Bau bau-Maumere-Lewoleba-Kupang-Kalabahi-Saumlaki-Tual-Dobo-Timika-Agats- Merauke (PP)
2	KM Tatamailau	Bitung-Tidore-Sorong-Fak Fak-Kaimana-Tual-Timika-Agats- Merauke (PP)
3	KM Leuser	Tanjung Perak Surabaya-Benoa-Bima-Labuanbajo-Makassar-Bau bau-Wanci-Namrole-Ambon-Saumlaki-Tual-Agatas- Merauke (PP)

Sumber: Jadwal Kapal Pelni, 2023

2.3.2.9.4 Transportasi Udara

Transportasi udara merupakan salah satu pilihan yang paling utama untuk digunakan di Papua dikarenakan karakteristik medan yang cukup bergunung, curam, dan diliputi hutan sehingga perjalanan transportasi darat menjadi cukup sulit untuk dilakukan di beberapa tempat. Secara umum terjadi penurunan jumlah pergerakan penumpang melalui jalur udara dari tahun 2018 ke tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan moda transportasi umum untuk mengurangi penyebaran wabah. Terjadi pengurangan jumlah

keberangkatan sebesar 35% dan 60% jumlah penumpang berangkat di tahun 2020 dari tahun 2018. Sementara terjadi pengurangan jumlah kedatangan sebesar 28% dengan jumlah penumpang sebesar 64%.

Tabel II.70 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Transportasi Udara di Papua Selatan 2018-2020

		Merauke	Boven Digoel			Mappi	Asmat	Total
		Bandara Moppah	Bandara Mindiptanah	Bandara Tanah Merah	Bandara Bomakia	Kepi	Bandara Ewer	
2018	Jumlah Keberangkatan	4.182	87	5.487	228	958	458	11.400
	Penumpang	224.503	742	21.657	1.795	9.648	3.901	262.246
	Jumlah Kedatangan	4.177	87	5.464	226	958	458	11.370
	Penumpang	218.084	705	18.441	1.671	10.590	3.665	253.156
2019	Jumlah Keberangkatan	3.304	34	5.750	193	742	726	10.749
	Penumpang	166.943	185	27.801	1.528	8.137	8.201	212.795
	Jumlah Kedatangan	3.300	34	5.756	193	738	695	10.716
	Penumpang	166.882	213	25.926	1.556	8.014	7.369	209.960
2020	Jumlah Keberangkatan	1.971	15	5.071	29	445	86	7.617
	Penumpang	78.346	60	13.539	1.329	4.173	9.500	106.947
	Jumlah Kedatangan	1.984	15	5.666	29	444	86	8.224
	Penumpang	78.345	49	12.752	12.752	3.932	8.134	115.964

Sumber: Statistik Transportasi Papua Tahun 2021

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Teknologi Komunikasi dan Informatika merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah. Teknologi komunikasi dan informatika meningkatkan akses terhadap pelayanan pemerintah, membantu proses pengawasan dan pengaduan layanan masyarakat. Hal ini mendorong proses transparansi kegiatan yang dilakukan pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dalam level individu dan komunitas, ketersediaan akses teknologi informasi dan komunikasi mempermudah pertukaran informasi antar individu maupun kelompok dan memicu pertumbuhan aktivitas dan kolaborasi. Kemudahan akses kepada informasi juga membuka informasi serta peluang terhadap pasar yang lebih luas. Namun demikian dibutuhkan kesiapan masyarakat dalam hal pengoperasian peralatan komunikasi serta pengetahuan terhadap substansi aktivitas yang berkaitan. Untuk hal ini komunikasi dan informasi berperan mempercepat proses pendidikan dan penyebaran pengetahuan yang mendukung kesiapan masyarakat dalam mengakses teknologi. Peningkatan akses teknologi komunikasi dan informatika perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan akses pada layanan masyarakat, mendukung transparansi, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesiapan masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan mendorong roda perputaran ekonomi dan pembangunan.

Tabel II.71 menyajikan persentase pengguna Telepon nirkabel di tiap Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Secara umum proporsi pengguna telepon nirkabel selalu meningkat di seluruh kabupaten. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten dengan proporsi pengguna telepon tertinggi di tahun 2022 (74,07%) sementara Provinsi Asmat merupakan kabupaten dengan proporsi pengguna telepon nirkabel terendah di tahun 2022 (19,10%).

Tabel II.71 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Menggunakan Telepon di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	72,18	70,73	72,21	63,87	74,07
Boven Digoel	52,68	59,55	59,29	51,04	62,12
Mappi	15,90	20,57	28,77	24,17	44,70
Asmat	19,17	19,11	15,62	20,99	19,10
Rata-rata	39,98	42,49	43,97	40,02	50,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Papua 2018-2022

Tabel II.72 menunjukkan jumlah dan persentase kampung/ kelurahan berdasarkan jenis sinyal internet yang diterima. Pertumbuhan jenis sinyal internet dengan kualitas 4G/LTE meningkat sebesar lebih dari 40% di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Namun demikian ketimpangan ketersediaan jaringan internet masih cukup terasa di mana 10-50% desa di tiap kabupaten belum terlayani jaringan internet.

Tabel II.72 Banyaknya Kampung/Kelurahan Berdasarkan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Tahun 2019-2021

Kabupaten	Kualitas jaringan	2019		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4G/LTE	50	41%	88	69%	115	85%
	3G/H+/H/EVDO	31	25%	8	6%	7	5%
	2.5G/E/GPRS	3	2%	6	5%	1	1%
	Tidak ada	39	32%	25	20%	12	9%
Boven Digoel	4G/LTE	2	3%	30	41%	39	51%
	3G/H+/H/EVDO	4	6%	1	1%	3	4%
	2.5G/E/GPRS	11	16%	3	4%	4	5%
	Tidak ada	52	75%	39	53%	31	40%
Mappi	4G/LTE	-	0%	30	29%	54	50%
	3G/H+/H/EVDO	-	0%	2	2%	4	5%
	2.5G/E/GPRS	7	10%	8	9%	7	9%
	Tidak ada	62	62%	62	57%	43	50%
Asmat	4G/LTE	-	0%	12	17%	25	43%
	3G/H+/H/EVDO	2	3%	3	4%	1	2%
	2.5G/E/GPRS	36	55%	32	45%	17	29%
	Tidak ada	27	42%	24	34%	15	26%

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2021-2023

Tabel II.73 menunjukkan persentase penduduk yang mengakses internet di Provinsi Papua Selatan. Secara umum proporsi penduduk yang mengakses internet di Provinsi Papua Selatan meningkat sebesar 15% dari 17,54% di tahun 2018 menjadi 32,10% pada tahun 2022. Penduduk di Kabupaten Mappi dan Asmat merupakan kabupaten dengan penduduk yang paling banyak belum mengakses internet di tahun 2022. Kurang dari 20% penduduk di kabupaten tersebut yang sudah mengakses internet. Peningkatan akses kepada internet perlu ditingkatkan dalam rangka penyebaran informasi melalui media online.

Tabel II.73 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	35,62	40,95	46,32	54,46	55,94
Boven Digoel	25,47	26,42	27,38	33,63	41,46
Mappi	4,23	7,91	10,58	13,61	17,25
Asmat	4,87	8,54	6,74	16,97	13,78
Rata-rata	17,54	20,00	22,76	29,67	32,10

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Papua 2018-2022

Tabel II.74 menyajikan persentase penduduk di atas 5 tahun yang menggunakan komputer. Secara umum terjadi sedikit penurunan pengguna komputer dari tahun 2022 (8,4%) dibandingkan tahun 2018 (9,03%). Kabupaten Asmat memiliki proporsi pengguna komputer paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya (4,82%). Proporsi pengguna komputer di Papua Selatan secara umum masih rendah (<10%) mengindikasikan keperluan masyarakat terhadap alat komputasi masih relatif rendah.

Tabel II.74 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	17,72	14,94	15,16	13,3	13,11
Boven Digoel	12,24	9,17	8,12	7,23	8,97
Mappi	3,33	2,84	2,78	5,15	6,73
Asmat	2,82	3,74	3,58	5,72	4,82
Rata-rata	9,03	7,67	7,41	7,85	8,40

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Papua 2018-2022

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Tabel II.75 menunjukkan jumlah koperasi menurut jenis koperasi di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.75 diketahui terdapat 258 unit koperasi di Papua Selatan. Meskipun demikian perlu dikaji lebih lanjut karena jumlah ini belum memisahkan antara koperasi aktif dan koperasi yang tidak aktif.

Tabel II.75 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Kategori	Merauke		Boven Digoel		Mappi		Asmat		Papua Selatan	
	unit	%	unit	%	unit	%	unit	%	unit	%
Koperasi Unit Desa (KUD)	10	6,54	2	3,70	2	16,67	0	0,00	14	5,43
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)	12	7,84	0	0,00	1	8,33	0	0,00	13	5,04
Koperasi Karyawan (KOPKAR)	7	4,58	0	0,00		0,00	0	0,00	7	2,71
Koperasi Wanita (KOPWAN)	4	2,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	1,55
Koperasi Serba Usaha (KSU)	48	31,37	0	0,00	1	8,33	0	0,00	49	18,99
Koperasi Peranserta Masyarakat Adat (KOPERMAS)	0	0,00	0	0,00	7	58,33	0	0,00	7	2,71
Lainnya	72	47,06	52	96,30	1	8,33	39	100,00	164	63,57
JUMLAH	153	100,00	54	100,00	12	100,00	39	100,00	258	100,00

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

Dalam Tabel II.75 juga dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis usahanya, koperasi dengan distribusi merata di setiap kabupaten adalah Koperasi Unit Desa (KUD) meskipun jumlah agregatnya masih sedikit dibandingkan koperasi jenis usaha lainnya. Apabila meninjau berdasarkan wilayah, Kabupaten Merauke memiliki jumlah koperasi terbanyak yaitu 153 koperasi, sedangkan wilayah dengan jumlah koperasi terkecil adalah Boven Digoel yaitu hanya 12 koperasi.

2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

2.3.2.12.1 Pembangunan Pemuda

Untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, dilakukan perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Dengan adanya IPP diharapkan terdapat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. IPP merupakan komposit dari domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan distriminasi, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.76.

Tabel II.76 Domain dan Indikator Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda

Domain	Indikator
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
	APK Sekolah Menengah
	APK Perguruan Tinggi
Kesehatan dan Kesejahteraan	Angka kesakitan pemuda
	Persentase korban kejahatan
	Persentase pemuda yang merokok
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil
Lapangan dan Kesempatan Kerja	Persentase pemuda wirausaha kerah putih
	Tingkat pengangguran terbuka
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi
	Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat
Gender dan Diskriminasi	Angka perkawinan usia anak
	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas
	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2022 (<https://ipp.sarikata.com/?t=2021>)

Sehubungan dengan belum tersedianya data agregat untuk Provinsi Papua Selatan sebagai DOB, maka dalam meninjau kinerja pembangunan pemuda Provinsi Papua Selatan menggunakan data kinerja IPP Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Berdasarkan Tabel II.77 diketahui terdapat peningkatan IPP Provinsi Papua dari skor 48,00 pada tahun 2017 menjadi 52,00 pada tahun 2021. Meskipun nilai IPP Provinsi Papua masih berada di bawah nasional, namun skor IPP Papua mengalami peningkatan signifikan dan hampir menyamai skor nasional.

Tabel II.77 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2017-2022

Domain	Tahun	Papua	Indonesia
Pendidikan	2017	56,67	63,33
	2018	50,00	66,67

Domain	Tahun	Papua	Indonesia
	2019	56,67	70,00
	2020	56,67	70,00
	2021	56,67	70,00
Kesehatan dan Kesejahteraan	2017	55,00	55,00
	2018	62,50	57,50
	2019	67,50	55,00
	2020	67,50	55,00
	2021	75,00	60,00
Lapangan dan Kesempatan Kerja	2017	45,00	35,00
	2018	45,00	40,00
	2019	45,00	45,00
	2020	50,00	40,00
	2021	45,00	40,00
Partisipasi dan Kepemimpinan	2017	50,00	46,67
	2018	46,67	46,67
	2019	46,67	46,67
	2020	46,67	46,67
	2021	53,33	43,33
Gender dan Diskriminasi	2017	33,33	46,67
	2018	33,33	46,67
	2019	33,33	46,67
	2020	30,00	43,33
	2021	30,00	53,33
IPP	2017	48,00	49,33
	2018	47,50	51,50
	2019	49,83	52,67
	2020	50,17	51,00
	2021	52,00	53,33

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2022 (<https://ipp.sarikata.com/?t=2021>)

Apabila meninjau berdasarkan domain komponen IPP, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) domain IPP yang telah melebihi angka nasional yaitu: (1) kesehatan dan kesejahteraan; (2) lapangan dan kesempatan kerja; serta (3) partisipasi dan kepemimpinan. Adapun domain IPP yang termasuk dalam kategori rendah dan masih di bawah angka nasional adalah domain gender dan diskriminasi, serta domain pendidikan.

2.3.2.12.2 Pembangunan Olahraga

Penyusunan kebijakan dan program pembinaan olahraga dalam konteks daya saing daerah tidak hanya terbatas pada capaian olahraga prestasi, tetapi juga olahraga pendidikan yang menekankan pada penanaman nilai moral dan etos kerja serta olahraga masyarakat yang menekankan pada kesehatan dan modal sosial. Olahraga merupakan “*driving forces*” bagi meningkatnya sejumlah komponen pembentuk daya saing karena kebugaran jasmani dan kesehatan fisik menjadi faktor krusial guna mendukung produktivitas dan ketahanan masyarakat suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat mengukur pembangunan olahraga adalah Indeks Pembangunan Olahraga (*Sport Development Index*) yang merupakan indeks komposit dari berbagai dimensi yaitu, SDM, ruang terbuka, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa (lihat Tabel II.78).

Tabel II.78 Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Papua Tahun 2021-2022

Dimensi	Definisi	2021	2022
SDM	rasio antara jumlah ketenagaan olahraga (guru, pelatih, instruktur, dan relawan) dengan jumlah penduduk berusia 5 tahun ke atas pada suatu daerah	0,071	0,054
Ruang terbuka	tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik indoor maupun outdoor	0,246	0,336
Partisipasi	Keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir	0,279	0,282
Kebugaran	Kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti.	0,228	0,218
Literasi Fisik	pengetahuan, sikap, dan kompetensi fisik dari individu untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat	0,563	0,575
Kesehatan	Sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif.	0,448	0,430
Perkembangan Personal	Nilai-nilai kehidupan seperti persahabatan, kepemimpinan, respek pada aturan, menghormati lawan, dan keberanian mengambil risiko sebagai dampak perkembangan personal olahraga	0,537	0,576
Ekonomi	Eksternalitas di bidang ekonomi yang tumbuh sebagai dampak aktivitas olahraga	0,725	0,712
Performa	Dalam konteks olahraga prestasi, perolehan medali menjadi ukuran yang absolut	0,479	0,877
Indeks Pembangunan Olahraga		0,397	0,451

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2021-2022 (dalam "Laporan Nasional Sport Development Indeks")

Sehubungan dengan belum tersedianya data agregat untuk Provinsi Papua Selatan sebagai DOB, maka dalam meninjau kinerja pembangunan olahraga Provinsi Papua Selatan menggunakan data kinerja Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Berdasarkan Tabel II.78 diketahui terdapat peningkatan Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Papua dari skor 0,397 pada tahun 2021 menjadi 0,451 pada tahun 2022. Apabila meninjau berdasarkan domain komponen Indeks Pembangunan Olahraga, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) dimensi dengan capaian yang paling baik, yaitu: (1) ekonomi; (2) perkembangan sosial; serta (3) literasi fisik. Adapun dimensi yang termasuk rendah adalah SDM, kebugaran dan partisipasi.

2.3.2.13 Statistik

Pencatatan Statistik yang dilakukan oleh Provinsi Papua Selatan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk melakukan urusan statistik Provinsi Papua Selatan. Kelengkapan yang digunakan sebagai indikator kelengkapan urusan statistik merujuk lampiran Permendagri No. 45 Tahun 2020 yaitu ketersediaan dokumen data sebagai bahan kegiatan perencanaan daerah sebagai berikut:

1. Buku Provinsi Daerah
2. Buku Statistik Daerah
3. Buku PDRB Provinsi

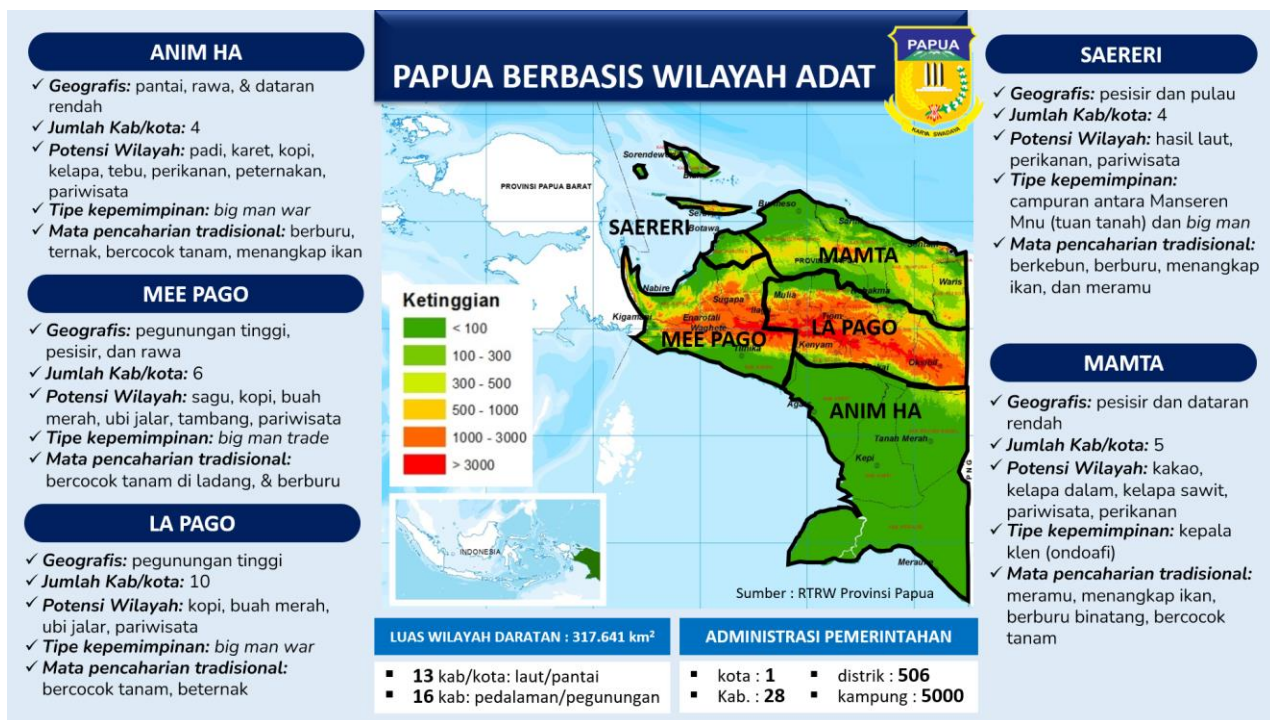
Semenjak ditetapkan sebagai provinsi Papua Selatan pada Juli 2022 hingga dokumen perencanaan ini dibuat, urusan statistik provinsi masih dalam tahap peralihan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan. Sehingga dokumen statistik pada level Provinsi belum terpublikasi. Sumber data perencanaan selama masa peralihan masih menggunakan sebagian data Provinsi Papua sebagai provinsi induk sebelum Provinsi Papua Selatan terbentuk. Data Kabupaten yang terdapat di buku

statistik provinsi maupun statistik Kabupaten dan Kota juga digunakan untuk kemudian diagregatkan atau dicari nilai tengah sebagai pendekatan data Provinsi Papua Selatan.

2.3.2.14 Kebudayaan

Provinsi Papua Selatan merupakan bagian dari wilayah adat Anim Ha dengan karakteristik geografis pesisir dan dataran rendah, tipe kepemimpinan “kepala klen” (ondoafi), serta mata pencaharian tradisional meramu, menangkap ikan, berburu binatang dan bercocok tanam (lihat **Error! Reference source not found.**). Pembagian wilayah adat ini dilakukan berdasarkan indikator kesamaan dalam aspek hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik, geografis, dan lainnya.

Gambar II.65 Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua



Sumber: RPJMD Provinsi Papua 2018-2023

Mengutip dari website DPMKOAP Provinsi Papua, Marind Anim adalah suku yang menjadi tuan rumah di tanah datar ini. Suku Marind Anim menghuni empat penjuru mata angin dengan tujuh marga besar, yaitu Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Balagaize, dan Basik-basik. Seperti dituliskan J. Van Baal dalam karyanya, ‘*Dema” Description and Analysis of Marind Anim Culture*’, dahulu Suku Marind atau Malind punya kepercayaan terhadap dema, yakni roh yang dipercaya bisa menjelma sebagai apa pun di alam ini, baik manusia, binatang, tumbuhan, atau batu. Semua alam semesta berasal dari dema. Dema ini berupa kekuatan gaib dalam alam, atau berupa roh-roh orang mati. Semua itu terkait pula dengan konsep mereka tentang totemisme. Karena itu ada dema-dema alam yang dipuja selain dema-dema totemnya sendiri. Ada dema yang memunculkan diri di hadapan manusia berbentuk manusia pula atau berbentuk hewan. Ada yang disebut yorma (dema laut), wonatai (totem buaya), yawi (dema kelapa) dan lain-lain. Hari berganti bulan, tahun berganti abad, keharmonisan masyarakat Malin dengan alam terus terjaga. Perilaku berburu,

meramu dan bercocok tanam masih dipertahankan hingga saat ini. Satu hal lagi, sagu merupakan sumber makanan pokok penduduk Malind Anim. Sagu juga digunakan dalam ritual peradilan adat, musyawarah dan adat perkawinan. Orang Marind sangat terkenal dengan makanan khas yang berasal dari olahan sagu, bercitarasa sedap dan lezat. Pohon sagu juga bisa digunakan untuk perahu dan bahan bangunan rumah. Sagu sangat menunjang kehidupan orang marind, itulah sebabnya mereka menganggap sagu sebagai 'raja', yang harus dihormati dan dipelihara.

Suku Marind Anim mendiami dataran luas di bagian selatan, mulai dari Selat Muli (Selat Marianne) sampai ke daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Sebagian dari mereka tersebar pula di sekitar daerah aliran sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe dan Maro. Daerah tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Okaba, Merauke, sebagian Kecamatan Kimam dan Muting di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Daerah ini merupakan dataran rendah bersavana dengan floranya yang mirip flora benua Australia dan dataran berawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu di sungai-sungai. Jumlah populasinya sekitar 5.000-7.000 jiwa.

Suku lainnya yang berada di wilayah Anim Ha adalah Suku Asmat. Suku asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. populasi suku asmat terbagi dua yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal cara hidup, struktur sosial dan ritual. Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi ke dalam dua bagian yaitu suku bisman yang berada di antara sungai sinesty dan sungai nin serta Suku Simai.

Suku Asmat meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan Dewa Fumeripitsy yang turun dari dunia gaib yang berada di seberang laut di belakang ufuk, tempat matahari terbenam tiap hari. Menurut keyakinan mereka, dewa nenek-moyang itu dulu mendarat di bumi di suatu tempat yang jauh di pegunungan. Dalam perjalanannya turun ke hilir sampai ia tiba di tempat yang kini didiami oleh orang Asmat hilir, ia mengalami banyak petualangan.

Suku Asmat ada yang tinggal di daerah pesisir pantai, jarak mereka antara satu lokasi dengan lokasi pemukiman lainnya berkisar 100 km hingga 300 km. Bahkan yang berada di daerah pedalaman, dikelilingi oleh hutan heterogen yang berisi tanaman rotan dan kayu (gaharu) waktu tempuhnya mencapai 1 hari 2 malam untuk mencapai daerah pemukiman satu dengan yang lainnya. Sedangkan jarak antara perkampungan dengan kecamatan sekitar 70 km. Dengan kondisi geografis demikian, maka berjalan kaki merupakan satu-satunya cara untuk mencapai daerah perkampungan satu dengan lainnya.

Orang-orang Asmat pandai membuat hiasan ukiran tanpa membuat sketsa terlebih dahulu. Ukiran-ukiran yang mereka buat memiliki makna, yaitu persembahan dan ucapan terima kasih kepada nenek moyang. Bagi Suku Asmat, mengukir bukan pekerjaan biasa, melainkan jalan bagi mereka untuk berhubungan dengan para leluhur.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Pembahasan urusan pemerintahan pilihan dalam subbab ini terdiri atas pembahasan tentang: (1) urusan kelautan dan perikanan; (2) urusan pariwisata; (3) urusan pertanian; (4) urusan kehutanan; (5) urusan energi dan sumber daya mineral; (6) urusan perindustrian; serta (7) urusan perdagangan.

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

2.3.3.1.1 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Terdapat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Provinsi Papua Selatan yang berlokasi di Kabupaten Merauke dengan letak geografis antara 137°-141° BT dan 5°-9° LS. Dengan lokasinya yang strategis, Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang wilayahnya menghadap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.54/MEN/2014, estimasi potensi sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 terdiri dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang, ikan karang konsumsi, lobster dan cumi-cumi. Di antara potensi tersebut, ikan pelagis kecil merupakan potensi yang terbesar, sedangkan produksi terkecil adalah lobster. Dari potensi perikanan tersebut, Kabupaten Merauke baru memanfaatkan sebesar 15% dari potensi lestari (potensi berkelanjutan) di WPP 718, sehingga terdapat peluang dan prospek untuk memanfaatkan potensi sebesar 85% sebagai penggerak ekonomi maritim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Gambar II.66 Masterplan SKPT Merauke



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015 (dalam dokumen "Masterplan SKPT Merauke")

Permasalahan yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah: (1) kondisi sarana dan prasarana yang belum mendukung; (2) keterbatasan pendidikan dan kemampuan SDM setempat; (3) jenis alat tangkap dan perahu yang digunakan masih tradisional; (4) belum tersedia prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan; serta (5) adanya kapal asing yang melakukan illegal fishing dengan jumlah yang besar.

Berkaitan dengan rencana pembangunan SKPT, terdapat strategi pengembangan perikanan di Kabupaten Merauke untuk dua peruntukan, yaitu kawasan pendukung SKPT dan kawasan pusat SKPT. Kawasan pendukung SKPT berada di wilayah pesisir berada di Distrik Tabonji, Ilwayab, Kimaam, Waan, Okaba, Tubang, Malind, Naukenjerai, dan Semangga. Adapun kawasan pusat SKPT berada di Distrik Merauke. Dalam rangka pengembangan kelautan dan perikanan, lokasi sentra-sentra produksi perikanan tangkap yang potensial untuk dikembangkan di kawasan pendukung berada di Distrik Tabonji, Ilwayab, Kimaam, dan Waan. Kemudian sebagai pusat kawasan berada di Merauke yang berfungsi sebagai kawasan industri pengolahan; pemasaran dan distribusi kelautan dan perikanan terintegrasi yang dirancang dengan pendekatan konektivitas antar kawasan.

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep pengembangan perikanan di SKPT Merauke berbasis inti dan plasma yang dinamis. Kawasan sentra-sentra produksi perikanan tangkap sebagai **"plasma"** artinya kawasan tersebut sebagai sumber produksi perikanan tangkap bagi pengembangan perikanan, meliputi wilayah Distrik Merauke, Tabonji, Ilwayab, Kimaam, dan Waan. Untuk mendukung kinerja kawasan plasma ini dibangun pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana (dermaga, cold storage, pabrik es, suplai air, energi listrik). Sedangkan untuk mendukung kegiatan nelayan dibantu dengan sarana penangkapan ikan (perahu dan alat penangkapan ikan). Secara faktual, masyarakat Pulau Kolepon yang perlu dibantu dalam penyediaan armada kapal adalah sebesar 10.358 nelayan. Untuk memanfaatkan potensi hasil tangkapan perikanan sebesar 69.750 ton, maka diperkirakan membutuhkan motor tempel 5 GT dengan kapasitas 2 ton/motor tempel sebanyak 34.875 unit motor tempel. Oleh sebab itu, masing-masing lokasi pelabuhan perikanan membutuhkan 159 unit motor tempel/lokasi/tahun. Selain itu, alat tangkap yang digunakan antara lain pukat udang, tramell net, gill net, jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring insang angkat, pancing, bubu dan jala. Selain itu, dengan adanya peluang ekspor berupa ikan dan udang hingga Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Thailand, Eropa dan Australia, maka perlu dilakukan pengembangan armada kapal 10-30 GT, sedangkan untuk kapal insulated) untuk melakukan kegiatan collecting (mengumpulkan) produksi dari masing-masing sentral produksi.

Distrik Merauke yang berada di kawasan pelabuhan perikanan Merauke dan sekitarnya, ditetapkan sebagai **"inti"** atau pusat kawasan industri pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk perikanan, pendaratan ikan, pintu gerbang pasar luar daerah termasuk ekspor beserta pelayanannya. Sebagai kawasan inti, Distrik Merauke perlu dilengkapi dengan sarana industri pengolahan (cold storage, pabrik es, suplai air, energi listrik, pasar ikan) dan prasarana pelabuhan perikanan (dermaga, kawasan industri, jalan komplek). Dalam operasionalisasinya, produksi hasil penangkapan para nelayan ditampung di pelabuhan perikanan pada masing-masing sentra

produksi. Pada periode tertentu, kapal pengangkut mengumpulkan produksi di masing-masing pelabuhan perikanan dan dibawa ke Kimaam (alternatif pertama) dan/atau ke Wanam (alternatif kedua). Selanjutnya, semua produksi yang sudah terkumpul diangkut melalui laut dan udara menuju Merauke.

2.3.3.1.2 Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan terjadi di Kabupaten Merauke, Mappi dan Asmat. Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan sebesar 60.296 ton dengan nilai produksi Rp. 1,93 triliun (lihat Tabel II.79). Produksi perikanan tangkap terbesar terdapat di Kabupaten Merauke sebesar 46.286 ton dengan nilai Rp.1,50 triliun, atau 76,76% dari total produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan.

Gambar II.67 Kondisi Perikanan Tangkap di Provinsi Papua Selatan

(a) Pemasaran hasil tangkapan ikan di Asmat



(b) Pembuatan ikan asin di Asmat



(c) Kapal penangkap ikan di Merauke



(d) Ikan Kakap Cina di Merauke



Sumber:

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Asmat (<https://www.asmatkab.go.id/gallery/perikanan>)
- (2) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua, 2016 (dalam dokumen "Papua in Picture: Anim Ha")

Berdasarkan lokasinya, perikanan tangkap dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu perikanan tangkap di laut dan perikanan perairan umum daratan (sungai, danau, dsb). Dalam Tabel II.79 dapat diketahui bahwa produksi perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan perairan umum daratan. Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di laut sebesar 58.226 ton dengan nilai Rp.1,91 triliun, sedangkan produksi perikanan perairan umum daratan sebesar 2.070 ton dengan nilai Rp.19,18 miliar. Dalam hal ini, kabupaten

Merauke merupakan wilayah penghasil perikanan tangkap terbesar, baik perikanan tangkap di laut maupun perikanan perairan umum daratan.

Tabel II.79 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Perairan Umum Daratan		Total	
	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)
Merauke	44.786	1.483.533.626	1.500	13.907.421	46.286	1.497.441.047
Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
Mappi	12.002	400.501.089	486	4.490.954	12.488	404.992.043
Asmat	1.438	23.751.885	84	785.426	1.522	24.537.311
Papua Selatan	58.226	1.907.786.600	2.070	19.183.801	60.296	1.926.970.401

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Tabel II.80 menunjukkan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di laut menurut komoditas utama di Provinsi Papua Selatan tahun 2020. Dalam Tabel II.80 diketahui bahwa komoditas utama dengan produksi terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah ikan cakalang (1.915 ton) dan ikan tuna (1.779 ton). Adapun nilai produksi perikanan tertinggi adalah ikan tuna yaitu sebesar Rp.149,17 miliar. Berdasarkan kabupaten, wilayah yang secara konstan berkontribusi dalam produksi ikan tangkap cakalang, tongkol dan tuna adalah Kabupaten Merauke. Meskipun demikian, Kabupaten Mappi unggul dalam produksi udang sebanyak 751 ton dengan nilai produksi Rp. 30,06 miliar.

Tabel II.80 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020

Kabupaten	Cakalang	Tongkol	Tuna	Udang	Lainnya	Total
Volume (Ton)						
Merauke	1.915	397	1.779	123	40.572	44.786
Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
Mappi	0	0	0	751	11.251	12.002
Asmat	0	0	0	0	1.438	1.438
Papua Selatan	1.915	397	1.779	874	53.261	58.226
Nilai (Rp.000)						
Merauke	57.629.559	12.526.014	149.172.077	6.373.224	1.257.832.752	1.483.533.626
Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
Mappi	0	0	0	30.056.000	370.445.089	400.501.089
Asmat	0	0	0	0	23.751.885	23.751.885
Papua Selatan	57.629.559	12.526.014	149.172.077	36.429.224	1.652.029.726	1.907.786.600

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

2.3.3.1.3 Perikanan Budidaya

Selain dari perikanan tangkap, produksi perikanan Provinsi Papua Selatan juga berasal dari perikanan budidaya. Pada tahun 2021, produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Papua Selatan terdapat di Kabupaten Merauke (1.500 ton dengan nilai produksi Rp.13,91 milyar) dan Kabupaten Mappi (486 ton dengan nilai produksi Rp.4,49 milyar), sebagaimana yang ditampilkan dalam **Error! Reference source not found..** Berdasarkan produksi dan nilai produksi yang teridentifikasi, dapat diketahui pada tahun 2021 total produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Selatan sebesar 2.070 ton dengan nilai produksi Rp.19,18 milyar rupiah.

Tabel II.81 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Komoditas Utama			Total
	Udang	Ikan	Lainnya	
Volume (Ton)				
Merauke	0	1.500	0	1.500
Boven Digoel	0	0	0	0
Mappi	0	486	0	486
Asmat	0	84	0	84
Papua Selatan	0	2.070	0	2.070
Nilai (Rp.000)				
Merauke	0	13.907.421	0	13.907.421
Boven Digoel	0	0	0	0
Mappi	0	4.490.954	0	4.490.954
Asmat	0	785.426	0	785.426
Papua Selatan	0	19.183.801	0	19.183.801

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Selatan dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatannya, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel II.82. Berdasarkan Tabel II.82 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 986 ton produksi pembesaran, 10,53 juta ekor produksi pembenihan, serta 12 ribu ekor produksi ikan hias.

Tabel II.82 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Pembesaran (ton)	Pembenihan (1000 ekor)	Ikan Hias (1000 ekor)
Merauke	394	10.470	11
Boven Digoel	3	60	1
Mappi	498	0	0
Asmat	91	0	0
Papua Selatan	986	10.530	12

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Tabel II.83 menunjukkan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan komoditas utama di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.83 diketahui bahwa berdasarkan jenis ikan komoditas utama, budidaya ikan terbesar di Merauke tahun 2021 adalah budidaya ikan nila (943 ton dengan nilai produksi Rp.51,49 milyar), ikan mas (456 ton dengan nilai produksi Rp.23,63 milyar) dan ikan lele (151 ton dengan nilai produksi Rp.6,10 milyar). Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, produksi budidaya ikan nila terbesar terdapat di Kabupaten Mappi (408 ton), produksi budidaya ikan mas terbesar terdapat di Kabupaten Asmat (195 ton), sedangkan produksi budidaya ikan lele hanya terdapat di Kabupaten Mappi (78 ton) dan Merauke (73 ton).

Tabel II.83 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Jenis Ikan					
	Gurame	Patin	Lele	Nila	Ikan Mas	Udang
Volume (Ton)						
Merauke	0	0	73	236	85	0
Boven Digoel	0	0	0	166	86	0
Mappi	0	0	78	408	90	0
Asmat	0	0	0	133	195	0

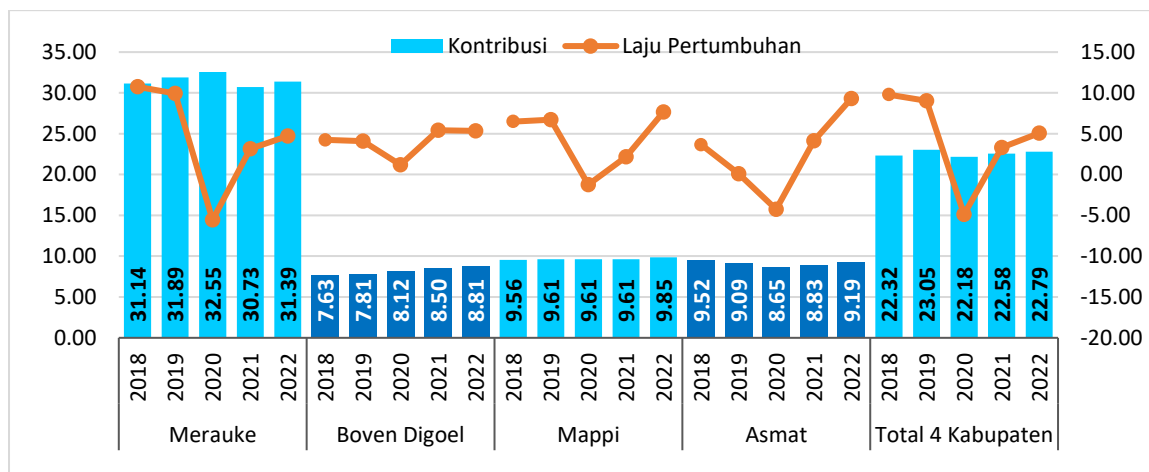
Kabupaten	Jenis Ikan					
	Gurame	Patin	Lele	Nila	Ikan Mas	Udang
Papua Selatan	0	0	151	943	456	0
Nilai (Rp.000)						
Merauke	0	0	3.303.132	9.646.434	3.607.230	0
Boven Digoel	0	0	0	10.239.010	4.731.640	0
Mappi	0	0	2.796.800	21.880.416	4.203.940	0
Asmat	0	0	0	9.733.200	11.088.780	0
Papua Selatan	0	0	6.099.932	51.499.060	23.631.590	0

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

2.3.3.2 Pariwisata

Dalam mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah diperlukan identifikasi semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata karena pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri. Terdapat 4 sektor utama yang menjadi komponen perhitungan pendapatan regional sektor pariwisata, yaitu: (1) penyediaan akomodasi dan makan minum; (2) transportasi dan pergudangan; (3) informasi dan komunikasi; serta (4) perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2018-2022 pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten di Provinsi Papua Selatan berada dalam kondisi fluktuatif karena mengalami trend menurun pada 2018-2020 namun mengalami peningkatan pada 2020-2022 (lihat Gambar II.68 dan Tabel II.84).

Gambar II.68 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (data diolah)

Tabel II.84 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap Perekonomian (PDRB) di Papua Selatan 2016-2020 (%)

Wilayah	Sektor	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten					Laju Pertumbuhan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	Sektor Pariwisata	31,14	31,89	32,55	30,73	31,39	10,75	9,95	-5,56	3,15	4,73
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,13	14,32	14,46	14,29	14,29	9,68	9,01	0,03	0,30	4,54
	Transportasi dan Pergudangan	7,88	8,10	8,23	6,04	6,54	11,17	9,29	-27,31	9,92	11,74

Wilayah	Sektor	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten					Laju Pertumbuhan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,31	1,34	1,35	1,16	1,25	10,25	8,59	-14,53	8,67	4,73
	Informasi dan Komunikasi	7,82	8,13	8,50	9,23	9,32	12,31	12,48	7,52	2,48	0,09
Boven Digoel	Sektor Pariwisata	7,63	7,81	8,12	8,50	8,81	4,25	4,09	1,19	5,42	5,34
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,37	5,51	5,80	6,15	6,37	1,87	1,35	-0,87	0,75	2,35
	Transportasi dan Pergudangan	1,73	1,76	1,75	1,75	1,84	4,95	5,14	1,31	0,24	0,26
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	2,06	-3,84	-10,34	-3,13	-0,38
	Informasi dan Komunikasi	0,30	0,31	0,34	0,35	0,36	0,00	13,33	0,00	5,88	5,56
Mappi	Sektor Pariwisata	9,56	9,61	9,61	9,61	9,85	6,49	6,73	-1,26	2,16	7,65
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,71	6,77	7,08	7,06	7,07	6,82	7,06	3,28	1,93	5,22
	Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,09	1,75	1,76	1,97	5,73	5,88	-17,01	2,75	17,66
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	8,49	8,50	-7,57	1,19	5,23
	Informasi dan Komunikasi	0,53	0,52	0,56	0,57	0,58	4,53	5,23	5,73	3,72	7,82
Asmat	Sektor Pariwisata	9,52	9,09	8,65	8,83	9,19	3,65	0,08	-4,28	4,15	9,33
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,32	5,86	5,73	5,81	5,83	2,96	-2,87	-1,61	3,66	5,26
	Transportasi dan Pergudangan	2,33	2,37	2,01	2,05	2,37	5,12	6,75	-14,89	4,28	21,50
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	6,47	-1,05	0,19	0,28	6,80
	Informasi dan Komunikasi	0,60	0,61	0,66	0,71	0,73	4,12	5,78	9,53	9,50	8,43
Total PDRB 4 Kabupaten	Sektor Pariwisata	22,32	23,05	22,18	22,58	22,79	9,78	9,02	-4,87	3,30	5,07
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,81	11,03	11,20	11,17	11,24	8,54	7,77	0,40	1,22	4,69
	Transportasi dan Pergudangan	5,61	5,78	4,38	4,69	5,05	10,24	8,71	-25,01	8,67	12,01
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,89	0,91	0,80	0,85	0,86	9,82	8,08	-13,41	7,98	4,67
	Informasi dan Komunikasi	5,02	5,33	5,80	5,86	5,65	12,01	12,21	7,51	2,61	0,31

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (data diolah)

Berdasarkan Tabel II.84 dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian kabupaten di Papua Selatan pada tahun 2018 adalah 22,32%, mengalami peningkatan menjadi 23,05% pada tahun 2019, namun terjadi penurunan kontribusi kembali menjadi 22,18% pada tahun 2020 sebagai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, sebagai dampak recovery ekonomi pasca pandemi, mulai terjadi perbaikan ekonomi di Papua Selatan termasuk peningkatan kontribusi pariwisata menjadi 22,58% pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan menjadi 22,79% pada tahun 2022.

Tabel II.85 Destinasi Wisata di Provinsi Papua Selatan

Kategori	Atraksi Wisata		Lokasi	
			Distrik	Kabupaten
1 Wisata Bahari	1	Pantai Lampu Satu	Merauke	Merauke
	2	Pantai Pombo (nama lain: "Pulau Ular")	Kimaam	
	3	Pantai Payum	Merauke	
	4	Pantai Onggaya	Naukenjerai	
	5	Pantai Onggari	Malind	

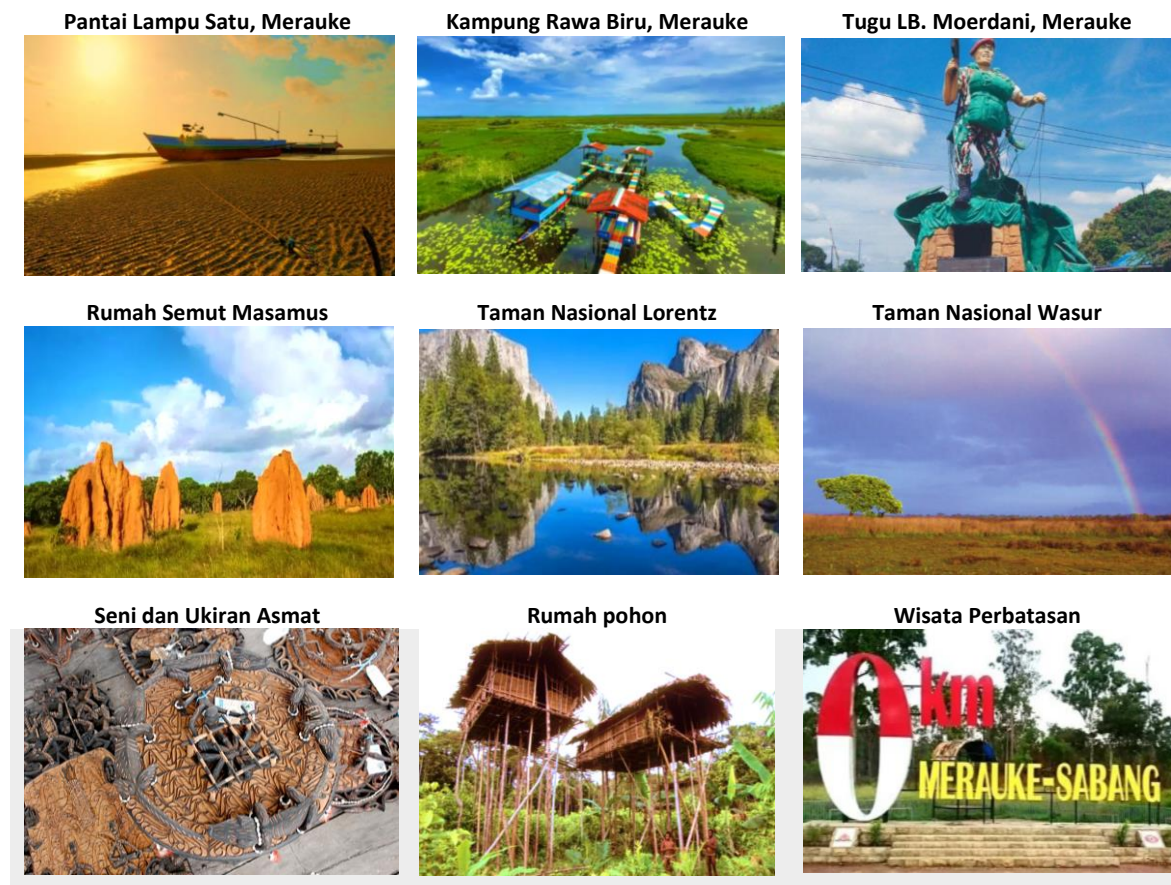
Kategori	Atraksi Wisata		Lokasi				
			Distrik	Kabupaten			
		6	Pantai Ndalir	Merauke dan Naukenjerai			
		7	Taman Wisata Pulau Kimaam	Kimaam			
		8	Rawa Biru	Sota			
				9	Pulau Ikan Ampera	Mandobo	Boven Digoel
				10	Pantai Bokap	Agats	Asmat
				11	Pantai Pek	Agats	
				12	Pantai Bayun	Pantai Kasuari	
		2	Wisata Alam	1	Cagar Alam Kumbe		Merauke
				2	Taman Nasional Wasur		
				3	Rumah Semut (Musamus)		
				4	Kawasan Sungai Ampera	Mandobo	Boven Digoel
				5	Gunung Koreom	Ambatkwi	
6	Pulau Terek			Subur			
7	Agrowisata Kebun Raya Kelapa Sawit			Jair			
8	Air Terjun Aman D. Tayon			Arimop			
9	Air Terjun Kun			Iniyandit			
10	Air Terjun Atakat			Iniyandit			
11	Air Terjun Kali Komen			Waropko			
12	Pemancingan Kali Munum Desa Patriot			Arimop			
13	Danau Wegi Boma Bomakia II			Bomakia			
14	Taman Nasional Lorenz			Sawa Erma	Asmat		
15	Pulau Tiga/Somel			Joerat			
16	Pulau Sengsara/Fumaripits			Akat			
17	Pulau Lak/Mamats			Sawa Erma			
				18	Rawa Baki	Sirets, Akat, Suru-suru	
				19	Ekowisata Folklor	Seluruh distrik	Mappi
				20	Kampung Soba (dengan nama lain "kampung batu" di Kota Sejuta Rawa)	Kepi	
3	Wisata Budaya	1	Upacara Tanam Sasi		Merauke		
		2	Jembatan Maro atau Tujuh Wali-Wali (TWW)				
		3	Wisata perbatasan	PLBN Sota			
		4	Rumah pohon dan kehidupan tradisional Suku Koroway dan Kombay	Yaniruma	Boven Digoel		
		5	Pesta ulat sagu	Yaniruma			
		6	Museum Kebudayaan dan Kerajinan	Agats	Asmat		
		7	Ukiran dan Kerajinan Asmat	Seluruh distrik			
		8	Rumah Panjang	Seluruh distrik			
		9	Perahu	Seluruh distrik			
		10	Tarian Sambutan, Tarian Memanggil Roh	Seluruh distrik			
		11	Adventure dan Rumah di Atas Pohon	Suator			
		12	Kawasan sekolah budi pekerti khas Asmat	Sawa Erma			
		13	Pesta Budaya Asmat	Agats			
				14	Kampung Suku Korowai		Mappi
4	Wisata Sejarah	1	Tugu LB. Moerdani	Tanah Miring	Merauke		
		2	Tugu Perbatasan				
		3	Tugu Kembaran Sabang-Merauke	Sota			
		4	Tugu Pepera	Merauke			
		5	Monumen Perjuangan Kemerdekaan				
		6	Puncak Adil Mandala		Boven Digoel		

Kategori	Atraksi Wisata	Lokasi			
		Distrik	Kabupaten		
	7	Penjara Situs Boven Digoel	Mandobo		
	8	Tugu Monumen Bung Hatta	Mandobo		
	9	Tanah Tinggi Maryam	Mandobo		
	10	Rumah Pengasingan Bung Hatta			
	11	Patung Uni Mimio	Bomakia		
	12	Taman makam pahlawan (perintis)	Mandobo		
	13	Mappi Pos	Edera		Mappi
5	Wisata Religi	1	Tugu 100 Tahun Gereja Katolik	Merauke	
		2	Gua Bunda Maria	Mandobo	Boven Digoel
		3	Goa Bunda Maria Autriop	Iniyandit	
		4	Gua Bunda Maria Kandon Kakuna	Mindiptana	

Sumber:

- (1) RTRW Provinsi Papua 2013-2033
- (2) Website Pemerintah Kabupaten Asmat (<https://www.asmatkab.go.id/page/pariwisata>)
- (3) Website Pemerintah Kabupaten Boven Digoel (https://bovendigoelkab.go.id/halaman/pariwisata_kebudayaan)
- (4) Website Pemerintah Kabupaten Merauke (<https://portal.merauke.go.id/news/2267/wisata-pantai-di-kota-merauke.html>)

Gambar II.69 Beberapa Atraksi Wisata di Provinsi Papua Selatan



Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Selatan dapat dikatakan belum optimal apabila dilihat dari besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Papua Selatan jika dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Provinsi Papua Selatan memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman

Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan ialah: Taman Nasional Lorentz di Asmat, dan Taman Nasional Wasur di Merauke. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Selatan dikelompokkan menjadi 4 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, dan obyek wisata alam. Selain itu, ada beberapa obyek wisata lainnya di Provinsi Papua Selatan yaitu Tugu Kembar Sabang Merauke di Merauke, Pantai Lampu Satu di Merauke, dan Museum Kebudayaan dan Kerajinan di Asmat. Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Selain akses konektivitas melalui pembangunan infrastruktur, perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Selatan sangat didukung oleh beberapa fasilitas penunjang kenyamanan dalam berwisata seperti sarana akomodasi/hotel. Berdasarkan Tabel II.86 diketahui terdapat peningkatan jumlah akomodasi di Provinsi Papua Selatan dari 34 unit pada tahun 2017 menjadi 47 unit pada tahun 2021. Kabupaten yang memiliki sarana akomodasi terbanyak adalah Kabupaten Merauke (tahun: 23 unit) dan Boven Digoel (tahun 2022: 15 unit) Adapun jumlah sarana akomodasi di wilayah lainnya masih terbatas yaitu sebanyak 3 unit di Kabupaten Mappi dan 6 unit di Kabupaten Asmat.

Tabel II.86 Banyaknya Sarana Akomodasi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2017-2021

Kabupaten	Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	Akomodasi	16	18	18	18	23
	Kamar	363	362	410	434	483
	Tempat Tidur	480	486	550	599	627
Boven Digoel	Akomodasi	9	14	14	15	15
	Kamar	97	155	158	205	181
	Tempat Tidur	110	172	173	203	205
Mappi	Akomodasi	5	7	5	3	3
	Kamar	76	98	84	60	60
	Tempat Tidur	95	147	124	73	79
Asmat	Akomodasi	4	4	5	5	6
	Kamar	68	75	100	130	77
	Tempat Tidur	93	123	153	126	126
Papua Selatan	Akomodasi	34	43	42	41	47
	Kamar	604	690	752	829	801
	Tempat Tidur	778	928	1000	1001	1037

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023")

Tabel II.87 menunjukkan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.87 diketahui bahwa tamu asing dan domestic memiliki preverensi menginap lebih lama di hotel berbintang, dibandingkan dengan hotel non-bintang. Adapun rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di hotel berbintang adalah 3,25 hari, sedangkan rata-rata lama menginap di hotel non-bintang adalah 2,69 hari. Di hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu asing adalah 5,48 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik hanya mencapai 3,25 hari.

Tabel II.87 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Provinsi Papua Selatan (hari) Tahun 2021

Kabupaten	Hotel Bintang			Hotel Non-Bintang		
	Tamu Asing	Tamu Domestik	Asing+ Domestik	Tamu Asing	Tamu Domestik	Asing+ Domestik
Merauke	5,48	2,67	2,67	-	1,83	1,83
Boven Digoel	-	3,83	3,83	-	3,76	3,76
Mappi	-	-	-	-	2,62	2,62
Asmat	-	-	-	-	2,46	2,54
Rata-rata	5,48	3,25	3,25	-	2,67	2,69

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023")

Tabel II.88 menunjukkan persentase tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi lainnya menurut jenis hotel di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.88 diketahui terdapat penurunan rata-rata tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi di kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang menurun dari 54,87% pada tahun 2018 menjadi 31,91% pada tahun 2021. Adapun tingkat penghunian kamar hotel non-bintang menurun dari 38,61% pada tahun 2018 menjadi 13,33% pada tahun 2021. Penurunan tingkat penghunian hotel serta rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten dalam upaya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Tabel II.88 Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel di Papua Selatan Tahun 2021

Kategori	Kabupaten	2018	2019	2020	2021
Hotel Berbintang	Merauke	54,87	n.a	31,56	42,88
	Boven Digoel	-	n.a	12,44	20,94
	Mappi	-	n.a	-	-
	Asmat	-	n.a	-	-
	Rata-rata 4 Kabupaten	54,87	n.a	22,00	31,91
Hotel Non Bintang	Merauke	27,90	n.a	7,60	13,98
	Boven Digoel	54,71	n.a	21,65	28,23
	Mappi	-	n.a	0,80	8,22
	Asmat	33,21	n.a	2,84	2,90
	Rata-rata 4 Kabupaten	38,61	n.a	8,22	13,33

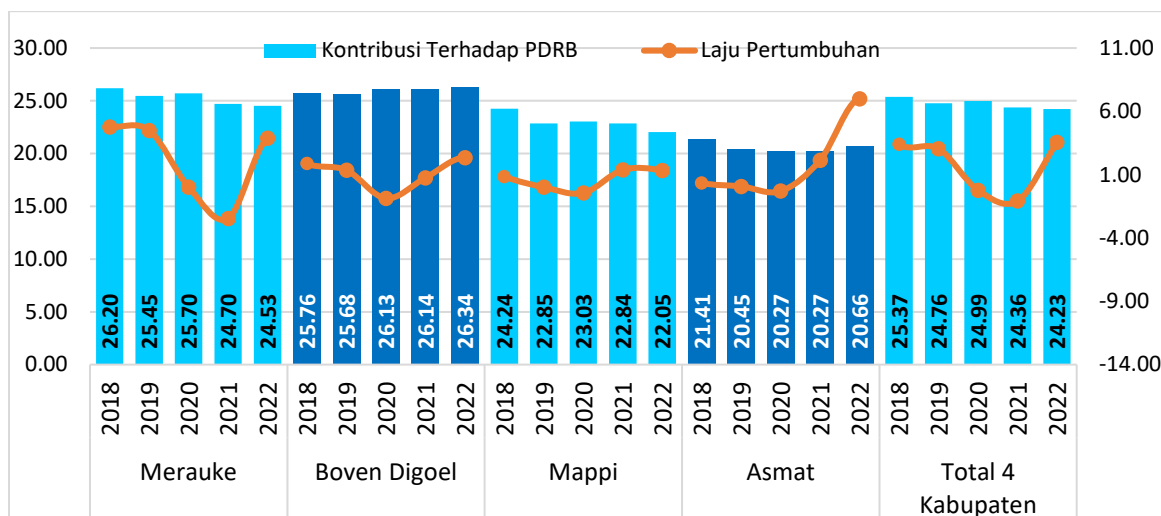
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023")

2.3.3.3 Pertanian

Pertanian mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Selatan sebagai penyangga ketahanan pangan sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Berdasarkan Gambar II.70 diketahui bahwa secara umum kontribusi sektor pertanian di Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan dari 25,37% pada tahun 2018 menjadi 24,23% pada tahun 2022. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, daerah yang mengalami penurunan kontribusi sektor pertanian adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Adapun Kabupaten Boven Digoel merupakan daerah yang mengalami peningkatan kontribusi sektor pertanian dari 25,76% pada tahun 2018 menjadi 26,34% pada tahun 2022. Penurunan kontribusi ini secara umum disebabkan karena (1) menurunnya produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; (2) kurangnya penerapan teknologi tepat guna; (3) rendahnya kapasitas petani di

bidang usaha agribisnis; serta (4) belum adanya ketersediaan lahan khusus usaha agribisnis dan kurangnya pembukaan lahan pertanian potensial.

Gambar II.70 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, maka sektor pertanian di Provinsi Papua Selatan perlu dioptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, diharapkan adanya percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, serta pengembangan kawasan strategis pertanian. Adapun pembahasan urusan pertanian lebih lanjut dalam subbab ini terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dalam hal ini, pembahasan akan berfokus pada komoditas lokal dan komoditas strategis pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi.

2.3.3.3.1 Tanaman Pangan

Tabel II.89 menunjukkan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.89 diketahui bahwa secara umum produksi tanaman pangan terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah padi (350 ribu ton), ubi kayu (40,66 ribu ton), serta ubi jalar (23,97 ribu ton). Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, hanya Kabupaten Merauke dan Boven Digoel saja yang dapat diidentifikasi produksi pertaniannya dengan adanya keterbatasan data. Terdapat perbedaan produksi komoditas tanaman pangan antara Kabupaten Merauke yang mengutamakan produksi padi (349,59 ribu ton), sedangkan Kabupaten Boven Digoel yang lebih dominan dalam produksi ubi kayu (25,53 ribu ton) dan ubi jalar (16,74 ribu ton).

Tabel II.89 Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021 (ton)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat*	Papua Selatan
Padi	349.588,00	1.211,00	350.799,00
Ubi Kayu	15.136,35	25.530,00	40.666,35
Ubi Jalar	7.238,48	16.736,00	23.974,48
Talas	4.850,90	1.099,00	5.949,90
Jagung	4.050,66	4.050,66
Kacang Tanah	897,70	1.019,50	1.917,20
Gembili	1.899,90	1.899,90
Kacang Hijau	152,83	152,83
Kedelai	25,54	10,00	35,54

*Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033
 Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

Sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga ketahanan pangan dan mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan di Provinsi Papua Selatan maka pengembangan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua Selatan perlu sejalan dengan arahan RTRW tentang penetapan kawasan budidaya peruntukkan pertanian pangan. Apabila diperlukan kedepannya dapat ditentukan penetapan Kawasan Strategis agropolitan/minapolitan/agribisnis dalam penyusunan RTRW Provinsi Papua Selatan.

Apabila dilakukan analisis terhadap capaian produksi pertanian tanaman pangan dan arahan RTRW Provinsi Papua sebagai provinsi induk, maka dapat diketahui bahwa -dari seluruh kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan- Kabupaten Mappi, Asmat dan Boven Digoel belum dapat memproduksi komoditas tanaman pangan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), hal ini tercermin juga dalam Indeks Ketersediaan (IK) pangan yang bernilai 0,00 di 3 (tiga) kabupaten tersebut (lihat Tabel II.55). Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat ketahanan pangan merupakan hal yang vital dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat.

2.3.3.3.2 Holtikultura

Tabel II.90 menunjukkan produksi sayuran berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.90 diketahui bahwa secara umum, produksi sayuran terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah tomat (24,97 ribu quintal), sawi/petsai (17,73 ribu quintal), dan cabe rawit (17,03 ribu quintal). Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, hasil produksi Kabupaten Merauke mendominasi atau memiliki proporsi yang sangat besar terhadap produksi sayuran regional di Papua Selatan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan produksi holtikultura di Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat dalam rangka mencapai ketahanan pangan daerah.

Tabel II.90 Produksi Sayuran di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021 (quintal)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Bawang Daun	2.744,00	2.744,00
Bawang Merah	2.768,00	2.768,00
Bawang putih	0,00

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Bayam	4.685,00	4.685,00
Buncis	8.182,00	8.182,00
Cabe Besar	9.330,00	30,00	280,00	25,33	9.665,33
Cabe Rawit	15.544,00	1.456,00	0,00	30,00	17.030,00
Kacang Panjang	9.252,00	...	350,00	74,57	9.676,57
Kangkung	12.697,00	...	300,00	243,18	13.240,18
Kembang Kol	1.849,00	1.849,00
Kentang	0,00
Ketimun	7.984,00	22,31	8.006,31
Kubis	12.647,00	2.200,00	14.847,00
Labu siam	82,00	82,00
Sawi/Petsai	17.426,61	...	270,00	34,04	17.730,65
Terung	7.443,00	66,56	7.509,56
Tomat	20.420,00	4.320,00	210,00	27,50	24.977,50

*Kawasan peruntukkan pertanian hortikultura berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

Tabel II.91 menunjukkan produksi buah-buahan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2020. Berdasarkan Tabel II.91 diketahui bahwa komoditas buah-buahan yang paling banyak diproduksi di Provinsi Papua Selatan tahun 2020 adalah manga (59,63 ribu kuintal) dan jeruk siam/keprok/orang (41,14 ribu kuintal) yang sebagian besar diproduksi di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke merupakan wilayah yang paling banyak memproduksi buah-buahan dengan hasil produksi unggulan yaitu manga (59,04 ribu kuintal), jeruk siam/keprok/orang (40,98 ribu kuintal), durian (7,3 ribu kuintal), dan melinjo (7,23 ribu kuintal).

Tabel II.91 Produksi Buah-buahan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (kuintal)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Alpukat	1.145,00	1.145,00
Anggur	8,00	8,00
Apel	0,00	0,00
Belimbing	1.559,00	1.559,00
Duku/ Langsung/ Kokosan	32,00	32,00
Durian	7.303,00	...	590,00	...	7.893,00
Jambu Air	2.598,00	2.598,00
Jambu Biji	3.737,00	77,80	3.814,80
Jengkol	8,00	8,00
Jeruk Besar	1.330,00	55,60	1.385,60
Jeruk siam/ Keprok/ Orange	40.984,00	...	160,00	...	41.144,00
Mangga	59.042,00	...	530,00	63,90	59.635,90
Manggis	2.340,00	2.340,00
Markisa	0,00	0,00
Melinjo	7.227,00	7.227,00
Nanas	540,00	181,60	721,60
Pisang	1.990,00	2.429,00	4.419,00
Pepaya	0,00	98,10	98,10
Rambutan	...	598,50	500,00	48,80	1.147,30
Salak	...	14,48	14,48

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Sirsak	...	9,78	9,78
Sukun	...	179,40	179,40

*Kawasan peruntukkan pertanian hortikultura berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

2.3.3.3.3 Perkebunan

Tabel II.92 menunjukkan produksi perkebunan di Provinsi Papua Selatan pada Tahun 2020. Dalam Tabel II.92 dapat diketahui bahwa komoditas perkebunan yang paling banyak diproduksi di Provinsi Papua Selatan adalah sagu (5.317 ton), kelapa (4.273 ton), jambu mete (917 ton) dan pinang (123 ton). Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat variasi produksi perkebunan antar kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang mencerminkan kekhasan daerah. Kabupaten Merauke merupakan wilayah penghasil kelapa (3.408 ton), jambu mete (917 ton), kapuk randu (68 ton), pinang (53 ton), sagu (13 ton), dan lada (2 ton). Kabupaten Boven Digoel merupakan wilayah penghasil kelapa (175 ton) dan kakao (4 ton). Kabupaten Mappi merupakan wilayah penghasil kelapa (475 ton), pinang (70 ton), kakao (8 ton), cengkeh (7 ton) dan kapuk rindu (2 ton). Adapun Kabupaten Asmat merupakan wilayah penghasil sagu (5.304 ton) dan kelapa (215 ton).

Tabel II.92 Produksi Perkebunan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (ton)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat	Papua Selatan
Kelapa Sawit	0	0	0	0	0
Kelapa	3.408	175	475	215	4.273
Karet	0	0	0	0	0
Kopi	0	0	0	0	0
Kakao	0	4	8	0	12
Tebu	0	0	0	0	0
Teh	0	0	0	0	0
Tembakau	0	0	0	0	0
Sagu	13	0	0	5.304	5.317
Pinang	53	0	70	0	123
Vanili	0	0	0	0	0
Jambu Mete	917	0	0	0	917
Lada	2	0	0	0	2
Kapuk Randu	68	0	2	0	70
Cengkeh	0	0	7	0	7

*Kawasan peruntukkan perkebunan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

2.3.3.3.4 Peternakan

Tabel II.93 menunjukkan populasi ternak dan unggas di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.93 diketahui bahwa populasi ternak dan unggas yang paling banyak di Provinsi Papua Selatan tahun 2022 adalah ayam kampung (2,13 juta ekor), itik (47.470 ekor), sapi (44.460 ekor), dan babi (15.140 ekor). Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang paling banyak terdapat ternak dan unggas adalah Kabupaten Merauke, sedang 3 (tiga) kabupaten lainnya (terutama Kabupaten Asmat) relatif memiliki ternak yang sedikit dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Tabel II.93 Populasi Ternak dan Unggas (ekor) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat	Papua Selatan
Sapi	43.220	878	60	302	44.460
Kerbau	661	0	0	0	661
Kuda	2.902	35	0	0	2.937
Babi	13.547	1.153	130	310	15.140
Domba	15.835	6.332	3.151	2.205	27.523
Ayam Kampung	2.075.619	12.440	33.617	8.455	2.130.131
Itik	41.923	1.890	1.952	1.705	47.470

*Kawasan peruntukkan peternakan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033
Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Dalam Angka")

Tabel II.94 menunjukkan produksi daging ternak/unggas dan telur di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.94 diketahui bahwa ayam kampung merupakan komoditas peternakan yang paling banyak memenuhi konsumsi daging di Provinsi Papua Selatan yaitu 3,57 ton daging dan 2,87 butir telur. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat variasi produksi daging antar kabupaten yang mencerminkan preverensi peternak dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi hewani. Dalam hal ini, terdapat pola produksi daging yang berbeda terjadi di Kabupaten Boven Digoel dengan adanya mayoritas produksi daging babi (53,03 ton) dibandingkan dengan daging sapi (53,01 ton) dan daging ayam (20,88 ton).

Tabel II.94 Produksi Daging Ternak dan Telur Unggas di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Komoditas	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
DAGING (KG)					
Sapi	702.650	53.010	5.049	3.967	764.676
Kerbau	19.261	0	0	0	19.261
Kuda	17.250	0	0	0	17.250
Kambing/Domba	23.909	3.150	316	89	27.464
Babi	23.096	53.029	24.705	9.480	110.310
Ayam Kampung	3.484.135	20.882	56.430	14.193	3.575.639
Ayam Petelur	144.927	9.755	391	2.927	157.999
Itik	26.408	1.222	1.246	1.125	30.001
TELUR (KG)					
Ayam Kampung	2.793.584	16.743	45.245	11.380	2.866.952
Itik	338.624	12.600	14.297	9.360	374.881

*Kawasan peruntukkan peternakan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033
Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Dalam Angka")

2.3.3.4 Kehutanan

Kondisi hutan di Provinsi Papua Selatan dibagi menjadi dua jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Luasan hutan lindung di Provinsi Papua Selatan yaitu seluas 1.687.302 Ha. Untuk Hutan Produksi, Provinsi Papua Selatan memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki kriteria: 10 memiliki

faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki kriteria, sebagai berikut: a) memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau, b) merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.

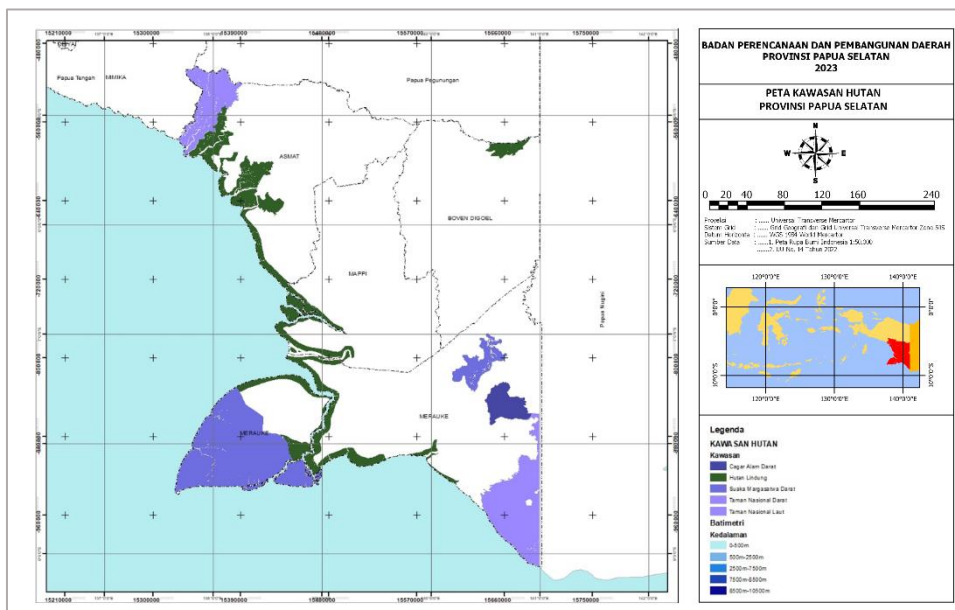
Tabel II.95 Kawasan Hutan Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (Hektar)

Kabupaten	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
Merauke	268.734	1.405.767	978.542	213.723	1.237.698	4.119.825
Boven Digoel	83.772	0	1.292.101	403.213	173.785	1.956.482
Mappi	210.729	0	586.285	796.061	48.459	2.128.312
Asmat	1.124.067	278.888	105.556	1.031.620	42.352	2.594.449
Papua Selatan	1.687.302	1.684.655	2.962.484	2.444.617	1.502.294	10.799.068

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2023

Adapun kondisi luasan kawasan hutan di Provinsi Papua Selatan menurut Kabupaten dapat dilihat pada Tabel II.95 diketahui bahwa luasan kawasan hutan di Provinsi Papua Selatan untuk Hutan Produksi Terbatas yaitu sebesar 2.962.484 Ha, dengan Kabupaten Boven Digoel memiliki luasan terbesar yaitu 1.292.101 Ha. Hutan Produksi Tetap memiliki luasan sebesar 2.444.617 Ha, dengan Kabupaten Asmat memiliki luasan terbesar yaitu 1.031.620 Ha. Berikutnya Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Papua Selatan memiliki luasan sebesar 1.502.294 Ha dengan daerah yang memiliki luasan paling besar yaitu Kabupaten Merauke sebesar 1.237.698 Ha.

Gambar II.71 Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua Selatan



Sumber: Peta RTRW Provinsi Papua, 2013, Data RBI dan Pengolahan Data Tahun 2022

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi saat ini menjadi salah satu kebutuhan dasar hampir seluruh elemen pembangunan mulai dari kebutuhan rumah tangga, pelayanan masyarakat, pengolahan komoditas industri, hingga distribusi dan pemasaran barang. Untuk itu ketersediaan energi merupakan hal yang krusial dan wajib terpenuhi bagi setiap daerah. Salah satu indikasi ketersediaan akses terhadap energi adalah penggunaan listrik PLN untuk kebutuhan harian rumah tangga. Penggunaan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dinilai lebih efisien dibandingkan penggunaan energi bahan bakar. Tabel II.96 menyajikan data sumber penerangan utama rumah tangga Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Data menunjukkan mayoritas sumber penerangan telah menggunakan energi listrik baik PLN maupun non-PLN. Terlihat pula jumlah yang cukup signifikan pada penggunaan sumber penerangan bukan bersumber dari listrik. Kabupaten Asmat tercatat sebagai kabupaten dengan sumber penerangan utama non listrik terbesar di Provinsi Papua Selatan.

Tabel II.96 Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Penerangan Utama 2020-2022

Kabupaten	2020			2021			2022		
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik
Merauke	87,76	6,50	5,73	89,36	4,87	5,76	90,54	1,68	7,78
Boven Digoel	53,09	36,92	10,00	42,93	35,65	21,43	45,70	39,01	15,30
Mappi	21,66	53,23	25,11	26,55	62,83	10,62	32,99	55,03	11,97
Asmat	18,65	40,97	40,38	21,75	20,76	57,49	23,44	17,99	58,56
Rata-rata	45,29	34,41	20,31	45,15	31,03	23,83	48,17	28,43	23,40

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022

Kebutuhan energi dalam skala rumah tangga lainnya yang perlu diperhatikan adalah sumber energi atau sumber bahan bakar yang digunakan untuk memasak. Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Papua Selatan masih banyak yang menggunakan bahan bakar kayu (58,98%) dan minyak tanah (38,08%). Kabupaten dengan pengguna minyak tanah mayoritas berada di Kabupaten Boven Digoel dan Merauke, sementara bahan bakar memasak kayu masih sangat mayoritas digunakan di Kabupaten Mappi dan Asmat.

Tabel II.97 Persentase Distribusi Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Papua Selatan 2022

Kabupaten	Listrik	Gas/Elpiji	Minyak Tanah	Arang/ Briket	Kayu	Lainnya
Merauke	0,38	5,35	68,3	0,2	25,55	0,22
Boven Digoel	4,18	7,69	49,37	0	45,6	0
Mappi	0,21	0	16,19	0	83,61	0
Asmat	0	0,37	18,46	0	81,17	0
Rata-rata	1,19	3,35	38,08	0,05	58,98	0,06

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022

2.3.3.6 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan bentuk kapitalisasi faktor dan sistem produksi yang memutar pergerakan roda ekonomi. Semakin besar modal yang digunakan, semakin besar dan kompleks pula skala industri yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan harapan efisiensi pada penggunaan

faktor-faktor ekonomi. Peningkatan sektor ekonomi harus mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Semakin panjang rantai produksi yang dilakukan secara lokal, semakin besar pula dampak pertambahan nilai ekonomi yang dirasakan oleh daerah. Pengembangan industri juga harus memerhatikan kelestarian alam dengan tidak bersifat ekstraktif, serta menggunakan sumber energi terbarukan. Pengolahan limbah industri juga perlu diperhatikan secara ketat agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Tabel II.98 memperlihatkan jumlah perusahaan, pekerja, nilai investasi dan produksi yang dihasilkan oleh industri besar dan sedang di tiap Kabupaten Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke dan Boven Digoel memiliki jumlah industri yang sama. Namun demikian besarnya investasi, jumlah pekerja, dan nilai produksi yang dimiliki oleh Industri di Boven Digoel jauh lebih besar dibandingkan Industri di Merauke.

Tabel II.98 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Papua

Kabupaten	Jumlah Industri	Jumlah pekerja	Investasi (ribu rupiah)	Nilai Produksi (ribu rupiah)
Merauke	2	110	n.a.	34.256.269
Boven Digoel	2	2.732	9.986.204	8.359.138.442
Papua Selatan	4	2.842	9.986.204	8.393.394.711

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2023

Tabel II.99 menyajikan data jumlah industri mikro menurut kabupaten dan modal usaha di Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke memiliki jumlah usaha paling tinggi dengan Kabupaten Asmat dengan jumlah usaha yang paling sedikit. Sebagian besar usaha berasal dari modal yang dimiliki sendiri. Kabupaten Merauke memiliki industri dengan modal usaha non-milik sendiri terbanyak di Provinsi Papua Selatan. Hal ini menunjukkan tingkatan kerja sama modal industri di Kabupaten Merauke lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya.

Tabel II.99 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Sumber Modal Usaha di Papua Selatan, 2020

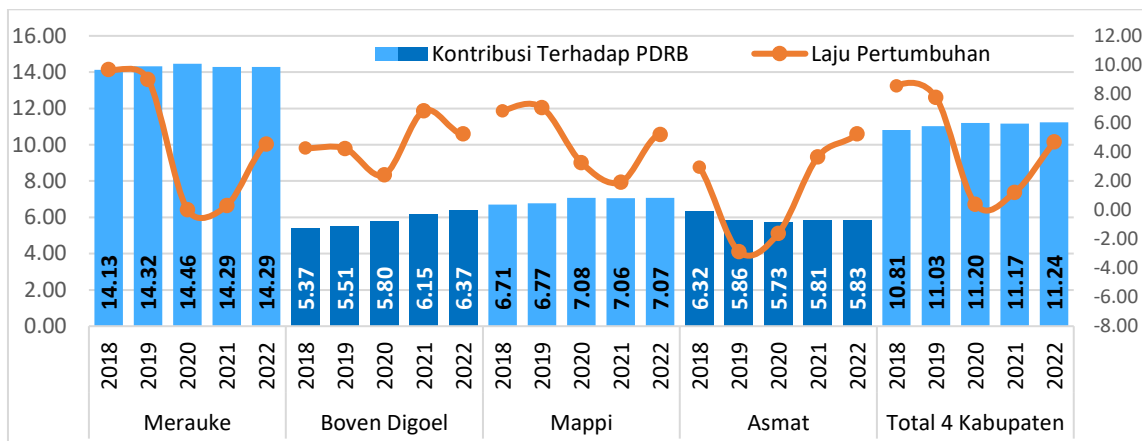
Kabupaten	Banyaknya Usaha	Sepenuhnya Milik Sendiri	Sumber Modal Utama Lainnya					Tenaga Kerja
			Bank	Koperasi	Perorangan	Program Pemerintah	Lainnya	
Merauke	1572	1312	193	1	15	27	24	3313
Boven Digoel	289	269	20	20				512
Mappi	446	404	42	34		8		667
Asmat	61	59	2	2				85
Papua Selatan	2368	2044	257	57	15	35	24	4577

Sumber: Profil Industri Mikro dan Kecil Papua Tahun 2020

2.3.3.7 Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB secara umum mengalami tren yang cenderung meningkat dari 10,81% pada tahun 2018 menjadi 11,24% pada tahun 2022 (lihat Gambar II.72 dan Tabel II.100). Meskipun demikian, laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dari 8,54% pada tahun 2018 menjadi 4,69% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan di Provinsi Papua Selatan meskipun terdapat potensi perdagangan yang sangat besar.

Gambar II.72 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2019-2023

Tabel II.100 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten					Laju Pertumbuhan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	14,13	14,32	14,46	14,29	14,29	9,68	9,01	0,03	0,30	4,54
Boven Digoel	5,37	5,51	5,80	6,15	6,37	4,27	4,24	2,44	6,84	5,24
Mappi	6,71	6,77	7,08	7,06	7,07	6,82	7,06	3,28	1,93	5,22
Asmat	6,32	5,86	5,73	5,81	5,83	2,96	-2,87	-1,61	3,66	5,26
Total 4 Kabupaten	10,81	11,03	11,20	11,17	11,24	8,54	7,77	0,40	1,22	4,69

Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2019-2023

Pengembangan sektor perdagangan di Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana perdagangan seperti pasar, toko, kios dan warung sebagai lokasi transaksi antara penjual dan pembeli. Tabel II.101 menunjukkan jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel II.101 diketahui terdapat 151 kelompok pertokoan, 17 pasar dengan bangunan permanen, 41 pasar dengan bangunan semi permanen, 7 pasar tanpa bangunan, 83 minimarket, serta 36 restoran/rumah makan di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Kabupaten yang memiliki sarana perdagangan paling sedikit adalah Kabupaten Mappi yang terdiri atas 11 pasar, 7 minimarket dan 3 restoran/rumah makan.

Tabel II.101 Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Sarana Perdagangan, 2021

Sarana Perdagangan	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Kelompok Pertokoan	129	4	0	18	151
Pasar dengan Bangunan Permanen	7	3	4	3	17
Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	12	16	6	7	41
Pasar Tanpa Bangunan	1	4	1	1	7
Minimarket/swalayan / supermarket	32	16	7	28	83
Restoran / Rumah Makan	30	0	3	3	36

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (dalam dokumen "Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021")

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Berdasarkan Tabel II.102 diketahui rata-rata pengeluaran per kapita 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. Pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Papua Selatan mengalami trend peningkatan dari rata-rata 7,70 juta rupiah pada 2018 menjadi 7,73 juta pada tahun 2022.

Tabel II.102 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	10.430	10.498	10.097	10.201	10.424
Boven Digoel	8.211	8.300	7.947	7.864	8.086
Mappi	6.268	6.513	6.353	6.327	6.550
Asmat	5.882	6.066	5.733	5.736	5.860
Rata-rata 4 Kabupaten	7.698	7.844	7.533	7.532	7.730
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Apabila meninjau kondisi Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, wilayah yang memiliki pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kabupaten Merauke (10,42 juta rupiah). Adapun wilayah dengan pengeluaran per kapita yang paling rendah di Papua Selatan adalah Kabupaten Asmat (5,86 juta rupiah) dan Kabupaten Mappi (6,55 juta rupiah).

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan

Perubahan pendapatan dan kapasitas ekonomi masyarakat akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Seperti yang dikatakan pada hukum Engle bahwa akan terjadi sebuah pergeseran dari proporsi pengeluaran konsumen untuk produk makanan saat pendapatan meningkat, artinya pada titik dimana pemenuhan kebutuhan makanan sudah tercukupi saat pendapatan meningkat maka peningkatan pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau disimpan sebagai tabungan/investasi.

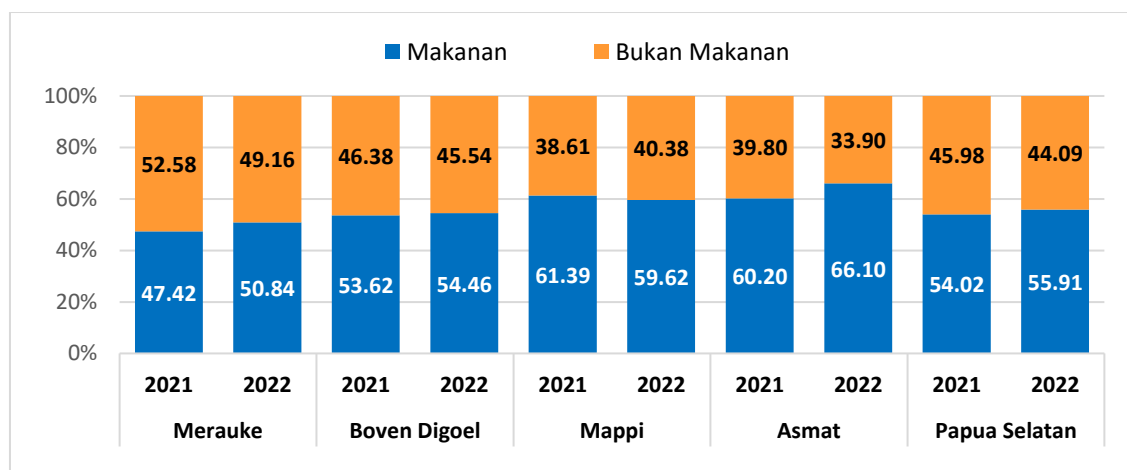
Tabel II.103 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2022

Kabupaten	Satuan	Konsumsi Makanan		Konsumsi Bukan Makanan		Jumlah	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Merauke	rupiah	751.944	900.434	833.790	870.530	1.585.734	1.770.965
	%	47,42	50,84	52,58	49,16	100,00	100,00
Boven Digoel	rupiah	553.790	587.152	478.935	490.961	1.032.725	1.078.113
	%	53,62	54,46	46,38	45,54	100,00	100,00
Mappi	rupiah	409.437	503.458	257.548	340.943	666.984	844.401

Kabupaten	Satuan	Konsumsi Makanan		Konsumsi Bukan Makanan		Jumlah	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	%	61,39	59,62	38,61	40,38	100,00	100,00
Asmat	rupiah	619.718	581.727	409.723	298.343	1.029.441	880.071
	%	60,20	66,10	39,80	33,90	100,00	100,00
Rata-rata 4 Kabupaten	rupiah	2.888.679	3.159.923	2.458.931	2.491.738	5.347.609	5.651.663
	%	54,02	55,91	45,98	44,09	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka 2023")

Gambar II.73 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka 2023")

Tabel II.103 dan Gambar II.73 menampilkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Papua Selatan. Secara umum, terdapat penurunan kapasitas masyarakat Papua Selatan untuk dapat mengkonsumsi kebutuhan non-makanan dari 45,98% pada tahun 2021 menjadi 44,09% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, kabupaten dengan persentase pengeluaran konsumsi makanan tertinggi adalah Kabupaten Asmat (tahun 2022: 66,10%), sedangkan kabupaten dengan konsumsi makanan terendah adalah Kabupaten Merauke (tahun 2022: 50,84%). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke telah memiliki kapasitas ekonomi / pendapatan yang lebih besar untuk membeli kebutuhan non-pangan, sedangkan masyarakat Kabupaten Asmat masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan.

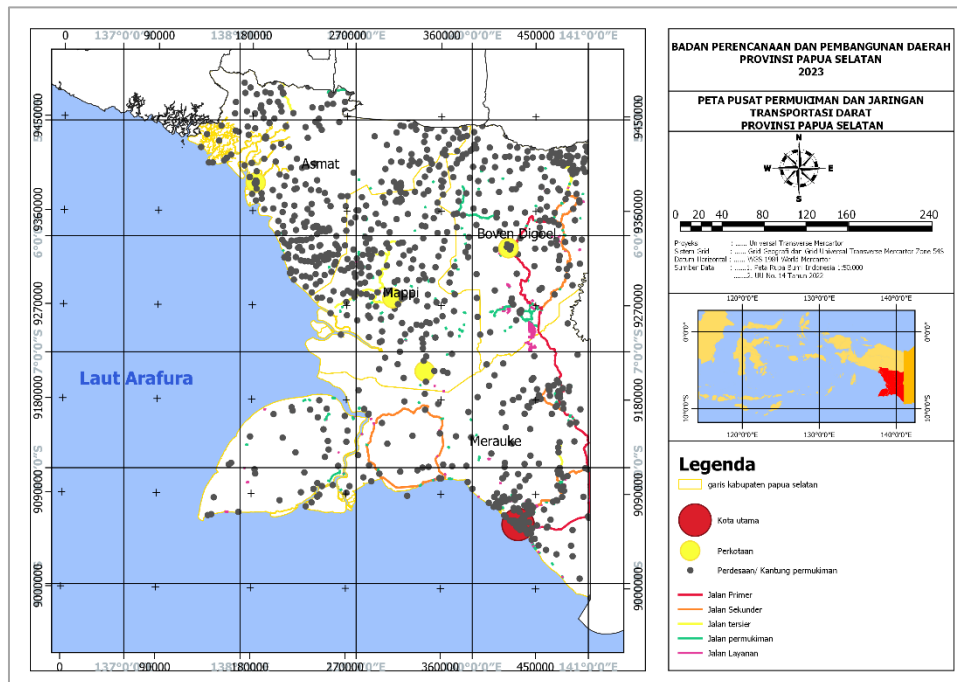
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Sarana Transportasi

Sarana Transportasi khususnya jaringan infrastruktur jalan berfungsi untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial dalam hal perpindahan orang dan barang. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan memberikan efisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu, maupun risiko perjalanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi antara lain mudahnya perpindahan orang, meningkatnya frekuensi pengiriman barang, barang lebih murah dan mudah didapatkan, serta mendorong aktivitas pada umumnya untuk

lebih mudah dan sering dilakukan. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya pembangunan.

Gambar II.74 Peta Pusat Aktivitas/Permukiman dan Jaringan Transportasi Darat Provinsi Papua Selatan 2023



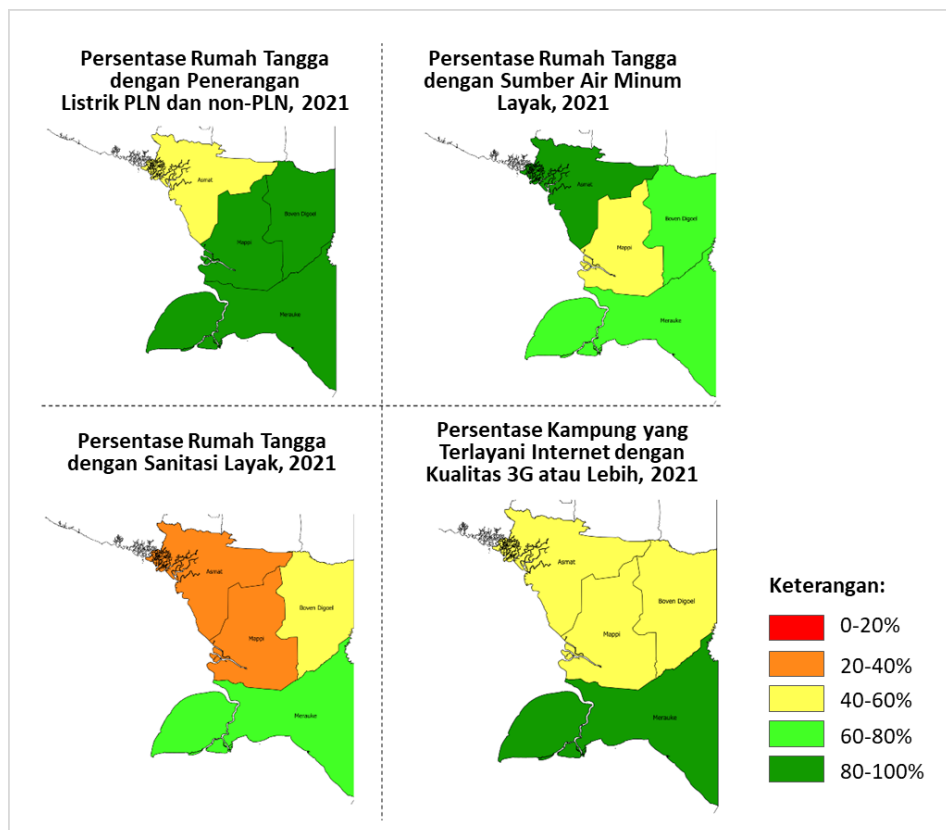
Sumber: Data OpenStreetMap dan Hasil Analisis, 2023

Dalam pelayanan skala wilayah, infrastruktur transportasi menghubungkan pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan. Pusat-pusat aktivitas ini merupakan bentuk lokasi strategis tempat terjadinya fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa sesuai skala aktivitas ekonomi yang bersangkutan, mulai dari skala rumah tangga hingga nasional. Pusat-pusat aktivitas ini harus terhubung satu sama lainnya untuk menjamin keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih luas sehingga aktivitas sosial ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi. Pada Gambar II.74 ditampilkan pusat-pusat aktivitas di Papua Selatan beserta infrastruktur darat yang menghubungkan pusat-pusat tersebut. Data pusat-pusat aktivitas yang berasal dari sumber terbuka OpenStreetMap menunjukkan Merauke sebagai kota utama di Provinsi Papua Selatan secara langsung terhubung dengan pusat Kabupaten Boven Digoel melalui jaringan transportasi darat. Pusat Kabupaten Mappi dan Asmat belum terhubung secara langsung dengan pusat aktivitas kabupaten lainnya melalui jalur darat. Sementara itu pusat aktivitas kabupaten ini terhubung dengan permukiman-permukiman kecil di sekitarnya melalui jaringan jalan sekunder dan tersier. Sementara itu untuk menghubungkan antar perdesaan atau permukiman sudah terdapat beberapa wilayah yang terlayani jalan permukiman walaupun sebagian besar belum terlayani fasilitas tersebut.

2.4.2.2 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, dan akses internet merupakan indikator dasar yang menjadi tolak ukur daya saing daerah. Dalam Gambar II.75 tersaji persentase rumah tangga tiap kabupaten yang memiliki akses terhadap fasilitas tersebut. Untuk akses terhadap listrik, hampir seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap listrik (>80%), hanya kabupaten Asmat yang masih terkendala pada akses listrik (40-60%). Untuk akses sumber air minum layak, kabupaten Asmat meraih persentase tertinggi, rumah tangga di Merauke dan Boven Digoel terlayani 60-80% dan Kabupaten Mappi sudah terlayani 40-60%. Rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak tertinggi pada Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel 40-60%, Kabupaten Asmat dan Mappi relatif masih sedikit akses ke sanitasi layak yaitu sekitar 20-40%. Untuk akses terhadap informasi melalui internet, Kabupaten Merauke terlayani lebih dari 80%, sementara kabupaten lainnya rata-rata terlayani 40-60%

Gambar II.75 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Papua Selatan 2023, data diolah

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi iklim berinvestasi karena menunjukkan risiko penduduk terkena tindak kejahatan, serta tingkat kerawanan kejahatan suatu wilayah pada periode tertentu. Berdasarkan Tabel II.104 diketahui bahwa pada periode 2018-2022 secara umum terdapat peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Papua Selatan

dari 672 kasus pada tahun 2018 menjadi 966 kasus pada tahun 2022. Wilayah dengan jumlah kejahatan tertinggi adalah Kabupaten Merauke yaitu 413 kasus pada tahun 2018 menjadi 880 kasus pada tahun 2022.

Tabel II.104 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan					Persentase Penyelesaian Tindak Pidana				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	413	530	503	385	808	49,15	37,36	39,76	41,30	22,50
Boven Digoel	82	91	127	185	89	56,09	42,86	10,24	4,32	2,50
Mappi	89	123	127	109	61	29,21	41,46	31,50	33,03	1,70
Asmat	88	111	23	40	8	85,22	34,23	21,74	57,50	0,20
Papua Selatan	672	855	780	719	966	52,08	38,13	33,08	31,43	19,16

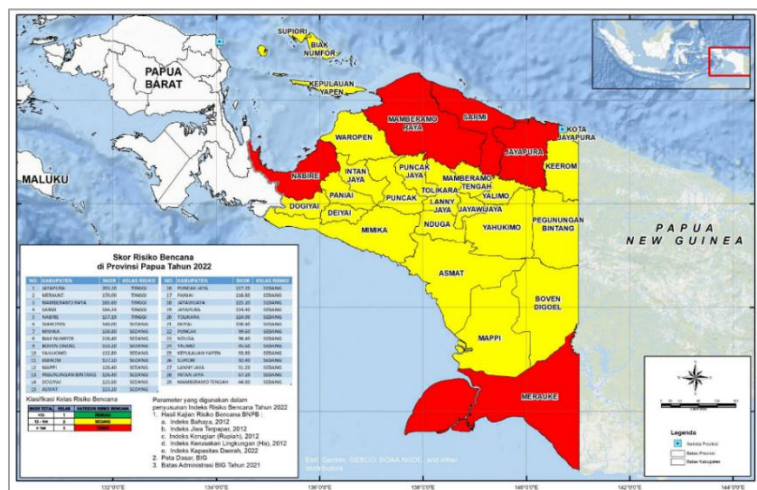
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka 2023”)

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Papua Selatan, belum diiringi dengan peningkatan persentase penyelesaian tindak pidana. Berdasarkan Tabel II.104 diketahui terdapat penurunan persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Papua Selatan secara general dari 52,08% pada tahun 2018 menjadi 19,16% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, Kabupaten yang mengalami penurunan drastis penyelesaian tindak pidana adalah Kabupaten Asmat dari 85,22% pada tahun 2018 menjadi 0,20% pada tahun 2022. Kabupaten lainnya yang memiliki penyelesaian tindak pidana yang sangat rendah (<10%) pada tahun 2022 adalah Kabupaten Mappi (1,70%) dan Kabupaten Boven Digoel (2,50%).

2.4.3.2 Kerawanan Bencana

Provinsi Papua Selatan secara garis besar memiliki indeks kerawanan bencana pada rentang risiko sedang hingga tinggi. Berdasarkan wilayah di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke memiliki indeks risiko bencana tinggi sementara Kabupaten Asmat, Boven Digoel, dan Mappi memiliki indeks risiko bencana sedang, sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar II.76.

Gambar II.76 Peta Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kota Tahun 2022



Sumber: BNPB, 2023

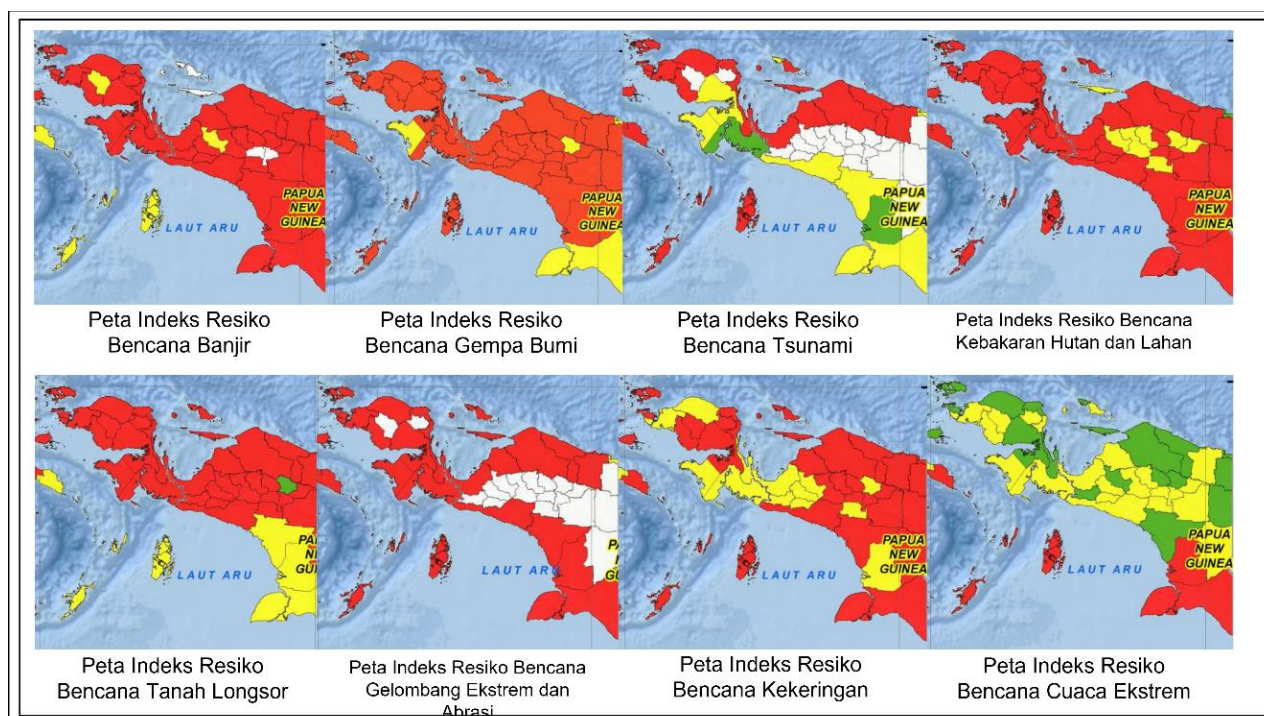
Kabupaten di Provinsi Papua Selatan secara umum memiliki risiko yang tinggi untuk jenis bencana banjir dan kebakaran hutan, sedangkan risiko sedang untuk bencana tanah longsor. Kabupaten dengan wilayah pesisir yaitu Merauke, Mappi, dan Asmat memiliki risiko tinggi terhadap gelombang ekstrem dan abrasi, sementara kabupaten yang berdekatan dengan daerah pegunungan di sebelah utara memiliki risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi (lihat Gambar II.77 dan Tabel II.105).

Tabel II.105 Kelas Risiko Bencana di Provinsi Papua Selatan 2022

Jenis Bencana	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Tsunami	Sedang	-	Rendah	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Bencana Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi
Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah

Sumber: BNPB, 2023

Gambar II.77 Peta Indeks Tiap Risiko Bencana Kabupaten dan Kota Tahun 2022



Sumber: BNPB, 2023

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang menentukan daya saing wilayah Provinsi Papua Selatan. Apabila tenaga kerja suatu daerah berkualitas dan berpendidikan tinggi, maka tingkat produktifitas tenaga kerja akan semakin membaik. Berdasarkan Tabel II.106 dapat diketahui bahwa mayoritas angkatan kerja di Provinsi Papua Selatan memiliki tingkat pendidikan

yang sangat rendah (tidak/belum tamat SD/memiliki ijazah SD) yaitu sebesar 51,39% atau 134.089 orang. Dari 134.089 orang tersebut, sebanyak 131.502 orang atau 98,07% telah bekerja. Angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas) tergolong rendah yaitu sebesar 10,67% atau 27.844 orang angkatan kerja. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki proporsi angkatan kerja berpendidikan tinggi terbesar adalah Kabupaten Merauke yaitu sebesar 12,16% atau 15.459 jiwa. Adapun kabupaten dengan angkatan kerja berpendidikan tinggi paling sedikit adalah Kabupaten Mappi yaitu hanya mencapai 6,79% atau 2.819 orang angkatan kerja.

Tabel II.106 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021

Wilayah	Kategori	Tidak/Belum Tamat SD/SD	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	Jumlah
Merauke	Bekerja	52.282	23.153	34.106	14.850	124.391
	Pengangguran	824	117	1.236	609	2.786
	Jumlah	53.106	23.270	35.342	15.459	127.177
	%	41,76	18,30	27,79	12,16	100,00
Boven Digoel	Bekerja	16.372	5.520	10.206	3.771	35.869
	Pengangguran	636	298	1.401	255	2.590
	Jumlah	17.008	5.818	11.607	4.026	38.459
	%	44,22	15,13	30,18	10,47	100,00
Mappi	Bekerja	24.475	4.221	8.314	2.819	39.829
	Pengangguran	1.067	254	386	0	1.707
	Jumlah	25.542	4.475	8.700	2.819	41.536
	%	61,49	10,77	20,95	6,79	100,00
Asmat	Bekerja	38.373	4.050	5.551	5.540	53.514
	Pengangguran	60	0	180	0	240
	Jumlah	38.433	4.050	5.731	5.540	53.754
	%	71,50	7,53	10,66	10,31	100,00
Papua Selatan	Bekerja	131.502	36.944	58.177	26.980	253.603
	Pengangguran	2.587	669	3.203	864	7.323
	Jumlah	134.089	37.613	61.380	27.844	260.926
	%	51,39	14,42	23,52	10,67	100,00

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka 2022")

2.4.4.2 Kapasitas Aparatur Pemerintah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tugas aparatur pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas dimaksud maka setiap aparatur harus memiliki manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat memperbandingkan (*merit system*) antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pejabat pada saat rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Kebijakan pembangunan kepegawaian daerah diarahkan pada penyediaan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban

kerja di setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumber daya aparatur berdasarkan standar kompetensi.

Tabel II.107 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Merauke		Boven Digoel		Mappi		Asmat		Jumlah 4 Kabupaten	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Dasar (SD)	43	0,83	21	0,86	104	3,46	108	4,03	276	2,08
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	114	2,20	21	0,86	148	4,92	672	25,07	955	7,18
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.407	27,19	687	28,21	935	31,07	57	2,13	3.086	23,20
Diploma I, II, III	1.038	20,06	488	20,04	690	22,93	576	21,49	2.792	20,99
S1, S2, S3	2.573	49,72	1.218	50,02	1.132	37,62	1.267	47,28	6.190	46,54
Jumlah	5.175	100,00	2.435	100,00	3.009	100,00	2.680	100,00	13.299	100,00

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka 2023")


Pada tahun 2022, total jumlah aparatur sipil negara di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan sebanyak 13.299 personil. Berdasarkan Tabel II.107, dapat dilihat bahwa mayoritas aparatur sipil negara merupakan lulusan sarjana / magister / doktoral (46,54% atau 6.190 personil). Namun, masih terdapat personil yang belum mendapatkan kualifikasi pendidikan di perguruan tinggi (sebanyak 2,08% atau 276 personil kelulusan SD/ sederajat, 7,18% atau 955 personil kelulusan SMP/ sederajat, dan 23,20% atau 3.086 personil kelulusan SMA/ sederajat). Diharapkan, pada masa mendatang kualitas pendidikan aparatur di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan, dikarenakan kapasitas SDM merupakan aspek penting dalam optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah ke depannya diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas, baik dalam bentuk pendidikan formal, maupun dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi kepada aparaturnya.

2.4.4.3 Rasio Ketergantungan

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting karena semakin tinggi persentase *dependency ratio*, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel II.108 Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020

Kategori	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur:					



Kategori	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
0-4	35.260	12.311	19.240	27.745	94.556
5-9	26.640	9.672	17.073	14.251	67.636
10-14	19.076	5.208	11.360	10.699	46.343
15-19	15.334	4.055	8.226	8.796	36.411
20-24	18.138	4.904	7.832	7.445	38.319
25-29	17.606	4.734	7.635	7.373	37.348
30-34	17.996	5.510	7.855	7.676	39.037
35-39	17.787	4.696	6.909	6.422	35.814
40-44	13.599	3.718	5.882	5.995	29.194
45-49	12.482	3.338	4.591	4.228	24.639
50-54	9.282	2.155	3.549	3.630	18.616
55-59	9.158	1.733	2.972	2.343	16.206
60-64	6.345	948	2.012	1.602	10.907
65-69	5.163	693	1.474	946	8.276
70-74	3.326	333	884	523	5.066
75+	3.740	277	801	431	5.249
Penduduk Usia Belum Produktif (<15 tahun)	80.976	27.191	47.673	52.695	208.535
Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	137.727	35.791	57.463	55.510	286.491
Penduduk Usia Tidak Produktif (≥65 tahun)	12.229	1.303	3.159	1.900	18.591
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	67,67	79,61	88,46	98,35	79,28

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023

Tabel II.108 menunjukkan rasio ketergantungan Provinsi Papua Selatan dan setiap kabupaten di Papua Selatan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan Papua Selatan sangat tinggi yaitu sebesar 79,28. Tingginya rasio ketergantungan ini disebabkan karena tingginya penduduk usia belum produktif (< 15 tahun) dan tingginya angka kelahiran di Provinsi Papua Selatan. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan paling tinggi di Papua Selatan adalah Kabupaten Asmat (98,35) dan Mappi (88,46). Adapun wilayah yang memiliki rasio ketergantungan paling rendah di Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke (67,67) dan Boven Digoel (79,61).

Tingginya rasio ketergantungan di Provinsi Papua Selatan menunjukkan terbatasnya keleluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri, seperti untuk mengakses pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, maupun akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Hal ini disebabkan karena penduduk usia produktif di Provinsi Papua Selatan perlu membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi

BAB III

Gambaran Keuangan Daerah



Bab ini memuat gambaran pengelolaan keuangan daerah yang memuat tentang skenario pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Papua Selatan selama periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) periode tahun 2024-2026

1.1 LATAR BELAKANG

Gambaran keuangan daerah secara umum dicerminkan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD). Kondisi APBD yang baik akan menjadi satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika pemerintahan daerah diibaratkan sebagai satu organ tubuh maka fungsi APBD dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung yang senantiasa memompakan darah segar bagi fungsi/sektor pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan. Seperti halnya jantung yang berfungsi sebagai pompa darah yang memompa darah ke seluruh tubuh, APBD juga berfungsi sebagai alat yang mengalokasikan sumber daya ke seluruh sektor pembangunan di daerah tersebut. keuangan daerah menjadi pusat pengendalian keuangan dalam setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, APBD juga harus memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif, agar penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Seperti halnya jantung yang harus menjaga ritme detaknya agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, APBD juga harus menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sehingga keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.



Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kinerja dan kebijakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan kerangka pendanaan periode mendatang. Gambaran tentang keuangan daerah memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan, salah satunya sebagai dasar pengalokasian anggaran dalam kerangka Rencana Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan daerah

Selanjutnya APBD juga berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, APBD harus disusun dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu APBD harus memenuhi prinsip;

1. Legalitas: APBD harus disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu UU (Undang-Undang), PP (Peraturan Pemerintah), maupun peraturan lainnya.
2. Kredibilitas: APBD harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yaitu mampu dipercaya oleh masyarakat dan semua pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Akuntabilitas: APBD harus memuat informasi yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan dana publik, serta siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

Sesuai dengan keberadaan Provinsi Papua Selatan yang baru dimekarkan dari Provinsi Induk Papua melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan maka diperlukan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan berasal dari perhitungan dana transfer sesuai dengan perhitungan dan data data objektif yang melekat pada Provinsi Papua Selatan, disamping juga adanya kordinasi yang kuat dengan Provinsi induk Papua guna memastikan sumber sumber pendapatan asli daerah dan juga pembagiann beban-beban belanja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



3.1 Kondisi APBD Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur pendapatan daerah Provinsi Papua Selatan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum -- Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum,, Dana Transfer Khusus --DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan total pendapatan daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.1,61 trilyun dengan sumber utama berasal dari dana transfer yang mencapai sebesar Rp.1,53 trilyun atau sebesar 94,6 persen dari total pendapatan daerah, kemudian berasal dari pendapatan lain-lain berupa hibah yang mencapai sebesar Rp.61,99 milyar atau sebesar 3,8 persen dari total pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah berupa retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar Rp.25 milyar atau mencapai sebesar 1,5 persen dari total pendapatan daerah.

Tabel 3.1. Pendapatan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2023	
		Rupiah	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.618.357.419.650	
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000.000	1,5%
04.01.02	Retribusi Daerah	25.000.000.000	
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.531.361.935.000	94,6%
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.531.361.935.000	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	312.248.063.000	
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak	62.639.044.000	
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam	249.609.019.000	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	493.333.258.000	
	DAU yang ditentukan penggunaannya	90.462.195.000	
	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	402.871.063.000	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.634.299.000	
	Dana Alokasi Khusus fisik	48.196.739.000	
	DAK Non Fisik	1.437.560.000	
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	676.146.315.000	
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	302.849.602.000	
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	373.296.713.000	
04.03	PENDAPATAN LAIN-LAIN	61.995.484.650	3,8%
04.03.01	Hibah	61.995.484.650	

Selanjutnya uraian masing-masing kelompok pendapatan dalam APBD Papua Selatan tahun 2023 diuraikan berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 diasumsikan sebesar Rp.25 milyar yang merupakan retribusi daerah yang dimobilisasi dalam penyelenggaraan pelayanan ;
2. Pendapatan Transfer diproyeksikan pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp.1.531.361.935.000 Rincian pendapatan transfer selanjutnya diuraikan pada bagian berikut ini;
 - a. DBH Pajak yang terutama berasal dari bagi hasil PPH dan PBB pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.62.639.044.000,-
 - b. DBH Sumber Daya Alam pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.249.608.819.000,-
 - c. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya maupun tidak ditentukan penggunaannya pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.493.333.258.000,-
 - d. Dana alokasi fisik dan non fisik pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.49.634.299.000,-
 - e. Dana Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari 2,25 % DAU nasional baik yang bersifat kinerja maupun block grant pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.302.849.602.000,-
 - f. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus Papua pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.373.296.713.000,-
 - g. Dana Hibah pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp.61.995.484.650,-

3.1.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan target pendapatan daerah tahun 2023 maka perkiraan total belanja daerah pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp1.618.357.419.650,-terdiri dari;

1. Belanja Operasi diperkirakan mencapai sebesar Rp622.148.073.850,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai diperkirakan mencapai sebesar Rp272.595.148.975,-yang terutama dialokasikan untuk biaya gaji dan tunjangan serta jasa-jasa untuk pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyiapan berbagai instrumen pemerintahan Provinsi Papua Selatan-
 - b. Belanja Barang dan Jasa diperkirakan mencapai sebesar Rp690.644.428.289 yang terutama dialokasikan untuk penyediaan penunjang penyelenggaraan pemerintahan



dan pembangunan daerah di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat

- c. Belanja Hibah diperkirakan mencapai sebesar Rp7.845.000.000,- yang terutama dialokasikan untuk memfasilitasi bantuan pengembangan lembaga sosial, keagamaan dan ekonomi kemasyarakatan agar dapat menjadi salah satu aktor percepatan pembangunan daerah Papua Selatan
- d. Belanja Bantuan Sosial diperkirakan mencapai sebesar Rp8.300.000.000,- yang terutama dialokasikan untuk menjadi bantalan bagi masyarakat-masyarakat kurang mampu dan tertinggal

Tabel Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	2023	
		Rupiah	%
5	BELANJA DAERAH	1.618.357.419.650	
05.01	Belanja Operasi	979.384.577.264	61%
05.01.01	Belanja Pegawai	272.595.148.975	
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	690.644.428.289	
05.01.05	Belanja Hibah	7.845.000.000	
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	8.300.000.000	
05.02	Belanja Modal	467.972.842.386	29%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.257.231.198	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.924.968.000	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	297.530.643.188	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.260.000.000	
05.03	Belanja Tidak Terduga	168.000.000.000	10%
05.04	Belanja Transfer	3.000.000.000	
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	-	
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	3.000.000.000	




2. Belanja Modal diperkirakan mencapai sebesar Rp467.972.842.386,- yang terutama dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perkantoran pemerintah daerah Papua Selatan, infrastruktur sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan aksesibilitas antar wilayah Provinsi Papua Selatan
3. Belanja Tidak Terduga diperkirakan mencapai sebesar Rp168.000.000.000,- yang disediakan untuk menjadi sumber pendanaan bagi hal-hal mendesak yang sudah pasti akan terjadi di daerah baru yang belum memiliki banyak persiapan di berbagai bidang,-
4. Belanja Transfer diperkirakan mencapai sebesar RP. 3.000.000.000 berupa transfer ke Pemerintah kabupaten/Kota ataupun ke kampung yang akan digunakan untuk pelaksanaan program-program khusus yang bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota ataupun pemerintah kampung guna mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Provinsi Papua Selatan terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Adapun Penganggaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2023 masih belum ada, mengingat memang belum ada sumber dana yang menjadi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Papua Selatan.

Penganggaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2023 hanya berupa pembiayaan pengeluaran yang mencapai sebesar Rp14.995.484.650 merupakan merupakan sisa anggaran pada tahun anggaran 2022 dan menjadi penyeimbang bagi defisit anggaran yang diciptakan tahun 2023.

Tabel Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023
	Surplus/Defisit	
6	PEMBIAYAAN	-
06.01	Penerimaan Pembiayaan	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Netto	-

3.2 Neraca Daerah

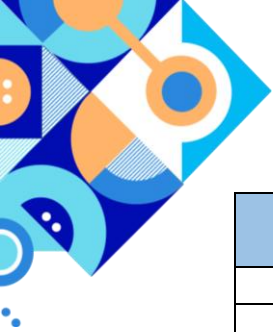
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Laporan Penyajian kondisi keuangan Provinsi Papua Selatan kurun waktu 2018-2023, masih menggunakan dan memanfaatkan fasilitas data, informasi dan dokumen yang tergabung pada kondisi Provinsi Papua, karena belum adanya penyerahan aset dan dokumen serta personil, sehingga Provinsi Papua Selatan masih dalam skala pemanfaatan dan pengguna terhadap hal tersebut.

Adapun rincian Komponen Neraca Daerah Provinsi Papua Selatan yang tmasih bergabung dengan Provinsi Papua, sebagai berikut :

Tabel Rincian Komponen Neraca Daerah Provinsi Papua Selatan

Uraian
Aset
Aset Lancar
Kas di Kas Daerah
Kas di Bend. Pengeluaran
Kas di Bend. Penerimaan
Kas Lainnya
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)
Kas di Bendahara BLUD
Kas di Bendahara BOS
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang Dana Bagi Hasil
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Piutang Transfer Antar Daerah
Persediaan
Investasi Jangka Panjang
Inv. Non Permanen Lainnya
Penyertaan Modal Pemda
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung Bangunan
Jalan Irigasi Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akum. Penyusutan
Dana Cadangan
Dana Cadangan
Aset Lainnya
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Non Lancar Lainnya
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset lainnya
Total Aset
Kewajiban
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Kewajiban jangka pendek
Utang kepada Pihak Ketiga
Pendapatan Diterima dimuka
Utang Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya



Uraian
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana
Total Ekuitas dan Kewajiban

3.2. Proyeksi APBD Papua Selatan Tahun 2024-2026

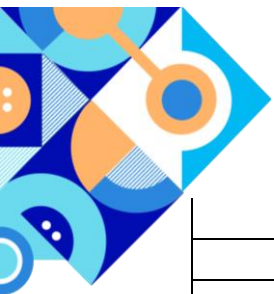
Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2024-2026 dilakukan dengan teknik justifikasi rasional kapasitas keuangan daerah dengan menggunakan basis data APBD 2023 Papua Selatan sebagai tahun 1 perencanaan, hal ini terkait dengan keberadaan data APBD tahun 2023 yang merupakan angka awal APBD Provinsi Papua Selatan pasca berlakunya undang undang pemekaran Provinsi Papua Selatan. Angka angka penerimaan dana transfer daerah (DTKD) juga telah disesuaikan dengan arahan Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri keuangan (PMK) terkait dengan perhitungan penyesuaian antar provinsi induk dan pemekaran berdasarkan variabel-variabel tertentu termasuk jumlah penduduk, luas wilayah dan kapasitas fiskal daerah.





Tabel 3.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Papua Selatan, 2024-2026 (Rp)

KODE REK	URAIAN	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.618.357.419.650	1.642.263.780.945	1.724.764.419.992	1.811.002.640.992
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000.000	25.375.000.000	26.643.750.000	27.975.937.500
04.01.01	Pajak Daerah	25.000.000.000	25.375.000.000	26.643.750.000	27.975.937.500
04.01.02	Retribusi Daerah	0	0	0	0
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.531.361.935.000	1.554.332.364.025	1.632.048.982.226	1.713.651.431.338
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.531.361.935.000	1.554.332.364.025	1.632.048.982.226	1.713.651.431.338
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	312.248.063.000	316.931.783.945	332.778.373.142	349.417.291.799
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak	62.639.044.000	63.578.629.660	66.757.561.143	70.095.439.200
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam	249.609.019.000	253.353.154.285	266.020.811.999	279.321.852.599
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	493.333.258.000	517.999.920.900	543.899.916.945	571.094.912.792
	DAU yang ditentukan penggunaannya	90.462.195.000	94.985.304.750	99.734.569.988	104.721.298.487
	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	402.871.063.000	423.014.616.150	444.165.346.958	466.373.614.305
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.634.299.000	50.378.813.485	52.897.754.159	55.542.641.867



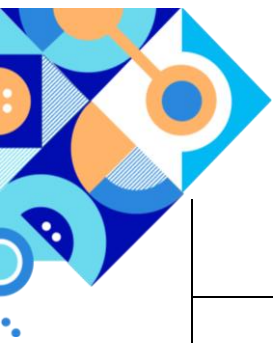
	Dana Alokasi Khusus fisik	48.196.739.000	48.919.690.085	51.365.674.589	53.933.958.319
	DAK Non Fisik	1.437.560.000	1.459.123.400	1.532.079.570	1.608.683.549
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	676.146.315.000	686.288.509.725	720.602.935.211	756.633.081.972
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	302.849.602.000	307.392.346.030	322.761.963.332	338.900.061.498
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	373.296.713.000	378.896.163.695	397.840.971.880	417.733.020.474
04.03	PENDAPATAN LAIN-LAIN	61.995.484.650	62.925.416.920	66.071.687.766	69.375.272.154
04.03.01	Hibah	61.995.484.650	62.925.416.920	66.071.687.766	69.375.272.154



Adapun Belanja Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Proyeksi Belanja Daerah dan Pembiayaan Provinsi Papua Tahun 2024-026

KODE REKENING	URAIAN	Proyeksi Tahun 2023	REALISASI 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
5	BELANJA DAERAH	1.618.357.419.650		1.642.632.780.945	1.724.764.419.992	1.811.002.640.992
05.01	Belanja Operasi	622.148.073.850		637.701.775.696	669.586.864.481	703.066.207.705
05.01.01	Belanja Pegawai	155.172.763.000		159.052.082.075	167.004.686.179	175.354.920.488
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	310.345.527.200		318.104.165.380	334.009.373.649	350.709.842.331
05.01.03	Belanja Bunga				0	0
05.01.04	Belanja Subsidi				0	0
05.01.05	Belanja Hibah	61.629.783.650		62.554.230.405	65.681.941.925	68.966.039.022
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	95.000.000.000		97.375.000.000	102.243.750.000	107.355.937.500
05.02	Belanja Modal	746.209.345.800		764.864.579.445	803.107.808.417	843.263.198.838
05.03	Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000		87.816.425.804	92.207.247.094	96.817.609.449
05.04	Belanja Transfer	150.000.000.000		152.250.000.000	159.862.500.000	167.855.625.000
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	-			0	0
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000.000		152.250.000.000	159.862.500.000	167.855.625.000
	Surplus/Defisit	-	-	-	-	-
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	SILPA	-	-	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-



	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-






Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	-

3.3. Arah Kebijakan APBD Papua Selatan Tahun 2024-2026

Pada tahun 2024-2026, daerah akan dihadapkan dengan berbagai tantangan ekonomi yang perlu diatasi melalui kebijakan APBD yang tepat. Beberapa tantangan ekonomi yang mungkin dihadapi antara lain inflasi yang tinggi, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan ketidakpastian global yang meningkat. Dalam menghadapi tantangan ini, kebijakan APBD tahun 2024-2026 harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program investasi yang produktif, seperti investasi di sektor infrastruktur dan industri, serta program pelatihan dan pengembangan SDM.
2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor publik dengan melakukan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
3. Memperkuat sektor pertanian, yang merupakan sektor yang penting bagi sebagian besar daerah di Indonesia, melalui program peningkatan produktivitas, pengembangan pasar dan peningkatan akses ke teknologi.
4. Mengatasi masalah inflasi dengan menjaga stabilitas harga, misalnya melalui pengawasan dan pengendalian harga bahan pokok, serta memperkuat kerja sama antar daerah dalam pengadaan dan distribusi barang.
5. Memperkuat pertumbuhan sektor strategis daerah lainnya termasuk meningkatkan promosi,



pelayanan, dan fasilitas, sehingga dapat menarik investor dan memberikan kontribusi positif pada ekonomi daerah.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026, meliputi:

1. Konsolidasi dan penyiapan kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Papua Selatan seiring dengan optimalisasi pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan;
2. Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas pemungut pajak dan retribusi Daerah;
4. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.
7. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan potensi pendapatan daerah
9. Meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi regulasi pengajuan usulan dana transfer dari Pusat dan Dana Otonomi Khusus;
10. Penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua dikelola secara efisien, efektif, transparan, taat pada peraturan perundang undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan pada OAP dan akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan, kemanfaatan, keadilan dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD
11. Dana otonomi Khusus terutama diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan OAP dan mengikat untuk dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
12. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus terutama dialokasikan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah berupa infrastruktur perhubungan, energi kelistrikan, Air Minum, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan;
13. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah;

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 adalah:

1. Konsolidasi belanja daerah Papua Selatan dengan Provinsi induk Papua pasca terbentuknya daerah pemekaran Provinsi Papua Selatan;
2. Mendisain perencanaan anggaran belanja yang didasari oleh prinsip value for money, yaitu ekonomis, efisien dan efektif ;
3. Penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
4. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan
5. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
6. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
7. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - a. Belanja pegawai daerah telah melebihi 30%, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun
 - b. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal
9. Pengalokasian belanja yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua disesuaikan dengan peraturan perundangan, yang antara lain diarahkan sebagai berikut:
- a. Penggunaan penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP) dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik;
 - b. Penggunaan dana otonomi khusus yang bersifat umum, antara lain untuk:
 - o Pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik.
 - o Peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat.
 - o Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penggunaan dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan:
 - o Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan.
 - o Paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan.
 - o Pemberdayaan ekonomi masyarakat
10. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus dialokasikan untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah berupa infrastruktur perhubungan, energi kelistrikan, Air Minum, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 meliputi:



1. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
3. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD
4. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan
5. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, serta
7. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran mendatang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.4 Pengelolaan Dana OTSUS Papua

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua meliputi:

- a. Pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.
- b. Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua
- c. RIPP dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua.

Kebijakan pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 meliputi:



- a. pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan memprioritaskan OAP;
- b. pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan memprioritaskan OAP;
- c. pembangunan infrastruktur berkualitas terutama yang mendukung pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sanitasi lingkungan, pemukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar lainnya dengan memprioritaskan Distrik dan Kampung yang merupakan basis OAP;
- d. peningkatan kesejahteraan kualitas hidup OAP, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan Masyarakat Adat;
- e. pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua dalam rangka mengurangi kesenjangan dengan provinsi lainnya; dan
- f. pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus papua bagi daerah yang tidak memiliki tambang, minyak dan gas bumi, maka penerimaan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 34 sebagai Sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten / kota adalah penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus diatur penerimaannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penerimaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua terdiri atas Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon alokasi dana alokasi umum nasional; dan DTI.
2. Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% terdiri atas: a. penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional; dan b. penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional.

Penggunaan : Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum nasional sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 4 ayat (2) huruf a ditujukan untuk: a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; b. peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga Adat; dan c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penerimaan Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon dana alokasi umum nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditujukan untuk: a). paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; b). paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan c). pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penggunaan DTI digunakan untuk: a. pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan; b. energi listrik; c. air bersih; d. telekomunikasi; dan e. sanitasi lingkungan.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI digunakan untuk mendanai Kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan Kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua untuk tahun berkenaan meliputi: a. desain perencanaan; b. biaya tender; c. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur negara; d. jasa konsultan pengawas; e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau perjalanan dinas untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan Kegiatan. Besaran persentase untuk Kegiatan penunjang dari alokasi DTI sepanjang tidak melebihi paling tinggi 5% (lima persen) dapat disesuaikan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

Pembagian alokasi antarprovinsi atas pagu Dana Otonomi Khusus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan: a. jumlah OAP; b). jumlah penduduk;



c).luas wilayah; d). jumlah kabupaten/kota, Distrik, dan Kampung/desa/kelurahan; e). tingkat kesulitan geografis; f). indeks kemahalan konstruksi; g). tingkat capaian pembangunan; dan h). indikator lain yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Pembagian alokasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan atas pagu masing-masing provinsi yang telah dialokasikan, dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan bagian provinsi tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari pagu provinsi yang bersangkutan.

SILPA OTSUS : sesuai Peraturan Pemerintah 107 Pasal 37 mengatur tentang penggunaan SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, pengelolaannya dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain. SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi. Penggunaan SiLPA Otsus 1% yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas Belanja Pendidikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.

Penggunaan SiLPA Otsus 1,25% yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan earmarking penggunaan dalam ketentuan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai Dana Abadi.

Penggunaan SiLPA Otsus DTI yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan earmarking penggunaan dalam ketentuan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai Dana Abadi. Earmark SILPA DTI meliputi : a. Infrastruktur Perhubungan b. Infrastruktur Telekomunikasi c. Infrastruktur Energi Listrik d. Infrastruktur Sanitasi Lingkungan e. Infrastruktur Air Bersih.





Kode Rek	Uraian	Realisasi 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.618.357.419.650	1.642.632.780.945	1.642.632.780.945	1.642.632.780.945
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.531.361.935.000	1.554.332.364.025	1.554.332.364.025	1.554.332.364.025
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.634.299.000	50.378.813.485	50.378.813.485	50.378.813.485
	Dana Alokasi Khusus fisik	48.196.739.000	48.919.690.085	48.919.690.085	48.919.690.085
	DAK Non Fisik	1.437.560.000	1.459.123.400	1.459.123.400	1.459.123.400
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	676.146.315.000	686.288.509.725	686.288.509.725	686.288.509.725
4.2.01.03.01	Dana Otonomi Khusus- Provinsi Papua	302.849.602.000	307.392.346.030	307.392.346.030	307.392.346.030
4.2.01.03.04	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	373.296.713.000	378.896.163.695	378.896.163.695	378.896.163.695

BAB IV

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah



Bab ini memuat berbagai isu strategis yang terkait dengan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis internasional, kebijakan nasional dan isu sektoral lainnya.

Permasalahan dan Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Papua Selatan jangka waktu 2024-2026 mengacu dari hasil capaian kinerja pembangunan Daerah Provinsi Papua. Komponen pembentuk isu strategis di Provinsi Papua Selatan terdiri dari: analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Provinsi Papua Induk 2005-2025, RPJMN 2020-2024; dan isu aktual yang sedang berlangsung termasuk persiapan pemerintahan Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SELATAN

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/ SDGs/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/ capaian tahun sebelumnya atau tren). Berikut erupakan permasalahan pembangunan yang terjadi di Provinsi Papua Selatan :



Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Makro di Provinsi Papua Selatan

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Kesejahteraan	Ketimpangan meningkat	Indeks Gini Provinsi Papua Selatan	Nilai Gini Ratio Provinsi Papua Selatan selama periode 2016 s/d Maret 2021 terus mengalami fluktuasi, data terakhir di 2021 menunjukkan indeks gini ratio Provinsi Papua Selatan sebesar 0,395.
		Masih rendahnya pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Selatan Tahun 2016-2021	IPM Papua Selatan meningkat dari 57,82 pada tahun 2016 menjadi 60,52 pada tahun 2021. Meskipun selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun angka IPM di Papua Selatan berada dalam kategori rendah dari tahun 2016 sampai 2018, dan masuk pada kategori sedang di tahun 2019 hingga 2021

		Tingkat kemiskinan masih tinggi	Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2020	Meskipun persentase tingkat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 terus mengalami penurunan, namun angka persentase kemiskinan di Papua Selatan masih tinggi yaitu 20,99% pada tahun 2018, dan 19,99% pada tahun 2020.
		Tingginya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2021	Tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 2,82% menjadi 4,92%. Kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2021 yaitu 3,01%
2	Aspek Pelayanan Umum	Masih kurangnya partisipasi sekolah SD, SMP, dan SMA	Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021	Angka Partisipasi Murni jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun 2021 masing-masing 85,74%, 52,82%, dan 38,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik



				pada jenjang tersebut masih rendah.
		Masih kurangnya fasilitas Kesehatan	Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Pembantu di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 257 Puskesmas Pembantu, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 309 Puskesmas Pembantu.
		Masih kurangnya kondisi panjang jalan	Panjang Jalan di Provinsi Papua Selatan tahun 2021	Di Provinsi Papua Selatan telah terbangun 663,75 km jalan, dengan 273,1 km permukaan aspal dan 390,65 km permukaan lainnya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPD Provinsi Papua Selatan 2024-2025 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat menyelesaikan masalah secara tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan di Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang pendidikan; (2) urusan bidang kesehatan; (3) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta (6) urusan bidang sosial.

4.1.1.1 Urusan Bidang Pendidikan

Permasalahan Pendidikan di Papua Selatan telah lama menjadi perhatian nasional, demi mencapai pemerataan kualitas Pendidikan antarwilayah. Berbagai studi menunjukkan terdapat kesenjangan antara kondisi Pendidikan di Papua Selatan dengan wilayah lain, baik pada jenjang Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun menunjukkan trend yang meningkat selama lima tahun terakhir, tetapi capaian kedua indikator tersebut di Papua Selatan masih tertinggal dengan rata-rata di tingkat nasional.

Identifikasi permasalahan Pendidikan di Papua Selatan menunjukkan terdapat tiga permasalahan utama, yaitu; (1) Rendahnya akses terhadap layanan Pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu/kualitas layanan Pendidikan; dan (3) Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan Pendidikan. Permasalahan akses menyangkut kemudahan bagi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sementara masalah mutu terkait bagaimana proses Pendidikan dapat dijalankan secara efektif sehingga menghasilkan keluaran yang kompetitif. Sementara tata kelola merupakan sebuah hubungan institusi dan aktor-aktor terkait, terutama pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk pendidikan. Terkait dengan ketiga faktor tersebut, uraian terhadap rumusan masalah dan akar masalahnya bisa dilihat pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Akses, kualitas dan tata kelola pendidikan yang belum optimal	1	Rendahnya akses terhadap layanan pendidikan	1	Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi
			2	Rendahnya proporsi pengeluaran per kapita rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan
			3	Belum meratanya ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Beberapa kabupaten mengalami kekurangan fasilitas sekolah menengah.
			4	Kondisi topografi yang sangat ekstrim dan variatif sehingga menyulitkan peserta didik mengakses sekolah
	2		1	Belum optimalnya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
		Belum optimalnya mutu/ kualitas layanan pendidikan		dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan
			2	Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas relatif masih rendah
			3	Belum maksimalnya melek Calistung (membaca, menulis dan berhitung)
			4	Fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti kelas dalam kondisi rusak, kekurangan fasilitas laboratorium, dsb
			5	Rendahnya sekolah yang bersertifikasi A dan B
			6	Pendidikan ekstrakurikuler dan program pengayaan belum berkembang dengan optimal
			7	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran
			8	Belum berkembangnya sekolah menengah, politeknik dan perguruan tinggi yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal seperti jurusan pertanian, pariwisata, pertambangan
			9	Rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di sekolah menengah, politeknik dan universitas, serta kurangnya program pemagangan yang terstruktur sehingga kompetensi lulusan kurang relevan
	3	Belum optimalnya tata kelola	1	Belum maksimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH								
	penyelenggaraan pendidikan	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Belum memadainya penerapan SPM pendidikan di setiap sekolah</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Belum ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Selatan.</td> </tr> </table>	2	Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi	3	Belum memadainya penerapan SPM pendidikan di setiap sekolah	4	Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran	5	Belum ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Selatan.
2	Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi									
3	Belum memadainya penerapan SPM pendidikan di setiap sekolah									
4	Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran									
5	Belum ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Selatan.									

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.2 Urusan Bidang Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Selatan tergolong rendah yang, ditandai dengan masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta tingginya prevalensi gizi buruk pada balita. Permasalahan-permasalahan yang memberikan sumbangan terhadap angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan kesehatan. Berikut rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Selatan berdasarkan capaian program-program kesehatan hingga tahun 2022:

Tabel II.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH				
1	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan belum memadai	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Separuh puskesmas di Provinsi Papua Selatan belum terakreditasi, dan yang sudah terakreditasi sebagian besar baru pada tingkat dasar dan madya</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan belum memiliki rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan (masih sebagai FKTP)</td> </tr> </table>	1	Separuh puskesmas di Provinsi Papua Selatan belum terakreditasi, dan yang sudah terakreditasi sebagian besar baru pada tingkat dasar dan madya	2	Empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan belum memiliki rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan (masih sebagai FKTP)
1	Separuh puskesmas di Provinsi Papua Selatan belum terakreditasi, dan yang sudah terakreditasi sebagian besar baru pada tingkat dasar dan madya					
2	Empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan belum memiliki rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan (masih sebagai FKTP)					



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
				3	Rasio posyandu per jumlah balita masih rendah dan strata posyandu sebagian besar berstrata pratama dan madya
				4	Belum semua kabupaten melaksanakan Posbindu PTM, dan yang sudah terlaksana belum berjalan secara teratur
				5	Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine belum berjalan sesuai standar
	2	Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum merata		1	Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terutama dokter gigi dan tenaga preventif-promotif (Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, ATLM, Kefarmasian dan Gizi)
				2	Distribusi tenaga medis, perawat dan bidan belum merata, terutama untuk daerah-daerah sulit
				3	Kurang dari 10% puskesmas di Provinsi Papua Selatan yang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan cukup
	3	Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal		1	Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu dan anak tidak berjalan secara teratur
				2	Cakupan pelayanan ibu dan anak masih rendah, terutama di kabupaten yang memiliki wilayah sulit
				3	Prevalensi penyakit menular (Tb, malaria, HIV, diare, pneumonia) masih tinggi di beberapa kabupaten
				4	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi rendah
				5	API Malaria masih tinggi, dan belum ada kabupaten/kota yang dinyatakan telah mencapai eliminasi malaria
				6	Belum ada kabupaten/ kota yang telah mencapai pelayanan terpadu PTM $\geq 80\%$ puskesmas.

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
				7	Belum ada kabupaten/ kota yang memenuhi kriteria melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja dan Upaya Kesehatan Olah Raga
				8	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) baru berjalan di 1 kabupaten dan Kabupaten/ Kota Sehat (KSS) belum berjalan
				9	Pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota masih rendah. Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam kesehatan keluarga dan pengendalian penyakit, pelayanan lain meliputi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, dan orang dengan gangguan jiwa berat
				10	Sebagian target-target Renstra Kemenkes di tingkat provinsi belum terpenuhi, antara lain mencakup penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat serta peningkatan sumber daya kesehatan
2	Kualitas SDM Provinsi Papua Selatan masih rendah, yang dipengaruhi oleh faktor gizi sejak 1000 HPK		Tingginya prevalensi balita stunting	1	Belum semua kabupaten/ kota menjalankan surveilans gizi sesuai standar
				2	Peran serta lintas sektoral dalam intervensi sensitif untuk pencegahan stunting belum berjalan, hampir seluruhnya masih dilaksanakan oleh sektor kesehatan
				3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merupakan intervensi spesifik



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
		untuk pencegahan stunting masih rendah.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.3 Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel II.3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas daerah	1 Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan jembatan) serta sistem pengendali aliran air.	1 Masih banyaknya jalan provinsi yang masih dalam status rusak dan belum optimal penanganannya
		2 Kuranginya kapasitas OPD untuk mengidentifikasi dan mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan prioritas
		3 Lambatnya rehabilitasi jalan/ jembatan rusak
		4 Pembangunan jalan/jembatan yang terintegrasi dengan sasaran prioritas pembangunan sektoral dan spasial masih belum dikelola secara optimal
		5 Kuranginya akses jalan antar ibu kota kabupaten menuju ke distrik serta kampung yang bisa terakses
		6 Belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan di wilayah Provinsi Papua Selatan terutama ke daerah-daerah yang memiliki potensi besar baik di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan
		7 Belum adanya pengendali banjir untuk kawasan pemukiman dan pertanian yang terletak disepanjang aliran sungai yang berpotensi banjir.
		8 Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH		
		9	Belum terpenuhinya kebutuhan saluran drainase	
	2	1 2 3 4	1	Manajemen infrastruktur dasar yang masih sangat rendah
	Belum memadainya kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar penyedia air baku dan air bersih		2	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat
			3	Belum tercukupinya kesiapan sarana pendukung air bersih
			4	Belum maksimalnya optimalisasi pemanfaatan sumber sumber air baku
	3	1 2 4	1	Belum adanya sarana pengolahan sampah untuk masyarakat dan TPA di berbagai wilayah di Provinsi Papua Selatan
	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur sanitasi		2	Rendahnya implementasi Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (SPALD)
			4	Tingginya persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS)
	4	1 2	1	Kondisi geografis wilayah yang sulit berimplikasi pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur fisik daerah
	Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan infrastruktur		2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah
	5	1 2 3 4	1	Belum optimalnya implementasi dan pengawasan pemanfaatan ruang
	Belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang		2	Rendahnya kualitas data tata ruang wilayah, baik data pemetaan, kuantitatif, serta kualitatif
			3	Evaluasi implementasi rencana tata ruang masih belum memadai
			4	Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Provinsi Papua Selatan



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
		5 Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.4 Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel II.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya akses pemukiman layak huni	1 Rendahnya tingkat penghunian rumah layak dan sehat	1 Kurang memadainya sanitasi dan jamban yang aman, bersih dan layak pada rumah tangga
		2 Masih banyaknya keluarga yang memiliki rumah dengan atap, dinding dan lantai tanah yang tidak memenuhi persyaratan kriteria rumah layak huni
		3 Rendahnya kepemilikan rumah dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan standar keamanan dan keselamatan
		4 Masih terdapat 13 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan, dengan penanganan yang kurang optimal
		5 Belum optimalnya jumlah rumah yang dibangun untuk Orang Asli Papua (OAP)
	2 Terbatasnya kapasitas tata kelola dan tingginya pembiayaan	1 Kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dan kepulauan-kepulauan telah mengakibatkan kesulitan dan mahalnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Papua Selatan
		2 Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
		perumahan masyarakat dan penataan kawasan permukiman
		3 Pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman seringkali masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.5 Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketenteraman, ketertiban serta perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Selatan dapat dilihat pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketenteraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat	1 Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban.	1 Belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan keamanan
		2 Belum optimalnya penegakan perda dan perkada
		3 Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat, serta masih tingginya tindak pidana yang belum tertangani
		4 Belum memadainya tenaga pengendali dan keamanan lingkungan
		5 Masih adanya potensi kecemburuan sosial di masyarakat antara orang asli Papua dan warga pendatang
		6 Belum optimalnya fungsi FKUB sebagai wahana untuk menjaga kerukunan umat beragama



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		7 Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat	
	2 Belum optimalnya penyelenggaraan stabilitas politik daerah	1 Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan	
		2 Lemahnya peran partai politik dan DPRD sebagai lembaga demokrasi	
		3 Rendahnya tingkat kebebasan sipil dalam berkumpul dan berserikat	
		4 Masih terdapat tindakan atau pernyataan diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	
	3	Tingginya risiko bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi & adaptasi yang komprehensif	1 Provinsi Papua Selatan termasuk provinsi yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi
			Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana di beberapa wilayah yang memiliki kelas risiko multi bencana tinggi
			2 Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial
			5 Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
			6 Banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana yang belum ditangani dengan baik
			7 Belum optimalnya kapasitas aparat daerah dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.1.6 Urusan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya kohesivitas sosial. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang sosial di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.6.

Tabel II.6 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Sosial di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Tingginya kerentanan sosial masyarakat	1 Lemahnya perlindungan sosial dan mitigasi risiko bencana sosial maupun bencana alam	1 Tingginya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan
		2 Masih banyaknya kelompok orang asli papua dalam komunitas adat terpencil yang belum terjamah dan memiliki aksesibilitas dalam pembangunan
		3 Kekosongan bantuan sosial atau penanganan risiko sosial yang belum responsif terhadap kondisi kelompok miskin dan rentan, seperti pada perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja, serta skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi darurat
		4 Belum optimalnya pemberian paket bantuan dan rehabilitasi sosial kepada PMKS
		5 Belum tersedianya peralatan logistik (bahan pembangunan rumah/logistik lainnya) dalam penanganan bencana sosial dan bencana alam
	2 Lemahnya akurasi dan validitas data penerima bantuan perlindungan sosial	1 Belum optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (lansia, janda, duda, yatim piatu, tuna rungu, tuna daksa, gangguan jiwa)
		2 Belum tersedianya data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perlindungan sosial (bencana sosial, bencana alam, dan masyarakat kurang mampu)
		3 Belum adanya integrasi antara data penerima bantuan perlindungan sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan pendataan terpilah OAP dan non-OAP by name by address secara berkala



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
		yang dilakukan di tingkat kampung melalui SIO Papua
	3 Lemahnya kualitas SDM yang menangani masalah kesejahteraan sosial	1 Belum memadainya SDM yang terdidik/terlatih di bidang rehabilitasi sosial
		2 Keterbatasan pendampingan pelayanan untuk penduduk miskin dan rentan, serta strukturisasi pendamping sosial di masyarakat
	4 Lemahnya kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	1 Pembiayaan bantuan sosial (seperti bantuan tunai, bantuan siswa miskin, bantuan penyandang difabel) saat ini sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD, dan belum mengoptimalkan sumber pembiayaan lain seperti hibah, CSR, TJSL, PKBL, maupun filantropi
		2 Kurangnya koordinasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang tenaga kerja; (2) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) urusan bidang pangan; (4) urusan bidang pertanahan; (5) urusan bidang lingkungan hidup; (6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8) urusan bidang pemberdayaan masyarakat kampung; (9) urusan bidang perhubungan; (10) urusan bidang komunikasi dan informatika; (11) urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; (12) urusan bidang penanaman modal; (13) urusan bidang kepemudaan dan olah raga; (14) urusan bidang kebudayaan.

4.1.2.1 Urusan Bidang Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Provinsi Papua Selatan masih cukup rendah, dimana angkanya pada tahun 2020 adalah sebesar 69.55%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih Banyak penduduk Angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Selatan juga tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Selain itu, tenaga kerja yang terserap diindikasikan masih memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan OPD yang membidangi peningkatan sumberdaya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal yang sesuai dengan sektor tenaga kerja yang

dibutuhkan. Tabel II.7 akan memberikan pemetaan antara rumusan masalah dan akar masalah di bidang urusan ketenagakerjaan.

Tabel II.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Tenaga Kerja di Papua Selatan

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja	1	Rendahnya kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) tenaga kerja untuk mendukung produktivitas industri, karena mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah
				2	Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik (lulusan SMK dan universitas) karena adanya mismatch antara bidang pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia
				3	Belum tersedianya Balai Latihan Kerja di Papua Selatan yang memberikan pendidikan/pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan sesuai dengan SDA yang tersedia. Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Papua Selatan hanya satu di Kota Sorong dan merupakan BLK milik Kementerian Tenaga Kerja
				4	Longgarnya ikatan kerja (engagement) serta tingginya kecenderungan pencarian kerja baru/ meninggalkan pekerjaan (turnover rate) yang dapat meningkatkan risiko untuk tidak bekerja
		2	Belum terjalinnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja	1	Tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan UMP yang ditetapkan masih sangat rendah
				2	Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
				3	Penanganan perselisihan tenaga kerja belum maksimal



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
		3	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan	1	Belum terealisasinya pemetaan/ data dukung kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan yang berinvestasi di Papua Selatan sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Papua Selatan
				2	Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja
				3	Belum ada sinergisitas antar OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun dari pendidikan nonformal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku usaha yang sudah berinvestasi di Provinsi Papua Selatan baik itu pada bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, gas bumi & perminyakan
2	Belum optimalnya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 terhadap ketenaga-kerjaan	1	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja	1	Pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penurunan pendapatan buruh/karyawan sebagai dampak pandemi Covid-19
				2	Meningkatnya pekerja sektor pertanian-informal di perdesaan yang berpotensi meningkatkan pekerja miskin di perdesaan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.2 Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak termarginalisasi dalam proses-proses pembangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dari sisi kesenjangan gender, angka IPG di Papua Selatan masih tertinggal jauh di bawah nasional. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan isu besar di Papua Selatan. Identifikasi

permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Selatan dapat dilihat dalam Tabel II.8.

Tabel II.8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah	1 Belum optimalnya perlindungan hak serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan	1	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun diranah publik dengan spektrum yang semakin luas.
		2	Banyaknya perkawinan yang tidak sah
		3	Kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan
		4	Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran Indonesia dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal
		5	Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan perempuan
	2 Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	1	Rendahnya pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik, yaitu: a. kepemilikan akte kelahiran; b. Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; c. puskesmas ramah anak, d. kampung anak sejahtera; e. sekolah ramah anak; f. pusat kreatifitas anak; g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); h. Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); i. media informasi layak anak seperti PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak)
		2	Masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang termasuk minuman keras pada anak
		3	Masih terdapat kasus konsumsi video porno untuk anak di bawah umur



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH		
		4	Masih terdapat kekerasan anak dalam rumah tangga	
		5	Belum ada penyediaan rumah layak anak (panti) untuk anak di keluarga yang tidak mampu	
		6	Masih terjadinya kasus diskriminasi dan eksploitasi anak	
		7	Masih terdapat kasus pernikahan dini pada anak usia remaja	
		8	Pelayanan untuk anak yang sedang dalam masa tahanan kurang maksimal	
	3	Belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan	1	Masih kurangnya tenaga perempuan yang bekerja di DPR, lembaga eksekutif, dan PNS
			2	Terdapat pola patrilineal kesukuan, menyebabkan partisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menjadi sulit
	4	Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
			2	Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Provinsi Papua Selatan
			3	Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.3 Urusan Bidang Pangan

Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan masyarakat memiliki kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan

pangan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang ketahanan pangan di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.9.

Tabel II.9 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Tingginya kerawanan pangan masyarakat	1 Rendahnya ketahanan pangan masyarakat	1 Terbatasnya diversifikasi pangan lokal. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal
		2 Terbatasnya akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas
		3 Persentase daerah rentan pangan di Provinsi Papua Selatan masih cukup tinggi
		4 Belum optimalnya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
	2 Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi	1 Rendahnya daya beli penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan. Hal ini ditunjukkan dengan konsumsi pangan yang berada di bawah standar kecukupan gizi
		2 Akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas
		3 Masih terbatasnya infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang akan turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan
	3 Belum optimalnya tata kelola dan SDM pemenuhan kebutuhan pangan dan kecukupan gizi	1 Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan
		2 Terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pemdamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
		peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.4 Urusan Bidang Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal ini terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria. Cita-cita pembangunan fisik masih terkendala oleh tingginya konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak milih dan tanah adat. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Selatan. Pelayanan administrasi pertanahan juga bukan hal yang mudah di Papua Selatan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanahan di Papua Selatan dapat dilihat dalam Tabel II.10.

Tabel II.10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan	1 Belum optimalnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	1 Banyaknya tanah yang terlantar, dengan status kepemilikan yang belum jelas
		2 Belum adanya database/pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Selatan
		3 Pelayanan administrasi pertanahan masih belum menjangkau secara efektif sampai dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis
		4 Rendahnya penerbitan sertifikat tanah dan izin lokasi
		5 Belum harmonisnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kesesuaian undang-undang pemerintahan daerah dengan undang-undang sektoral
	2 Belum optimalnya pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat	1 Tingginya konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat
		2 Belum maksimalnya pengakuan negara/pemerintah daerah atas tanah adat/tanah ulayat

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
		3 Belum ada harmonisasi data sertifikat hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik tanah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.5 Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan kebakaran disertai dengan pembangunan daerah yang harus disertai dengan pengelolaan berbasis lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Salah satu permasalahan fundamental dalam bidang lingkungan hidup adalah belum adanya dokumen perencanaan dan analisis tertulis yang mengakomodir potensi dan masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagaimana Tabel II.11.

Tabel II.11 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang mendukung keberlanjutan sektor lingkungan hidup	1 Belum optimalnya perencanaan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan	1 Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup
		2 Belum adanya dokumen yang mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		3 Belum adanya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
	2 Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam	1 Penurunan kualitas udara karena pembakaran kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta kebakaran hutan dan lahan
		2 Penurunan kualitas air karena pencemaran limbah domestik, kondisi



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
	pembangunan berkelanjutan		sanitasi tidak layak dan tingginya paparan beban pencemaran sungai
		3	Penurunan kualitas tutupan lahan karena deforestasi hutan/lahan, serta belum signifikannya reforestasi hutan/lahan dan kegiatan penanaman lainnya
		4	Terdapat tekanan demografi kepada kawasan konservasi yang menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa dan berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi
		5	Penerapan pola penanganan/pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan. Belum optimalnya kontribusi jasa lingkungan dan pengembangan circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah menggunakan metode 3R (reduce, reuse and recycle).
		6	Meningkatnya investasi berbasis lahan skala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
		7	Tingginya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.6 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan menyangkut pada akses pelayanan publik lainnya. Misalnya, akta kelahiran sebagai syarat pendaftaran sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal yang paling fundamental untuk memastikan pengakuan hukum seorang individu oleh negara, sehingga mudah bagi individu tersebut untuk memperoleh pelayanan publik yang menjadi hak-nya. Secara umum, masih banyak yang perlu di perbaiki dalam peningkatan cakupan penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Papua Selatan. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Papua Selatan dapat dilihat dalam Tabel II.12.

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Pemerintah provinsi berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Selatan meningkat signifikan, dari 37.32% pada tahun 2017 sampai 63.64% pada tahun 2020. Namun, kepemilikan akta lahir masih sangat rendah. Pada tahun 2021, masih ada 44.64% anak berusia 0-4 tahun yang belum memiliki akta lahir. Tentunya, hal ini akan menghambat mereka untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan pencatatan sipil juga masih sangat buruk. Rasio pasangan yang berakta nikah pada tahun 2021 hanya ada 37.73%.

Adapun permasalahan yang disebutkan tersebut disebabkan karena terbatasnya sarana prasarana kependudukan, seperti ketersediaan gedung perkantoran serta alat perekaman KTP. Selain itu, sumberdaya manusia atau kader di tingkat kampung sebagai fasilitator tenaga registrasi masih terbatas. Adapun rumusan masalah pada bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel II.12

Tabel II.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan menjangkau semua masyarakat	1 Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	1 Belum optimalnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan akta catatan sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik
		2 Rendahnya penerbitan akta kelahiran bagi anak di setiap daerah
		3 Cakupan pendataan data terpilah OAP dan nonOAP belum 100%
		4 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan
	2 Terbatasnya sarana prasarana kependudukan	1 Sarana dan prasarana pendataan Dukcapil (Gedung perkantoran dan alat perekaman KTP) yang masih sangat terbatas dan menyebar tidak merata
		2 Terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga kerja atau kader untuk pencatatan dokumen kependudukan

Sumber: Hasil Analisis, 2022



4.1.2.7 Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meskipun dengan pertumbuhan penduduk yang rendah di Papua Selatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kedepan. Lonjakan penduduk dapat mengakibatkan ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Permasalahan utama yang perlu menjadi pusat perhatian adalah rendahnya cakupan akseptor KB. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.13.

Pada umumnya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas, yang dilaksanakan melalui upaya promosi, perlindungan dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan penyediaan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga berkualitas dengan usia kawin ideal, jumlah ideal anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan melalui pola asuh tumbuh kembang balita dan remaja. Dalam hal ini, persepsi masyarakat mengenai program KB sangat penting, dan berdasarkan LKIP BKKBN Tahun 2020, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Program KB hanyalah upaya pembatasan jumlah anak dan pemusnahan etnik tertentu.

Selain itu dari segi pelaksanaan program, Papua Selatan masih belum optimal dalam menyediakan alat kontrasepsi bagi PUS. Terbatasnya petugas lapangan KB di tingkat kabupaten/kota juga memperparah pelaksanaan program KB. Selain itu, angka kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi. Adapun lengkapnya mengenai rumusan masalah pada bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel II.13.

Tabel II.13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum maksimalnya pengendalian penduduk, pelayanan Keluarga Berencana	1 Rendahnya akseptor KB aktif	1 Belum optimalnya penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS
		2 Rendahnya literasi fungsi dan keterkaitan KB
		3 Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan pemasangan alat kontrasepsi masih relatif terbatas
		4 Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi (alkon) KB jangka Panjang
		5 Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi karena lokasi kampung yang sulit terjangkau
		6 Terbatasnya tenaga penyuluh KB dan kader KB

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
	2	Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
			2	Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga, yaitu: 1. fungsi agama; 2. fungsi sosial budaya; 3. fungsi cinta dan kasih sayang; 4. fungsi perlindungan; 5. fungsi reproduksi; 6. fungsi sosialisasi dan pendidikan; 7. fungsi ekonomi; serta 8. fungsi pembinaan lingkungan
			3	Pernikahan usia anak
			4	Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.8 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Bidang pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk mengembangkan potensi masyarakat, misalnya dalam sektor ekonomi kerakyatan. Kemudian, pengelolaan institusi lokal masyarakat dalam suatu unit wilayah juga di pegang oleh bidang urusan ini. Di sisi lain, kampung yang saat ini dipandang strategis sebagai unit pembangunan dalam paradigma baru membutuhkan upaya pemberdayaan. Khususnya di Papua Selatan, saat ini kebijakan Provinsi banyak mendorong terbentuknya pemberdayaan tersebut. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.14.

Tabel II.14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pembangunan kampung berbasis	1	Masih rendahnya penggunaan dana kampung untuk kebutuhan prioritas	1	Masih lemahnya pemahaman masyarakat kampung dalam manajemen pengelolaan anggaran kampung.
			2	Belum maksimalnya pembinaan manajemen pengelolaan anggaran kepada setiap aparat kampung.



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
sumber daya kampung		pembangunan kampung.	4	Belum berjalannya fungsi evaluasi anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK).
			5	Belum terbentuk / belum dimanfaatkannya Badan Usaha Milik Kampung sebagai sumber pendapatan kampung
			6	Pemenuhan aspirasi kebutuhan program kampung masih bersifat kekeluargaan belum sampai pada pemenuhan kebutuhan umum kampung.
	2	Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan kampung	1	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung (Bamuskam dan Baperkam).
			2	Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat kampung dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat
			3	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem administrasi kampung, termasuk Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua)
	3	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat kampung	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program prioritas kampung untuk kepentingan bersama.
			2	Belum tersedianya instrument kebijakan dan petunjuk pelaksanaan standar pemenuhan kebutuhan sosial dasar OAP secara terpadu serta pelaksanaan pemberdayaan OAP sesuai kewenangan Otsus di kampung
			3	Belum optimalnya pembinaan kader kampung dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung
	4	Belum optimalnya pembangunan kampung	1	Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan percepatan pembangunan kampung sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
		2 Belum optimalnya pelaksanaan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat kampung
		3 Penetapan target sasaran penerima manfaat dalam pembangunan kampung belum secara maksimal didukung ketersediaan data by name by address terpilah OAP dan non-OAP di tingkat kampung
		4 Cakupan implementasi program strategis pemberdayaan masyarakat dan kampung belum dilaksanakan oleh seluruh kampung dan kabupaten/kota

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.9 Urusan Bidang Perhubungan

Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan ketidakefektifan konektivitas transportasi. Permasalahan ini menimbulkan dampak yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang dan jasa. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.15.

Tabel II.15 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perhubungan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya konektivitas transportasi	1 Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan dan keandalan pelayanan transportasi dalam pemenuhan kebutuhan transportasi	1 Kurang optimalnya pemanfaatan bandara perintis
		2 Kurang maksimalnya keberadaan titik terminal untuk mengangkut kendaraan umum dan penumpang
		3 Belum optimalnya fungsi fasilitas terminal karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan
		4 Rendahnya ketersediaan moda transportasi antar daerah
		5 Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara dan fasilitas bandara



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH		
		6	Biaya angkutan umum yang belum terstandar	
		7	Masih terisolasinya beberapa wilayah distrik	
	2	Lemahnya implementasi transportasi berwawasan lingkungan	1	Belum berjalannya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi seperti penurunan emisi gas buang kendaraan dan penurunan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan
	3	Masih rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan perjalanan	1	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat (Lampu jalan, rambu-rambu)
	4	Belum optimalnya tata kelola urusan perhubungan	1	Kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi pelayanan transportasi darat, laut dan udara
			2	Proses perencanaan (studi-pengusulan) dan proses pembangunan sarana dan prasarana fisik sarana prasarana infrastruktur perhubungan memakan waktu yang lama
			3	Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi
			4	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.10 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; diseminasi informasi dan komunikasi publik; serta penelitian dan pengembangan SDM bidang komunikasi dan informatika. Identifikasi permasalahan

pembangunan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.16.

Tabel II.16 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung berbagai bidang pembangunan daerah	1	Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik
				2	Masih sedikitnya SDM di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung yang menguasai keahlian pada bidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam pengelolaan/managemen sistem E-Government termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				3	Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik, tata Kelola, sistem e-Government, serta sistem pendataan, termasuk sistem pendataan terpilah OAP dan non-OAP melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
				4	Belum diterapkannya pengamanan dan persandian terhadap sistem teknologi dan informasi pemerintah
				5	Belum adanya SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang persandian
				6	Belum optimalnya pelembagaan serta akselerasi cakupan penggunaan dan pendataan Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung.
				7	Belum optimalnya pengadaan alat jurnalistik
2	Belum optimalnya	1	Belum optimalnya pemerataan akses	1	Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses pelayanan



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informatika	1	infrastruktur komunikasi dan informatika	1	informasi dan komunikasi bagi masyarakat
				2	Jaringan internet yang belum merata tersebar di seluruh wilayah
				3	Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha sehingga menyisakan blank spot di wilayah non-komersial

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.11 Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pemberdayaan, perlindungan, serta pengawasan koperasi dan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.17.

Tabel II.17 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Papua Selatan

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Kondisi perkembangan koperasi yang stagnan	1	Lemahnya tata kelola dan kelembagaan koperasi	1	Persentase koperasi aktif di Provinsi Papua Selatan masih rendah
				2	Banyak koperasi yang belum berbadan hukum
				3	Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas sehingga pengelolaan koperasi belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang profesional
		2	Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran koperasi, serta kurang tanggapnya koperasi terhadap dinamika kebutuhan pasar	1	Sistem produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM
				2	Belum aktifnya peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan lokal

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
					(pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan pertambangan)
2	Rendahnya kontribusi UMKM pada sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian wilayah	1	Lemahnya kapasitas produksi dan pemasaran UMKM	1	Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya
				2	Kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah
				4	Sulitnya kondisi geografis sehingga UMKM mengalami kesulitan mendistribusikan produk
				5	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
				6	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil pertanian rakyat
				7	Masih rendahnya partisipasi Koperasi dalam aktifitas pertambangan rakyat
				2	Lemahnya kapasitas pembiayaan UMKM
		2	Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menyediakan jasa pinjaman modal untuk UMKM belum dimanfaatkan secara optimal		
		3	Mayoritas UMK merupakan UMK yang tidak berbadan usaha		

Sumber: Hasil Analisis, 2022



4.1.2.12 Urusan Bidang Penanaman Modal

Urusan bidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pengembangan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang penanaman modal di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.18.

Tabel II.18 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Penanaman Modal di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1 Belum optimalnya pelayanan penanaman modal yang sesuai dengan investor needs	1 Belum adanya kejelasan penyelesaian kasus antar investor dengan pemilik hak ulayat
		2 Belum tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah
		3 Belum optimalnya performa sistem logistik di Papua Selatan
		4 Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan perizinan standar OSS
	2 Belum optimalnya kualitas penanaman modal	1 Belum optimalnya perkembangan pengusaha asli papua dalam kegiatan ekonomi
		2 Masih tingginya pelanggaran terhadap izin lokasi
		3 Kuranginya kesadaran masyarakat dalam membuat izin usaha
		4 Belum efektifnya pelaporan pertanggung jawaban investor terhadap Pemerintah Daerah
	3 Lemahnya tata kelola penanaman modal	1 Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM layanan perizinan
		2 Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN
		3 Belum optimalnya promosi investasi daerah
		4 Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan penanaman modal antar pusat dan daerah

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
	4 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penanaman modal	1 Penundaan investasi oleh investor karena ketidakjelasan supply chain atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Belum optimalnya penggalian potensi dan pengembangan kapasitas pemuda dan keolahragaan merupakan permasalahan yang ditemukan di Provinsi Papua Selatan. Telah tersedia fasilitas olahraga yang tersebar di seluruh kabupaten, namun belum dilakukannya pencarian dan pengembangan bakat olahragawan yang dapat dilatih untuk merepresentasikan Provinsi Papua Selatan dalam kompetisi-kompetisi olahraga. Selain itu, diperlukannya SDM/pelatih yang memiliki kompetensi di pendidikan keolahragaan untuk mengembangkan talenta calon-calon olahragawan. Berikut adalah tabel yang memetakan permasalahan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Tabel II.19 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pengembangan daya saing pemuda berbasis pada unsur-unsur kebudayaan dan olahraga	1 Belum optimalnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga	1 Keterbatasan SDM pertandingan
		2 Banyak atlet yang mengalami kendala administrasi karena ada perbedaan data di akte dan kondisi fisiknya
		3 Kurangnya pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di bidang keolahragaan
		4 Prestasi dan daya saing keolahragaan yang belum maksimal
		5 Kurangnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi
		6 Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota
	2 Belum optimalnya peran sosial pemuda	1 Munculnya orientasi berlebihan kepada kegiatan politik praktis seputar kekuasaan dibandingkan kegiatan kepeloporan di bidang keswadayaan dan kesukarelawanan, penumbuhan modal sosial dan pekerja



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH		
			sosial, penumbuhan kreasi seni, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga	
		2	Budaya premanisme di kalangan pemuda	
		3	Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan narkotika	
	3	Belum optimalnya peran pemuda sebagai penggerak ekonomi	1	Tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda disebabkan karena (1) terbatasnya lapangan kerja; dan (2) belum sesuai kompetensi dan kualifikasi pemuda dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia
			2	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan, kreativitas, inovasi dan daya saing pemuda dalam aktivitas perekonomian

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2.14 Urusan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi, Papua Selatan memiliki potensi yang besar, namun kondisi tersebut sekaligus menghadapkan Papua Selatan dengan berbagai tantangan dalam pelestarian budaya asli Papua. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah urusan kebudayaan.

Tabel II.20 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Kebudayaan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Menurunnya kualitas dan kuantitas nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	1 Belum optimalnya pendidikan lingkungan dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1	Belum tersedianya ruang publik untuk pertunjukan seni dan budaya
		2	Promosi budaya yang belum memadai melalui festival dan event-event budaya di tingkat kabupaten dan propinsi Papua Selatan.
		3	Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian
		4	Belum optimalnya pembinaan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal tua-tua adat kepada generasi muda, sebagai bentuk menjaga kelangsungan sejarah asal-usul,

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH		
	2		arsitektur rumah tradisional, pengetahuan lokal tentang pengelolaan sumber daya alam dan kearifan lokal.	
		1	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok sanggar seni dan budaya	
		2	Belum dilestarikannya arsitektur rumah adat kaki seribu sebagai simbol arsitektur tradisional yang bernilai bagi pengembangan budaya dan pariwisata.	
		3	Belum adanya roadmap dan catatan-catatan kajian Etnografi sebagai sarana pelestarian budaya suku OAP di Papua Selatan dimasa yang akan datang.	
		4	Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian	
	5	Belum adanya museum etnografi sebagai tempat penyimpanan benda-benda cagar budaya masyarakat		
	3	Belum adanya pemetaan batas-batas ulayat adat ditingkat marga dan keret di kampung	1	Pemahaman batas-batas adat masih bersifat lisan dan belum ada yang tertulis atau dikaji dalam pemetaan, sehingga masih rawan konflik tanah adat antar kampung.
			2	Belum optimalnya pembinaan adat kepada generasi muda berkenaan pemahaman tentang cerita sejarah asal-usul dan batas-batas hak ulayat adat antar marga atau keret.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3 Urusan Pilihan

Urusan pilihan terdiri atas: (1) urusan bidang perikanan; (2) urusan bidang pariwisata; (3) urusan bidang pertanian; (4) urusan bidang kehutanan; (5) urusan bidang perdagangan; serta (6) urusan bidang perindustrian.



4.1.3.1 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan bidang perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengawasan sumber daya perikanan, produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, beserta pengembangan SDM masyarakat bidang perikanan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perikanan di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.21.

Tabel II.21 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perikanan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan	1 Belum optimalnya produksi dan pemasaran sektor perikanan	1 Masih rendahnya produksi perikanan budidaya
		2 Masih rendahnya teknologi perikanan budidaya
		3 Masih rendahnya promosi hasil budidaya perikanan
		4 Kurangnya pemahaman terkait teknik budidaya
		5 Belum optimalnya akses permodalan untuk peningkatan skala usaha budidaya perikanan
		6 Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
	2 Lemahnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan	1 Belum efektifnya pengembangan industri pengolahan di bidang perikanan
	3 Belum optimalnya tata kelola sumber daya perikanan	1 Belum terdatanya nelayan budidaya dan nelayan tangkap
		2 Belum terbentuknya bina kelompok nelayan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.2 Urusan Bidang Pariwisata

Urusan bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pariwisata di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.22.

Tabel II.22 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pariwisata di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya peranan sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	1 Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata	1 Belum tersedianya fasilitas akomodasi dan layanan makan dan minum untuk wisatawan (homestay, resort dan restaurant)
		2 Belum tersedianya sarana prasarana pariwisata, termasuk fasilitas penunjang atraksi wisata (gazebo, toilet, spot foto, pos jaga dan menara pandang)
		3 Belum optimalnya pengembangan ekowisata berbasis flora dan fauna endemik
		4 Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan wisata budaya
		5 Belum optimalnya penguatan kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan
	2 Belum optimalnya pemasaran pariwisata	1 Strategi komunikasi pemasaran belum terpadu sehingga branding pariwisata belum terpublikasi secara optimal
		2 Belum tersedianya layanan informasi pariwisata
		3 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dalam mempromosikan citra pariwisata
	3 Belum optimalnya pengembangan kelembagaan kepariwisataan	1 Kapasitas SDM pariwisata masih terbatas
		2 Belum terlembaganya kelompok sadar wisata (Pokdarwis)
		3 Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor yang belum optimal dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2022



4.1.3.3 Urusan Bidang Pertanian

Urusan bidang pertanian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perbaikan produktifitas komoditas pertanian, pemenuhan kebutuhan petani terhadap sarana prasarana pertanian, melakukan penyehatan hewan ternak, serta menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan ternak dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pertanian di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.23.

Tabel II.23 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pertanian di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA					
1	Belum optimalnya kontribusi subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	1	Masih kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura
				2	Pengembangan varietas tanaman pangan unggulan lokal belum dilakukan dengan baik
				3	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)
				4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan pertanian masyarakat
		2	Belum optimalnya pemasaran komoditas tanaman pangan dan hortikultura	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil pertanian rakyat
				3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping petani tidak memadai

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH			
				3	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok tani untuk menjadi wadah sharring knowledge petani		
PERKEBUNAN							
2	Belum optimalnya kontribusi subsektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum optimalnya produksi dan produktifitas perkebunan	1	Masih kecilnya skala usaha perkebunan		
				2	Terdapat permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat)		
				3	Keterbatasan sumber bibit perkebunan yang berkualitas		
				4	Rendahnya penerapan teknologi terhadap pengembangan perkebunan masyarakat		
		2	Belum optimalnya pemasaran komoditas perkebunan	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan		
				2	Belum adanya koperasi sekunder yang penampungan hasil perkebunan rakyat		
				3	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar		
		3	Belum optimalnya pengembangan SDM perkebunan	1	Belum aktifnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)		
				2	Kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh/pendamping perkebunan tidak memadai		
				3	Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik		
		PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					
		3	Belum optimalnya kontribusi	1	Belum optimalnya produksi dan	1	Kurangnya distribusi bibit ternak
2	Kurang lengkapnya pendataan hewan ternak						



POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
subsektor peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah		produktifitas peternakan	3	3	Belum adanya penyediaan sarana produksi ternak daerah (bibit, pakan, obat-obatan dan vitamin ternak)
		Minimnya akses pelayanan kesehatan ternak	2	1	Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten
		Belum optimalnya pemasaran komoditas peternakan	2	1	Tingginya biaya transportasi mengakibatkan pendapatan peternak tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan
				2	Belum efektifnya fungsi infrastruktur pemasaran yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal seperti pasar
		Belum optimalnya pengembangan SDM peternakan	3	1	Mayoritas tingkat pendidikan peternak adalah SD dan SMP sehingga dapat mempengaruhi kompetensi, kreativitas dan inovasi peternak dalam menghasilkan komoditas peternakan berkualitas dan berdaya saing
				2	Belum adanya inisiatif dalam membentuk kelompok ternak untuk menjadi wadah sharring knowledge petani
				3	Belum adanya pembinaan bagi kelompok ternak

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.4 Urusan Bidang Kehutanan

Provinsi Papua Selatan merupakan provinsi dengan persentase hutan tertinggi di Indonesia berdasarkan data KLHK tahun 2020. Ini mengindikasikan bahwa Papua Selatan memiliki potensi besar untuk pengelolaan hutan. Selain sebagai potensi yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan hutan juga memiliki tantangan yang tidak kecil. Berdasarkan data dan informasi sektor kehutanan beberapa tahun terakhir, dapat dirumsukan permasalahan yang dikelompokkan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Tabel II.24 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Kehutanan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
---------------	-----------------	--------------

Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang memastikan pengelolaan yang berkelanjutan di bidang kehutanan	1	Serapan emisi masih rendah dari sektor kehutanan dan lahan	1	Perubahan lahan yang tidak produktif menjadi produktif masih rendah
			2	Kelembagaan pengelolaan kawasan hutan dan modal sosial masih lemah
	2	Belum optimalnya penjagaan dan pengawasan terhadap hutan dan kawasan lindung	1	Belum optimalnya pengawasan terhadap ekosistem hutan serta kawasan lindung
			2	Belum adanya regulasi khusus terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam hayati
	3	Nilai tambah hasil kehutanan masih rendah	1	Pendampingan kepada masyarakat sekitar hutan masih rendah
			2	Dukungan SDM pendamping serta sarana dan prasarana masih terbatas
			3	Jaringan pemasaran hasil produksi masyarakat sangat terbatas
			4	Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.5 Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah; pengelolaan minyak dan gas bumi; pelaksanaan inventarisasi geologi; serta akses penyediaan listrik secara optimal. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang energi dan sumber daya mineral terdapat dalam Tabel II.25.

Tabel II.25 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Rendahnya produktifitas sektor energi dan sumberdaya mineral	1	Belum maksimalnya peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan antarpersonal	1	Belum efektifnya proses perizinan pertambangan (IUP)
				2	Belum optimalnya pengawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI)
				3	Kuantitas dan kualitas penelitian dan survey pelayanan geologi masih sangat kurang
				4	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal di sektor pertambangan



		maupun antarsektor	5	Rendahnya daya serap sektor pertambangan dalam menyerap produk-produk pertanian lokal
	2	Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya energi listrik	1	Minimnya ketersediaan energi listrik untuk kegiatan rumah tangga, industri dan perkantoran
			2	Penyediaan sumber daya energi listrik pada kampung yang sangat terbatas dan tidak merata
			3	Rendahnya pemanfaatan energi listrik baru terbarukan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.6 Urusan Bidang Perdagangan

Urusan bidang perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perizinan dan pendaftaran perusahaan; terpenuhinya kebutuhan sarana distribusi perdagangan; mendorong stabilitas harga barang kebutuhan pokok; mengembangkan ekspor; serta menyelenggarakan standarisasi dan perlindungan konsumen. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perdagangan di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.26.

Tabel II.26 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perdagangan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum maksimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah	1	Belum efektifnya penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan	1	Belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan
			2	Besarnya biaya transportasi untuk distribusi perdagangan
			3	Belum optimalnya sistem pengelola data dan informasi perdagangan
			4	Minimnya kualitas pasar rakyat dalam meningkatkan konsumsi produk domestik yang beredar di pasar rakyat
	2	Belum adanya standar mutu komoditas	1	Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
			2	Minimnya diversifikasi produk bernilai tambah berbasis berbas SDA
			3	Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
	3 Belum terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang	1 Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup
		2 Belum adanya jaminan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.3.7 Urusan Bidang Perindustrian

Urusan bidang perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan perencanaan pembangunan industri; penerbitan izin usaha industri; serta kontribusi industri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang industri di Papua Selatan terdapat pada Tabel II.27.

Tabel II.27 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perindustrian di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya kontribusi sektor industri dalam perekonomian wilayah	1 Belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur	1 Lemahnya kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu
		2 Belum optimalnya dukungan infrastruktur seperti jalan, listrik, air dan sarana pengelolaan limbah/ persampahan dalam pengembangan industri
		3 Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah
	2 Belum terwujudnya daya saing, kemandirian dan penguasaan pasar industri pengolahan	1 Belum terlaksananya pengembangan sentra Industri kecil berbasis pertanian, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan dan inklusif
		2 Belum memadainya kuantitas dan kualitas produksi dan industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan
	3 Belum terwujudnya tata kelola perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1 Rendahnya kualitas kelembagaan pelaku industri
		2 Lemahnya tingkat partisipasi pemegang izin usaha industri dalam menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan

Sumber: Hasil Analisis, 2022



4.1.4 Urusan Pemerintahan Penunjang

Urusan pemerintahan penunjang terdiri atas: (1) urusan bidang pemerintahan umum; (2) urusan bidang aparatur dan kepegawaian; (3) urusan bidang keuangan daerah; (4) urusan bidang perencanaan pembangunan daerah; serta (5) urusan bidang pengawasan pembangunan daerah.

4.1.4.1 Urusan Bidang Pemerintahan Umum

Berdasarkan pasal 25 UU No 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum mencakup: (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar atau UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; (4) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota; serta (6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan pemerintahan umum Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.28.

Tabel II.28 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pemerintahan Umum di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1 Belum optimalnya kordinasi kewenangan pemerintahan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan umum	1 Kuatnya prinsip money follow function dan money follow organization, serta belum efektifnya implementasi money follow programme
		2 Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja dan antar-instansi serta dengan mitra strategis lainnya
		3 Belum optimalnya kordinasi kebijakan pembangunan antar yurisdiksi, distrik, kelurahan dan kampung
		4 Belum optimalnya kordinasi, perencanaan, implementasi serta monitoring evaluasi penyelenggaraan kebijakan otonomi khusus Papua
		5 Belum optimalnya kordinasi penyelenggaraan program-program Otonomi Khusus
		6 Belum efektifnya penataan kelembagaan daerah yang sesuai dengan kewenangan

			khusus yang dilaksanakan terkait dengan kebijakan Otsus Papua Selatan	
		7	Belum optimalnya koordinasi kebijakan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial serta afirmasi terhadap OAP	
		8	Masih terdapat persoalan tanah ulayat yang belum selesai untuk pembangunan sarana prasarana pemerintahan	
		9	Belum optimalnya pelaksanaan SPM di tingkat Provinsi maupun kabupaeten/kota	
		10	Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah	
		11	Rendahnya kewenangan Lembaga MRP dalam mengawal program-program otonomi khusus yang mengarah pada pemberdayaan perlindungan dan keberpihakan Masyarakat Asli Papua. Kewenangan hanya memberikan pertimbangan atau fungsi konsultatif	
	2	Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1	Belum optimalnya pelayanan distrik, kelurahan dan kampung kepada masyarakat
			2	Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah
			3	Belum memadainya pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah
			4	Rendahnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
			5	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan civil society
6			Belum optimalnya penerapan nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi	
7			Publikasi dan diseminasi kebijakan Pemerintah Provinsi belum memadai	

Sumber: Hasil Analisis, 2022



4.1.4.2 Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian

Urusan bidang aparatur dan kepegawaian berkaitan dengan manajemen kepegawaian dalam peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada sistem merit. Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur memiliki nilai strategis dengan adanya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian di Pemerintah Daerah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang aparatur dan kepegawaian di Papua Selatan terdapat pada Tabel II.29.

Tabel II.29 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Belum optimalnya kompetensi, distribusi dan pelayanan ASN	1 Ketersediaan ASN di Provinsi Papua Selatan belum mencukupi kebutuhan daerah
		2 Rendahnya kualitas/ kompetensi SDM ASN sesuai tugas dan fungsi
		3 Rendahnya kemampuan pengelolaan data informasi berbasis komputer
		4 Masih kurangnya Penempatan ASN pada Jabatan tertentu berdasarkan kompetensi jabatan
		5 Masih rendahnya jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat Pimpinan
		6 Rendahnya jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklatsar CPNS
		7 Belum terbentuknya kebijakan kepegawaian yang disesuaikan dengan kebijakan Otsus Papua
		8 Rendahnya mentalitas ASN terkait disiplin dan kinerja
	2 Belum optimalnya kelembagaan dan tata laksana aparatur dan kepegawaian	1 Belum efektifnya sosialisasi sistem penilaian beban kerja pegawai
		2 Belum berkembangnya sistem reward untuk ASN berprestasi dan punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
		3 Belum adanya sistem database dan informasi ASN yang terintegrasi, komprehensif dan berbasis kinerja

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
	3 Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	1 Kurangnya sarana penunjang akses informasi dan komputer
		2 Model e-government masih didominasi perspektif provider tunggal dan tidak terintegrasi
		3 Belum adanya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.4.3 Urusan Bidang Keuangan Daerah

Urusan keuangan berkaitan dengan kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang keuangan di Papua Selatan terdapat pada Tabel II.30.

Tabel II.30 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Keuangan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya birokrasi dalam memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1 Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah	1 Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah
		2 Belum akuratnya database pajak dan retribusi serta objek pendapatan daerah lainnya
		3 Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah, baik melalui Samsat maupun instansi pemungut lainnya
		4 Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD
	2 Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja	1 Penyampaian LKPD tidak tepat waktu
		2 Penyusunan APBD yang tidak tepat waktu
		3 Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD
		4 Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah



POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
		5 Prinsip value for money dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan	
		6 Belum optimalnya penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah	
	3	Belum optimalnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus	1 Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otonomi Khusus
			2 Kurang optimalnya pelaporan pengelolaan dana otsus
			3 Belum tersedianya nomenklatur belanja dan program kegiatan khusus Otonomi Khusus
	4	Belum optimalnya kapasitas aparatur keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi
			2 Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja

Sumber: Hasil Analisis, 2022

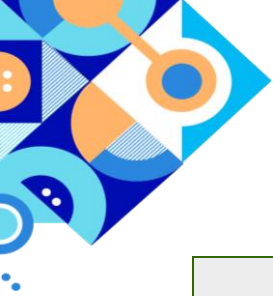
4.1.4.4 Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan perencanaan berkaitan dengan perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; perencanaan wilayah dan tata ruang; serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam implementasi urusan perencanaan, pembangunan daerah di Papua Selatan terdapat dalam Tabel II.31 berikut.

Tabel II.31 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH	
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan dan penataan ruang	1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil	1 Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan
			2 Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
			3 Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah

			4	Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya terhadap dampak lingkungan hidup yang diakibatkan
			5	Belum optimalnya kajian-kajian dan perencanaan khusus konstektual Papua Selatan
	2	Belum optimalnya sinergi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1	Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan belum berjalan optimal
			2	Lemahnya tingkat pemahaman terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam pelaksanakannya secara efektif dan efisien
	3	Belum optimalnya Penyelenggaraan Perencanaan Otonomi Khusus Papua	1	Cakupan pendataan OAP secara berkala dengan menggunakan SIO Papua yang terintegrasi belum 100%. Padahal, cakupan pendataan OAP berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan OTSUS bermanfaat bagi OAP.
			2	Terdapat OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya pembagian kewenangan urusan berdasarkan PP 106 Tahun 2021
			3	Belum tersedianya instrumen perencanaan khusus untuk pelaksanaan otonomi khusus di level Provinsi, kabupaten/kota dan juga Kampung. Perencanaan Otsus saat ini masih digabung dengan perencanaan umum daerah
			4	Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang OTSUS masih digabung dengan Musrenbang RKPD
	4	Terdapat permasalahan pengelolaan dan manajemen perencanaan	1	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
			2	Belum terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu
			3	Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas OPD, termasuk hubungan



			perencanaan dengan provinsi dan pemerintah pusat
		4	Belum optimalnya penjangkauan aspirasi masyarakat di semua jenjang pemerintahan melalui mekanisme Musrenbang
		5	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
		6	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (ter-cascading)

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.4.5 Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pengawasan pembangunan daerah di Papua Selatan dapat dilihat pada Tabel II.32.

Tabel II.32 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan dalam pembangunan daerah	1 Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya	1 Belum optimalnya revidu terhadap dokumen Perencanaan, Anggaran dan dokumen lainnya (RPJMD, Renstra, RKPD, KUA PPAS, Renja dan RKA)
		2 Masih rendahnya Implementasi SPIP di Lingkup Pemerintah Daerah
		3 Masih rendahnya capaian penyelesaian rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK
		4 Belum optimalnya pengawasan dan audit penyelenggaraan program program Otsus
		5 Belum terbentuknya wadah/majelis Tuntutan Ganti Rugi dan Saberpungli dalam rangka penyelesaian kerugian daerah serta menunjang pelayanan Publik
	2 Belum optimalnya kapasitas dan integritas SDM tentang akuntabilitas dan pengawasan	1 Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi dan rendahnya kesadaran pejabat untuk melaporkan harta kekayaan
		2 Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, mark up harga, kurang volume pekerjaan dan pekerjaan tidak tepat waktu

		pengelolaan pembangunan daerah	3	SDM APIP di Pemerintah Daerah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
--	--	--------------------------------	---	--

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda SDGs 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan acuan pembangunan untuk pencapaian tujuan global, yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti. Dalam upaya merumuskan pembangunan di level Kabupaten, penyesuaian dengan SDGs sangat diperlukan bahkan sangat bermanfaat untuk membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan di level kabupaten. SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Pada dasarnya, tujuan bersama dalam SDGs ingin memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun 17 SDGs di rumuskan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan bermutu;
5. Kesetaraan gender;
6. Akses air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Infrastruktur, industri dan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan;
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Menjaga ekosistem laut;
15. Menjaga ekosistem darat;
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat;
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, dirumuskan sebuah kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen perintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpres ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana-rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB. Dengan kata lain, untuk mencapai TPB membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.

Gambar II.1 Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: United Nations, 2005

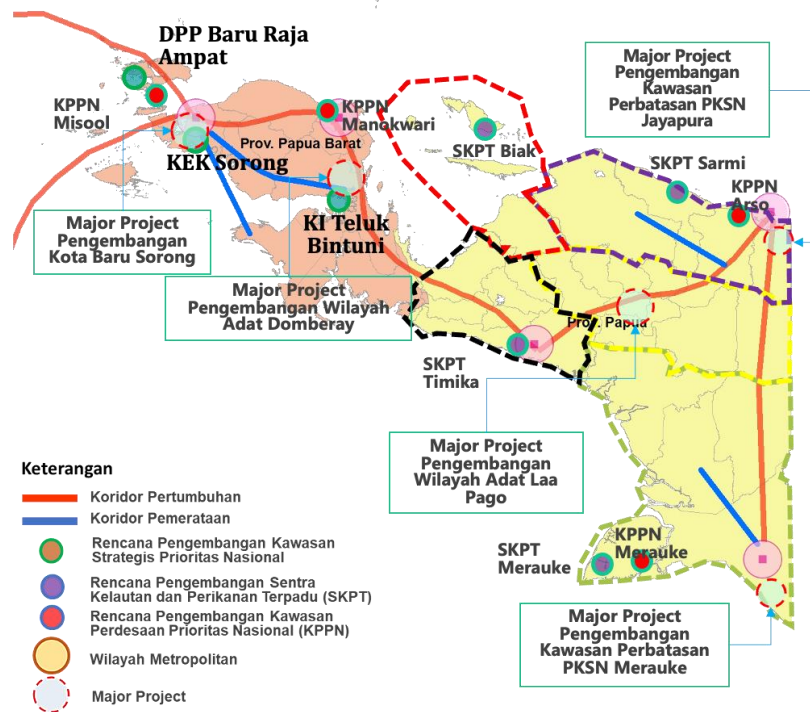
4.2.2 Isu Kebijakan Nasional

4.2.2.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Untuk lima tahun mendatang, rencana pembangunan wilayah Papua Selatan telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18/2020. Dalam narasi RPJMN, pembangunan wilayah Papua Selatan di akomodasi pada Bab III dengan tajuk “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan”. Di level nasional, agenda utama pada lima

tahun mendatang di tanah Papua secara umum menekankan kepada pertumbuhan ekonomi untuk menjamin pemerataan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Lebih detilnya mengenai prioritas pembangunan Papua Selatan dibahas pada Lampiran IV RPJMN 2020-2024.

Gambar II.2 Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan Wilayah Papua dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: RPJMN 2020-2024

Pendekatan yang diambil dalam pembangunan wilayah dalam RPJMN menekankan adanya integrasi antara pendekatan pertumbuhan dan pemerataan. Oleh karena itu, dalam RPJMN telah ditetapkan dua koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan koridor pertumbuhan merupakan pembangunan dengan mengandalkan basis keunggulan di suatu wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Sedangkan pembangunan koridor pemerataan dilakukan dengan mendorong pengembangan wilayah penyangga di sekitar koridor pertumbuhan untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar. Gambar II.2 akan memberikan ilustrasi peta dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan arahan strategi pengembangan wilayah Papua.

Terlepas dari strategi pertumbuhan dan pemerataan, kebutuhan pembangunan wilayah tanah Papua berdasarkan RPJMN 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana pendidikan dasar dan menengah yang terdistribusi secara merata. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah dan peningkatan mutu sumber daya manusia.



2. Keterkaitan antarwilayah serta perkuatan rantai antara penghasil sumberdaya, industri hulu, industri hilir, serta pusat perdagangan lokal, regional dan global. Hal ini dilakukan untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik termasuk pemerintahan desa. Hal ini dilakukan untuk penunjang akselerasi pembangunan.

4.2.2.2 Kebijakan Otonomi Khusus

Dasar hukum penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua Selatan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan pokok pemberian otonomi khusus adalah pengakuan dan penghormatan karakteristik sebuah daerah yang spesifik, sekaligus sebagai upaya untuk memperkokoh integrasi nasional yang ditempuh melalui penghargaan secara setara atas keragaman kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Papua. Lebih lanjut, tujuan pemberian otonomi khusus adalah sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

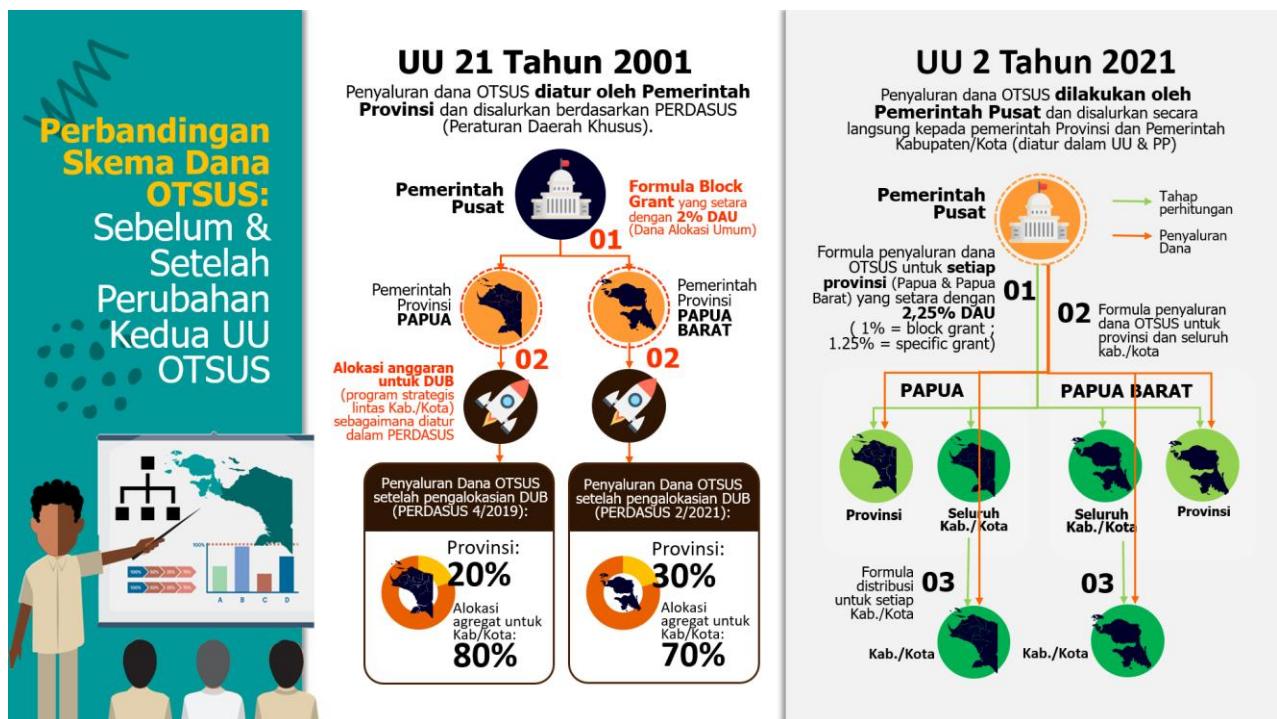
Untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 maka ditetapkan peraturan turunannya yaitu **PP Nomor 106 Tahun 2021** tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua, serta **PP Nomor 107 Tahun 2021** tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Dalam **Error! Reference source not found.** dapat terlihat bahwa secara umum terdapat 5 norma pengaturan dalam PP No.106 Tahun 2021 dan PP No.107 Tahun 2021, yaitu:

1. Kewenangan khusus;
2. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
3. DPRD dan DPRK yang diangkat;
4. Keuangan Otsus dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP); serta
5. Pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terdapat perubahan kebijakan penyaluran dan kewenangan yang signifikan pada pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001 dibandingkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001, penyaluran dana otonomi khusus (sebesar 2% DAU) diatur oleh Pemerintah Provinsi dan disalurkan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS). Sedangkan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021, penyaluran dana otonomi khusus (sebesar 2,25% DAU) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan disalurkan secara langsung kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 serta PP Nomor 107 Tahun 2021 (lihat Gambar II.3).

Berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam provinsi secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga kesenjangan antara Provinsi Papua Selatan dan daerah lain bisa dimoderasi, dan hak-hak dasar penduduk Asli Papua mulai bisa dipenuhi. Undang-undang Otonomi Khusus juga menekankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pemerintahan yang harus bertumpu pada perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara.

Gambar II.3 Perbandingan Skema Dana Otonomi Khusus: Sebelum dan Setelah Perubahan Kedua Undang-Undang Otonomi Khusus



Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

Otonomi khusus yang menjadi basis penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan mencakup aspek kewenangan dan tugas pemerintahan yang sangat luas, bukan hanya aspek pemerintahan umum yang berlaku di semua tempat, namun aspek-aspek spesifik yang terkait dengan pengembangan kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia. Aspek-aspek kewenangan yang secara spesifik harus menjadi perhatian pemerintah provinsi mencakup perlindungan dan pengembangan masyarakat adat, pengembangan ekonomi orang asli Papua, keterjaminan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, konservasi lingkungan hidup, dan hubungan antar umat beragama yang bersendi toleransi/ penghargaan. Kewenangan-kewenangan tersebut secara spesifik menekankan pada perlakuan yang bersifat afirmatif untuk masyarakat asli Papua. Bentuk afirmasi lain berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan dan



kepemimpinan politik, dimana Orang Asli Papua memiliki saluran yang lebih luas melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan ketentuan prioritas dalam kepemimpinan politik di provinsi dan kabupaten/kota.

4.2.2.3 Arah Draft Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)

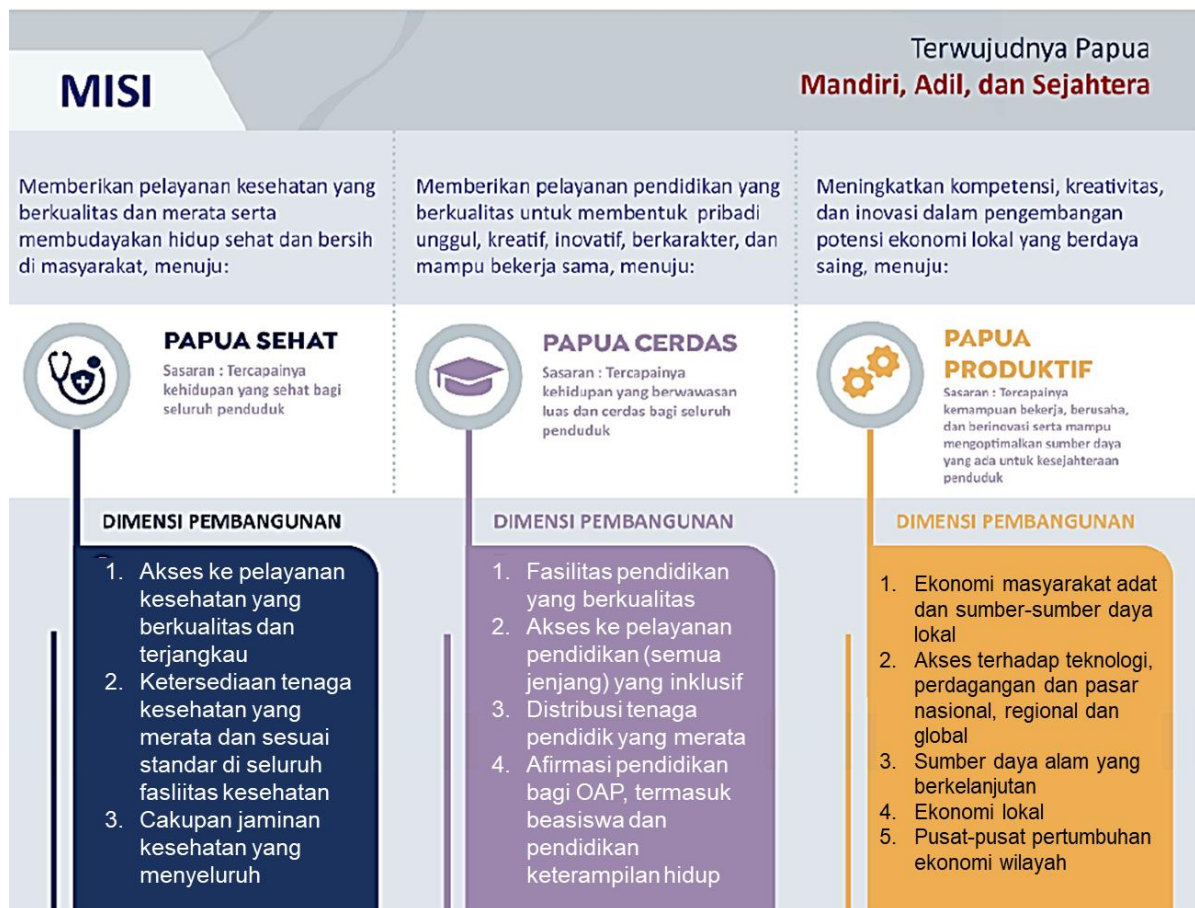
Disahkannya UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berimplikasi pada dirumuskannya langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Papua untuk 20 tahun mendatang. Langkah-langkah strategis tersebut termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, serta peraturan turunannya yaitu Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk tahun 2022-2041. Adapun RAPPP merupakan rencana aksi nasional 5 (lima) tahunan yang memuat sinergi program/kegiatan dan sumber pendanaan pembangunan pada pemerintah pusat dan daerah.

Percepatan pembangunan Papua Selatan ke depan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mendukung hal tersebut, terdapat visi percepatan pembangunan Papua 2022-2041 yaitu “Terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera”. Selanjutnya dalam rangka terwujudnya visi tersebut terdapat misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut:

1. **Misi-1**, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, **menuju Papua Sehat**, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
2. **Misi-2**, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, **menuju Papua Cerdas**, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
3. **Misi-3**, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, **menuju Papua Produktif**, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu

mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Gambar II.4 Visi, Misi dan Dimensi Pembangunan dalam RIPPP dan RAPP



Sumber: Draft RIPPP 2022-2041

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Papua Selatan

1. Penguatan pondasi tata kelola daerah otonomi baru Papua Selatan
2. Penyiapan suprastruktur dan infrastruktur serta tata ruang Papua Selatan ke depan
3. Pengembangan ekonomi kreatif
4. Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial
5. Otonomi Khusus

BAB V

Tujuan dan Sasaran



Bab ini memuat tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja dan Target sasaran pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

5.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, maka Provinsi Papua Selatan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Selanjutnya, agar tercipta kesinambungan dan keselarasan pembangunan daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Papua Selatan tahun 2024-2026 mepedomani a). Visi Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025(Provinsi Induk); b). Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 Tahap Keempat dan c). Isu strategis actual.

Adapun Visi RPJP Provinsi Papua Tahun 2005-2025, yaitu : “Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik”

Dimana untuk mewujudkan Visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi yang ditetapkan, yaitu :

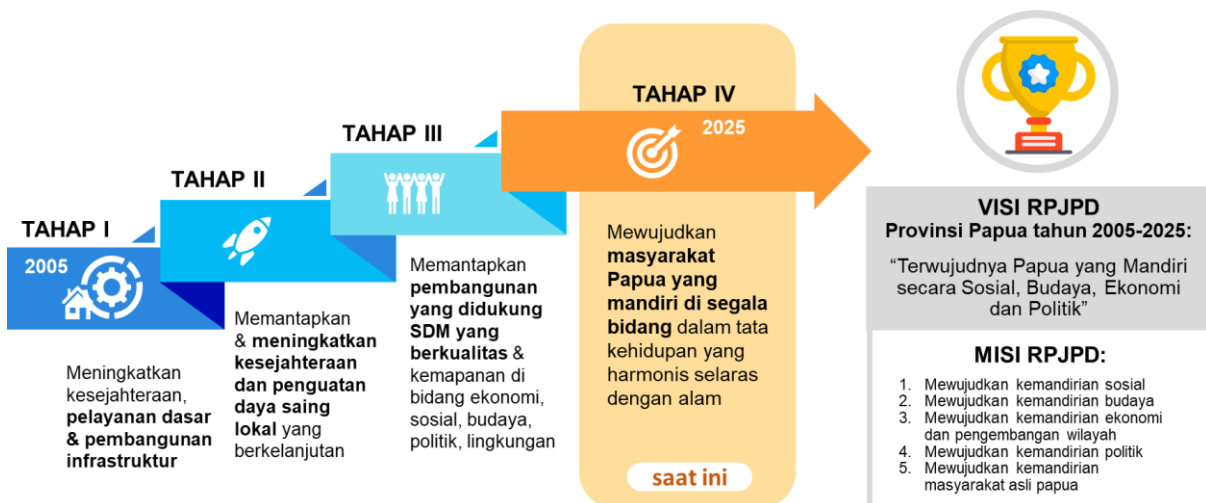
1. Mewujudkan kemandirian sosial



2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua

Pada periode pembangunan Tahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing.

Gambar V.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang dalam RPJPD Provinsi Papua 2005-2025



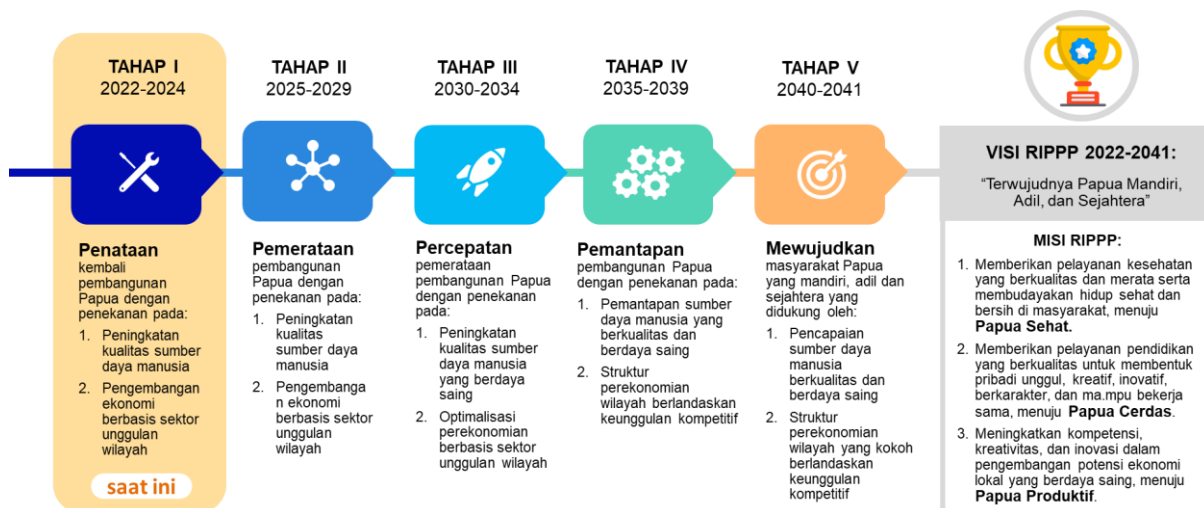
Pada tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemampuan ekonomi lokal yang berdaya saing. Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua Selatan akan memiliki permukiman yang sehat, sistem penyediaan air bersih, jaringan energi listrik terbarukan, sanitasi lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua Selatan juga diarahkan untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemampuan pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas



pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Selain mengacu pada sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahap keempat RPJPD 2005-2025 sebagaimana diuraikan di atas, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-2026 juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua. Dalam hal ini, RPD 2024-2026 berada dalam pembangunan RIPP Tahap 1 yang merupakan **tahap penataan** kembali pembangunan Papua dengan penekanan pada: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia; serta (2) pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan (lihat Gambar V.2). Secara umum, terdapat beberapa agenda besar dalam RIPP yang perlu diintegrasikan dalam RPD Papua Selatan yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, termasuk kondisi perlu untuk percepatan pembangunan Provinsi Papua Selatan.

Gambar V.2 Agenda Percepatan Pembangunan Papua Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) Tahun 2022-2041



Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Papua Selatan juga mempertimbangkan isu strategis aktual yang dihadapi oleh Provinsi Papua Selatan saat ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab IV dokumen RPD ini, yaitu:

- a. Penguatan pondasi tata kelola daerah otonomi baru Papua Selatan, serta tata kelola Otonomi Khusus
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- c. Penyiapan suprastruktur dan infrastruktur serta tata ruang Papua Selatan ke depan
- d. Pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan daerah dan ekonomi kreatif yang menyerap tenaga kerja



e. Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial


Kondisi di atas menjadikan pedoman Provinsi Papua Selatan dalam merumuskan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel V.1. Tujuan dan sasaran pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator kinerja untuk mengukur capaian pembangunan.

Tabel V.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Selatan 2024-2026

Tujuan	Sasaran	
 <p>01 Mewujudkan kualitas daya saing pembangunan manusia</p>	S1	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan manajemen pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus)
	S2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
	S3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan perlindungan anak
	S4	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda, literasi digital dan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga
	S5	Mewujudkan pelayanan kependudukan, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat terutama bagi OAP
 <p>02 Mewujudkan kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan</p>	S6	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan serta peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah
	S7	Meningkatkan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif
	S8	Meningkatkan pengembangan komoditas industri dan perdagangan lokal berbasis nilai tambah
 <p>03 Mewujudkan daya dukung lingkungan, kualitas infrastruktur dasar, utilitas perkotaan,</p>	S9	Meningkatnya konektivitas dan mobilitas pada jalur darat, air dan udara
	S10	Meningkatnya daya dukung dan pengelolaan lingkungan hidup
	S11	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi berkelanjutan





<p>dan penopang pembangunan perekonomian daerah</p>	<p>S12</p>	<p>Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan</p>
<p> 04 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel</p>	<p>S13</p>	<p>Menguatnya tata kelola dan sumber daya penyelenggara pemerintah daerah</p>

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, serta Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi awal RPD 2021	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
01	02	03	04	05	06	07	08	09
Mewujudkan Kualitas Saing Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas hidup sosial, ekonomi masyarakat Papua Selatan	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	60,62	62.75	63.44	64.14	64.13
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	17.60	17.27	17,10	16.93	16.93
	Meningkatnya kepedulian OAP akan budaya dalam pelesterain kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	n/a	45,5	50,25	54,15	54,15
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	76,15	78.14	78.53	78.92	78.92
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,64	62.65	63.16	63.38	63.38
Mewujudkan Kualitas Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks	1.65	4.44	4.67	4.90	4.90
		Indeks Gini	Indeks	0,395	0.379	0.372	0.364	0,364
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,1	2,50-1,65	2,25-1,63	2,20-1,60	2,20-1,60
		Indeks Kemahalan Harga	Indeks	146,63	142.72	141.29	139.88	139.88
Mewujudkan Kualitas Dasar, Uttilitas Perkotaan, Dan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	70.55	48.99	49.23	49.48	49.48



Penopang Pembangunan Perekonomian Daerah	pelayanan dasar infrastruktur, air bersih dan sanitasi berkelanjutan	Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persen	78.26	58.42	62.60	67.09	67.09
		Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air layak	Persen	76.33	75.11	77.37	79.69	79.69
		Persentase angkutan umum yang berkualitas baik	Persen	75.25	80.25	83,55	85.66	85.66
	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses listrik (PLN dan non-PLN)*	Persen	82.66	79.59	81.29	82.91	82.91
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif Berbasis EGovernment	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	2.02	2.75	2,98	3	3
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	B	BB	BB	A	A

5.2 KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN RPD PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024-2026 DAN RPJMN 2020-2024

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu : “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.

RPJMN Tahun 2020-2024 disusun dengan berlandaskan pada RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik

Adapun keselarasan tujuan dan Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 dengan agenda pembangunan jangka menengah dan Sasaran dalam RPJMN 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 5.1 Keselarasan RPD Provinsi Papua Selatan 2024-2026 dengan RPJMN 2020-2024

Tujuan RPD Provinsi Papua Selatan 2024-2026	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
1. Mewujudkan Kualitas Daya Saing Pembangunan Manusia	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Mewujudkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

3. Mewujudkan Kualitas Infrastruktur Dasar, Utilitas Perkotaan, Dan Penopang Pembangunan Perekonomian Daerah	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
4. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif Berbasis EGovernment	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan publik

Tabel 5.2 Keselarasan Sasaran RPD Provinsi Papua Selatan 2024-2026 dengan sasaran dalam RPJMN 2020-2024

SASARAN RPD PROVINSI PAPUA SELATAN		SASARAN RPJMN 2021-2024	
01	02	03	04
Meningkatnya kualitas hidup sosial, ekonomi masyarakat Papua Selatan	Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kemiskinan	sasaran Makro	Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatnya kepedulian OAP akan budaya dalam pelestarian kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Agenda Pembangunan Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan	Indek pembangunan kebudayaan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indeks Kemahalan Harga	sasaran Makro	Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penurunan Emisi GRK
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar infrastruktur, air bersih dan sanitasi berkelanjutan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih Persentase angkutan umum yang berkualitas baik		
Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi		

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase instansi pemerintah dengan indeks maturitas SPBE kategori baik
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Transformasi Pelayanan Publik	Persentase instansi pemerintah dengan indeks sistem merit kategori \geq Baik
	Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Agenda Pembangunan Revolusi mental dan	Instansi Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan E-Government	Pembangunan Kebudayaan	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB \geq Baik
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku		Persentase instansi pemerintah pusat yang mendapatkan opini WTP
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan aparatur pemerintahan yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM		

5.3 PENYELARASAN DENGAN RIPP TAHUN 2022 - 2041

Dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022 – 2041 perlu diperhatikan dalam penyelarasan arah pembangunan RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026, sebagai salah satu acuan dokumen rencana pembangunan dalam skala yang lebih makro. Adapun visi pembangunan Papua tahun 2041 adalah adalah “*Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera*”, yang menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas SDM. Upaya perwujudan visi Papua di atas ditempuh melalui 3 misi dan sasaran indikator, yaitu:

1. **Misi 1:** memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang se hat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
2. **Misi 2:** memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh

penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

3. **Misi 3:** meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebelumnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua tahap I (RAPPP I) tahun 2023-2024 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah Papua di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun arahan pembangunan wilayah Papua, yaitu :

1. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) **bidang kesehatan** yang diarahkan pada:
 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi:
 - a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan akreditasi.
 - b. Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan kuantitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan orang asli Papua (OAP).
 2. Penataan budaya perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan strategi:
 - a. Peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan kabupaten/kota dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
3. Penataan budaya dan peningkatan prestasi olahraga, dengan strategi:
 - a. Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat.
 - b. Peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
 - c. Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.



4. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) **bidang pendidikan** yang diarahkan pada penataan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikan papua secara merata dengan strategi:
 - a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - b. Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan

5. Pembangunan **ekonomi** yang diarahkan pada:
 - 1) Penataan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi:
 - a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
 - b. Peningkatan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*).
 - 2) Penataan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan strategi:
 - a. Peningkatan jangkauan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP.
 - b. Peningkatan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

BAB VI

Strategi, arah kebijakan & program pembangunan daerah



Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah Provinsi Selatan sesuai dengan permasalahan dan dinamika isu strategis pembangunan yang berkembang

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta target kinerja RPD dengan efektif dan efisien pada tahun 2024-2026. Strategi pembangunan menunjukkan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders pembangunan daerah. Keterkaitan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Provinsi Papua Selatan 2024-2026 dapat dilihat dalam Tabel 0.1.

Tabel 0.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi Papua Selatan 2023-2026

Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
01	02	03
Mewujudkan Kualitas Daya Saing Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas hidup sosial, ekonomi masyarakat Papua Selatan	Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran
	Meningkatnya kepedulian OAP akan budaya dalam pelestarian kebudayaan	Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun
		Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan



Mewujudkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana Pelayanan Pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata
		Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Kesehatan Reproduksi
		Meningkatkan Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		Pengembangan Sarana dan Prasarana yang memadai, khususnya Puskesmas Pembantu pada daerah sulit akses
		Pengembangan Jaminan Kesehatan Gratis bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah
		Mengarusutamakan isu gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
		Meningkatkan cakupan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak
		enyelenggarakan Perlindungan sosial OAP
		Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
		Penetapan area penggunaan ruang Kawasan Sentra Produksi (KSP) Provinsi Papua Selatan
		Penyusunan Peta Produksi Peggunan Lahan Pertanian dan Perkebunan Provinsi Papua Selatan
		Pemantapan pendampingan Diversifikasi Pangan pada Kawasan Sentra
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian pada Kawasan Sentra Produksi
		Penguatan Kualitas dan Kuantitas Balai Penyuluh Pertanian (BPP)



		<p>Pemberdayaan, Pelatihan Teknis dan pembinaan kegiatan usaha perikanan bagi Nelayan, Pembudidaya ikan dan Kelompok Usaha Perikanan</p> <p>Pendampingan dan Penyediaan dan pemerataan petugas tenaga pendamping perikanan</p> <p>Pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan</p> <p>Penataan Pelabuhan Bongkar Muat Pelabuhan Perikanan</p> <p>Pengembangan ekonomi kreatif potensi obyek wisata potensial</p> <p>Pendampingan komunitas masyarakat dalam mendukung pengembangan obyek wisata potensial</p>
<p>Mewujudkan Kualitas Infrastruktur Dasar, Utilitas Perkotaan, Dan Penopang Pembangunan Perekonomian Daerah</p>	<p>Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar infrastruktur, air bersih dan sanitasi berkelanjutan</p>	<p>Penyediaan kebutuhan infrastruktur penopang pengembangan obyek wisata potensial</p> <p>Promosi potensi obyek wisata potensial Provinsi Papua Selatan melalui media cetak dan online</p> <p>Penetapan Ruas Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.</p> <p>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan</p> <p>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan maupun Jembatan untuk menunjang konektivitas antar wilayah</p> <p>Penyediaan prasarana dan sarana air bersih</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana air bersih</p>

		Perbaikan akses dan penyediaan penunjang transportasi
		Pemeliharaan kualitas jalan khususnya bagi daerah-daerah penopang distribusi barang dan jasa
		Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dalam kerangka mewujudkan keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas.
		Pembangunan pelabuhan rakyat pada daerah startegis dan terpencil
	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	Peningkatan akses layanan listrik yang memenuhi standar
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif Berbasis EGovernment	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan asset
		Peningkatan tata kelola manajemen Keuangan Daerah
		Peningkatan Ketersediaan Regulasi Daerah terkait Pengelolaan Keuangan
		Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah di setiap entitas
		Pengawasan secara terpadu penerapan sistem informasi perencanaan
		Pengelolaan sistem dan kinerja pemerintah daerah secara holistic berbasis teknologi informasi
		Pengembangan Teknis Penelitian, inovasi, dan teknologi pembangunan daerah
		Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan, perlindungan, dan keselamatan arsip daerah
		Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan jaringan internet gratis
		Penyebarluasan akses internet dan pengawasan penggunaan pada tingkat masyarakat

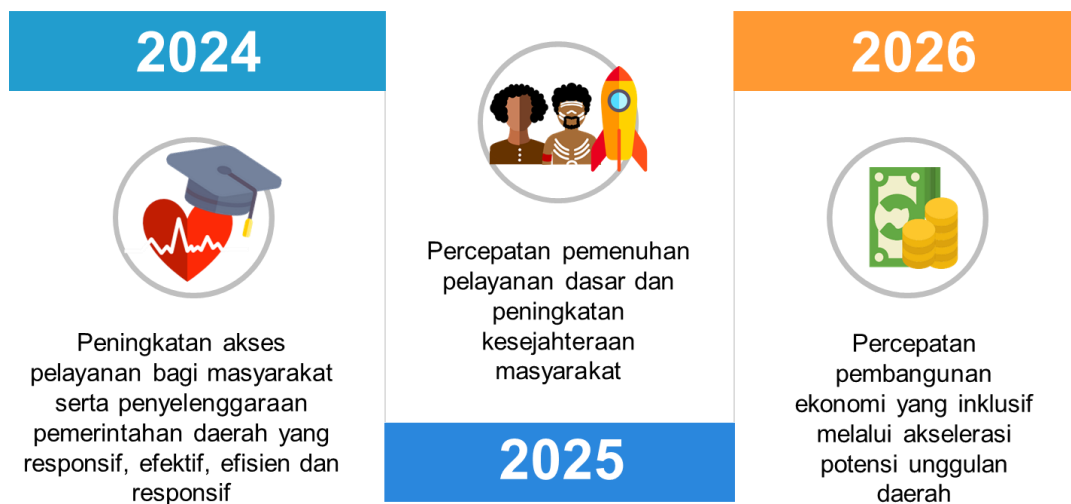
		Pelatihan manajemen dan pelayanan ASN
		Peningkatan profesionalitas aparatur
		Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada ASN dengan peningkatan e-literacy

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

6.2.1 Tema Pembangunan

Tema dan Arah kebijakan umum Pembangunan Provinsi Papua Selatan merupakan fokus pembangunan setiap tahun selama lima tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi penyelesaian permasalahan yang hendak dilaksanakan dalam horizon waktu berlakunya dokumen perencanaan ini. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama empat tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Gambar VI.1 Tema Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026



Tema pembangunan setiap tahunnya selama 4 (empat) tahun, akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tema akan disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis daerah serta tema pembangunan Nasional. Berdasarkan tema pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan

sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Sedangkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Provinsi Papua Selatan di tahun 2024 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan Akses Pelayanan Publik Bagi masyarakat serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Responsif, Efektif, Efisien Responsif.

Sedangkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu dan dan PILKADA Serentak
2. Konsolidasi kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan menuju satu pemerintahan definitif yang siap melaksanakan pelayanan publik
3. Penanganan kemiskinan ekstrim
4. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan Pendidikan
5. Pemulihan ekonomi yang ditopang oleh investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal
6. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
7. Penciptaan stabilitas wilayah dan Ketahanan Masyarakat

Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Provinsi Papua Selatan di tahun 2025 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar & Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Sedangkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan transisi kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan menuju satu pemerintahan definitif yang siap melaksanakan pelayanan publik
2. Percepatan Penanganan kemiskinan ekstrim
3. Percepatan Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan Pendidikan
4. Percepatan Pemulihan ekonomi yang ditopang oleh investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal
5. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas

Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Provinsi Papua Selatan di tahun 2026 diselenggarakan dengan arah kebijakan yaitu Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Ungulan Daerah Sedangkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan menuju satu pemerintahan definitif yang siap melaksanakan pelayanan publik
2. Percepatan Penanganan kemiskinan ekstrim
3. Percepatan Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan Pendidikan
4. Percepatan Pemulihan ekonomi yang ditopang oleh investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal
5. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Arah kebijakan pembangunan menunjukkan tahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan. Arah kebijakan umum pembangunan akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Papua Selatan dengan tema yang akan disesuaikan dengan isu strategis daerah maupun tema pembangunan Nasional. Keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua Selatan dapat dilihat dalam Tabel 0.2.

Tabel 0.2 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Papua Selatan 2024-2026

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun		
		2024	2025	2026
01	02	03	04	05
Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global	√	√	√
Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan wajib belajar 12 tahun	Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	√	√	√
Meningkatkan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik	√	√	√
Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana Pelayanan Pendidikan	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata	√	√	√
Koordinasi dan monitoring untuk pemantapan mutu tata kelola pada unit pelayanan pendidikan yang menjunjung keberpihakan pada masyarakat	Koordinasi dan Monitoring yang intens di setiap unit pelayanan Pendidikan	√	√	√
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata	Percepatan akreditasi dan pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan	√	√	√
	Perluasan cakupan dan pengembangan layanan telemedicine dan pembangunan puskesmas di distrik tanpa puskesmas	√	√	√
	Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses		√	√

Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal dan pascapersalinan dengan tenaga kesehatan terlatih	√	√	√
	Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi	√	√	√
Meningkatkan Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Perbaiki distribusi alat Kesehatan, obat dan vaksin untuk mencukupi kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan		√	√
Pengembangan Sarana dan Prasarana yang memadai, khususnya Puskesmas Pembantu pada daerah sulit akses	Jaminan Kesehatan Gratis bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah	√	√	√
Pengembangan Jaminan Kesehatan Gratis bagi Rumah Tangga Berpendapatan Rendah		√	√	√
Mengarusutamakan isu gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak	√	√	√
	Penguatan kebijakan, regulasi dan kelembagaan untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Hak-hak Anak	√	√	√

Meningkatkan cakupan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak	Penguatan Layanan Terpadu di bidang perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten/kota	√	√	√
	Peningkatan cakupan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan pelibatan pemangku kepentingan terkait dan berdasarkan kondisi sosial budaya setempat	√	√	√
Menyelenggarakan Perlindungan sosial OAP	Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses pembiayaan	√	√	√
Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	√	√	√
Penetapan area penggunaan ruang Kawasan Sentra Produksi (KSP) Provinsi Papua Selatan	Penyusunan Dokumen Penataan Ruang terkait Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan	√	√	√
Penyusunan Peta Produksi Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan Provinsi Papua Selatan				√
Pemantapan pendampingan Diversifikasi Pangan pada Kawasan Sentra	Intensifikasi Dan Extensifikasi Pertanian			√
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian pada Kawasan Sentra Produksi	Koordinasi dan Optimalisasi antar OPD terkait dan Penyuluh Pertanian dalam pengendalian OPT			√



Penguatan Kualitas dan Kuantitas Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Peningkatan Sarana Produksi Hasil Pertanian			√
Pemberdayaan, Pelatihan Teknis dan pembinaan kegiatan usaha perikanan bagi Nelayan, Pembudidaya ikan dan Kelompok Usaha Perikanan	Peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya			√
Pendampingan dan Penyediaan dan pemerataan petugas tenaga pendamping perikanan				√
Pelatihan diversifikasi olahan hasil perikanan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan				√
Penataan Pelabuhan Bongkar Muat Pelabuhan Perikanan				√
Pengembangan ekonomi kreatif potensi obyek wisata potensial		Penyelenggaraan event rutin dan atraksi pariwisata		
Pendampingan komunitas masyarakat dalam mendukung pengembangan obyek wisata potensial	Pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pelaku kepariwisataan			√
Penyediaan kebutuhan infrastruktur penopang pengembangan obyek wisata potensial	Pengembangan industri pariwisata			√
Promosi potensi obyek wisata potensial Provinsi Papua Selatan melalui media cetak dan online	Pengembangan promosi pariwisata		√	√
Penetapan Ruas Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.			√	√



Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada distrik sulit akses		√	√
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan maupun Jembatan untuk menunjang konektivitas antar wilayah			√	√
Penyediaan prasarana dan sarana air bersih	Pelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air		√	√
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana air bersih			√	√
Perbaikan akses dan penyediaan penunjang transportasi	Penyediaan dan Pengembangan fasilitas akses penunjang transportasi		√	√
Pemeliharaan kualitas jalan khususnya bagi daerah-daerah penopang distribusi barang dan jasa				√
Penyediaan fasilitas keselamatan lalulintas dalam kerangka mewujudkan keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas.		√	√	√
Peningkatan akses layanan listrik yang memenuhi standar	Perluasan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik dan rumah tangga hingga ke pelosok	√	√	√
Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset	Meningkatkan cakupan dan kualitas pengelolaan aset daerah	√	√	√
Peningkatan tata kelola manajemen Keuangan Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pencatatan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah	√	√	√
Peningkatan Ketersediaan Regulasi Daerah terkait Pengelolaan Keuangan		√	√	√
Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah di setiap entitas		√	√	√
Pengawasan secara terpadu penerapan sistem informasi perencanaan		√	√	√
Pengelolaan sistem dan kinerja pemerintah daerah secara holistic berbasis teknologi informasi	Penerapan dan optimalisasi hasil kajian atau riset dalam implemntasi pembangunan daerah	√	√	√
Penyediaan sarana dan prasarna pemeliharaan, perlindungan, dan keselamatan arsip daerah		√	√	√

√

√



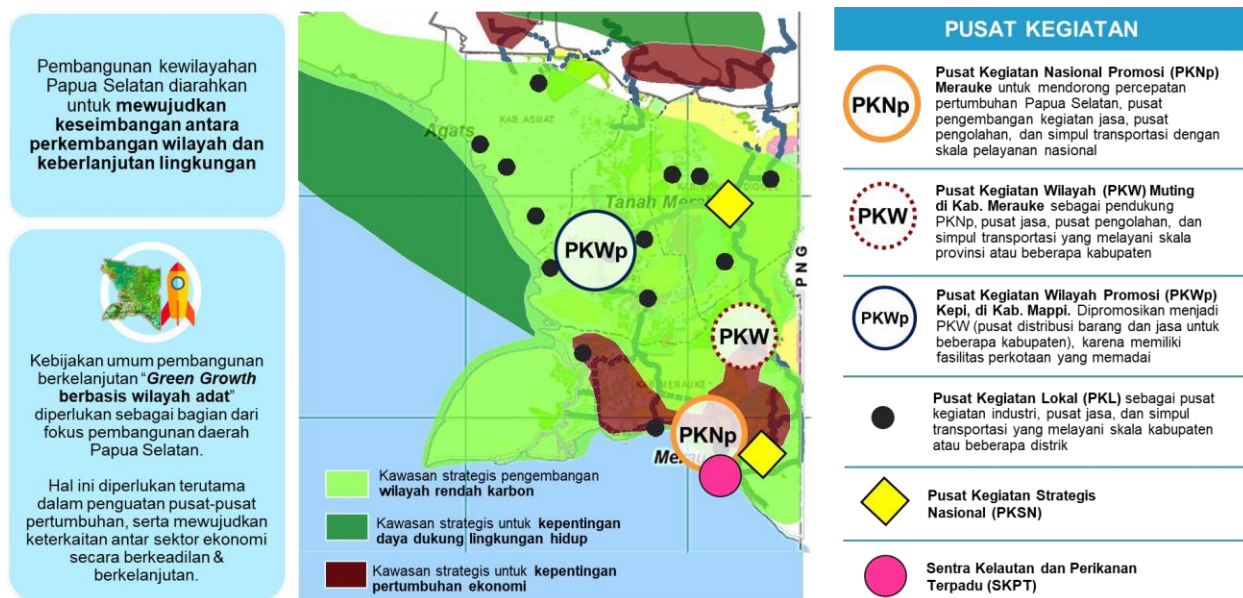
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan jaringan internet gratis	Penyebarluasan akses internet dan pengawasan penggunaan pada tingkat masyarakat	√	√	√
Penyebarluasan akses internet dan pengawasan penggunaan pada tingkat masyarakat	Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan	√	√	√
Pelatihan manajemen dan pelayanan ASN	Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh pemerintah daerah	√	√	√
Peningkatan profesionalitas aparatur	Menegakkan kebijakan dan regulasi untuk peningkatan disiplin aparatur	√	√	√
Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada ASN dengan peningkatan e-literacy	Mengembangkan kerjasama dan sinergisitas dengan lembaga-lembaga terkait untuk implementasi inovasi pelayanan daerah	√	√	√
	Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan yang berasal dari penelitian- penelitian terapan	√	√	√

6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Pengembangan wilayah Provinsi Papua Selatan merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Pengembangan kewilayahan Provinsi Papua Selatan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Provinsi Papua sebagai provinsi induk (khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah), hasil analisis kondisi daerah, serta arahan RIRPP dan RAPP. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “Green Growth berbasis wilayah adat” diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan wilayah Papua Selatan. Hal ini diperlukan terutama dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Gambar VI.2 dapat diketahui adanya dominasi cakupan Kawasan strategis pengembangan wilayah rendah karbon di seluruh wilayah Papua Selatan, serta cakupan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Kabupaten Merauke.

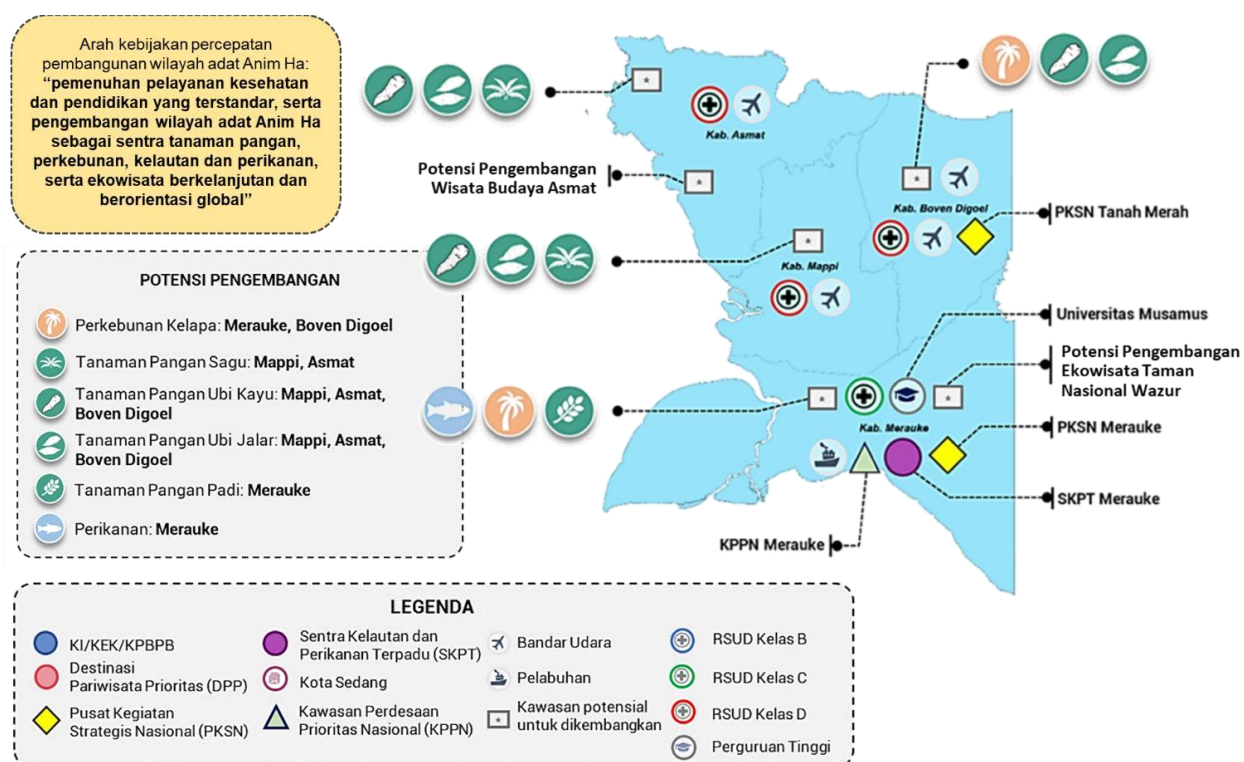
Gambar VI.2 Arahan Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua Selatan Berdasarkan RTRW Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk



Pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah yang terdapat di Provinsi Papua Selatan sebagai DOB masih perlu dikembangkan. Saat ini baru terdapat 3 (tiga) pusat kegiatan dengan skala pelayanan nasional/wilayah, yaitu PKNP di Kabupaten Merauke, PKW Muting di Kabupaten Merauke dan PKWp Kepi di Kabupaten Mappi. Adapun pusat kegiatan di Kabupaten Boven Digoel dan Asmat masih berupa pusat kegiatan lokal yang melayani skala kabupaten atau beberapa distrik.

Berdasarkan RIPP 2022-2041 terdapat arahan pengembangan wilayah Papua Selatan sebagai wilayah adat Anim Ha yaitu: “pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.” Dalam hal ini, terdapat arahan pengembangan komoditas unggulan yang berbeda antar wilayah dan perlu dikembangkan untuk mendorong terbentuknya sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta ekowisata tersebut sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar VI.3.

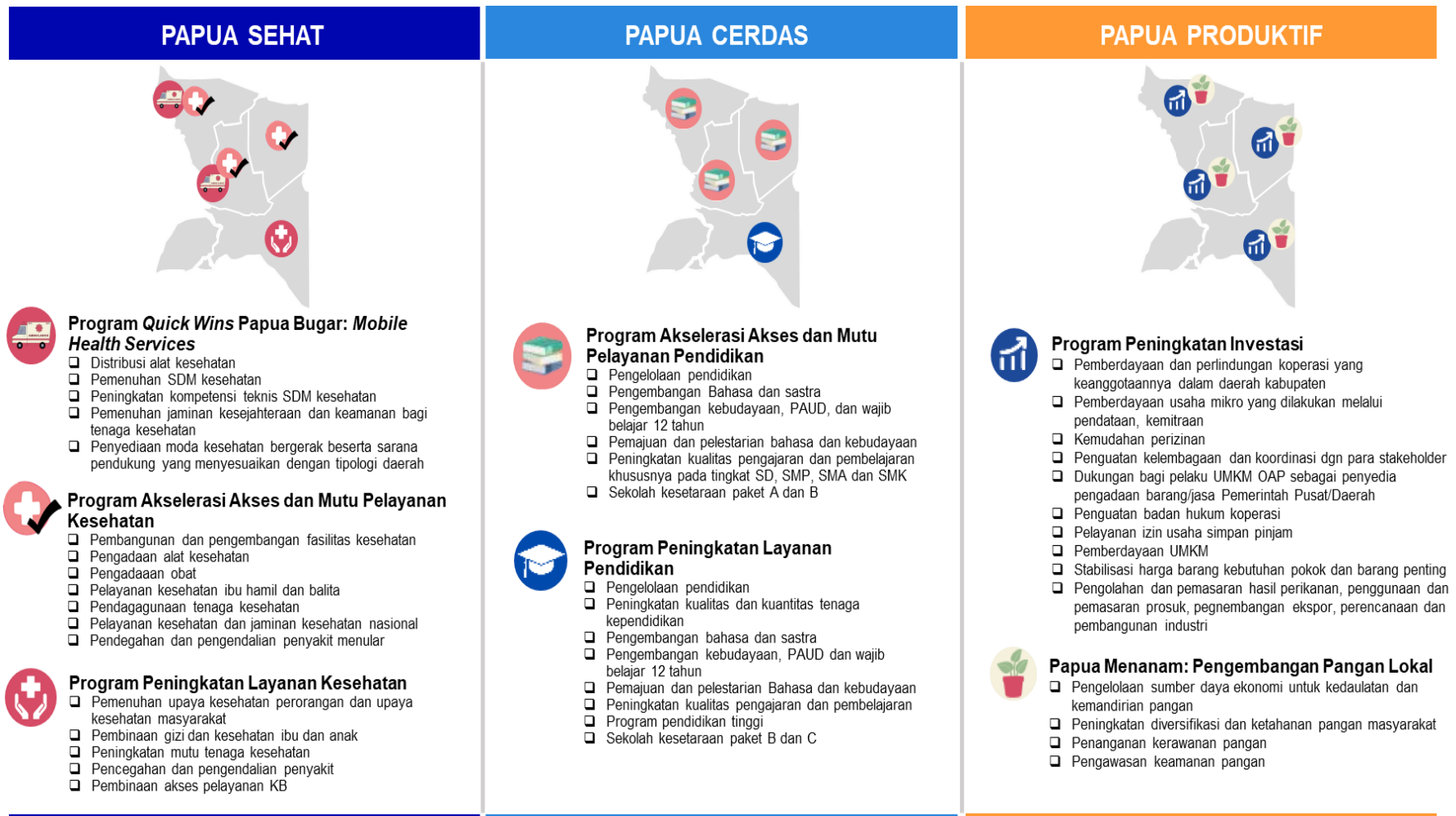
Gambar VI.3 Arahan Pengembangan Wilayah Papua Selatan Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) 2022-2041



Berdasarkan draft RAPPP 2023-2024, untuk mencapai flagship Papua Cerdas, Papua Pintar dan Papua Produktif terdapat arahan implementasi program berdasarkan wilayah (lihat Gambar VI.4). Kabupaten Merauke diarahkan sebagai lokasi implementasi program: (1) peningkatan layanan kesehatan, (2) peningkatan layanan pendidikan, (3) peningkatan investasi, dan (4) pengembangan pangan lokal. Kabupaten Mappi dan Asmat diarahkan sebagai lokasi implementasi program: (1) mobile health services, (2) akselerasi akses dan mutu pelayanan kesehatan, (3) akselerasi akses dan mutu pelayanan pendidikan; (3) peningkatan investasi, dan (4) pengembangan pangan lokal. Adapun Kabupaten Boven Digoel diarahkan sebagai lokasi implementasi program: (1) mobile health services, (2) akselerasi akses dan mutu pelayanan pendidikan; (3) peningkatan investasi, dan (4) pengembangan pangan lokal.

Dengan mempertimbangkan arahan RTRW, RIPPP, RAPPP dan hasil analisis kondisi daerah, maka dalam implementasi program dan kegiatan RPD Papua Selatan 2024-2026, terdapat prioritas kewilayahan dalam implementasi program sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel VI.3. Penetapan prioritas kewilayahan dalam subbab ini terbagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu prioritas 1 (sangat penting), prioritas 2 (penting), prioritas 3 (kurang diprioritaskan).

Gambar V1.4. Arahan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Flagship Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dalam Draft RAPP 2023





6.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Program prioritas pembangunan daerah yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 selanjutnya ditampilkan dalam Tabel 6.3

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
T1	Mewujudkan kualitas daya saing pembangunan manusia												
S1	Meningkatnya kualitas hidup sosial, ekonomi masyarakat Papua Selatan	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	62,75		63,44		64,13		64,13			
		Tingkat Kemiskinan		20,24		18,79		17,5		17,5			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	persen	75,00	205.000	80,00	207.665	85	210.365	85,00	623.030	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	persen	100		100		100		100			
		Persentase fasilitasi penyelenggaraan	persen	100		100		100		100			

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		SMA/SMK berbasis asrama											
		Cakupan Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persen	100		100		100		100			
		Cakupan pelaksanaan aktivitas Akademi Komunitas aktif	Persen	100		100		100		100			
		Cakupan Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Persen	100		100		100		100			
		Cakupan lembaga swasta yang aktif dalam pendidikan khusus	Persen	100		100		100		100			
		Cakupan OAP Penerima beasiswa PAUD	Persen	100		100		100		100			
		Cakupan OAP Penerima beasiswa SD	Persen	100		100		100		100			



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		Cakupan OAP Penerima beasiswa SMP	Persen	100		100		100		100			
		Cakupan OAP Penerima beasiswa SMA	Persen	100		100		100		100			
		Cakupan OAP Penerima beasiswa SMK	Persen	100		100		100		100			
		Cakupan OAP Penerima beasiswa Perguruan Tinggi	Persen	100		100		100		100			
		Cakupan OAP Penerima beasiswa ikatan Dinas	Persen	100		100		100		100			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah silabus muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang tersusun	dokumen		580		588		595		1.763	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Jenis Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	Jumlah		1.150		1.165		1.180		3.495	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		Provinsi yang Tersusun											PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan sarana dan prasarana kepemudaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	Persen		972		984		997		2.953	Dinas Kepemudaan , Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Cakupan kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten kota yang terselenggara	Persen										
		Cakupan organisasi kepemudaan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen										
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi	Persen		2.186		2.214		2.243		6.642	Dinas Kepemudaan , Olahraga, Pariwisata	



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		yang termanfaatkan										dan Ekonomi Kreatif	
		Cakupan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang mendapat pengembangan	Persen										
		Cakupan kejuaraan olah raga tingkat provinsi yang terlaksana	Persen										
		Cakupan pembinaan atlet berprestasi	Persen										
		Cakupan organisasi keolahragaan yang memperoleh pengembangan kapasitas	Persen										
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Cakupan kegiatan kepramukaan	Persen		492		498		504		1.494	Dinas Kepemudaan , Olahraga,	



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	KAPASITAS KEPRAMUKAAN	provinsi yang terlaksana										Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Cakupan SDM Kepramukaan Provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	Persen										
		Cakupan organisasi kepramukaan provinsi yang meningkat kapasitasnya	Persen										
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.3	100.000	1.4	101.300	1.5	102.617	1.5	303.917	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi	%	86,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	%	100,00		100,00		100,00		100,00			



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		Persentase kepemilikan KK	Persen										
		Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	Rasio										
		Rasio pasangan beraktenikah	Rasio										
S2	Meningkatnya kepedulian OAP akan budaya dalam pelestarian kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	45,5		50,25		54,15		54,15			
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	78.14		78.53		78.92		78.92			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62.65		63.16		63.38		63.38			



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan jumlah fasilitas budaya daerah yang dikembangkan	persen		2.500		3.500		3.592		10.637	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan jumlah jenis kesenian tradisional daerah yang dikembangkan	persen		3.000		3.039		3.079		9.118	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	persen		3.440		3.485		3.530		10.455	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	persen		8.600		8.712		8.825		26.137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan,	persen		3.200		3.242		3.284		9.725	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		Cakupan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi yang mendapat pemberdayaan dan peningkatan peran serta dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persen										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	persen		2.950		2.988		3.027		8.964	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan pembinaan Pengarusutamaan Gender ke kabupaten/kota	persen		610		618		626		1.854	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
T2	Mewujudkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Indeks	4.44		4.67		4.90		4.90			
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Gini	Indeks	0.387		0.379		0.372		0.372			
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,50-1,65		2,25-1,63		2,20-1,60		2,20-1,60			
		Indeks Kemahalan Harga	Indeks	146,63		142.72		139.88		139.88			



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemberian bantuan sarana kepada kelompok peternak	Persen		4.050		4.103		4.156		12.309	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pilihan Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemberian bantuan prasarana kepada kelompok peternak	Persen		1.300		1.317		1.334		3.951	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pilihan Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan penanganan kesehatan hewan di wilayah provinsi Papua Selatan	Persen		480		486		493		1.459	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pilihan Pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peternak yang meningkat kapasitasnya	Persen		500		507		513		1.520	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pilihan Pertanian
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Presentase pemberdayaan dan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Persen		1.200		1.216		1.231		3.647	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		untuk jenis makanan ikan											
		Kontribusi PDRB ADHK subsektor perikanan terhadap perekonomian	Persen										
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan pangan	Persen		1.650		1.671		1.693		5.015	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		PPH konsumsi pangan	Persen										
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Distrik Rawan Pangan yang Ditangani		1.700		1.722		1.744		5.167	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	Persen		200		203		205		608	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan jumlah OAP yang menerima pelatihan peningkatan kapasitas	persen		175		177		180		532	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun yang dapat diselesaikan	persen		100		101		103		304	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Cakupan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	persen		150		152		154		456	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi	persen		405		411		416		1.232	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan/ lestari yang di berdayakan.	Persen		580		588		595		1.764	Dinas Kepemudaan , Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persen		1.000		1.013		1.026		3.039	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI , USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM	Persen										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI , USAHA KECIL, DAN



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
													MENENGAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM OAP yang berkembang	Persen		2.000		2.026		2.052		6.078	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		Jumlah UMKM perempuan yang terfasilitasi	UMKM										
		Jumlah pameran/promosi yang diselenggarakan per tahun	pameran										
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan penyelenggaraan perijinan dan pendaftaran perusahaan			550		557		564		1.672	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
												n dan Perdagangan	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan penyelenggaraan operasi pasar barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen		1.900		1.925		1.950		5.774	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen										
		Inflasi tahunan	Persen										
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan fasilitasi pelaku ekspor yang dibina	Persen		300		304		308		912	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustria	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	Perekonomian Daerah												
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar infrastruktur, air bersih dan sanitasi berkelanjutan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	48.99		49.23		49.48		49.48			
		Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persen	58.42		62.60		67.09		67.09			
		Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air layak	Persen	75.11		77.37		79.69		79.69			
		Persentase angkutan umum yang berkualitas baik	Persen	80.25		83,55		85.66		85.66			
		Indeks Kualitas Udara (IKU)***	indeks	96,28		96,76		97,24		97,24			
	Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses listrik (PLN dan non-PLN)*	Persen	79.59		81.29		82.91		82.91			



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	persen		120.000		121.560		123.140		364.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
		Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	persen										
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	persen		10.300		10.434		10.570		31.303	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Status dan Tingkat Kelengkapan dokumen perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan	persen		17.000		17.221		17.445		51.666	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.000		2.026		2.052		6.078	Dinas Perhubungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
													PERHUBUNGAN
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	ada/tidak ada		500		507		513		1.520	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	ada/tidak ada										
		Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	ada/tidak ada										
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	persen		600		608		616		1.824	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		Indeks Kualitas Udara	persen										
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	persen										
		Laporan Inventarisasi GRK	ada/tidak ada										
		Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	ada/tidak ada										
		Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	Persen										
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persen		150		152		154		456	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	BERACUN (LIMBAH B3)												GAN HIDUP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen		300		304		308		912	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	Persen		350		355		359		1.064	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Cakupan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen		556		563		570		1.689	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Cakupan masyarakat OAP dan penyuluh serta polhut yang mendapatkan pemberdayaan kehutanan	Jumlah orang		2.760		2.796		2.832		8.388	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	Persen		2.880		2.917		2.955		8.753	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	persen		35.000		35.455		35.916		106.371	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Bersih	persen										
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak	persen		23.450		23.755		24.064		71.269	Dinas Pekerjaan Umum dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											Perumahan Rakyat	PEKERJAAN UMUM
		Rasio rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan dan perkotaan	persen										
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	Persen		20.800		21.070		21.344		63.215	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
		Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	persen										
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas	Persen		11.000		11.143		11.288		33.431	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar											PEKERJAAN UMUM
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Persen		142.000		143.846		188.747		474.593	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Persen		16.000		16.208		16.419		48.627	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Persen		1.000		1.013		1.026		3.039	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	URUSAN PEMERINTAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan penyelenggaraan upaya pengelolaan aspek geologi	persen		893		904		916		2.712	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MINERAL



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan	persen		250		253		257		760	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	persen		280		284		287		851	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
													DAYA MINERAL
T4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel												
S1	Menguatnya tata kelola dan sumber daya penyelenggara pemerintah daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kriteria	WTP		WTP		WTP		WTP			
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	2.75		2,98		3		3			
		Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	BB		BB		A		A			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Badan Publik terbuka	Persen		2.487		2.520		2.552		7.559	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
													INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen		5.499		5.570		5.643		16.712	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen		-								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase penyelenggaraan pelayanan persandian	persen		215		218		221		654	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		15.000		15.195		15.393		45.588	Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PNUNJANG PEMERINTAHAN UMUM
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan penyelenggaraan administrasi kewilayahan dan pemerintahan yang dihasilkan	persen		5.700		5.774		5.849		17.323	Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PNUNJANG PEMERINTAHAN UMUM
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian bantuan kepada masyarakat	persen		1.500		1.520		1.539		4.559	Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PNUNJANG PEMERINTAHAN UMUM



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	Cakupan pelaksanaan klordinasi penyelenggaraan kebijakan OTSUS	persen		25.000		25.325		25.654		75.979	Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PNUNJANG PEMERINTAHAN UMUM
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen		817		828		839		2.484	Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PNUNJANG PEMERINTAHAN UMUM
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen		-								
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum yang difasilitasi	Persen		2.104		2.131		2.159		6.393	Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PNUNJANG



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen		383		388		393		1.164	Sekretariat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PNUNJANG PEMERINTAHAN UMUM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		15.143		20.897		21.170		57.210	Sekretariat MRP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PNUNJANG PEMERINTAHAN UMUM
	PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkauan aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	persen		15.000		15.195		15.393		45.588	Sekretariat MRP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PNUNJANG PEMERINTAHAN UMUM



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah											
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan pelaksanaan penelitian dan inovasi pembangunan daerah	Persen		10.869		11.011		11.154		33.034	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan pelaksanaan penelitian dan inovasi pembangunan daerah	Persen		5.000		5.065		5.131		15.196	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	Tepat Waktu /Tidak Tepat Waktu		168.661		170.853		173.074		512.588	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN DAERAH



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		Penyampaian LKPD	Tepat Waktu /Tidak Tepat Waktu										
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Asset management	Ya/Tidak		1.200		1.216		1.231		3.647	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen		4.700		4.761		4.823		14.284	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persen		2.411		2.442		2.474		7.326	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur	Persen		3.000		3.039		3.079		9.118	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM	Persen		3.000		3.039		3.079		9.118	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level		3.486		3.532		3.578		10.595	Insepektorat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen		2.700		2.735		2.771		8.206	Insepektorat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
		Persentase capaian kepatuhan pelaporan LHKPN	Persen										
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persen		150		152		154		456	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang dibina dan diawasi	persen		1.132		1.147		1.162		3.440	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persen		768		778		788		2.334	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



KODE	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran						Kondisi Akhir RPD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Urusan Pemerintahan
				2024		2025		2026		K	A		
				T	Rp.Juta	T	Rp.Juta	T	Rp.Juta				
													N BANGSA
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	Persen		100		101		103		304	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA



BAB VII

Kerangka Pendanaan Pembangunan & Program Perangkat Daerah

Bab ini mengemukakan Kemampuan kapasitas fiskal daerah, program pembangunan daerah disertai Pagu Pendanaan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, Provinsi Papua Selatan merumuskan dan menetapkan Indikasi rencana program prioritas Daerah di Provinsi Papua Selatan yang berisi program-program, baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPD ini maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Selatan. Namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Sumber-



sumber pendanaan lainnya). Namun pendanaan dalam Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan hanya bersumber dari APBD Provinsi Papua Selatan.

Tabel Kerangka Pendanaan Indikatif Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026

URAIAN	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
KAPASITAS RIIL KEUANGAN	1.618.357.419.650	1.642.632.780.945	1.724.764.419.992	1.811.002.640.992
BELANJA DAERAH	1.618.357.419.650	1.642.632.780.945	1.724.764.419.992	1.811.002.640.992
Belanja Operasi	622.148.073.850	637.701.775.696	669.586.864.481	703.066.207.705
Belanja Pegawai	155.172.763.000	159.052.082.075	167.004.686.179	175.354.920.488
Belanja Barang dan Jasa	310.345.527.200	318.104.165.380	334.009.373.649	350.709.842.331
Belanja Hibah	61.629.783.650	62.554.230.405	65.681.941.925	68.966.039.022
Belanja Bantuan Sosial	95.000.000.000	97.375.000.000	102.243.750.000	107.355.937.500
Belanja Modal	746.209.345.800	764.864.579.445	803.107.808.417	843.263.198.838
Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000	87.816.425.804	92.207.247.094	96.817.609.449
Belanja Transfer	150.000.000.000	152.250.000.000	159.862.500.000	167.855.625.000
Belanja Bagi Hasil	-	-	0	0
Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000.000	152.250.000.000	159.862.500.000	167.855.625.000

7.2. Rencana Program Pembangunan Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Papua Selatan tahun 2024– 2026 didukung dengan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Provinsi Papua Selatan. Rencana program yang ditetapkan dalam RPD ini menjadi program perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 menjadi dasar penentuan kegiatan dan sub kegiatan dengan. plafon anggaran yang diuraikan sebagai berikut:



Tabel : Plafon BelanjaBidang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Target Kinerja			Kondisi Akhir RPD
	2024	2025	2025	
	Rp (juta)	Rp (juta)	Rp (juta)	Rp (juta)
<i>01</i>	<i>06</i>	<i>08</i>	<i>10</i>	<i>12</i>
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Urusan pemerintahan bidang pendidikan	216.144	221.954	226.800	226.800
Urusan pemerintahan bidang kesehatan	118.065	145.665	151.286	127.286
Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	429.814	444.409	501.515	490.515
Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	1.000	1.513	1.526	1.526
Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	5.000	8.565	8.756	8.756
Urusan pemerintahan bidang sosial	12.969	13.935	15.203	14.203
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2596	2628	2666	2666
Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	993	1005	1020	1020
Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	1523	1542	1563	1563



Urusan pemerintahan bidang transmigrasi	1.251	1.267	1.283	1.283
Urusan pemerintahan bidang pangan	6.485	6.569	6.654	6.654
Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	3.586	3.634	3.680	3.680
Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	16.270	16.481	16.696	16.696
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	2.730	2.765	2.801	2.801
Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	4.962	5.026	5.092	5.092
Urusan pemerintahan bidang perhubungan	10.048	10.178	10.310	10.310
Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	15.007	16.202	16.400	16.400
Urusan pemerintahan bidang persandian	215	218	221	221
Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	8.000	8.104	8.209	8.209
Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	7.000	7.092	7.183	7.183
Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	4.760	5.039	5.115	5.115
Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	20.740	22.024	22.310	22.310



Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	350	355	359	359
Urusan pemerintahan bidang pertanahan	1526	1546	1565	1565
URUSAN PILIHAN				
Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	2.685	4.080	5.360	4.360
Urusan pemerintahan bidang pariwisata	1499	1520	2296	1539
Urusan pemerintahan bidang perdagangan	3.850	4.900	5.451	5.451
Urusan pemerintahan bidang perindustrian	4.150	4.204	4.258	4.258
Urusan pemerintahan bidang pertanian	6.330	6.966	7.496	7.496
Urusan pemerintahan bidang kehutanan	17.700	22.995	23.293	23.293
URUSAN PENDUKUNG				
Sekretariat daerah	141.177	142.267	146.104	144.104
Sekretariat dprp	12.665	12.830	12.996	12.996
PENUNJANG URUSAN				
Perencanaan	48.494	52.012	52.637	52.637



Keuangan	445.849	451.645	457.515	457.515
Kepegawaian	16.500	16.714	17.333	16.933
Inspektorat daerah	14.782	14.975	15.170	15.170
UNSUR KEWILAYAHAN				
Kesatuan bangsa dan politik	30.200	7.858	8.052	8.052
Otsus MRP	30.243	36.092	36.868	36.563



Tabel : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Daerah Daerah Papua Selatan 2024-2026

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja						Kondisi Akhir RPD		Penanggung Jawab
				2024		2025		2025		Target	Rp (juta)	
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	9.414	100	9.536	100	9.660	100	9.660	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 16- 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	persen	70,3	75	205.000	80	210.665	85	215.365	85	215.365	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	persen	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM-APK SMA/SMK	persen	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase fasilitasi penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	persen	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Cakupan Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persen	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Cakupan Sekolah Pendidikan Khusus yang	Persen	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.241		11.426		11.613		11.613	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.3	1.3	95.000	1.4	121.300	1.5	125.617	1.5	125.617	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi	%	86	86		100		100		100		
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	n/a	100		100	500	100	500	100	500	
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang	%	n/a	100		100	500	100	500	100	500	

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi											
	Jumlah Kematian Ibu	Kemati an Ibu	216	214		212		210		210		
	Jumlah Kematian Bayi (0-11 Bulan)	Kemati an Bayi	24	23		22		21		1		
	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	%	100	100		100		100		100		
	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi	%	100	100		100		100		100		
	Persentase Kabupaten/ko ta Yang	%	100	100		100		100		100		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia											
	Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	%	100	100		100		100		100		
	Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Olah raga	%	100	100		100		100		100		
	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar	%	100			100		100		100		
	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	100			100		100		100		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC(Treatment Coverage)	%	50	50		50		50		50		
	Prevalensi HIV Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	64.03	64.03		62		60		60		
	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	4	4		4		4		4		
	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	41.4	44		47		50		50		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar		20	20	7.730	20	7.830	20	7.932	20	7.932	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	persen	n.a	100	1.144	100	1.159	100	2.174	100	2.174	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	persen	n.a	100		100		100		100		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persen	n.a		100		100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	Persen	n.a		100		100		100		100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan peran masyarakat dan lintas sector dalam pemberdayaan kesehatan dan kemitraan kesehatan, KIE dan UKBM	Persen	n.a	100	220000000	100	220000000	100	220000000	100	220000000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase terpenuhinya akreditasi puskesmas dan rumah sakit	Persen	n.a	100	750	100	750	100	750	100	750	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	100	34.675	100	35.126	100	35.582	100	35.582	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	persen	n.a	75.22	119.589	76.38	128.151	87.22	135.140	87.22	135.140	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	persen	n.a	78.99		82.63		87.99		87.99		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	persen	n.a	76.33	35.000	85.25	35.455	89.50	35.916	9.50	35.916	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Bersih	persen										
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak	persen	n.a	100	23.450	100	25.755	100	26.064	100	26.064	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Rasio rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan dan perkotaan	persen	n.a	100		100		100		100		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	Persen	n.a	77.25	20.800	79.60	21.070	85.65	21.344	85.65	21.344	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik yang terbangun di tingkat provinsi	persen	n.a	65.33		72.65		86.33		86.33		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Persen	n.a	52.36	11.000	68.88	11.143	75.25	12.288	75.25	12.288	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat	Persen	n.a	64.55	142.000	76.66	143.846	87.55	188.747	87.55	188.747	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Laik Fungsi (SLF)											
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Persen	n.a	78.22	16.000	80.63	16.208	85.55	16.419	5.55	16.419	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	persen	n.a	72.11	10.300	75.60	10.434	85.88	10.570	85.88	10.570	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Status dan Tingkat Kelengkapan dokumen perencanaan tata ruang wilayah	persen	n.a	100	17.000	100	17.221	100	19.445	100	19.445	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Provinsi Papua Selatan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	Persen	n.a	70.25	1.000	75.22	1.013	83.65	1.026	83.65	1.026	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	persen	n.a	0	0	65.65	500	72.35	500	72.35	500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan	Persen	100	100	5.000	100	5.065	100	5.131	100	5.131	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Pemerintahan Daerah											Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	persen	n.a	0	0	100	1.000	100	1.000	100	1.000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	persen	100	0	0	100	2.500	100	2.625	100	2.625	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	100	5.966	100	6.043	100	6.122	100	6.122	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan provinsi yang	persen		100	1.830	100	1.854	100	2.878	100	2.878	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	memperoleh peningkatan kapasitas											
	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kewenangan provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	persen	n.a		100		100			100		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penanganan rehabilitasi sosial (dalam Panti)	persen	n.a	100	3.773	100	3.822	100	3.872	100	3.872	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	persen		100		100		100		100		
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	persen		100		100		100		100		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	persen		100		100		100		100		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM yang mendapatkan bantuan sosial afirmatif OAP kewenangan provinsi	persen	n.a	50	200	75.20	1000	78.25	1100	78.25	1100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen		100		100		100		100		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan korban bencana alam yang mendapat bantuan logistik tanggap darurat	persen	n.a	100	1.200	100	1.216	100	1.231	100	1.231	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Cakupan korban bencana alam yang mendapat bantuan	persen	n.a	100		100		100		100		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



DAN SUMBER DAYA MINERAL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggara nya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	ana	100	100	100	101	100	103	100	103	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan penyelenggara an upaya pengelolaan aspek geologi	persen	na	100	893	100	904	100	916	100	916	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM MINERAL DAN BATU BARA	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua,	persen	na	100	250	100	253	100	257	100	257	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan												
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	persen	NA	100	280	100	284	100	287	100	287	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	283	100	286	100	290	100	290	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	
PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi	persen	na	75.20	405	79.35	411	85.25	416	85.25	416	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi	persen	na	100	563	100	570	100	577	100	577	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	na	100	2.935	100	2.973	100	3.012	100	3.012	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan pangan	Persen	na	100	1.350	100	1.371	100	1.393	100	1.393	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	PPH konsumsi pangan	Persen										
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Distrik Rawan Pangan yang Ditangani	Persentase Distrik Rawan Pangan yang Ditangani	Persen	na	1.700	100	1.722	100	1.744	100	1.744	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	Persen	na	100	200	100	203	100	205	100	205	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
	Cakupan pangan segar yang sudah disertifikasi	Produk		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.686	100	1.708	100	1.730	100	1.730	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	ada/tidak ada		ada	500	ada	507	ada	513	ada	513	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	ada/tidak ada		ada		ada		ada		ada		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	ada/tidak ada		ada		ada		ada		ada		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	persen	na	600		608		616		616		Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
	Indeks Kualitas Udara	persen	na	100		100		100		100		
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	persen	na	100		100		100		100		
	Laporan Inventarisasi GRK	ada/tidak ada	ada	ada		ada		ada		ada		
	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	ada/tidak ada	ada	ada		ada		ada		ada		
	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber	Persen	na	100		100		100		100		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	pencemaran dan perusakan lingkungan												
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persen	na	100	150	100	152	100	154	100	154	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	na	100	300	100	304	100	308	100	308	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	Persen	na	100	350	100	355	100	359	100	359	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	4.152	100	4.350	100	4.400	100	4.400	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	na	100	3.960	100	4.011	100	4.064	100	4.064	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	Rasio Cakupan Penduduk ber KTP	Rasio		43.20		45.65		46.65		50.58		
	Persentase kepemilikan KK	Persen		100		100		100		100		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran	Rasio		35.65		45.65		47.12		47.12		
	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio		50.22		55.65		68.77		68.77		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk terdaftar dalam data kependudukan	Persen	na	100	1000	100	1000	100	1000	100	1000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase pelayanan sipil dan terdata	Persen	na	100	650	100	700	100	850	100	850	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profil kependudukan	Persen	na	100	750	100	750	100	750	100	750	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kesuburan Total, Jumlah Rata-rata Anak yang dilahirkan per Wanita Usia Subur)	persen	na	100	1.383	100	1.401	100	1.419	100	1.419	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Laju pertumbuhan penduduk	persen	na	100		100		100		100		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	na	100	629	100	637	100	646	100	646	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persen	na	100		100		100		100		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	8.048	100	8.152	100	8.258	100	8.258	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	persen	na	0	0	2.000	100	2.026	100	2.052	100	2.052	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	7.021	100	7.112	100	7.205	100	7.205	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Badan Publik terbuka	Persen	na	65.20	2.487	8.75	3.520	75.80	3.552	75.80	3.552	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	na	65.25	5.499	75.56	5.570	89.25	5.643	89.25	5.643	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	na	100	-	100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase penyelenggaraan pelayanan persandian	persen	na	100	215	100	218	100	221	100	221	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	na	100	5.000	100	5.065	100	5.131	100	5.131	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian	Persen	na	100	1.000	100	1.013	100	1.026	100	1.026	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	na	100	4.083	100	4149	100	4.216	100	4.216	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan pengembangan iklim investasi penanaman modal	persen	na	100	260	100	263	100	266	100	266	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah regulasi kebijakan pada sektor penanaman modal	Dokumen	na	1		2		2			2	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan potensi dan peluang investasi daerah yang sudah dipromosikan	Sektor	na	20.12	192	35.56	195	48.55	197	48.55	197	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perijinan & non perijinan yang di keluarkan pertahun	Dokumen	na	100	946	100	959	100	971	100	971	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan nilai realisasi investasi	Persen	n.a	100	519	100	526	100	533	100	533	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah data dan informasi penanaman Modal	Persen	n.a		1000		1000		1000		1000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.010	100	1.023	100	1.036	100	1.036	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan sarana dan prasarana kepemudaan Provinsi yang terkelola dan dimanfaatkan	Persen		56.33	972	68.55	984	75.66	997	75.66	997	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Cakupan organisasi kepemudaan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		100	100	100	120	100	135	100	135	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan sarana dan prasarana olahraga Provinsi yang dimanfaatkan	Persen		100	2.186	100	2.214	100	2.243	100	2.243	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Cakupan organisasi keolahragaan yang memperoleh pengembangan kapasitas	Persen	na	0	0	100	200	100	200	100	200	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan kegiatan kepramukaan provinsi yang terlaksana	Persen	na	100	492	100	498	100	504	100	504	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Cakupan SDM Kepramukaan Provinsi yang memperoleh peningkatan kapasitas	Persen	na	0	0	100	100	200	100	200	100	

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Cakupan organisasi kepramukaan provinsi yang meningkatkan kapasitasnya	Persen	na	0	0	100	100	200	100	200	100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Obyek Pemajuan kebudayaan guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	persen		100	2.500	100	3.546	100	3.592	100	3.592	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan seni budaya OAP guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	persen	na	78.55	3.000	85.22	3.039	83.50	3.079	83.50	3.079	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	persen	na	100	3.440	100	3.485	100	3.530	100	3.530	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	persen	100	8.600	100	8.712	100	8.825	100	8.825	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Cakupan pengelolaan museum yang dikelola	persen	100	3.200	100	3.242	100	3.284	100	3.284	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	100	350	100	355	100	359	100	359	Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Cakupan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Persen	100	556	100	563	100	570	100	570	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	(satu) Daerah Provinsi											
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong	Persen	na	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Persen	na	100	970	100	983	100	995	100	995	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
URUSAN PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Presentase pemberdayaan dan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Persen	na	100	1.200	100	1.216	100	1.231	100	1.231	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Kontribusi PDRB ADHK subsektor perikanan terhadap perekonomian	Persen	na	100	100	100	100	100	100	100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik/Destinas i Wisata yang ditingkatkan	Persen	na	100	165	100	168	100	750	100	750	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Rata-rata lama menginap tamu asing	hari	Na	5		5		5		5		
	Rata-rata lama menginap tamu domestik	hari	na	3		3		3		3		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat penghunian kamar hotel berbintang	Persen	na	100	315	100	319	100	500	100	500	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Tingkat penghunian kamar hotel nonbintang dan	Persen	na	100		100		100		100		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	akomodasi lainnya												
	Jumlah event pariwisata tahunan	event		1		2		2		2			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Sumberdaya OAP yang terlibat dalam pengembangan pariwisata kegiatan Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Persen	na	100	439	100	445	100	451	100	451		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang memperoleh pembinaan	persen	na	100		100		100		100			
	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi	industri	na	1		2		2		2			

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	pariwisata di dalam negeri												
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan unit usaha ekonomi kreatif dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan / lestari yang di berdayakan.	Persen	na	100	580	100	588	100	595	100	595	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan penyelenggaraan perijinan dan pendaftaran perusahaan	persen	na	100	550	100	557	100	564	100	564	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan penyelenggaraan operasi pasar barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	na	100	1.900	100	1.925	100	1.950	100	1.950	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	na	0	0	100	500	100	750	100	750	
	Inflasi tahunan	Persen	na	0	0	100	500	100	750	100	750	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan fasilitasi pelaku ekspor yang dibina	Persen	na	100	300	100	304	100	308	100	308	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	na	100	1.100	100	1.114	100	1.129	100	1.129	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							-		-		-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan pelaku IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	Persen	n.a	100	3.100	100	3.140	100	3.181	100	3.181	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Pertumbuhan jumlah industri sedang dan besar	Persen		100		100		100		100		
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan penyelenggaraan perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persen	n.a	100	1.050	100	1.064	100	1.077	100	1.077	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemberian bantuan sarana kepada kelompok peternak/petani	Persen	n.a	72.50	4.050	84.12	4.103	87.20	4.156	87.20	4.156	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemberian bantuan prasarana kepada kelompok peternak/petani	Persen	n.a	100	1.300	100	1.870	100	2.334	100	2.334	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Cakupan penanganan kesehatan hewan di	Persen	n.a	100	480	100	486	100	493	100	493	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	wilayah provinsi Papua Selatan												
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan peternak/petani yang meningkatkan kapasitasnya	Persen	n.a	100	500	100	507	100	513	100	513	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luasan Pengelolaan Hutan Papua Selatan	Ha		100	12.060	100	17.282	100	17.506	100	17.506	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	
	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	ada/tidak ada		ada		ada		ada		ada			
	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Persen		100		100		100		100			
	Persentase luasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Persen		100		100		100		100			

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



BIRO ADMINISTRASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	15.000	100	15.195	100	15.393	100	15.393	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Prosentase Rumusan Rekomendasi dan Kebijakan penyelenggaraan administrasi kewilayahan dan pemerintahan yang dihasilkan	persen	na	100	5.700	100	5.774	100	5.849	100	5.849	Sekretariat Daerah
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian bantuan kepada masyarakat	persen	na	73.66	1.500	8.20	1.520	85	1.539	85	1.539	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan	persen	na	76.36	25.000	.22	25.325	95.20	27.654	95.20	27.654	Sekretariat Daerah

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Kerjasama daerah												
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	85.000	100	84.458	100	85.556	100	85.556	Sekretariat Daerah	
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.255	100	1.271	100	1.288	100	1.288	Sekretariat Daerah	
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	n.a	100	817	100	828	100	839	100	839	Sekretariat Daerah	

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	na	0	0	100	500	100	500	100	500	
BIRO HUKUM												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	na	100	1.396	100	1.415	100	1.433	100	1.433	Sekretariat Daerah
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk hukum yang difasilitasi	Persen	n.a	75.50	2.104	100	2.131	100	2.159	100	2.159	Sekretariat Daerah
	Persentase rancangan hasil evaluasi dan fasilitasi terhadap produk hukum kabupaten/kota yang disusun tepat waktu	persen	n.a		0-	100	200	100	200	100	200	

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	100	1.335	100	1.353	100	1.370	100	1.370	Sekretariat Daerah
BIRO PEREKONOMIAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	na	100	1.429	100	1.447	100	1.466	100	1.466	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Rumusan Kebijakan Analisis Makro Ekonomi, Sarana Perekonomian , Perindustrian dan Perdagangan	Persen	n.a	100	258	100	262	100	265	100	265	Sekretariat Daerah
	Presentase Rumusan kebijakan pembinaan	Persen	n.a	0	0	100	200	100	200	100	200	

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	BUMD dan investasi daerah											
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persen	n.a	100	383	100	388	100	393	100	393	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRP												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	100	12.665	100	12.830	100	12.996	100	12.996	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan
PENUNJANG URUSAN												
PERENCANAAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	100	8.907	100	9.022	100	9.140	100	9.140	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tercapainya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	n.a	75.25	8.989	82.63	9.106	95.20	9.224	95.20	9.224	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD	Persen	n.a	87.25	650	100	650	100	650	100	650	
	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	n.a	0	0	100	500	100	500	100	500	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	n.a	0	0	100	750	100	750	100	750	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tercapainya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan	Persen	n.a	100	13.729	100	13.908	100	14.088	100	14.088	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



	Pembangunan Daerah Bidang Sumbder Daya Alam											
	Persentase Tercapainya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Persen	n.a	100	500	100	1000	100	10000	100	1000	
	Persentase Tercapainya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persen	n.a	100	500	100	1000	100	10000	100	1000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan pelaksanaan penelitian dan inovasi pembangunan daerah	Persen	n.a	65.25	10.869	47.50	11.011	65.78	11.154	65.78	11.154	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan pelaksanaan penelitian dan inovasi pembangunan daerah	Persen	n.a	100	5.000	100	5.065	100	5.131	100	5.131	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
KEUANGAN					-							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	100	259.370	100	375.000	100	278.387	100	278.387	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	n.a	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	168.661	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	170.853	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	173.074	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	173.074	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	Penyampaian LKPD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	n.a	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu		Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu		Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu		Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Asset management	Ya/Tidak	n.a	100	1.200	100	1.216	100	1.231	100	1.231	Badan Pengelolaan Pendapatan,

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



												Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen	n.a	100	4.700	100	4.761	100	4.823	100	4.823	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
KEPEGAWAIAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	100	8.089	100	8.194	100	8.301	100s	8.301	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persen	n.a	100	2.411	100	2.442	100	2.474	100	2.474	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Cakupan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur	Persen	n.a	10	3.000	10	3.039	10	3.479	10	3.479	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM	Persen	n.a	10	3.000	10	3.039	10	3.079	10	3.079	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
INSPEKTORAT DAERAH					-							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	100	8.596	100	8.708	100	8.821	100	8.821	Insepektorat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	D	D	3.486	D	3.532	D	3.578	D	3.578	Insepektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen		100	2.700	100	2.735	100	2.771	100	2.771	Insepektorat Daerah
	Persentase capaian kepatuhan pelaporan LHKPN	Persen		85.20		85.50		87.60		87.60		

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



UNSUR KEWILAYAHAN												
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	100	5.510	100	5.582	100	5.654	100	5.654	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persen	n.a	100	6000	100	2607	100	345	100	345	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang dibina dan diawasi	persen	N.a	100	3500	100	1250	100	1.162	100	1.162	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan pembinaan dan	Persen	n.a	100	5700	100	1450	100	788	100	788	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RPD
Provinsi Papua Selatan
2024-2026



KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama												
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase rekomendasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) yang ditindaklanjuti oleh pemerintah	Persen	n.a	100	15000	100	2550	100	103	100	103	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
OTSUS MRP													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N.a	100	15.243	100	20.897	100	21.470	100	21.470	Sekretariat MRP	
PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA	Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan MRP, penjangkaran aspirasi serta pelaksanaan fungsi MRP	persen	n.a	100	15.000	100	15.195	100	15.398	100	15.398	Sekretariat MRP	

RPD

Provinsi Papua Selatan
2024-2026



BAB VIII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Bab ini memuat mengemukakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan beserta Target Tahun 2024-2026

Penetapan sasaran kinerja daerah Provinsi Papua Selatan, disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024--2026 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan kurun waktu Tahun 2024-2026 kedalam kinerja tahunan.

Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja pembangunan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan suatu daerah, maka dibutuhkan daya ungkit atau indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut, dan juga sebagai sarana publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja			Kondisi akhir RPD 2026
		2024	2025	2026	
01	02	03	04	05	06
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	62.75	63.44	64.14	64.13
Tingkat Kemiskinan	Persen	18,79	17,5	17,25	17,25
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	45,5	50,25	54,15	54,15
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	78.14	78.53	78.92	78.92
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62.65	63.16	63.38	63.38
Pertumbuhan Ekonomi	Indeks	4.44	4.67	4.90	4.90
Indeks Gini	Indeks	0.387	0.379	0.372	0,372
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,50-1,65	2,25-1,63	2,20-1,60	2,20-1,60
Indeks Kemahalan Harga	Indeks	142.72	141.29	139.88	139.88
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	Persen	48.99	49.23	49.48	49.48
Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi	Persen	58.42	62.60	67.09	67.09
Cakupan Rumah Tangga yang mendapatkan akses air layak	Persen	75.11	77.37	79.69	79.69
Persentase angkutan umum yang berkualitas baik	Persen	80.25	83,55	85.66	85.66
Persentase rumah tangga yang dapat mengakses listrik (PLN dan non-PLN)*	Persen	79.59	81.29	82.91	82.91



Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	2.75	2,98	3	3
Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	BB	BB	A	A

Adapun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 8.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja			Kondisi Akhir RPD
			2024	2025	2026	
01	02	02	04	05	06	07
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1.65	4,44	4,67	4,9	4,9
Pendapatan (PDRB ADHK) per Kapita	Rupiah	52.400.000	55.020.000	57.771.000	60.659.550	63.692.528
Indeks Gini Rasio	indek	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35
Tingkat Kemiskinan	persen	17,27	17,1	16,93	16,93	16,93
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	62,75972855	62,75	63,44	64,13	64,13
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,737259997	7,93	8,13	8,33	8,33
Harapan Lama sekolah	Tahun	11,33	11,78	11,95	12,12	12,12
Angka Harapan Hidup	Tahun	62.82	63,76	64,08	64,40	64,40



Prevalensi balita stunting	Persen	34.40	25	20	15	15
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	76.15	78,14	78,53	78,92	78,92
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	62,89	62,65	63,16	63,68	63,68
Peningkatan nilai PAD	persen	n.a	5	5	5	5
Opini BPK terhadap laporan Keuangan daerah	opini	n.a	WTP	WTP	WTP	WTP
Laju pertumbuhan sektor pariwisata dalam perekonomian (PDRB ADHK)	persen	3.30	5.07	5.08	5.09	5.09
Laju pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	persen	1.22	4.72	4.73	4.75	4.75
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam perekonomian (PDRB ADHK)	persen	-0.94	1,11	1,12	1,12	1,12
Laju pertumbuhan subsektor perikanan terhadap perekonomian (PDRB ADHK)	persen	10	10	10	10	10
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Persen	1158.11	142,72	141,29	139,88	139,88
Nilai investasi (PMA / PMDN)	Rp. Triliun	n/a	14.564,05	15.247,22	16.236,35	16.236,35
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Persen	34,04	37,55	42,69	50	50



Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk (<i>crime rate</i>)	per 100.000 Penduduk	719	526	538	346	346
Tingkat Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>)	Persen	n/a	75,88	64,46	51,1385	51,1385
ASPEK PELAYANAN UMUM						
PENDIDIKAN						
APM SMA/SMK	Persen	39,43	64,21	68,89	75,52	75,52
Angka Partisipasi Sekolah 16 - 18 Tahun (SDGs)	Persen	59,76	63,24	77,85	88,26	88,26
Angka kelulusan SMA	persen	100	100	100	100	100
Persentase SMA/SMK dengan Akreditasi B	persen	n/a	78,55	89,68	100	100
Persentase fasilitas penyelenggaraan SMA/SMK berbasis asrama	persen	n/a	75,25	83,55	100	100
Rasio guru terhadap murid sekolah SMA/SMK	Rasio per 10.000 murid	n/a	521	620	750	750
Rasio guru terhadap murid sekolah SLB	Rasio per 10.000 murid	n/a	825	988	1.200	1.200
Persentase Guru SMA/SMK yang tersertifikasi	Persen	n/a	86,25	96,33	100	100
Persentase Guru SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	n/a	75,65	89,55	100	100
Persentase pendidik dan Tenaga Kependidikan OAP bagi satuan pendidikan untuk	Persen	n/a	45,22	68,22	70	70



Sekolah Menengah						
Persentase penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	n/a	68,65	86,55	100	100
Jumlah penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang meningkat kompetensinya	orang	n/a	2	3	4	4
KESEHATAN						
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (Rujukan)	Rasio TT : 1000 Penduduk	n/a	1.2 : 1000	1.3 : 1000	2.3 : 1000	2.3 : 1000
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	%	n/a	42,22	35,45	30	30
Angka Kematian Bayi (0-11 Bulan)	%	1,62	1,52	1,50	1,48	1,48
Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	%	n/a	65,22	75,68	85	85
Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan	%	n/a	55,68	78,66	80	80



Kesehatan Usia Reproduksi						
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	n/a	65,22	80,25	85	85
Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	n/a	11	12	13	13
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	n/a	85,22	93,22	95	95
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	n/a	1	1	1	1
Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	n/a	1	1	1	1
Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	n/a	85,22	95,87	100	100
Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	persen	n/a	100	100	100	100
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						



Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	persen	n/a	36,25	38,55	40	40
Persentase jembatan provinsi dengan kualitas baik	persen	n/a	45,65	68,22	75	75
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	n/a	75,24	88,68	96	96
Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	n/a	65,33	74,89	83,54	83,54
Persentase penduduk berakses air minum	persen	n/a	68,56	78,98	82,43	82,43
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	n/a	27,55	32,54	36,76	36,76
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	n/a	82,55`	87,52	98,22	98,22
Rasio panjang saluran irigasi dalam kondisi baik kewenangan provinsi	Persen	n/a	25,65	28,55	30,07	30,07
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Persentase pemukiman yang tertata	Persen	n/a	17,25	19,54	21,26	21,26
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	n/a	86,55	95,66	100	100



Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	persen	n/a	75,22	87,26	100	100
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	persen	100	100	100	100	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	n/a	25,55	1,25	0	0
Persentase Penegakan PERDA	persen	n/a	75,25	89,65	100	100
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100
SOSIAL						
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	n/a	26,55	27,36	28,75	28,75
Persentase PMKS yang tertangani	Persen	n/a	78,22	89,54	100	100
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100
TENAGA KERJA						



Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	n/a	75,22	89,36	100	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen	n/a	35,68	45,68	50	50
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Persen	n/a	1,89	2,28	2,37	2,37
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	n/a	53,66	78,55	81,56	81,56
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	n/a	64,22	75,11	78,68	78,68
TRANSMIGRASI						
Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Persen	n/a	89,21	92,15	100	100
Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi	ada/tidak ada	n/a	ada	ada	ada	ada
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
Rasio KDRT	Per 100 ribu perempuan	n/a	1,25	1,15	0	0
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas	persen	n/a	84,56	92,14	100	100



rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.						
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	n/a	85,12	89,63	100	100
Rasio kekerasan terhadap anak	per 10 ribu anak	n/a	1,25	1,12	0	0
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	persen	n/a	2,15	68,33	74,22	74,22
PANGAN						
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	n/a	84,15	90,56	100	100
Ketersediaan pangan utama	Persen	n/a	82,66	94,21	100	100
PERTANAHAN						
Penyelesaian izin lokasi	Persen	n/a	85,66	91,22	100	100
Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	n/a	75,56	87,98	100	100
LINGKUNGAN HIDUP						
Peningkatan Indeks Kualitas Air	persen	n/a	51,35	60,87	67,5	67,5



Peningkatan Indeks Kualitas Udara	persen	n/a	78,56	85,21	97	97
Laporan Inventarisasi GRK	ada/tidak ada	n/a	ada	ada	ada	ada
Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	ada/tidak ada	n/a	ada	ada	ada	ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	ada/tidak ada	n/a	75,22	82,54	87,22	87,22
Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	n/a	68,55	75,22	80	80
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	n/a	64,22	75,88	79,22	79,22
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII						
Rasio Cakupan Penduduk ber KTP	Rasio	n/a	76,54	89,27	100	100
Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	n/a	71,66	86,88	100	100
Cakupan penerbitan akta kelahiran	Rasio	n/a	79,55	86,54	80	80



Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	n/a	65,21	45,26	80	80
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	n/a	8722	94,25	100	100
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	n/a	125	134	157	157
Persentase kader kampung yang dibina dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah kampung	Persen	n/a	69,33	75,65	80	80
Jumlah kelompok usaha OAP yang dibina	kelompok usaha	n/a	84,22	89,67	100	100
Persentase kampung maju	Persen	n/a	1,2	1,9	2,3	2,3
Persentase kampung berkembang	Persen	n/a	15,66	17,25	19,29	19,29
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	n/a	81,22	94,11	100	100
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	n/a	76,41	89,64	100	100
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
Total Fertility Rate (TFR)	persen	n/a	1,8	2,0	2,2	2,2
Laju pertumbuhan penduduk	persen	n/a	2,34	2,85	3	3



Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	n/a	42,41	50,15	60	60
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	n/a	75,12	85,36	100	100
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	n/a	79,64	87,69	100	100
PERHUBUNGAN						
Rasio konektivitas Provinsi	persen	n/a	75,99	84,11	87,56	87,56
Pemasangan Rambu-rambu	persen	n/a	76,22	79,22	80,12	80,12
Jumlah arus penumpang angkutan umum	persen	n/a	68,99	78,45	87,66	87,66
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara / terminal per tahun	Ton	n/a	75,41	79,68	84,22	84,22
Tingkat ketersediaan prasarana dan keselamatan perhubungan Laut	persen	n/a	78,54	89,44	95,47	95,47
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Cakupan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	n/a	56,36	68,54	78,66	78,66



Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	n/a	78,55	79,54	85,64	85,64
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
Persentase koperasi aktif	Persen	n/a	6,25	7,58	8,51	8,51
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	n/a	64,55	76,88	81,22	81,22
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	n/a	74,56	76,54	78,99	78,99
Persentase pertumbuhan KSP/USP	Persen	n/a	45,21	50,57	65	65
Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	n/a	38,98	48,66	50	50
Persentase UMKM OAP yang berkembang	Persen	n/a	25,89	31,44	33,9	33,9
PENANAMAN MODAL						
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Persen	n/a	35,25	48,22	50,64	50,64
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Persen	n/a	64,22	59,88	67,45	67,45
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA						
Cakupan pembinaan atlet berprestasi	Persen	n/a	76,69	87,66	100	100
Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	n/a	74,89	84,21	85,33	85,33



Cakupan pembinaan olahraga	Persen	n/a	79,66	81,22	95,22	95,22
STATISTIK						
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Persen	n/a	79,22	78,99	87,99	87,99
PERSANDIAN						
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	n/a	54,89	59,65	65,22	65,22
KEBUDAYAAN						
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	n/a	74,69	86,11	91,25	91,25
Cakupan pengelolaan museum yang dikelola	Persen	n/a	61,22	78,66	89,21	89,21
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Persen	n/a	77,54	81,22	86,88	86,88
Cakupan seni budaya OAP guna Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persen	n/a	68,22	74,68	83,87	83,87
PERPUSTAKAAN						



Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	indeks	n/a	35,12	47,24	50,1	50,1
KEARSIPAN						
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	n/a	45,88	56,33	65	65
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku		n/a	65,68	75,66	87	87
KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	Persen	n/a	79,21	85,45	90	90
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Ha	n/a	2,120,556,22	2,724,246,31	3.023.034,33	3.023.034,33
Produksi perikanan (budidaya/tangkap)	Ton	n/a	47.000	48.000	49.000	49.000
Nilai tukar nelayan (budidaya/tangkap)	Indeks	n/a	87,21	95,32	102,49	102,49
Persentase produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan	Persen	n/a	35,14	37,89	40	40
PARIWISATA						
Kunjungan wisata	Persen	n/a	36,12	37,21	38,69	38,69
Cakupan Daya Tarik/Destinas Wisata yang ditingkatkan	Persen	n/a	62,22	76,65	82,07	82,07



Lama kunjungan Wisata	hari	n/a	1,45	1,57	1,66	1,66
PERTANIAN						
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	n/a	17,89	18,21	19,35	19,25
Persentase irigasi pertanian terbangun	persen	n/a	65,88	75,99	80	80
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	n/a	75,66	87,65	95,88	95,88
Cakupan bina kelompok petani	Persen	n/a	68,44	78,21	84,36	84,36
PERDAGANGAN						
Cakupan fasilitasi pelaku ekspor yang dibina	Persen	n/a	56,21	61,24	65	65
Ekspor Bersih Perdagangan	juta US \$	n/a	1855,21	2059,44	2293,58	2293,58
Cakupan pembinaan pemasaran produk UMKM	Persen	n/a	62,65	73,65	85	85
Presentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	n/a	74,21	84,25	86,87	86,87
PERINDUSTRIAN						
Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	n/a	53,65	62,55	68,55	68,55
KEHUTANAN						



Cakupan masyarakat OAP dan penyuluh serta polhut yang mendapatkan pemberdayaan kehutanan	Jumlah orang	n/a	150	257	300	300
Luasan Pengelolaan Hutan Papua Selatan	Ha	n/a	1.325.265	1.427.214	1529818	1529818
Cakupan Kawasan Konservasi Daerah yang terkelola	Persen	n/a	78,21	89,44	100	100
Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Ha	n/a	75,99	85	87,25	87,25
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	n/a	68,22	70,12	75,23	75,23
ENERGI DAN MINERAL						
Rasio ketersediaan daya listrik	Unit	n/a	300	425	500	500
Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	n/a	72,45	78,11	83	83
Cakupan pembangunan energi terbarukan	Unit	n/a	257	472	500	500
Cakupan pemetaan potensi sumberdaya mineral	Persen	n/a	82,11	87,21	100	100
PENUNJANG URUSAN						
SEKRETARIAT DAERAH/SETWAN						
Persentase penyelenggaraan afirmasi OTSUS bagi OAP	persen	n/a	78,55	87,68	100	100



Persentase produk hukum/ OTSUS yang difasilitasi	Persen	n/a	85,11	95,11	100	100
Persentase Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi (PROSPEK OTSUS)	persen	n/a	74,88	85,14	100	100
Cakupan Tertib Administrasi dan Kinerja Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/OT SUS	Persen	n/a	34,87	46,22	55	55
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kategori	n/a	A	A	A	A
Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	n/a	A	A	A	A
Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	persen	n/a	78,14	87,22	95,52	95,52
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	n/a	95,25	96,21	100	100
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	Persen	n/a	86,12	91,22	100	100



pembangunan daerah						
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH						
Asset management	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Penyampaian LKPD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Presentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen	n/a	4	5	6	6
KEPEGAWAIAN DAERAH						
Cakupan penanganan pelayanan kepegawaian daerah	Persen	100	100	100	100	100
Cakupan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM	persen	n/a	75,88	87,21	100	100
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	n/a	78,35	89,24	100	100
INSPEKTORAT						
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	n/a	3	3	3	3
Persentase tindak lanjut temuan	Persen	n/a	87,21	92,55	100	100
Persentase pelanggaran pegawai (Persentase capaian)	Persen	n/a	85,25	92,54	100	100



kepatuhan pelaporan LHKPN)						
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		n/a	75,68	85,14	87,58	87,58
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		n/a	65,88	76,12	78,22	78,22
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
Persentase ormas yang dibina dan diawasi	persen	n/a	87,21	89,21	100	100
Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persen	n/a	86,88	91,65	100	100
Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	n/a	78,68	90,65	100	100
Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persen	n/a	78,98	89,99	100	100

BAB IX

Penutup



Bab ini memuat Kaidah Pelaksanaan RPD Papua Selatan Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua Induk, RPJMN, Draft Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dokumen perencanaan lain yang diperintahkan peraturan dan/atau relevan dengan perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan Perda tentang RPD Provinsi Papua Selatan tahun 2024-2026 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten.

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Papua Selatan dalam menyusun dokumen RPD maupun untuk perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam melaksanakan program-program Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan.



2. Pelaksana Tugas Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPD Provinsi Papua Selatan 2024- 2026, guna keberlanjutan Pembangunan Daerah, khususnya wilayah Provinsi Papua Selatan dalam hal kontribusi terhadap capaian Jangka Panjang Daerah sampai dengan Tahun 2025.
3. Gubernur Papua Selatan berkewajiban menyebarluaskan RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 kepada masyarakat.
4. Bappeda melaksanakan Pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026.
5. Penyusunan RKPD Provinsi Papua Selatan pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2024 sampai dengan 2026
6. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJD Tahun 2024-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Penyusunan RPD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Papua Selatan berpedoman pada RPD Provinsi Papua Selatan tahun 2024-2026 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di seluruh Papua Selatan.

9.2 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Hal ini disebabkan RPJMD Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk berakhir pada tahun 2023. Sehingga penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada program RPD Provinsi Papua Selatan 2024-2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dimana RKPD menjadi dasar penyusunan RAPBD Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan Pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Papua Selatan.